

ASEAN

Pusat Pertumbuhan Inklusif
dan Berkelanjutan



ASEAN

Pusat Pertumbuhan Inklusif dan Berkelanjutan

EDITOR

Yoga Affandi
Clarita Ligaya Iskandar





Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan penjara masing-masing paling singkat satu (1) bulan dan /atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

ASEAN

Pusat Pertumbuhan Inklusif dan Berkelanjutan

Dicky Kartikoyono, Solikin M. Juhro, Endang Trianti,
Yunita Resmi Sari, Donny Hutabarat, Rudy B. Hutabarat,
Yoga Affandi, Rahmatullah Sjamsudin, dkk

BANK INDONESIA INSTITUTE

ASEAN
Pusat Pertumbuhan Inklusif dan Berkelanjutan

Cetakan Pertama, Januari 2024

Editor

Yoga Affandi
Clarita Ligaya Iskandar

Penulis

Dicky Kartikoyono	Solikin M. Juhro
Endang Trianti	Yunita Resmi Sari
Donny Hutabarat	Rudy B. Hutabarat
Yoga Affandi	Rahmatullah Sjamsudin
Retno Ponco Windarti	Firman Mochtar
Dwi Safarina	Clarita Ligaya Iskandar
Iss Savitri Ha id	Elsya MS Chani
Cicilia Anggadewi Harun	Budi Trisnanto
Wahyu Hidayat S.	Januar Ha idz
Mirza Yuniar Isnaeni Mara Elyana	Linda Yunita Fatimah
K. Widyasari	Hesti Werdaningtyas
Meily Ika Permata	Mestika Widantri
Prayudhi Azwar	Heru Rahadyan
Linda Nurliana P.	M. Sukarno Andy P.
Atet Rizki Wijoseno	Arisona Lestari B.
Lisa Rienellda	Riyan Galuh Pratama
Anggita Cinditya Mutiara Kusuma	Hendro Prasetyo Nugroho
Oktoviana Banda Saputri	Harry Kurniawan
Arief Budi Laksono	Wulan Jayendra Iswari
Hutama Jaya Wardhana	Ni Luh Made Ayu Wahyuni
Ganis Arimurti	Ibrahim Adrian Nugroho
Siti Humaira	Ahmad Choirun Najib
Chairina Vania Wardani	Timothy Thamrin Andrew H. Sihombing
Nada Dinda Rynaldi	Ghina Khalida Zulhidia
Zaki Abdullah	Dhevina Dewantari
Charvin Lim	

Desain dan Visual

Kompas Institute

Penerbit

Bank Indonesia Institute

ISBN

978-623-5662-59-6
978-623-5662-60-2 (PDF)

Kata Pengantar

Perry Warjiyo
Gubernur Bank Indonesia



Dinamika perekonomian global berubah cepat dengan ketidakpastian dan kompleksitas masalah yang semakin tinggi. Pemulihan ekonomi global pascapandemi Covid-19 yang masih berlangsung di tengah peningkatan guncangan baru akibat fragmentasi geopolitik-ekonomi menyebabkan proses pemulihan ekonomi global melambat.

Melalui Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 dengan tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”, berbagai agenda transformasi penting dilakukan dalam rangka memperkuat ekonomi dan keuangan kawasan sehingga lebih tahan menghadapi guncangan global sekaligus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Forum ASEAN semakin strategis pascapandemi Covid-19, mengingat negara-negara di kawasan dihadapkan pada kondisi luar biasa yang menuntut respons kebijakan yang tepat dan cepat dalam meredam dampak pandemi serta mendukung pemulihan ekonomi.

Oleh karena itu, kami menyambut baik upaya Bank Indonesia Institute menerbitkan buku Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023

yang bertajuk *ASEAN Pusat Pertumbuhan Inklusif dan Berkelanjutan*. Penerbitan buku ini merupakan realisasi dari rekaman pengetahuan institusi mengenai peranan keketuaan Indonesia dalam forum internasional ASEAN. Melalui buku ini, Indonesia memiliki dokumen penting terkait pemikiran dan pengetahuan dari pembahasan berbagai agenda prioritas ekonomi (*priority economic deliverables/PEDs*) yang tertuang dalam rangkaian pertemuan sepanjang Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023.

Di samping itu, buku ini diharapkan menjadi buah karya nyata dan kontribusi Bank Indonesia dalam pengembangan keilmuan, sekaligus membangun ekosistem riset dan pembelajaran di tanah air. Secara khusus, buku ini diharapkan menjadi referensi utama terkait agenda prioritas ekonomi sekaligus sarana untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada mitra strategis Bank Indonesia dan khalayak luas mengenai Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melindungi dan meringankan langkah kita dalam berkarya, bersinergi, dan berinovasi untuk kemajuan Indonesia.

Kata Pengantar

Destry Damayanti
Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia

”ASEAN Matters: Epicentrum of Growth” ditetapkan sebagai tema Keketuaan ASEAN 2023. Indonesia memegang peran sentral dalam Keketuaan ASEAN pada tahun 2023 yang berjalan dengan baik di tengah kompleksitas tantangan internasional, baik dari sisi geopolitik maupun ekonomi. Tantangan dan permasalahan yang dihadapi perekonomian global memerlukan sebuah langkah sinergi bersama untuk mewujudkan pemulihan ekonomi dunia. Penguatan sinergi antarnegara anggota ASEAN kemudian dituangkan dalam tiga *strategic thrust*, yaitu *recovery-rebuilding*, *digital economy*, dan *sustainability*.

Penyamaan persepsi negara-negara ASEAN untuk mewujudkan tema Keketuaan ASEAN 2023 telah memunculkan begitu banyak pemikiran yang berharga. Pemikiran dan pengetahuan yang bersifat *tacit* dan tersebar dalam berbagai pertemuan tersebut merupakan harta berharga yang perlu dipelihara untuk dimanfaatkan dengan baik. Untuk itu perlu disusun sebuah inventarisasi dan perekaman pengetahuan (*knowledge capture*) yang sistematis dalam sebuah buku memori kelembagaan.



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga buku *ASEAN Pusat Pertumbuhan Inklusif dan Berkelanjutan* dapat diselesaikan dengan baik sebagai sebuah memori kelembagaan. Buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca untuk lebih memahami analisis lingkungan strategis yang mendasari perumusan tema dan *priority economic deliverables* dalam Ketetapan ASEAN melalui materi yang disampaikan pada setiap bagian dalam buku ini. Materi tersebut antara lain pengenalan ASEAN dan Ketetapan Indonesia, implementasi bauran kebijakan dalam mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN, kerja sama ekonomi meliputi transaksi mata uang lokal (*local currency transaction*) serta konektivitas pembayaran lintas negara (*regional payment connectivity*) di ASEAN, pengembangan ekonomi digital dan inisiatif inklusi dan literasi keuangan, hingga pengembangan keuangan berkelanjutan.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat membuka ruang diskusi dan menjadi media pembelajaran berharga dalam memahami berbagai dinamika isu-isu utama dan rekomendasi aksi yang dilakukan dalam menjawab tantangan ASEAN ke depan. Bank Indonesia mengharapkan agar buku ini dapat memperkuat motivasi dalam mengoptimalkan kekuatan ASEAN sebagai *Epicentrum of Growth*.



Daftar Isi

Kata Pengantar Gubernur Bank Indonesia	vii
Kata Pengantar Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Gambar	xvii
Leader's Insight	xxi
BAB 1 Mengenal ASEAN dan Keketuaan Indonesia 2023	1
• Sekilas tentang ASEAN	3
• Masyarakat ASEAN	4
• Sekretariat ASEAN	14
Boks: Sekilas mengenai ASEAN+3	15
• Kolaborasi ASEAN dalam Bidang Keuangan-Integrasi Keuangan	16
• Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023: "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth"	24
• Sekilas tentang Pilar Ekonomi	27
• Agenda Prioritas Ekonomi di Jalur Integrasi Keuangan	29
a. <i>Recovery-Rebuilding</i> : Memajukan Pemulihan, Memastikan Stabilitas Ekonomi dan Keuangan, serta Resiliensi	30
b. <i>Digital Economy</i> : Memajukan Konektivitas Pembayaran; Mempromosikan Literasi Keuangan Digital dan Inklusi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif; dan Memperkuat Ketangguhan dalam Sektor Keuangan	32
c. <i>Sustainability</i> : Memajukan Pembiayaan Transisi untuk Mendukung Keuangan Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau	32
• Agenda Prioritas Ekonomi di Bawah Bank Sentral	33
a. <i>Recovery-Rebuilding</i> : Memajukan Pemulihan, Memastikan Stabilitas Ekonomi dan Keuangan, serta Resiliensi	33

b. <i>Digital Economy</i> : "Memajukan Konektivitas Pembayaran, Mempromosikan Literasi Keuangan Digital dan Inklusi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, dan Memperkuat Ketangguhan dalam Sektor Keuangan"	36
c. <i>Sustainability</i> : "Memajukan Pembiayaan Transisi untuk Mendukung Keuangan Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau"	39
• Hasil Spesifik Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 di Jalur Integrasi Keuangan	41
Boks: Peran ASEAN dalam Perekonomian Global	43
BAB 2 Implementasi Bauran Kebijakan untuk Mendorong Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN	55
• Konsep Bauran Kebijakan untuk Pemulihan dan Ketahanan Ekonomi	59
• Kerangka Kerja Bauran Kebijakan Lembaga Internasional	64
i. Integrated Policy Framework — IMF	64
ii. Macro-Financial Stability Framework — BIS	69
• Keketuaan Indonesia untuk Pemulihan ASEAN	73
• Implementasi Bauran Kebijakan di Negara Berkembang	74
• Dinamika Pembahasan ASEAN untuk Pengarusutamaan Bauran Kebijakan	80
• Capaian dan Langkah ke Depan Bauran Kebijakan	85
Boks: Inovasi dengan Bauran Kebijakan	87
BAB 3 Mendorong Penggunaan Mata Uang Lokal untuk Meningkatkan Stabilitas Makroekonomi dan Keuangan	93
• Tren Diversifikasi Mata Uang di Sejumlah Negara	95
• Potensi LCS Indonesia dengan Negara-negara ASEAN	97
• LCT sebagai Upaya Diversifikasi Mata Uang Transaksi Bilateral Indonesia	103
• Kerja Sama LCT di Kawasan	106
• Perkembangan Pembahasan LCT di ASEAN	109

• Kolaborasi Bank Indonesia dengan Berbagai Pihak Terkait dengan Penggunaan Mata Uang Lokal	114
• Skema LCS Indonesia dengan ASEAN dan Negara Lain (Kerja Sama Bilateral)	115
• Perkembangan LCS Indonesia dengan ASEAN dan Negara Lain	121
• Transformasi LCS Menjadi LCT	123
BAB 4 Meningkatkan Konektivitas Pembayaran Lintas Negara di ASEAN	125
• Isu Strategis dan Tantangan	128
• Inisiatif Memajukan Konektivitas Pembayaran di Kawasan	131
i. QR Code	134
ii. Fast Payment	137
• Capaian dan Langkah ke Depan Implementasi Pembayaran Ritel Lintas Negara	140
Boks: Karakteristik Pembayaran Lintas Negara di ASEAN	143
BAB 5 Menavigasi Ekonomi Digital untuk Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Sektor Keuangan	147
• Lingkungan Strategis dan Tantangan Ekonomi Digital	149
i. Perkembangan Ekonomi Digital dan Sistem Keuangan	150
ii. Sistem Pembayaran di Era Digital: Mata Uang Digital Bank Sentral	157
iii. Isu Keamanan Siber dan Diskusi Kebijakan Bank Sentral	162
• Inisiatif ASEAN dalam Menavigasi Ekonomi Digital	166
i. Inisiatif ASEAN Terkait Sistem Keuangan	166
ii. Inisiatif ASEAN Terkait Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC)	172
Proyek Garuda: Menjaga Kedaulatan Rupiah di Era Digital	172
Singapura: Project Ubin	174
Kamboja: Project Bakong	176
Thailand: Project Inthanon	177
Filipina: Project Agila-CBDCPH	179

Vietnam: Vietnam CBDC	180
Malaysia: Malaysia CBDC	180
Laos: Dlak (Digital Lao Kip)	181
iii. Inisiatif ASEAN Terkait Keamanan Siber	182
Boks: Pentingnya Membangun Kesadaran Siber	184
• Penguatan Kolaborasi ASEAN dalam Menavigasi Ekonomi Digital	186
i. Kolaborasi ASEAN Terkait Sistem Keuangan	186
ii. Kolaborasi ASEAN Terkait Digitalisasi Sistem Pembayaran	199
iii. Kolaborasi ASEAN Terkait Keamanan Siber	202
• Capaian dan Langkah ke Depan Strategi Navigasi Ekonomi Digital	203
i. Usulan Penguatan ABIF	203
ii. Pandangan Industri mengenai Konsep Penguatan ABIF	207
iii. Tindak Lanjut Reviu ABIF Guidelines	208
Boks: Perkembangan Aset Kripto serta Regulasi dan Supervisi Terkait Aset Kripto	210
BAB 6 Inklusi dan Literasi Keuangan Digital untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Ketangguhan Sektor Keuangan ASEAN	225
• Akselerasi Inklusi Keuangan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi ASEAN	227
• Inisiatif ASEAN dalam Memperkuat Inklusi dan Literasi Keuangan Digital	235
• Pedoman Implementasi untuk Memperkuat Literasi Keuangan Digital di ASEAN	238
• Kolaborasi ASEAN dalam Penguatan Literasi Keuangan Digital	240
i. Pedoman Implementasi untuk Memperkuat Literasi Keuangan Digital di ASEAN	240
ii. Festival Inklusi Keuangan Digital	244
• Capaian dalam Inklusi dan Literasi Keuangan Digital di ASEAN	246
• Langkah ke Depan	247
Boks: Kolaborasi BI dengan Organisasi Internasional untuk Mendorong Inklusi Keuangan Digital	248

BAB 7 Keuangan Berkelanjutan dalam Mewujudkan Pembangunan ASEAN	253
• Tantangan: Dampak Perubahan Iklim di Kawasan ASEAN	255
• Potensi Pembiayaan Berkelanjutan dalam Rangka Pembangunan di ASEAN	260
• Inisiatif ASEAN dalam Mendorong Keuangan Berkelanjutan	265
• Pentingnya Sektor Keuangan dalam Mencapai Target Keberlanjutan	270
• Inisiatif Taksonomi Regional ASEAN dan Taksonomi Nasional di ASEAN	272
• Inisiatif Implementasi <i>Green Bonds</i> dan <i>Sustainable Bonds</i> di Negara-negara ASEAN	279
• Taksonomi ASEAN: Penguatan Fondasi Pengembangan Keuangan Berkelanjutan	290
• Peta Jalan Pasar Modal Berkelanjutan ASEAN: Mendukung Ekosistem <i>Green Bonds</i> dan <i>Sustainable Bonds</i>	293
• Peran Bank Sentral dalam Mendorong Keuangan Berkelanjutan	297
• Mengintegrasikan Pertimbangan Risiko Perubahan Iklim dalam Kerangka Pengawasan Sektor Keuangan	298
• Menerapkan <i>Stress Test</i> dan <i>Scenario Analysis</i> untuk Menilai Risiko Perubahan Iklim	300
• Upaya Mendorong Pengungkapan dalam Keuangan Berkelanjutan	301
• Pendekatan Kebijakan untuk Mendukung Keuangan Berkelanjutan	302
• Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi	304
• Peran ASEAN dalam Mengembangkan Taksonomi ASEAN Versi 2	306
• Peran ASEAN dalam Mempromosikan <i>Green Bonds</i> dan <i>Sustainable Bonds</i>	309
• Langkah ke Depan: <i>ASEAN Green Maps</i>	312
Boks: Pengelolaan Cadangan Devisa untuk Mendukung Keberlanjutan	314
Epilog	325
Daftar Pustaka	333

Daftar Gambar

BAB 1

Gambar 1.1	Struktur Pelaporan Kolaborasi pada Jalur Integrasi Keuangan	17
Gambar 1.2	AEC Priority Economic Deliverables 2023-Indonesia	28
Gambar 1.3	Data PDB dan Populasi ASEAN	44
Gambar 1.4	Data FDI ASEAN	48
Gambar 1.5	Data Perdagangan ASEAN	49
Gambar 1.6	Hasil Survei Pandangan Masyarakat Asia Tenggara terhadap ASEAN	51

BAB 2

Gambar 2.1	Integrasi Kerangka Kebijakan Moneter dan Makroprudensial	91
------------	--	-----------

BAB 3

Gambar 3.1	Volume Ekspor Indonesia Berdasarkan Negara Tujuan	98
Gambar 3.2	Volume Impor Indonesia Berdasarkan Negara Asal	99
Gambar 3.3	Persentase Valuta Setelmen Ekspor dan Impor Indonesia	100
Gambar 3.4	Arus Masuk Investasi Langsung Berdasarkan Asal Negara	101
Gambar 3.5	Arus Keluar Investasi Langsung Indonesia ke Negara-negara ASEAN	102
Gambar 3.6	Transaksi Bilateral	107
Gambar 3.7	Perkembangan Pelaku Transaksi LCS	118
Gambar 3.8	Perkembangan Volume Transaksi LCS (juta dollar AS)	119
Gambar 3.9	Perkembangan Persentase Penggunaan Rupiah	120

BAB 4

Gambar 4.1	Keterhubungan QR Antarnegara di ASEAN	134
Gambar 4.2	Interkoneksi dengan Model Bisnis Bilateral	142

BAB 5

Gambar 5.1	Perkembangan Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> di Indonesia	153
Gambar 5.2	Perkembangan Proyek CBDC	158
Gambar 5.3	Proyek CBDC di Negara ASEAN	159
Gambar 5.4	Laporan ISC2 pada Cybersecurity Workforce Study	163
Gambar 5.5	Laporan Gartner pada "Tips and Guidelines for Sizing Your Information Security Organization"	164
Gambar 5.6	Hasil Survei Terkait <i>Policy</i> dan Implementasi Kontrol pada Aspek <i>Process</i>	165
Gambar 5.7	Hasil Survei Terkait <i>Policy</i> dan Implementasi Kontrol pada Aspek <i>Technology</i>	166
Gambar 5.8	Kerangka Kerja Pelaporan Insiden Siber (CIR) FSB	183
Gambar 5.9	<i>Design Automatic Cyber-Security Awareness Platform</i> (ASAP) Bank Indonesia	184
Gambar 5.10	Linimasa Review ABIF	187
Gambar 5.11	Permasalahan dan Tantangan Implementasi ABIF	189
Gambar 5.12	Kerangka Reviu ABIF	191
Gambar 5.13	Prinsip Review ABIF	192
Gambar 5.14	Skema QAB Digital sebagai Alternatif QAB Saat Ini	204
Gambar 5.15	ABIF Baru Berbasis Digital	206
Gambar 5.16	Tren Volatilitas <i>Native Tokens</i>	211
Gambar 5.17	Kapitalisasi Pasar Aset Kripto	211
Gambar 5.18	<i>Global Crypto Adoption Rate</i>	212
Gambar 5.19	Grafik Tren Harga Bitcoin	213
Gambar 5.20	Tren Perkembangan Nilai Transaksi dan Jumlah Investor	214

Gambar 5.21	Perkembangan Jumlah Pedagang Kripto yang Terdaftar di Bappebti	215
Gambar 5.22	<i>Framework</i> Elemen Kebijakan Aset Kripto Gambar	180

BAB 6

Gambar 6.1	Pilar WC-FINC	230
Gambar 6.2	Tren Penggunaan Pembayaran Digital	234
Gambar 6.3	Perbandingan Tingkat Inklusi Finansial di ASEAN	236

BAB 7

Gambar 7.1	Peluang Pendanaan/Investasi Hijau di Negara ASEAN	264
Gambar 7.2	ASEAN Taxonomy Board (ATB)	273
Gambar 7.3	Penerbitan Green Sukuk dan SDG Bond (2018-2022)	281
Gambar 7.4	Milestone Taksonomi ASEAN	290
Gambar 7.5	Desain Taksonomi ASEAN	292
Gambar 7.6	Area Prioritas Peta Jalan Pasar Modal Berkelanjutan ASEAN	296
Gambar 7.7	Perbandingan Penerbitan Obligasi Hijau, Sosial, dan Keberlanjutan ASEAN	310

Leader's Insight

Perry Warjiyo
Gubernur Bank Indonesia

Melanjutkan kesuksesan pada Presidensi G20 tahun 2022, Indonesia meneruskan kepemimpinannya di ASEAN dalam menavigasi tantangan global, demi pencapaian tujuan dan aspirasi ASEAN sebagaimana tercantum dalam Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025.

Tema Keketuaan Indonesia "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth" dimaksudkan untuk menyatukan ASEAN dalam meningkatkan kapasitas dan efektivitas, serta memastikan kawasan ini tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Bank Indonesia memainkan peran penting selama Keketuaan ASEAN, bersinergi dengan pemerintah, terutama dalam jalur keuangan.

Indonesia memegang Keketuaan ASEAN pada masa-masa yang genting. Moderasi ekonomi global terus berlanjut di tengah hambatan yang timbul akibat fragmentasi geopolitik, kerentanan di negara terbelakang, dan pengetatan kebijakan moneter yang agresif di negara maju. Masalah kesehatan karena Covid-19 dan varian lain yang muncul juga masih memerlukan perhatian. Fragmentasi geopolitik, yakni perang Rusia di Ukraina, terus berlanjut dan semakin memperparah tantangan ekonomi global. Tekanan inflasi masih tinggi akibat gangguan rantai pasok global yang berlanjut, sementara harga pangan dan energi pun tetap tinggi, di atas level sebelum pandemi. Kondisi ini telah mendorong pengetatan kebijakan moneter di negara maju dan negara berkembang. Pengetatan ini telah meningkatkan beban keuangan utang negara sekaligus juga memberatkan kondisi keuangan pada bisnis dan rumah tangga.

Untuk mewujudkan tema utama di tengah tantangan yang dihadapi, Ketetuaan Indonesia di ASEAN fokus pada 3 (tiga) *strategic thrust*, yaitu: (i) membangun kembali pertumbuhan, konektivitas, dan daya saing baru di kawasan (*recovery-rebuilding*); (ii) mempercepat transformasi dan partisipasi ekonomi digital yang inklusif (*digital economy*); dan (iii) mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan untuk masa depan yang kokoh (*sustainability*).

Ketiga *strategic thrust* itu diwujudkan dalam 16 (enam belas) agenda prioritas ekonomi (*priority economic deliverables*), 3 (tiga) di antaranya berada di bawah ranah kementerian keuangan dan bank sentral, yaitu: (i) mendorong pemulihan, memastikan stabilitas serta ketahanan ekonomi dan keuangan; (ii) memajukan konektivitas pembayaran, mendorong literasi keuangan digital dan inklusi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta memperkuat ketahanan di sektor keuangan; (iii) mendorong pembiayaan transisi untuk mendukung keuangan berkelanjutan dan ekonomi hijau.

Mendorong Pemulihan serta Memastikan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan

Seperti kita ketahui, kawasan ASEAN merupakan salah satu kawasan dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Ekonomi ASEAN menikmati pertumbuhan yang kuat sepanjang tahun 2022 di tengah lonjakan aktivitas dan mobilisasi masyarakat pascapandemi Covid-19. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang telah ditempuh untuk meredam dampak pandemi dan mendukung pemulihan ekonomi.

Untuk melanjutkan pemulihan dan memastikan stabilitas ekonomi di bawah tantangan ekonomi yang meningkat saat ini, diperlukan kebijakan yang terkalibrasi dengan baik (*well-calibrated*), terencana dengan baik (*well-planned*), dan terkomunikasikan dengan baik (*well-communicated*). Hal ini dimaksudkan untuk memastikan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi sembari memitigasi risiko, seperti tingginya inflasi dan volatilitas aliran modal. Ketahanan kawasan ASEAN didukung oleh penggunaan bauran kebijakan nasional negara anggota masing-masing dengan memadukan kebijakan moneter dan fiskal untuk meredam perekonomian dari pandemi dan mempercepat pemulihan ekonomi.

Dalam pelaksanaannya selama Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, bauran kebijakan semakin dikenal dan dipahami di ASEAN sebagai kerangka kebijakan yang penting untuk diterapkan, terutama di tengah tantangan dan ketidakpastian global saat ini. Dalam hal ini, Indonesia adalah salah satu contoh utama penerapan bauran kebijakan makroekonomi. Kinerja ekonomi Indonesia yang berdaya tahan dan tumbuh baik adalah hasil positif dari sangat eratny sinergi respons bauran kebijakan ekonomi nasional antara pemerintah, Bank Indonesia, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Bauran kebijakan ekonomi nasional dimaksud mencakup 5 (lima) aspek penting, yaitu: (i) koordinasi fiskal dan moneter; (ii) akselerasi transformasi sektor keuangan; (iii) akselerasi transformasi sektor riil; (iv) digitalisasi ekonomi dan keuangan; dan (v) ekonomi dan keuangan inklusif dan hijau.

Kelima aspek bauran kebijakan tersebut mendukung perekonomian baik dari sisi permintaan maupun sisi penawaran. Aspek pertama, yaitu koordinasi kebijakan fiskal-moneter, dan aspek kedua, yaitu koordinasi stabilitas sistem keuangan, lebih menekankan pada terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan dengan tetap memberi dorongan pada pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, aspek ketiga, akselerasi transformasi sektor riil, aspek keempat, digitalisasi ekonomi dan keuangan, serta aspek kelima, ekonomi dan keuangan inklusif dan hijau. Ketiga aspek ini lebih diarahkan untuk mendorong sisi penawaran agar pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan karenanya berdampak positif pada stabilitas makroekonomi.

Dengan kata lain, sinergi kelima aspek bauran kebijakan ekonomi nasional tersebut berkontribusi kuat pada ketahanan ekonomi Indonesia menghadapi dampak rambatan global dengan stabilitas yang terjaga dan pertumbuhan yang relatif tinggi.

Untuk memastikan konsep bauran kebijakan makroekonomi dapat semakin dipahami dan diterapkan, ASEAN juga mengundang Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank for International Settlements (BIS) untuk bekerja sama dengan negara anggota ASEAN agar lebih memahami konteks regional sekaligus meningkatkan implementasi bauran kebijakan makroekonomi. Hal ini dilakukan untuk mendorong agar bauran kebijakan tidak hanya diterapkan di dalam ASEAN,

tetapi juga sebagai referensi bagi negara lain di kawasan atau bahkan secara internasional. Dalam aspek ini, implementasi Kerangka Kerja Kebijakan yang Terintegrasi (Integrated Policy Framework/IPF) dari IMF dan Kerangka Kerja Stabilitas Keuangan Makro (Macro-Financial Stability Framework/MFSF) dari BIS diharapkan akan berjalan dengan terintegrasi dan bekerja beriringan sebagai bauran kebijakan makroekonomi yang diterapkan di ASEAN.

Selain bauran kebijakan, untuk lebih mendorong stabilitas makroekonomi, sistem keuangan, dan juga untuk memperkuat ketahanan eksternal di negara-negara berkembang, terutama yang memiliki pasar keuangan relatif terbuka, ASEAN juga memajukan strategi diversifikasi mata uang dengan mendorong kerangka transaksi mata uang lokal (*local currency transaction/LCT*).

Dalam KTT ASEAN pada Mei 2023, para pemimpin telah mendukung dan menginstruksikan untuk memperluas penggunaan LCT ini. Upaya tersebut ditindaklanjuti oleh para menteri keuangan ASEAN dan gubernur bank sentral melalui kesepakatan untuk memperluas transaksi mata uang lokal dalam ketiga aspek: (1) transaksi mata uang lokal untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi; (2) LCT dalam sistem pembayaran lintas negara; dan (3) LCT untuk aset keuangan. Pada 25 Agustus 2023, Bank Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia, Thailand, dan Malaysia untuk memperluas LCT. Dalam hal ini, kami menantikan anggota ASEAN lainnya untuk dapat bergabung dalam penandatanganan MoU LCT.

Sejalan dengan upaya pemulihan jangka pendek, reformasi struktural juga diperlukan untuk mengatasi dampak krisis ekonomi jangka menengah panjang dan untuk mengamankan pertumbuhan di masa depan. ASEAN harus mengatasi efek berkepanjangan (*scarring effect*) yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan tantangan struktural yang timbul dari perubahan iklim, risiko digitalisasi, kerawanan pangan, serta produktivitas yang rendah.

Dalam hal ini, ASEAN fokus pada pembangunan kembali pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif dengan menerapkan lebih lanjut kebijakan reformasi struktural. Untuk mengatasi dampak pandemi, ASEAN membahas kebijakan untuk menangani masalah pasar tenaga kerja, gangguan dalam pendidikan, dan investasi yang lemah. Mengingat perubahan iklim, gangguan

rantai pasok, dan konflik di Ukraina telah memperburuk produksi dan distribusi pangan, pembahasan tentang peningkatan ketahanan pangan di kawasan ASEAN juga menjadi salah satu prioritas ASEAN.

Digitalisasi sangat penting dalam upaya katalisasi pertumbuhan karena dapat mempromosikan model dan pemain bisnis baru sambil mengubah perilaku konsumen serta lanskap ekonomi dan keuangan. Dalam kaitan ini, ASEAN mendorong pengembangan produk dan aktivitas perbankan di seluruh kawasan di era digital dengan meningkatkan pekerjaan terkait Kerangka Kerja Integrasi Perbankan ASEAN (ASEAN Banking Integration Framework).

Terakhir, ASEAN membahas upaya peningkatan produktivitas, antara lain melalui pengembangan industri hilir sumber daya alam. Hilirisasi tersebut diupayakan dengan mempertimbangkan pengembangan teknologi baru serta transisi menuju ekonomi hijau dan keuangan berkelanjutan, sebagai upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kapasitas *output* potensial dan pertumbuhan ekonomi tinggi.



DOKUMENTASI BI

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Akselerasi Transformasi Ekonomi Digital yang Inklusif

Dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di kawasan, ASEAN terus berupaya meningkatkan konektivitas melalui kolaborasi dengan berbagai terobosan dalam aspek ekonomi digital. Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan dalam satu dekade terakhir. Digitalisasi terbukti mampu mempercepat pemulihan ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Arah yang jelas dalam menavigasi integrasi ekonomi dan keuangan digital menjadi semakin penting di kawasan, terutama melalui pertukaran pandangan dan kolaborasi dalam pengembangan sistem pembayaran antarnegara ASEAN. Tindakan nyata dalam percepatan digitalisasi di kawasan diwujudkan dengan memajukan kerja sama konektivitas pembayaran untuk mendukung pembayaran lintas negara yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif melalui inisiatif konektivitas pembayaran regional (*regional payment connectivity*/RPC).

Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 mengedepankan perluasan RPC di kawasan. Menyusul keberhasilan penandatanganan ASEAN-5 tahun lalu di sela-sela KTT G20, tahun ini RPC diperluas sebagai tindak lanjut KTT ASEAN pada Mei 2023 yang tertuang dalam Deklarasi Para Pemimpin ASEAN (ASEAN Leaders' Declaration/ALD) tentang pemajuan (*advancing*) RPC dan penggunaan LCT. Komitmen ini akan membantu memfasilitasi pembayaran lintas negara yang lancar dan aman.

Dalam konteks ini, negara anggota ASEAN telah menyepakati peta jalan RPC yang di dalamnya mencakup *timeline* bagi anggota ASEAN untuk bergabung dalam RPC. Terkait hal ini, Vietnam baru saja bergabung dengan ASEAN-5 dalam konektivitas lintas negara, khususnya terkait QR *cross-border* dan *fast payment*. Selanjutnya, negara anggota ASEAN lainnya, termasuk Brunei, diharapkan bergabung ke dalam RPC. Ke depan, peningkatan dan perluasan inisiatif konektivitas pembayaran regional akan terus berlanjut dengan lebih banyak modalitas dan kerja sama yang lebih luas. Ambisi ini merupakan lompatan "*from ASEAN to the WORLD*" melalui implementasi Peta Jalan G20 untuk Meningkatkan Pembayaran Lintas Negara (G20 Roadmap for Enhancing Cross Border Payments).

Pada KTT Ke-42 ASEAN, 9-11 Mei 2023, para pemimpin negara

ASEAN telah mengadopsi enam deklarasi para pemimpin ASEAN (ALD), termasuk ALD tentang Pemajuan RPC dan Pengenalan LCT (ALD on Advancing Regional Payment Connectivity and Promoting Local Currency Transaction). ALD dimaksud fokus pada dua bidang prioritas bank sentral, yaitu konektivitas pembayaran dan transaksi dengan mata uang lokal.

Secara umum, ALD tentang RPC dan LCT mencakup beberapa poin utama, yaitu mendorong konektivitas pembayaran kawasan untuk mendukung integrasi kawasan menuju visi 2025; mendorong penggunaan mata uang lokal untuk transaksi ekonomi dan keuangan antarnegara anggota ASEAN; mengeksplorasi kerja sama lebih lanjut dalam memajukan konektivitas pembayaran regional dan pemanfaatan LCT; serta melibatkan mitra eksternal ASEAN, organisasi internasional, dan sektor swasta untuk membangun kerja sama dan kemitraan dalam memajukan konektivitas pembayaran regional dan pemanfaatan LCT.

Melalui adopsi ALD tersebut, para pemimpin negara ASEAN menugaskan menteri keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN untuk mengawal implementasi RPC dan LCT, dengan bantuan dan koordinasi yang erat dengan lembaga terkait lainnya. Mandat ini perlu direalisasikan untuk mendukung terwujudnya ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi global.

Revolusi digital juga memberikan peluang yang lebih besar untuk inklusi keuangan. Hal itu disebabkan semakin banyak pelaku ekonomi yang dapat mengakses dan memanfaatkan informasi, mendorong inovasi, dan membangun model bisnis baru. Untuk mengoptimalkan manfaat dalam inisiatif keuangan digital, penting untuk menggarap literasi keuangan dan digital. ASEAN telah mengalami kemajuan yang mengesankan dalam mempercepat tingkat inklusi keuangan. Kinerja tersebut terlihat dari angka terakhir tingkat eksklusi keuangan ASEAN yang telah mencapai 22,62 persen (per Desember 2022). Digitalisasi membuka peluang yang lebih luas dalam mempercepat inklusi keuangan.

Meskipun demikian, hanya setengah dari negara anggota ASEAN yang merumuskan strategi literasi keuangan nasional. Hal ini menimbulkan kekhawatiran atas perlindungan yang memadai yang diberikan kepada bagian paling rentan dari masyarakat kita.

Digitalisasi di satu sisi telah memfasilitasi inovasi canggih di sektor keuangan, tetapi di sisi lain juga meningkatkan kompleksitas dan membutuhkan keterampilan baru bagi penggunanya. Oleh karena itu, Keketuaan Indonesia perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap upaya peningkatan kesadaran dan kapasitas negara anggota ASEAN terkait perumusan dan implementasi strategi literasi keuangan digital agar dapat secara efektif mendorong inklusi keuangan di era digital ini.

Dengan latar belakang tersebut, ASEAN telah mendorong penguatan inklusi dan literasi keuangan digital. ASEAN telah menyelesaikan Pedoman Implementasi Penguatan Literasi Keuangan Digital (*Implementation Guideline to Strengthen Digital Financial Literacy*) di ASEAN yang bertujuan untuk memberikan panduan bagi para pembuat kebijakan di ASEAN dan diharapkan dapat melengkapi panduan yang ada dalam agenda inklusi keuangan ASEAN dan global. Selain itu, di bawah Keketuaan ASEAN Indonesia, juga dilaksanakan Festival Inklusi Keuangan Digital atau Digital Financial Inclusion (DFI) Festival di sela-sela Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (*ASEAN Finance Minister and Central Bank Governors' Meeting/AFMGM*) Ke-10 pada Agustus 2023. Festival DFI dan pengesahan Pedoman Implementasi bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memberdayakan individu di bidang keuangan digital.

Mempromosikan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan demi Masa Depan yang Resilien

Negara-negara di kawasan Asia Tenggara, baik secara individu maupun di bawah payung kerja sama ASEAN, menuju ke arah yang sama dengan inisiatif global dalam agenda iklim dan pembangunan berkelanjutan. Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang paling rentan terhadap risiko terkait iklim dan cuaca serta bencana alam. Dengan demikian, negara-negara anggota di bawah kerja sama ASEAN menempatkan komitmen untuk memperkuat upaya mendorong instrumen keuangan berkelanjutan sebagai prioritas tinggi.

Oleh karena itu, ASEAN telah mengadopsi Standar ASEAN tentang Keuangan Berkelanjutan (*ASEAN Standards on Sustainable Financing*) dan secara bertahap melakukan beberapa inisiatif,

misalnya Taksonomi ASEAN tentang Keuangan Berkelanjutan (*ASEAN Taxonomy on Sustainable Finance*) dan Kajian Peran Bank Sentral dalam Pengelolaan Risiko Terkait Iklim dan Lingkungan (*Study on the Role of Central Banks in Managing Climate and Environment-Related Risk*). Untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 dan target emisi nol bersih (*net-zero emission*), negara-negara ASEAN akan bekerja sama mendorong dialog untuk merumuskan dan mengembangkan mekanisme pembiayaan berkelanjutan serta menetapkan kebijakan hijau yang efektif, dengan mempertimbangkan keadaan negara yang berbeda.

Prioritas Keketuaan Indonesia di bidang ini akan memajukan peningkatan keuangan berkelanjutan di ASEAN melalui tindakan nyata. Kolaborasi dan dialog di ASEAN akan memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan praktik pasar di antara anggota ASEAN. Indonesia berupaya mempromosikan pembiayaan transisi untuk mendukung keuangan berkelanjutan dan ekonomi hijau, termasuk melalui pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Selain itu, para anggota akan didorong untuk berbagi pengalaman dan belajar satu sama lain dalam meningkatkan kapasitas untuk mendapatkan akses ke pembiayaan transisi menuju emisi nol bersih. Dalam konteks ini, dialog antarbank sentral ASEAN tentang perumusan kebijakan akan memperkuat dan memberi nilai tambah dalam mempromosikan keuangan berkelanjutan di kawasan.

Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan paling rentan terhadap risiko terkait iklim, cuaca, dan bencana alam.

Memperkuat Proses Kerja di Jalur Keuangan di ASEAN

Selain inisiatif-inisiatif terkait agenda prioritas ekonomi di atas, Indonesia juga mendorong penguatan proses di jalur keuangan melalui inisiatif peninjauan kembali mandat komite kerja. Bersama dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia telah menginisiasi diskusi untuk memperkuat proses kerja ASEAN, khususnya di jalur keuangan,

agar ASEAN dapat merespons kondisi ekonomi global terkini yang dinamis.

Sehubungan dengan hal itu, para gubernur bank sentral dan menteri keuangan ASEAN mendukung pembentukan Gugus Tugas Peninjauan Kembali Mandat Komite Kerja (Task Force Revisiting Working Committee Mandates). Dalam tahap awal, gugus tugas dibentuk untuk menyusun Pedoman yang diperlukan oleh komite kerja masing-masing untuk dapat meninjau kembali mandat dalam rangka menyambut visi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2025.

BAB 1

Mengenal ASEAN dan Ketetuaan Indonesia 2023



BPMI SETPRES/LAILY RACHEV

Presiden Joko Widodo menjamu santap malam para pemimpin negara ASEAN, negara mitra, serta organisasi internasional dan undangan lainnya di Hutan Kota Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Rabu, 6 September 2023. Jamuan ini digelar sebagai rangkaian acara puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN.

ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, adalah organisasi geopolitik dan ekonomi yang beranggotakan sepuluh negara di Asia Tenggara. Pada tahun 2023, Indonesia menerima tongkat estafet dari Kamboja untuk menjadi Ketua ASEAN kelima kalinya. Dengan mengangkat tema. "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth", Keketuaan Indonesia di ASEAN berfokus pada upaya memperkuat ASEAN menjadi kawasan ekonomi yang tumbuh cepat, inklusif, dan berkelanjutan, serta meningkatkan kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN.

Keketuaan ini terdiri atas tiga pilar kerja sama, yaitu Komunitas Ekonomi ASEAN, Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN, dan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN.

Komunitas Ekonomi ASEAN merupakan pilar penopang untuk tercapainya tujuan akhir kerja sama ekonomi negara-negara ASEAN, yakni wilayah perekonomian yang stabil,

makmur, dan kompetitif atau berdaya saing. Pilar ini dipimpin oleh Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community Council (AECC). Selama Ketekuaan Indonesia, AECC dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Di bawah kepemimpinan Indonesia, terdapat 16 agenda prioritas ekonomi (*priority economic deliverables*/PEDs) yang menjadi fokus dari Pilar Ekonomi yang dibagi ke dalam tiga *strategic thrust*.

Sementara itu, Masyarakat Politik-Ketahanan ASEAN ditujukan untuk mempercepat kerja sama politik dan ketahanan di ASEAN dalam mewujudkan perdamaian di kawasan regional dan global. Adapun Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN bertujuan untuk memupuk kerja sama bidang pembangunan sosial agar dapat meningkatkan standar hidup kelompok masyarakat yang kurang beruntung.

Sebagai pemegang Ketekuaan ASEAN pada tahun 2023, Indonesia bertanggung jawab untuk memimpin Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-42 ASEAN yang dilaksanakan di Labuan Bajo pada Mei 2023 dan KTT Ke-43 yang dilaksanakan di Jakarta pada September 2023. Berbagai pertemuan telah dilaksanakan dan menghasilkan kesepakatan serta inisiatif bersama dalam mewujudkan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan dan dunia.

Namun, sebelum membahas Ketekuaan Indonesia di ASEAN, ada baiknya kita memahami sejarah ASEAN dan ASEAN sebagai organisasi.

Sekilas tentang ASEAN

Terbentuknya ASEAN dilatarbelakangi oleh gejolak pada era Perang Dingin. Suasana gejolak itu mendorong sekelompok negara di Asia Tenggara bersatu dengan visi menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Pada 8 Agustus 1967, lima negara pendiri ASEAN-Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand—menandatangani dokumen Deklarasi ASEAN yang juga dikenal sebagai Deklarasi Bangkok. Deklarasi tersebut ditandatangani oleh lima menteri luar negeri, yakni Adam Malik dari Indonesia, Narciso R. Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Thanat Khoman dari Thailand.

Seiring berjalannya waktu, ASEAN memperluas keanggotaannya dengan menyambut Brunei Darussalam (8 Januari 1984), Vietnam (28 Juli 1995), Laos (23 Juli 1997), Myanmar (23 Juli 1997), dan Kamboja (30

April 1999). Dalam KTT Ke-41 ASEAN di Phnom Penh (13 November 2022), disetujui secara prinsip bergabungnya Timor Leste sebagai anggota ke-11. Selanjutnya, Timor Leste akan menyesuaikan berbagai peraturan di negeri itu untuk persiapan menjadi anggota tetap ASEAN.

Sebagaimana dicantumkan pada Deklarasi Bangkok, ASEAN memiliki tujuh tujuan utama, yakni:

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di kawasan Asia Tenggara melalui kerja sama dengan menjunjung kesetaraan dan kemitraan dalam rangka memperkuat landasan menuju masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai.
2. Mendorong kedamaian dan stabilitas kawasan Asia Tenggara dengan menghormati keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antarnegara di wilayah regional, serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3. Mendorong kerja sama aktif dan gotong royong dalam hal-hal yang merupakan kepentingan bersama, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, ilmu pengetahuan, maupun administrasi.
4. Saling memberikan bantuan berupa fasilitas pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan, profesi, teknis, dan administrasi.
5. Berkolaborasi secara efektif dalam mendorong pertumbuhan di sektor pertanian, industri, dan perdagangan. Hal ini termasuk peningkatan fasilitas transportasi dan komunikasi, serta studi terkait perdagangan komoditas internasional dalam rangka meningkatkan standar hidup masyarakat ASEAN.
6. Memajukan kajian mengenai Asia Tenggara.
7. Memelihara kerja sama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi internasional dan regional yang memiliki tujuan sama, serta mengeksplorasi seluruh strategi dalam rangka meningkatkan kualitas kerja sama antarnegara anggota ASEAN dan mitra lainnya.

Masyarakat ASEAN

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, ASEAN bergerak dengan berlandaskan kepada Piagam ASEAN yang berfungsi memberikan

status hukum dan kerangka kelembagaan. Piagam ASEAN juga menetapkan norma-norma, aturan-aturan, dan nilai-nilai ASEAN; menetapkan target yang jelas untuk ASEAN; serta menjadi standar akuntabilitas dan kepatuhan.

Dengan ditetapkannya Piagam ASEAN pada 15 Desember 2008 terbentuklah komitmen politik pada tingkat tinggi, yaitu (1) Bersatu dalam *One Vision, One Identity, and One Caring and Sharing Community*; (2) Membangun Masyarakat ASEAN (ASEAN Community) yang terdiri dari Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (ASEAN Political-Security Community), Masyarakat Sosiobudaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community), dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community).

ASEAN Political-Security Community (APSC) bertujuan untuk memastikan bahwa negara-negara di kawasan Asia Tenggara hidup damai satu sama lain dan dengan global dalam lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis. Hal ini dilaksanakan dengan menekankan kepada penggunaan proses damai dalam penyelesaian perbedaan intraregional dan memercayai bahwa keamanan negara masing-masing secara fundamental terkait dan terikat satu sama lain oleh lokasi geografis, visi, dan tujuan bersama.

Adapun ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) merupakan sebuah komitmen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Asia Tenggara melalui aktivitas kerja sama yang berorientasi pada manusia, memusatkan pada manusia, berwawasan lingkungan, dan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan realisasi tujuan akhir integrasi ekonomi wilayah ASEAN, yaitu ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, kawasan dengan tingkat kompetitif yang tinggi, pembangunan ekonomi yang adil, serta terintegrasi sepenuhnya ke dalam ekonomi global. Dengan kata lain, terdapat semangat integrasi ekonomi di kawasan ASEAN.

Sejarah terbentuknya MEA diawali dengan mandat dari pemimpin ASEAN untuk membentuk Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area/AFTA) pada tahun 1992. Sejak saat itu, upaya intensif dilakukan untuk memperluas potensi ekonomi kawasan ASEAN. Salah satunya adalah pembentukan Blueprint MEA 2015 yang diadopsi pada

tahun 2007 sebagai rencana utama yang koheren untuk membimbing pendirian AEC pada tahun 2015.

Berikutnya, dikembangkan Blueprint MEA 2025 untuk menetapkan arah strategis bagi fase berikutnya dari agenda integrasi ekonomi ASEAN. Blueprint MEA 2025 diharapkan dapat memperdalam integrasi ekonomi dan mencapai masyarakat ekonomi yang lebih terintegrasi.

Karakteristik dari masyarakat ekonomi yang diharapkan adalah sebagai berikut: (a) Ekonomi yang terintegrasi dan kokoh; (b) ASEAN yang kompetitif, inovatif, dan dinamis; (c) Peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; (d) ASEAN yang tangguh, inklusif, berorientasi pada masyarakat, dan berpusat pada masyarakat; (e) ASEAN yang global.

Dalam mewujudkan kelima karakteristik tersebut dicanangkanlah sepuluh bidang kolaborasi Masyarakat Ekonomi ASEAN, yakni:

a) Integrasi Perdagangan dan Pasar

Semangat integrasi perdagangan dan pasar di ASEAN ditandai dengan pertemuan menteri-menteri ekonomi atau perdagangan dari setiap anggota ASEAN (ASEAN Economic Ministers/ AEM) yang pertama kali diadakan pada tahun 1976 di Jakarta, Indonesia. Selanjutnya, AEM mengawasi perkembangan integrasi ASEAN pada perdagangan dan investasi melalui laporan pada isu-isu kebijakan dari Dewan AFTA dan Dewan ASEAN Investment Area (AIA).

AEM juga menerima dukungan teknis dan operasional dari Senior Economic Officials' Meeting (SEOM), yang terdiri dari pejabat berpangkat tinggi dari negara anggota ASEAN serta komite sektoral dan kelompok kerja dalam berbagai bidang kerja sama. Selain itu, AEM juga menerima rekomendasi dari High-Level Task Force on ASEAN Economic Integration (HLTF-EI) mengenai hal-hal yang terkait dengan integrasi ekonomi ASEAN dan hubungan eksternal.

AEM bertemu secara rutin dua kali setahun. Pertemuan pertama dilaksanakan dalam format *retreat* pada awal tahun untuk membahas hal-hal yang terkait dengan integrasi ekonomi internal ASEAN, sedangkan pertemuan kedua dalam format resmi.



KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua dari kanan) dan Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn (kedua dari kiri) memimpin The 23rd ASEAN Economic Community Council (AECC) Meeting di Jakarta, Minggu (3/9/2023).

b) Perdagangan Barang

Perdagangan barang meliputi berbagai isu termasuk liberalisasi tarif, hambatan nontarif, ketentuan asal barang, *sanitary and phytosanitary* (SPS), hambatan teknis perdagangan, dan lain-lain. Inisiasi kolaborasi fasilitasi isu-isu perdagangan barang di ASEAN pertama kali dilakukan dengan Persetujuan Common Effective Preferential Tariff (CEPT) yang ditandatangani di Singapura pada tahun 1992. Selanjutnya pada tahun 2010, AEM menyetujui ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) di Thailand yang memberikan kerangka hukum dalam mewujudkan aliran bebas perdagangan barang di kawasan ASEAN.

Dalam mendukung implementasi perdagangan barang di bawah ATIGA, dibentuk Komite Koordinasi ATIGA (Coordinating Committee ATIGA/CCA). Komite ini memiliki fungsi, antara lain, memantau dan mengawasi implementasi ATIGA, terutama dalam bidang liberalisasi tarif, aturan asal, hambatan nontarif, dan fasilitasi perdagangan. Fungsi berikutnya, menyelaraskan

dan memantau aktivitas kelompok kerja, komite, dan/atau sub-komite yang dibentuk di bawah ATIGA serta kemajuan implementasi di setiap bidang yang tercakup dalam ATIGA.

Selain itu, komite ini berfungsi menyelaraskan dan memantau aktivitas lain yang terkait dengan terwujudnya aliran bebas barang di Masyarakat Ekonomi ASEAN. Komite ini juga memberikan rekomendasi terkait perbaikan pada ATIGA untuk memastikan pencapaian tujuan-tujuannya, kelancaran pada implementasi, serta tetap sejalan dengan tren dan perkembangan terkini dalam perdagangan regional dan internasional.

c) Ketentuan Asal Barang

Peran dasar ketentuan asal barang (*rules of origin/ROO*) adalah untuk menentukan kewarganegaraan dari suatu barang tertentu. Hal ini dibutuhkan dalam rangka menetapkan kebijakan tarif pada suatu barang impor. ROO diterapkan oleh negara anggota ASEAN untuk menentukan apakah suatu barang memenuhi syarat mendapatkan perlakuan preferensial berdasarkan ATIGA.

Dalam pelaksanaan ROO dibentuk Sub-Komite Ketentuan Asal Barang (Sub-Committee on ATIGA Rules of Origin/SC-AROO) yang memiliki fungsi, yaitu:

- 1) meringkas dan memperkuat implementasi Ketentuan Asal Barang ATIGA sesuai dengan Blueprint Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2025;
- 2) memantau dan meninjau implementasi dan operasional Bab 3 (Ketentuan Asal Barang) ATIGA dengan mempertimbangkan praktik terbaik dari perjanjian perdagangan regional dan internasional lainnya;
- 3) mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan Ketentuan Asal Barang ATIGA;
- 4) memberikan rekomendasi yang sesuai kepada Badan Kerja ASEAN terkait Ketentuan Asal Barang, dalam mengembangkan Ketentuan Asal Barang dengan mitra

Perjanjian Perdagangan Bebas untuk memastikan konsistensi, dan memberikan rekomendasi untuk menyesuaikan semua negosiasi terkait Ketentuan Asal Barang dengan ketentuan di bawah ATIGA.

d) Perdagangan Jasa

Jasa merupakan sektor perdagangan yang cukup besar dan komponen produk domestik bruto (PDB) yang terus berkembang dalam ekonomi ASEAN. Per tahun 2021, sektor jasa mencakup 34,2% sampai 65,9% PDB negara-negara anggota ASEAN. Merespons perkembangan potensi perdagangan di sektor jasa, ASEAN secara resmi meluncurkan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa (ASEAN Framework Agreement on Services/AFAS) sebagai usaha bersama menuju perdagangan bebas sektor jasa di regional ASEAN.

Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh AEM pada KTT Ke-5 ASEAN di Thailand pada tahun 1995. Semua ketentuan pada AFAS konsisten dengan ketentuan internasional perdagangan jasa di bawah Perjanjian Umum Perdagangan Jasa (General Agreement on Trade in Services/GATS) yang dicanangkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). AFAS dibentuk dengan tujuan untuk menghilangkan semua hambatan dalam perdagangan sektor jasa antarnegara anggota ASEAN. Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan tingkat kompetitif penyedia jasa di ASEAN.

Dalam rangka memperlancar aliran perdagangan sektor jasa, AEM menandatangani ASEAN Agreement on Movement of Natural Persons (MNP). ASEAN MNP merupakan perjanjian mengenai pergerakan Lintas Negara sementara dari orang-perseorangan (tenaga kerja terampil) di lingkup ASEAN. Selanjutnya, Mutual Recognition Arrangements (MRA) dibentuk sebagai alat memberikan pengakuan mutual atas kualifikasi penyedia jasa profesional dalam rangka memfasilitasi mobilitas penyedia jasa profesional di kawasan ASEAN. Sampai saat ini terdapat tujuh MRA yang telah ditandatangani oleh AEM, antara lain Jasa Teknik, Jasa Perawat, Jasa Arsitektur, Praktisi Medis, Praktisi Gigi, dan Jasa Akuntansi.

Inisiatif lainnya dalam memfasilitasi mobilitas penyedia jasa adalah ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF). AQRF adalah kerangka referensi umum untuk membandingkan kualifikasi di semua sektor pendidikan dan pelatihan di semua negara anggota ASEAN. Dengan AQRF, negara-negara dapat merujuk kerangka kualifikasi atau sistem tingkat nasional mereka pada kerangka tingkat ASEAN ini. Dengan cara ini, AQRF mendukung dan meningkatkan Kerangka Kualifikasi Nasional (NQF) setiap negara serta mendorong transparansi dan sistem kualifikasi yang berkualitas lebih tinggi.

Selanjutnya, dengan diluncurkannya Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015, kembali ditekankan semangat ASEAN dalam memperluas dan memperdalam integrasi perdagangan jasa, dan meningkatkan tingkat kompetitif negara anggota ASEAN di sektor jasa. Cetak biru tersebut juga menekankan proses negosiasi dan implementasi Perjanjian Perdagangan Jasa ASEAN (ASEAN Trade in Services Agreement/ATISA) yang telah ditandatangani pada pertemuan AEM di Thailand pada tahun 2019.

e) Investasi

Pada tahun 2021, arus investasi asing langsung (*foreign direct investment*/FDI) di ASEAN meningkat sebesar 42 persen menjadi 174 miliar dollar AS dari level sebelum pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan ketahanan ASEAN dalam menghadapi gelombang pandemi yang beruntun. ASEAN bertahan menjadi penerima teratas FDI di wilayah berkembang (kedua setelah China pada tahun 2021), dan terus menjadi mesin pertumbuhan.

Hal ini digambarkan dengan aliran masuk FDI yang terus meningkat dari rata-rata tahunan sebesar 7% sebelum pandemi, tepatnya pada periode 2011–2017, menjadi 11 persen pada periode 2018–2019, lalu menjadi 12% pada 2020–2021 (Sumber: ASEAN Secretariat dan UNCTAD).

Dengan mempertimbangkan potensi besar investasi di kawasan ASEAN, kebijakan investasi ASEAN terutama dimaksudkan untuk meningkatkan daya tarik sebagai tujuan

investasi secara global. Hal itu diupayakan melalui pembentukan rezim investasi yang terbuka, transparan, dan dapat diprediksi. Dalam mewujudkan hal itu, dibentuk Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN (ASEAN Comprehensive Investment Agreement/ACIA) yang ditandatangani oleh AEM pada 26 Februari 2009 di Thailand dan mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2012.

ACIA adalah perjanjian komprehensif yang mencakup liberalisasi investasi, perlindungan, fasilitasi, dan promosi. Perjanjian ini mengadopsi pendekatan daftar negatif tunggal dan memberikan perlakuan *most-favoured nation* (MFN) otomatis kepada semua negara anggota. ACIA juga memiliki mekanisme penyelesaian sengketa antara investor dan negara yang komprehensif dan terperinci.



KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Ketua Delegasi Thailand Sarun Charoensuwan, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, Presiden RI Joko Widodo, Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao (dari kiri ke kanan) berfoto bersama sebelum memulai KTT ke-13 ASEAN dan PBB di Jakarta, Kamis (7/9/2023). Konferensi ini merupakan pertemuan penutup dari rangkaian KTT ke-43 ASEAN.

f) Kemudahan Perdagangan

Kemudahan perdagangan sebagai penggerak utama perkembangan ekonomi dan integrasi regional sangat penting dalam mewujudkan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi. Dalam Pertemuan Ke-38 Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) pada 22 Agustus 2016 di Kuala Lumpur, para menteri sepakat untuk mendirikan ASEAN Trade Facilitation Joint Consultative Committee (ATF-JCC) guna memberikan lebih banyak penekanan pada kemudahan perdagangan.

Strategi ini berfungsi untuk memperkuat kerja sama regional dengan mempromosikan, berkoordinasi, dan berkolaborasi dalam kebijakan, rekomendasi, rencana tindakan, serta pelaksanaan mekanisme kemudahan perdagangan. Semua ini bertujuan untuk mengurangi biaya transaksi perdagangan dan meningkatkan efisiensi waktu, sembari memastikan pencapaian kebijakan perdagangan yang efektif di ASEAN.

Penghapusan efek distorsi perdagangan dari hambatan nontarif (*non-tariff measures*/NTM) di wilayah tersebut dilakukan oleh badan sektoral ASEAN yang relevan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Komitmen ASEAN mengenai NTM pada Barang.

g) Bea Cukai

Dalam bidang bea cukai dibentuk Komite Koordinasi Bea Cukai (Coordination Committee on Customs/CCC) yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan tindakan dan langkah-langkah implementasi integrasi bea cukai.

Komite ini dibantu oleh tiga kelompok kerja yang terdiri dari Kelompok Kerja Prosedur Bea Cukai dan Kemudahan Perdagangan (Customs Procedures and Trade Facilitation Working Group/CPTFWG), Kelompok Kerja Penegakan dan Kepatuhan Bea Cukai (Customs Enforcement and Compliance Working Group/CECWG), dan Kelompok Kerja Pembangunan Kapasitas Bea Cukai (Customs Capacity Building Working Group/CCBWG).

Selain itu, untuk memperkuat kerja sama antarbea cukai, sesi konsultasi dengan mitra dialog, yaitu Australia, China,

Jepang, dan Korea, adalah bagian dari agenda dalam pertemuan Direktur Jenderal Bea Cukai ASEAN dan pertemuan CCC. Dalam hal yang sama, Bea Cukai ASEAN mengakui pentingnya kemitraan antara bea cukai dan pelaku bisnis di wilayah ini. Keterlibatan dengan sektor swasta (Dewan Penasihat Bisnis ASEAN, Dewan Bisnis Bersama, dan lain-lain) juga diadakan selama pertemuan Direktur Jenderal Bea Cukai ASEAN dan pertemuan CCC.

h) Jendela Tunggal

Jendela Tunggal ASEAN (ASEAN Single Window/ASW) adalah inisiatif regional yang disepakati oleh para pemimpin ASEAN pada KTT Ke-9 ASEAN di Bali, Oktober 2003. ASW merupakan langkah menuju terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN.

ASW adalah lingkungan yang menghubungkan dan mengintegrasikan *national single window* (NSW) dari setiap negara anggota ASEAN. Hal itu akan secara signifikan mempercepat pergerakan barang dan mendorong integrasi ekonomi ASEAN.

i) Integrasi Keuangan

Integrasi keuangan melibatkan harmonisasi dan koordinasi sistem keuangan, regulasi, dan lembaga keuangan di antara negara-negara anggota dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk lingkungan keuangan yang lebih lancar dan efisien, mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas, dan daya saing di seluruh wilayah.

Proses integrasi keuangan ini mencakup integrasi pasar modal, kerja sama perbankan, liberalisasi layanan keuangan, perbaikan sistem pembayaran dan penyelesaian, kerja sama regulasi, upaya inklusi keuangan, dan pembangunan kapasitas.

j) Standar dan Kesesuaian

Perdagangan barang dan jasa di antara anggota ASEAN telah difasilitasi. Biaya produk pun menjadi lebih rendah dengan adanya penghapusan tarif. Namun, masih terdapat masalah

nontarif yang menghambat produk mencapai pasar. Masalah nontarif ini termasuk spesifikasi produk yang berbeda, peraturan tentang keselamatan dan kualitas, serta adanya persyaratan termasuk ketentuan persetujuan pra-pasar.

Mandat untuk menghapus hambatan nontarif, yang juga dikenal sebagai hambatan teknis perdagangan (*technical barriers to trade/TBT*), ini diberikan kepada Komite Konsultatif ASEAN untuk Standar dan Kualitas (ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality/ACCSQ). ACCSQ didirikan sebagai langkah untuk mendukung terwujudnya AFTA.

Sekretariat ASEAN

Sekretariat ASEAN didirikan pada 24 Februari 1976 oleh menteri-menteri luar negeri ASEAN. Persetujuan tentang Pendirian Sekretariat ASEAN menyatakan bahwa mandat dasar Sekretariat ASEAN adalah “untuk menyediakan efisiensi yang lebih tinggi dalam koordinasi organ-organ ASEAN dan untuk pelaksanaan yang lebih efektif dari proyek-proyek dan aktivitas ASEAN”.

Sekretariat ASEAN didirikan dengan komposisi sebagai berikut: sekretaris jenderal, tiga direktur biro, pejabat hubungan perdagangan dan ekonomi luar negeri, pejabat administrasi, pejabat informasi publik, dan asisten sekretaris jenderal.

Pada intinya, fungsi utama Sekretariat ASEAN adalah peran sekretaris jenderal, yang diangkat oleh KTT ASEAN. Sekretaris jenderal memimpin dan mengelola sekretariat, memastikan kegiatan operasional berjalan lancar dan berfungsi secara efektif. Tanggung jawab sekretaris jenderal meliputi pengawasan pelaksanaan proyek-proyek ASEAN, berkoordinasi dengan negara-negara anggota, menyusun pertemuan dan acara ASEAN, serta mewakili ASEAN dalam forum-forum internasional.

Sekretariat ASEAN dipimpin oleh sekretaris jenderal yang diangkat melalui KTT ASEAN untuk masa jabatan yang tidak dapat diperpanjang selama lima tahun, dipilih dari warga negara-negara anggota ASEAN berdasarkan rotasi abjad. Pengangkatan sekretaris jenderal itu dilakukan dengan memperhatikan integritas, kemampuan, pengalaman profesional, dan kesetaraan gender.

Sekretaris jenderal akan dibantu oleh empat wakil sekretaris jenderal yang berasal dari kewarganegaraan yang berbeda dengan sekretaris jenderal dan berasal dari empat negara anggota ASEAN yang berbeda. Selain itu, Piagam ASEAN menetapkan pembentukan Komite Perwakilan Tetap ASEAN (CPR), yang akan dibentuk oleh Perwakilan Tetap Negara Anggota ASEAN dengan pangkat duta besar yang berkedudukan di Jakarta. Ketekuaan komite ini sejalan dengan rotasi tahunan Ketekuaan ASEAN.

Sekilas mengenai ASEAN+3

ASEAN+3 (The ASEAN Plus Three) didirikan pada 1997, pada KTT Informal Ke-2 ASEAN di Malaysia. ASEAN+3 terdiri atas negara anggota ASEAN (Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam) dan tiga negara mitra, yaitu China, Jepang, dan Korea Selatan.

Secara umum, ASEAN+3 berupaya meningkatkan kerja sama negara-negara anggota di berbagai bidang. Bidang-bidang tersebut antara lain bidang politik dan keamanan, perdagangan dan investasi, keuangan, pariwisata, pertanian dan kehutanan, energi, teknologi dan inovasi, lingkungan, tenaga kerja, pendidikan, dan konektivitas.

Rencana Kerja ASEAN+3 dituangkan dalam Pedoman *cooperation work plan* yang diperbarui setiap lima tahun. Rencana kerja ini berfungsi sebagai panduan utama untuk meningkatkan kerja sama ASEAN+3 dalam periode lima tahunan menuju pencapaian tujuan jangka panjang pembentukan forum. Berdasarkan pencapaian rencana kerja sebelumnya, Rencana Kerja ASEAN+3 akan berkontribusi dan menjadi bagian dari upaya ASEAN mewujudkan visi 2025 serta dokumen lanjutannya.

Dalam kerja sama ekonomi dan keuangan, rencana kerja ASEAN+3 meliputi upaya (1) mendorong perdagangan dan investasi; (2) menjaga stabilitas pasar keuangan di kawasan; (3) mempromosikan pariwisata berkelanjutan dan konektivitas antarmasyarakat (*people-to-people connectivity*); (4) meningkatkan kerja sama di bidang pangan, pertanian, dan kehutanan; (5) meningkatkan keamanan dan kerja sama energi dan mineral; (6) mendorong pembangunan berkelanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); (7) memperkuat kerja sama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi; serta (8) mendorong perkembangan ekonomi digital.

Dalam konteks Keketuaan ASEAN, pada 2023, Indonesia juga ditetapkan sebagai *Co-Chairs* ASEAN+3 bersama dengan Jepang. *Co-chairmanship* forum ini sejalan dengan penetapan *chairmanship* pada tahun berjalan. Pada lingkup kerja sama di jalur keuangan, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan RI mewakili Indonesia, bersama perwakilan Jepang, memimpin dan menavigasi pembahasan agenda pertemuan ASEAN+3 tahun 2023.

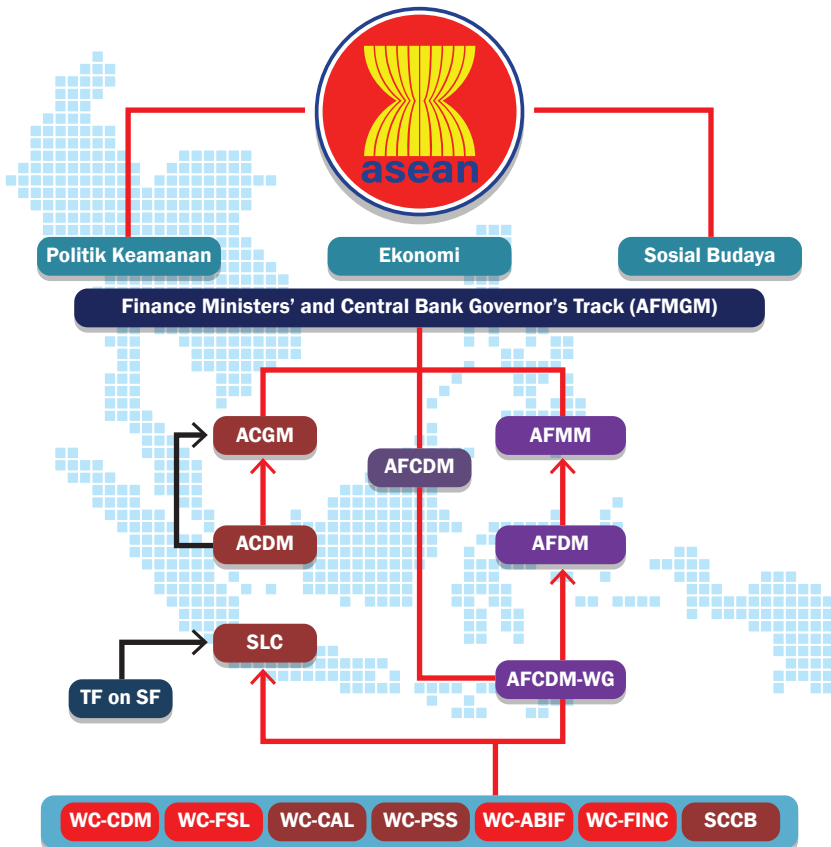
Kolaborasi ASEAN dalam Bidang Keuangan-Integrasi Keuangan

Integrasi keuangan merupakan aspek penting dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang dirancang untuk mendorong pembangunan ekonomi dan memfasilitasi arus keuangan di seluruh kawasan. Sebagai komponen integral dari tujuan utama ASEAN untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi, integrasi keuangan bertujuan untuk meningkatkan konektivitas keuangan, stabilitas, dan inklusivitas di antara negara-negara anggota.

Terkait hal itu, Pertemuan Menteri Keuangan ASEAN pertama kali dilaksanakan di Thailand pada tahun 1997. Pertemuan itu diadakan untuk menindaklanjuti keputusan pimpinan ASEAN bahwa ASEAN harus bergerak menuju ekonomi terintegrasi yang lebih besar dengan mengembangkan aktivitas kerja sama ekonomi yang sudah ada. Termasuk di dalamnya, menginisiasi bidang-bidang kerja sama baru, dan mempromosikan kerja sama yang lebih erat dalam forum-forum internasional. Pertemuan ini menyoroti pentingnya kerja sama

konkret dan lebih erat di bidang keuangan sebagai bagian dari fondasi untuk mewujudkan tujuan ASEAN dalam integrasi ekonomi yang lebih besar.

Integrasi keuangan dalam MEA intinya bertujuan untuk menghapus hambatan dan meningkatkan kerja sama di sektor keuangan. Tujuan tersebut dicapai melalui berbagai inisiatif, termasuk liberalisasi layanan keuangan, harmonisasi regulasi, dan fasilitasi investasi lintas negara. Dengan menyelaraskan kebijakan dan regulasi keuangan, negara-negara anggota berusaha menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menarik investasi dan memfasilitasi alokasi modal yang efisien.



Sumber: ASEAN Secretariat, diolah

Gambar 1.1 Struktur Pelaporan Kolaborasi pada Jalur Integrasi Keuangan.

Salah satu tujuan utama integrasi keuangan adalah mendorong stabilitas dan ketangguhan keuangan. Melalui terbentuknya praktik manajemen risiko yang kuat serta mekanisme pencegahan dan penyelesaian krisis, ASEAN bertujuan memperkuat sektor keuangan kawasan dari guncangan eksternal dan gangguan internal.

Kerja sama yang lebih baik dalam kerangka pengawasan dan regulasi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga membangun keyakinan di kalangan investor dan pemangku kepentingan. Contoh konkret dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah pembentukan ASEAN Surveillance Process pada puncak krisis keuangan Asia tahun 1998, yang dibuat sebagai mekanisme tinjauan oleh sesama pejabat senior dan menteri keuangan guna memfasilitasi kerja sama lebih erat dalam perkembangan ekonomi dan isu kebijakan di ASEAN.

Kerja sama di antara negara-negara anggota ASEAN dalam urusan keuangan diperkuat melalui pembentukan dialog, kelompok kerja, dan forum-forum. Platform-platform ini memberikan kesempatan kepada para pengambil kebijakan dan otoritas keuangan untuk terlibat dalam diskusi yang konstruktif, berbagi praktik terbaik, dan menangani tantangan bersama. Dengan menyelaraskan upaya mereka, negara-negara anggota dapat bersama-sama mengatasi isu-isu keuangan yang muncul dan mendorong integrasi dan stabilitas keuangan yang lebih besar.

Terkait upaya tersebut, Peta Jalan untuk Integrasi Keuangan ASEAN (Roadmap for ASEAN Integration in Finance/RIA-Fin) pada tahun 2003 dibuat untuk lebih memperdalam integrasi keuangan dan moneter ASEAN pada tahun 2015. Peta jalan ini mencakup (i) pengembangan pasar modal ASEAN; (ii) liberalisasi layanan keuangan; dan (iii) liberalisasi akun modal.

Pada Maret 2015, Pertemuan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (AFMGM) yang pertama diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan ini berfungsi sebagai saluran strategis untuk membahas isu-isu kunci yang menjadi perhatian bersama dan untuk memperluas cakupan diskusi mengenai dialog kebijakan tentang isu-isu stabilitas moneter dan keuangan.

AFMGM yang pertama juga menegaskan dukungan mereka terhadap kegiatan di bawah Peta Jalan Integrasi Moneter dan Keuangan

di ASEAN. Pada gilirannya, komitmen ini akan mendukung pencapaian tujuan Kawasan Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan seterusnya.

Selanjutnya, pada tahun 2016, disetujui Rencana Aksi Strategis (Strategic Action Plans/SAPs) Integrasi Keuangan ASEAN 2016-2025 pada Pertemuan Menteri Keuangan ASEAN Ke-2 di Vientiane, Laos. SAPs ini mencakup promosi integrasi keuangan, inklusi keuangan, dan stabilitas keuangan di ASEAN serta sejalan dengan Kerangka Pemantauan dan Evaluasi Komunitas Ekonomi ASEAN. Rencana aksi ini juga mencakup tindakan kebijakan, target, dan tonggak-tonggak untuk memandu pelaksanaan inisiatif integrasi sektor keuangan.

Selanjutnya, AFMGM diadakan setiap tahun dan menghadirkan menteri-menteri keuangan serta gubernur-gubernur bank sentral dari semua negara anggota ASEAN. Dalam pertemuan ini, para peserta terlibat dalam pembahasan komprehensif mengenai berbagai isu keuangan, termasuk perkembangan pasar keuangan, kebijakan moneter, stabilitas keuangan, dan prospek ekonomi regional.

Selain itu, AFMGM juga memberikan kesempatan bagi negara-negara anggota untuk berinteraksi dengan institusi-institusi keuangan internasional dan mitra eksternal (mitra dialog). Melalui dialog dengan perwakilan dari lembaga-lembaga seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia (ADB), ASEAN dapat meningkatkan kerja sama keuangan dan upaya penguatan kapasitas.

Keterlibatan ini juga memperkuat sinergi dengan standar-standar dan praktik-praktik keuangan global. Lebih lanjut, upaya-upaya ini akan memperkuat kredibilitas ASEAN sebagai komunitas keuangan yang terintegrasi dan bertanggung jawab.

Pertemuan-pertemuan ini juga didukung oleh wakil-wakil menteri keuangan dan deputi gubernur bank sentral melalui Pertemuan Deputi Menteri Keuangan ASEAN (AFDM) dan Pertemuan Deputi Bank Sentral ASEAN (ACDM) masing-masing. Inisiatif-inisiatif yang disetujui atau disahkan AFMGM akan diimplementasikan oleh komite-komite kerja/kelompok kerja yang khusus.

RIA-Fin awalnya didirikan pada tahun 2003 dengan tiga komite utama: Liberalisasi Neraca Modal, Pengembangan Pasar Modal, dan Liberalisasi Jasa Keuangan. Komite-komite ini dibentuk sebagai jalan menuju integrasi pasar keuangan, menjamin liberalisasi jasa keuangan

dan pembangunan pasar modal yang berkelanjutan. Seiring dengan berkembangnya RIA-Fin, dibentuklah sembilan komite dan kelompok kerja untuk mengimplementasikan program-program RIA-Fin.

Kelompok kerja pertama adalah Liberalisasi Neraca Modal (Capital Account Liberalization/CAL) yang didirikan untuk mencapai aliran modal yang lebih bebas di antara negara-negara anggota ASEAN. Hal itu dilakukan dengan secara bertahap menghapus pembatasan pada rekening giro, investasi asing langsung, investasi portofolio, dan aliran lainnya. Hal ini akan memastikan alokasi tabungan yang efisien di ASEAN untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

Kelompok kerja CAL telah menghasilkan *heatmap* untuk melacak kemajuan liberalisasi neraca modal negara anggota, kerangka dialog kebijakan yang disempurnakan mengenai aliran modal. Selain itu, juga mekanisme perlindungan dalam membantu negara anggota memantau tren aliran modal dan perumusan kebijakan dalam mempertahankan stabilitas keuangan di kawasan.

Selanjutnya adalah kelompok kerja Pengembangan Pasar Modal (Capital Market Development/CMD), didirikan untuk membangun kapasitas dan infrastruktur pengembangan pasar modal ASEAN, khususnya pasar obligasi. CMD memiliki tujuan jangka panjang untuk mencapai kolaborasi Lintas Negara antarpasar modal di ASEAN. Kelompok kerja CMD telah berkontribusi banyak dalam meningkatkan kerja sama regional dan integrasi antarpasar modal di ASEAN.

Hingga saat ini, kelompok kerja ini telah berkolaborasi dengan kelompok kerja Forum Pasar Modal ASEAN (ASEAN Capital Markets Forum/ACMF) untuk mempromosikan inisiatif-inisiatif pembiayaan infrastruktur dan pembiayaan berkelanjutan. Kelompok kerja CMD juga telah mengembangkan laporan mengenai keuangan berkelanjutan di ASEAN yang berfokus pada sektor pemerintahan dan kuasi-pemerintah.

Berikutnya adalah kelompok kerja Liberalisasi Jasa Keuangan (Financial Service Liberalization/FSL) yang bertujuan memberikan forum bagi AMS untuk berbagi informasi dan bertukar pengalaman mengenai liberalisasi jasa keuangan, melakukan proses liberalisasi jasa keuangan di antara AMS, serta memfasilitasi liberalisasi jasa keuangan oleh ASEAN dengan mitra dialognya.

Pada tahun 2019, kelompok kerja FSL telah menandatangani delapan

protokol untuk mengimplementasikan paket komitmen khusus jasa keuangan di bawah AFAS. Protokol-protokol ini menggarisbawahi komitmen ASEAN dalam memajukan hubungan di antara negara anggota dengan lebih membuka akses pasar dan secara progresif menghapus pembatasan di sektor jasa keuangan. Kelompok kerja ini juga telah memfasilitasi beberapa negosiasi Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) dengan mitra dialog.

Kelompok kerja keempat yang dibentuk bernama Forum Pasar Modal ASEAN (ASEAN Capital Markets Forum/ACMF) yang mulai beroperasi pada tahun 2004 untuk mengembangkan pasar modal regional yang mendalam, likuid, dan terintegrasi. Negara anggota ASEAN berpartisipasi dalam inisiatif ACMF berdasarkan kesiapan dan kemampuan mereka untuk memenuhi persyaratan kerangka masing-masing.

ACMF telah memperkenalkan beberapa inisiatif, antara lain ASEAN Corporate Governance Scorecard. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan standar dan praktik tata kelola perusahaan, menampilkan dan meningkatkan visibilitas perusahaan publik ASEAN yang memiliki tata kelola baik, dan mempromosikan ASEAN sebagai kelas aset internasional.

Di samping itu, juga dibuat inisiatif Skema Investasi Kolektif (Collective Investment Schemes/CIS) yang memungkinkan pengelola dana untuk menawarkan CIS kepada investor ritel di bawah proses otorisasi yang disederhanakan. Inisiatif lain, Mobilitas Profesional untuk memfasilitasi pergerakan profesional pasar modal dan publikasi laporan penelitian secara bertahap. Selain itu, juga terdapat Standar Pengungkapan dan Kerangka Peninjauan Penyederhanaan yang telah digabungkan untuk prakarsa prospektus bersama ASEAN.

Selanjutnya, ACMF juga mengembangkan inisiatif Pengawasan Digital untuk bertukar pandangan dan informasi mengenai perkembangan peraturan dan penipuan antarregulator. ACMF juga bertanggung jawab atas penerbitan Standar Obligasi Hijau ASEAN, Standar Obligasi Sosial ASEAN, dan Standar Obligasi Keberlanjutan ASEAN. Standar-standar ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, konsistensi, dan keseragaman obligasi hijau, sosial, dan keberlanjutan ASEAN. Selain itu, juga mengurangi biaya uji tuntas dan membantu investor global untuk mengambil keputusan yang tepat.

ASEAN Insurance Regulators' Meeting (AIRM) merupakan kelompok kerja yang dihadirkan pada tahun 1998 sebagai platform untuk memperkuat kerja sama asuransi dalam pengembangan kerangka peraturan dan pengawasan asuransi. Selain itu, juga dalam penelitian dan peningkatan kapasitas melalui ASEAN Insurance Training and Research Institute (AITRI).

AIRM terus bertukar pembaruan dalam meningkatkan kepatuhan mereka terhadap Prinsip-prinsip Inti Asuransi dari International Association of Insurance Supervisors (IAIS). Mereka berbagi informasi terkini mengenai peraturan asuransi baru dan inisiatif asuransi untuk meningkatkan tingkat penetrasi.

Wadah ini juga akan mendukung penyelesaian jaringan perjanjian bilateral tentang penghindaran pajak berganda.

AIRM juga telah mengawasi dan memberikan panduan implementasi Protokol 5 tentang Skema Wajib Asuransi Kendaraan Bermotor ASEAN di bawah Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN tentang Fasilitas Barang dalam Transit (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit/AFAFGIT).

Dalam mengatasi hambatan terkait pajak dan kebijakan integrasi ekonomi regional, serta untuk mendukung dialog regional tentang masalah perpajakan dalam integrasi regional, dibentuklah sebuah platform baru pada tahun 2010, yakni Forum Pajak ASEAN (ASEAN Forum on Taxation/AFT). Wadah ini juga akan mendukung penyelesaian jaringan perjanjian bilateral tentang penghindaran pajak berganda (*double taxation/DTA*).

Selain itu, juga mengatasi masalah pemotongan pajak dan pajak berganda serta meningkatkan pembagian informasi dan mengurangi kemungkinan penggelapan pajak. Terkait hal itu, negara anggota ASEAN saat ini sedang mengupayakan implementasi regional pertukaran informasi (*exchange of information/EOI*) dan pertukaran informasi otomatis (*automatic exchange of information/AEOI*).

Kelompok kerja selanjutnya adalah Kerangka Kerja Integrasi Perbankan ASEAN (ASEAN Banking Integration Framework (ABIF)). Awalnya dibentuk pada tahun 2011 sebagai satuan tugas untuk

merumuskan tonggak awal dan jadwal liberalisasi jasa keuangan di sektor perbankan ASEAN. Mandat asli untuk Satuan Tugas ABIF telah dipenuhi pada Desember 2014 dengan finalisasi Pedoman ABIF.

Pada tahun 2015, AFMGM mengizinkan ABIF untuk terus menjadi komite kerja yang fokus memfasilitasi implementasi integrasi perbankan serta inisiatif untuk memperkuat kerangka peraturan dan stabilitas sistem keuangan di kawasan. Kelompok Kerja ABIF telah menyelesaikan penandatanganan tiga perjanjian ABIF di antara negara anggota dan mendirikan dua *qualified ASEAN banks* (QABs) di Indonesia (CIMB dan Maybank). Kelompok kerja ini juga telah mengembangkan peta jalan untuk meningkatkan transparansi peraturan, standar, dan koherensi dengan kompilasi praktik dan persyaratan berbagi data Lintas Negara negara anggota ASEAN.

Kelompok kerja berikutnya, bernama Forum Asuransi ASEAN (ASEAN Insurance Forum/AIFo), dibentuk pada tahun 2011 demi memfasilitasi kolaborasi antara kelompok kerja FSL dan AIRM. Sejalan dengan itu, juga memanfaatkan sektor swasta untuk membantu mencapai kemajuan signifikan dalam integrasi asuransi ASEAN.

AIFo telah menerbitkan buku pegangan untuk asuransi di kawasan ASEAN yang menawarkan asuransi Lintas Negara laut, penerbangan, dan barang dalam transit (*marine, aviation, and goods in transit/MAT*) pada tahun 2019. Buku pegangan ini berfungsi sebagai referensi industri tentang definisi MAT, kerangka peraturan, dan prosedur untuk menawarkan asuransi MAT Lintas Negara, serta mekanisme perlindungan konsumen di negara-negara anggota ASEAN.

Berikutnya, kelompok kerja Inklusi Keuangan (Financial Inclusion/FINC) didirikan pada tahun 2015 untuk mengoordinasikan inisiatif demi memajukan inklusi keuangan di ASEAN melalui kolaborasi erat dengan komite kerja dan kelompok kerja terkait. Badan ini juga diberi mandat untuk berfungsi sebagai platform berbagi pengalaman, keahlian, dan informasi negara guna memfasilitasi negara anggota untuk mengembangkan atau meningkatkan strategi dan inisiatif inklusi keuangan nasional mereka.

Kelompok kerja FINC telah menerbitkan beberapa *guidance notes*, antara lain, (1) Pengembangan Kerangka Pemantauan dan Evaluasi untuk Inklusi Keuangan; (2) Layanan Keuangan Digital; (3) Edukasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen; (4) Strategi Inklusi Keuangan

Nasional; serta (5) Laporan Memajukan Inklusi Keuangan Digital di ASEAN.

Adapun kelompok kerja Sistem Pembayaran dan Penyelesaian (Payment and Settlement Systems/PSS) didirikan pada tahun 2010 untuk mempersiapkan PSS negara anggota dalam menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN. Hal itu dilakukan melalui pembuatan kajian dan rekomendasi kebijakan untuk pengembangan PSS serta kerja sama dan harmonisasi PSS ASEAN.

Kelompok kerja PSS telah menyelesaikan pemindaian lingkungan dari sistem pembayaran ritel *real time* di negara anggota ASEAN. Selain itu, kelompok kerja ini juga telah menyelesaikan Kerangka Kebijakan Pembayaran ASEAN untuk Pembayaran Ritel *Real time* Lintas Negara dan Pedoman Penerapannya.

Kelompok kerja terbaru adalah Komite Koordinasi Lintas Sektor ASEAN untuk Pembayaran dan Asuransi Risiko Bencana (ASEAN Cross-Sectoral Coordinating Committee on Disaster Risk Financing and Insurance/ADRFI). Dibentuk pada tahun 2013, platform koordinasi ini menjadi wadah bagi Pertemuan Deputy Keuangan dan Bank Sentral ASEAN (AFCDM), AIRM, dan Komite Manajemen Bencana ASEAN (ASEAN Committee of Disaster Management/ACDM) untuk mengimplementasikan Peta Jalan DRFI ASEAN.

Peta jalan ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas individu negara anggota dan kawasan untuk secara efektif mengelola dampak bencana serta meningkatkan ketahanan finansial terhadap bencana. Peta jalan juga ditujukan untuk mendorong kerja sama regional dalam meningkatkan ketahanan bencana dan iklim.

Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023: "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth"

Indonesia menerima estafet Keketuaan ASEAN dari Kamboja dan menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2023. Sebagai ketua, Indonesia berfokus memperkuat ASEAN menjadi kawasan ekonomi yang tumbuh cepat, inklusif, dan berkelanjutan. Indonesia juga memiliki tujuan untuk memperkuat kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN agar mampu menjawab tantangan 20 tahun ke depan. Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023 mengangkat tema "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth".

ASEAN matters bermakna bahwa Indonesia ingin menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi masyarakat ASEAN dan dunia. ASEAN berperan penting tidak hanya bagi negara-negara di dalam kawasan, tetapi juga bagi dunia. Baik berperan sentral sebagai motor perdamaian maupun kesejahteraan kawasan.

Sebagai ketua pada 2023, Indonesia bertekad mengawal langkah-langkah menuju ASEAN 2045, yang perlu senantiasa lebih adaptif, responsif, dan kompetitif. Semua itu harus diperjuangkan dengan *ASEAN way* atau cara ASEAN yang sejalan dengan semangat kerja sama dan implementasi prinsip Piagam ASEAN.

Terkait tema ketekuaan Indonesia, *epicentrum of growth* bermakna bahwa Indonesia ingin menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan dan dunia. Untuk itu, Indonesia bertujuan memperkuat pemulihan ekonomi dan menjadikan Asia Tenggara sebagai mesin pertumbuhan dunia yang berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi ASEAN hampir selalu berada di atas rata-rata pertumbuhan dunia. Untuk menopang pertumbuhan berkelanjutan, kerja sama di ASEAN akan terus ditingkatkan, khususnya di bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, kesehatan, dan stabilisasi keuangan.

Pada tahun 2023 ini, pertumbuhan perekonomian global masih menunjukkan sinyal pelemahan seiring dengan tantangan ekonomi global yang masih membayangi. Oleh karena itu, Indonesia bersama negara anggota ASEAN perlu mengambil langkah kolektif dalam memperkuat kolaborasi dan kerja sama.

Langkah kolektif itu diambil melalui tiga *strategic thrust*, yakni membangun kembali pertumbuhan, konektivitas, dan daya saing baru di kawasan (*recovery-rebuilding*); mempercepat transformasi dan partisipasi ekonomi digital yang inklusif (*digital economy*); serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan untuk masa depan yang kokoh (*sustainability*).

Peran ASEAN sangatlah penting dalam mengatasi tantangan ekonomi yang ada. Melalui penguatan kerja sama dalam kerangka tiga *strategic thrust* tersebut, ASEAN diharapkan dapat melangkah bersama sebagai episentrum pertumbuhan guna menghadapi berbagai tantangan, risiko dan masalah dunia bersama.

Penetapan *strategic thrust* pertama, *recovery-rebuilding*, bertujuan

untuk memulihkan pertumbuhan regional, konektivitas, dan daya saing baru. *Strategic thrust* ini berangkat dari isu global terkait pertumbuhan pascapandemi, pemulihan ekonomi inklusif, dan daya saing regional yang sedang menjadi pekerjaan utama negara-negara ASEAN sebagai upaya memulihkan dan membangun kembali perekonomian negaranya.

Isu tersebut juga merupakan lanjutan dari agenda prioritas jalur integrasi keuangan dalam Presidensi G20 Indonesia 2022 terkait strategi keluar untuk mendukung pemulihan dan mengatasi efek luka dalam mendukung pertumbuhan masa depan. Dalam aspek pemulihan, terdapat dua agenda G20 yang kembali diusung pada pembahasan di lingkup regional ASEAN, yaitu penguatan bauran kebijakan (*policy mix*) serta pemanfaatan mata uang lokal (*local currency*).

Secara umum, pembahasan bauran kebijakan dalam forum internasional G20 maupun ASEAN turut melibatkan organisasi internasional, antara lain Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank for International Settlements (BIS). Dibandingkan dengan pembahasan dalam G20, dinamika pembahasan mata uang lokal dipandang lebih relevan untuk dibahas di ASEAN dalam rangka menjaga stabilitas dan resiliensi. Hal ini disebabkan dalam lingkup regional, negara anggota memiliki karakteristik yang relatif sama.

Strategic thrust kedua, *digital economy*, bertujuan untuk mengakselerasi transformasi dan partisipasi ekonomi digital yang inklusif. *Strategic thrust* ini berlatar belakang isu yang sedang gencar mengenai peningkatan digitalisasi, revolusi industri, dan disrupsi rantai pasok. Isu ini juga melanjutkan agenda prioritas jalur integrasi keuangan dalam Presidensi G20 Indonesia 2022 terkait sektor finansial serta sistem pembayaran di era digital dan inklusi keuangan.

Terkait dengan upaya digitalisasi, G20 menekankan pada upaya tindak lanjut Peta Jalan G20 untuk Peningkatan Pembayaran Lintas Negara (G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments). Berikutnya, implementasi pembayaran lintas negara di ASEAN diejawantahkan dalam konektivitas pembayaran regional (*regional payment connectivity/RPC*).

Strategic thrust ketiga, *sustainability*, bertujuan mempromosikan ekonomi berkelanjutan dalam rangka mewujudkan masa depan yang tangguh. Isu mengenai transisi energi, ekonomi berkelanjutan,

keuangan berkelanjutan, dan perubahan iklim, yang melatarbelakangi *strategic thrust* ini, juga sejalan dengan keuangan berkelanjutan dan pajak internasional pada agenda prioritas jalur integrasi keuangan dalam Presidensi G20 Indonesia 2022.

Ketiga *strategic thrust* tersebut merupakan tema besar untuk semua pilar ASEAN, yaitu Pilar Politik-Keamanan, Pilar Sosial-Budaya, dan Pilar Ekonomi. Jalur integrasi keuangan, termasuk area bank sentral, merupakan bagian dari Pilar Ekonomi. Sebelum masuk ke jalur integrasi keuangan, alangkah baiknya apabila pembahasan dimulai dengan memahami sekilas tentang Pilar Ekonomi, termasuk agenda prioritas ekonomi yang diprioritaskan.

Sekilas tentang Pilar Ekonomi

Pilar Ekonomi dipimpin oleh Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community Council/AECC). Selama Ketekuaan Indonesia, AECC dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Di bawah kepemimpinan Indonesia, terdapat 16 PEDs yang menjadi fokus dari Pilar Ekonomi, terbagi ke dalam tiga *strategic thrust*.

Di bawah *strategic thrust recovery-rebuilding* terdapat enam PEDs yang menjadi fokus, yaitu:

- a. ASEAN Services Facilitation Framework (ASF);
- b. Deklarasi para pemimpin ASEAN tentang penguatan ketahanan pangan dan gizi sebagai respons terhadap krisis;
- c. Penandatanganan The 2nd Protocol to Amend the Agreement Establishing the ASEAN–Australia–New Zealand Free Trade Area (AANZFTA);
- d. Pembentukan unit pendukung RCEP di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Indonesia;
- e. ASEAN Framework on Industrial Project-Based Initiative;
- f. Mendorong pemulihan, menjamin stabilitas, ketahanan ekonomi dan keuangan, yang merupakan PEDs jalur integrasi keuangan. PEDs jalur integrasi keuangan tersebut diharapkan dapat menghasilkan ketangguhan sektor keuangan di seluruh wilayah serta optimalisasi perdagangan dan investasi.

16 AEC Priority Economic Deliverables 2023-Indonesia



Recovery and Rebuilding
Rebuilding regional growth through
connected markets and new competitiveness

	ASEAN Services Facilitation Framework (ASFF)
	Forestering Recovery and Ensuring Economic and Financial Stability and Resilience
	ASEAN Leader's Declaration on Strengtening Food Security
	Signing of the 2nd Protocol to Amend the Agreement Establishing the AANZFTA
	Establishment of the RCEP Suport Unit in the ASEAN Secretariat, Jakarta, Indonesia
	ASEAN Framework on Industrial Project-Based Initiative



Digital Economy
Accelerating inclusive digital economy
transformation and participation

	Full Implementation of Electronic Certificate of Origin (e-Form D) through the ASEAN Single Window
	Advancing Payment Connectivity, Promoting Literacy and Inclusion to Support Inclusive Economic Growth, and Strengthening Resilience in the Financial Sector
	Leaders' Statement to Develop the ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA)
	Regulatory Pilot Space (RPS) to Facilitate Cross-Border Digital Data Flows to Enabling Self-Driving Car in ASEAN
	ASEAN Frame work on Logistic for Digital Economy Supply Chain for Rural Area (Last-Mile Delivery)



Sustainability
Promoting sustainable economic growth
for a resilient future

	Roadmap of ASEAN Harmonised Standartds to Support SDGs Implementation*
	Development of the Electric Vehicle (EV) Ecosystem
	Development of ASEAN Blue Economy Framework
	Promoting Transition Finance to Support Sustainable Finance and Green Economy
	Declaration on Sustainable Energy Security through Interconnectivity

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

Gambar 1.2 AEC Priority Economic Deliverables 2023 - Indonesia.

Untuk *strategic thrust digital economy*, terdapat lima PEDs, yaitu:

- a. Implementasi Penuh Electronic Certificate of Origin (e-Form D) through the ASEAN Single Window;
- b. Leaders' Statement to Develop the ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA);
- c. Regulatory Pilot Space (RPS) guna memfasilitasi aliran data digital Lintas Negara untuk memungkinkan mobil *self-driving* di ASEAN;
- d. ASEAN Framework on Logistics for Digital Economy Supply Chain for Rural Area (Last-Mile Delivery); dan
- e. Meningkatkan konektivitas pembayaran, mendorong literasi dan inklusi keuangan digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, serta memperkuat ketahanan di sektor keuangan, yang merupakan PEDs jalur integrasi keuangan. Hasil yang diharapkan dari PEDs jalur integrasi keuangan dimaksud adalah konektivitas digital yang lancar, inklusivitas keuangan digital, dan ekosistem ekonomi digital yang terharmonisasi.

Untuk *strategic thrust* terakhir, yaitu *sustainability*, Pilar Ekonomi memiliki lima PEDs, yaitu:

- a. Peta Jalan Harmonisasi Standar ASEAN untuk mendukung implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs);
- b. Pengembangan ekosistem kendaraan listrik;
- c. Pengembangan ASEAN Blue Economy Framework;
- d. Deklarasi Sustainable Energy Security through Interconnectivity; dan
- e. Mempromosikan pembiayaan transisi untuk mendukung keuangan berkelanjutan dan ekonomi hijau, yang merupakan PEDs jalur integrasi keuangan.

Agenda Prioritas Ekonomi di Jalur Integrasi Keuangan

Berangkat dari elaborasi dan analisis lingkungan strategis tren perkembangan global, pada jalur keuangan disepakati untuk melanjutkan upaya yang telah berjalan dalam Presidensi G20 Indonesia. PEDs jalur integrasi keuangan memiliki keterhubungan

yang cukup besar dengan agenda prioritas G20. Agenda prioritas G20 tersebut meliputi normalisasi kebijakan (*exit strategy*) untuk mendukung pemulihan, penanganan dampak berkepanjangan akibat pandemi, sistem pembayaran di era digital, keuangan berkelanjutan, inklusi keuangan, dan yang terakhir perpajakan internasional.

Keenam agenda ini kembali diangkat dalam PEDs dengan lingkup regional yang dibagi ke dalam tiga *strategic thrust*. Untuk menerjemahkan PEDs jalur integrasi keuangan tersebut menjadi suatu hasil konkret, dibentuk berbagai inisiatif di jalur integrasi keuangan, dengan penjabaran sebagai berikut.

a. Recovery-Rebuilding: Memajukan Pemulihan, Memastikan Stabilitas Ekonomi dan Keuangan, serta Resiliensi

Poin pertama dalam PEDs ini menyoroti kesiapsiagaan kesehatan masyarakat setelah terjadinya pandemi Covid-19. Pandemi telah menggarisbawahi perlunya tindakan kolektif untuk secara signifikan meningkatkan investasi dan dukungan guna memperkuat kapasitas negara-negara ASEAN dalam mencegah, mempersiapkan, dan menanggapi pandemi berikutnya.

Pandemi ini telah menunjukkan bahwa berinvestasi dalam pencegahan, persiapan, dan respons (PPR) adalah hal baik pada publik global yang bermanfaat bagi setiap negara. Menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa investasi yang diperlukan dalam PPR dilakukan secara mendesak dan berkelanjutan sehingga negara-negara dan kawasan lebih siap menghadapi pandemi berikutnya.

Poin kedua, infrastruktur keuangan, berkaitan dengan tantangan terkait pandemi yang telah menyebabkan terganggunya aliran investasi dalam infrastruktur. Oleh karena itu, saat ini adalah waktu yang tepat dan relevan bagi ASEAN di bawah sektor keuangan untuk menegaskan kembali komitmen bahwa ASEAN harus memanfaatkan momentum pemulihan untuk mempercepat pengembangan infrastruktur dan pembiayaan di ASEAN.

Poin ketiga, kerja sama pajak dan bea cukai, berhubungan dengan ASEAN yang mengalami berbagai tantangan dalam administrasi dan kepatuhan perpajakan, termasuk implementasi

kerja sama perpajakan di kawasan yang sejalan dengan standar perpajakan internasional. Pendapatan pajak dari setiap negara anggota ASEAN telah mengalami penurunan yang signifikan. Hal itu berdampak pada ruang fiskal yang semakin terbatas selama era pandemi.

Sementara itu, sangat penting bagi setiap negara anggota ASEAN untuk menjaga ketersediaan pendapatan yang memadai guna membiayai pembangunan ekonominya pascapandemi, yang juga berdampak pada kondisi ekonomi regional. Oleh karena itu, diskusi perpajakan internasional yang lebih mendalam dan kerja sama perpajakan yang lebih erat di ASEAN perlu terus digalakkan.

Poin keempat membawa tema "Mendorong Pemulihan dan Pembangunan Kembali melalui Kombinasi Kebijakan dan Strategi Mengatasi Efek Luka". Memastikan bauran kebijakan makroekonomi yang solid menjadi hal yang penting. Terkait hal itu, berbagai otoritas beroperasi secara efektif bersama-sama dalam menjalankan mandat masing-masing.

Kebijakan yang akan datang harus mengidentifikasi strategi untuk mengatasi dampak berkepanjangan (*scarring effect*) dan mampu memberikan pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Untuk menghadapi tantangan global saat ini, diperlukan respons kebijakan yang menggunakan lebih dari satu instrumen kebijakan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan pengembangan Kerangka Kerja Kebijakan Terintegrasi (Integrated Policy Framework/IPF) dari IMF dan Kerangka Kerja Stabilitas Makrofinansial (Macro-Financial Stability Frameworks/MFSF) dari BIS.

Poin kelima berjudul "Mendorong Operasionalisasi Transaksi dalam Mata Uang Lokal (LCT) untuk Meningkatkan Stabilitas Makroekonomi dan Keuangan di Wilayah ASEAN". Hal ini diimplementasikan melalui pembuatan Kerangka Kerja Penyelesaian Mata Uang Lokal ASEAN yang bertujuan untuk mendorong penggunaan mata uang lokal di kawasan ASEAN. Kerangka digunakan untuk perdagangan Lintas Negara, penyelesaian investasi, dan kegiatan Lintas Negara lainnya, seperti pendapatan dan transfer.

Pembentukan jaringan transaksi mata uang lokal (*local*

currency transaction/LCT) di antara negara anggota ASEAN akan menjadi dasar untuk integrasi keuangan ASEAN yang lebih lanjut. Pada gilirannya, hal itu akan meningkatkan konektivitas dan memperkuat ketahanan terhadap guncangan eksternal.

- b. *Digital Economy*: Memajukan Konektivitas Pembayaran; Mempromosikan Literasi Keuangan Digital dan Inklusi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif; dan Memperkuat Ketangguhan dalam Sektor Keuangan

Poin pertama ini bertujuan untuk memajukan konektivitas pembayaran. Terdapat peluang untuk memperluas kerja sama bilateral dalam konektivitas pembayaran di ASEAN secara multilateral. Dalam hal ini, konektivitas pembayaran regional (*regional payment connectivity/RPC*) menjadi bagian dari upaya memperkuat integrasi ekonomi regional. Perjanjian multilateral dapat mempersingkat rantai pemrosesan dan memperbesar manfaat dari pembayaran Lintas Negara.

Poin kedua membawa topik "Tindakan Kolaboratif terhadap Isu-isu Terkini Ekonomi Digital". Kemajuan teknologi dalam lanskap inklusi keuangan melalui layanan digital dapat meningkatkan dan memperdalam sektor keuangan. Pada saat yang sama, juga mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap produk keuangan formal, terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan secara finansial. Sangat penting untuk memastikan bahwa pengembangan dan percepatan inklusi keuangan melalui ekonomi digital sejatinya memang bersifat inklusif untuk semua segmen.

Poin ketiga dalam PEDs ini adalah inklusi keuangan digital. ASEAN berkomitmen untuk memperkuat inklusi keuangan melalui layanan keuangan digital dan konektivitas pembayaran regional. Literasi keuangan dan digital sangat penting untuk memastikan manfaat dari inisiatif keuangan digital yang dibagikan kepada masyarakat di ASEAN.

- c. *Sustainability*: Memajukan Pembiayaan Transisi untuk Mendukung Keuangan Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau

Implementasi *strategic thrust* ini berkaitan dengan keuangan berkelanjutan. ASEAN fokus berupaya mendorong instrumen keuangan berkelanjutan, khususnya dalam ACMF dan kelompok kerja CMD. Untuk pencapaian tahun 2023, keuangan berkelanjutan merupakan agenda strategis yang terus diperjuangkan oleh ASEAN untuk dapat berkontribusi dalam diskusi global.

Agenda ini juga sangat penting sebagai kerja sama regional dalam memfasilitasi kebutuhan dan upaya individu negara anggota ASEAN dalam upaya mencapai tujuan dari Perjanjian Paris, SDGs, dan target emisi nol bersih (*net-zero emission*).

Agenda Prioritas Ekonomi di Bawah Bank Sentral

Dari penjelasan singkat tiap-tiap inisiatif di atas, terdapat agenda prioritas di bawah ranah bank sentral, termasuk *concrete deliverables* yang diinisiasi Bank Indonesia, yaitu bauran kebijakan, LCT, RPC, dan inklusi keuangan digital. Semua inisiatif tersebut telah selesai dan dilaporkan pada pertemuan AFMGM Ke-10 yang diselenggarakan pada 25 Agustus 2023.

Berikut ini penjelasan yang lebih detail:

- a. *Recovery-Rebuilding*: Memajukan Pemulihan, Memastikan Stabilitas Ekonomi dan Keuangan, serta Resiliensi

Tema pertama yang dibawa adalah "Memastikan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui *Policy Mix* dan Strategi Mengatasi Efek Luka".

Meskipun secara umum disepakati bahwa pandemi telah meninggalkan efek luka, tingkat efek luka yang ada kemungkinan akan bervariasi di setiap negara. Efek luka yang lebih parah terjadi di negara-negara *emerging markets* (EMs) dan negara berpendapatan rendah (*low income countries/LICs*).

Hal itu disebabkan keterbatasan ruang kebijakan dan kondisi yang sudah ada sebelum pandemi. Kebijakan yang akan datang harus mengidentifikasi strategi untuk mengatasi efek luka dan menyediakan pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.

Negara-negara ASEAN telah mengimplementasikan kebijakan

luar biasa untuk meredam dampak langsung pandemi dan mendukung pemulihan. Dalam mengimplementasikan dukungan kebijakan, negara-negara secara umum sepakat bahwa stimulus kebijakan perlu ditarik dengan tepat selama masa pemulihan sembari tetap siap untuk bereaksi terhadap situasi ekonomi yang terus berkembang.

Pada tahap ini, memastikan keberhasilan bauran kebijakan makroekonomi yang solid menjadi hal yang penting. Pada bauran kebijakan ini, berbagai otoritas beroperasi secara efektif bersama-sama dalam menjalankan mandat masing-masing.

Banyak negara, termasuk di ASEAN, menggunakan berbagai alat kebijakan untuk kondisi yang berbeda dalam menanggapi guncangan global. Tantangan global yang saat ini dihadapi memerlukan respons kebijakan yang menggunakan lebih dari satu instrumen kebijakan sehingga membutuhkan penguatan pengembangan IPF dan MFSF.

Tiga sasaran yang ingin dicapai meliputi pemahaman situasi saat ini, terkait normalisasi kebijakan, dan diskusi kebijakan untuk menjaga momentum pemulihan dan pembangunan kembali. Sasaran kedua adalah terkait penanganan aspek yang paling relevan dari *G20 Presidency Note* tentang "Policy Setting on Exit Strategy to Support Recovery and Addressing Scarring Effect to Secure Future Growth" bagi negara-negara ASEAN.

Terakhir, selama Keketuaan ASEAN di Indonesia, kegiatan berbagi informasi dan pengetahuan dapat diinisiasi serta dilakukan diskusi/dialog lebih lanjut, baik pada tingkat tinggi (*high level*) maupun tingkat teknis (*technical level*). Kegiatan itu dapat didukung oleh BIS/IMF terkait dengan *stocktaking* bauran kebijakan negara anggota ASEAN dalam menanggapi kondisi keuangan global yang ketat.

Output berkaitan dengan kegiatan berbagi informasi dan pengetahuan tersebut meliputi diskusi pengawasan risiko global dan dampak berkepanjangan (*global risk monitoring and scarring effect*); mengundang ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) untuk menyampaikan tren arus modal yang muncul dari normalisasi kebijakan (*exit strategy*) negara maju; presentasi Bank for International Settlements (BIS) terkait survei atas perangkat

bauran kebijakan makroekonomi dan diskusi terkait bauran kebijakan untuk mencapai pertumbuhan dan stabilitas di kawasan. Selain itu, dibuat pula diskusi level teknis terkait implementasi dari IPF/MFSF dan Dialog Kebijakan Tingkat Tinggi tentang Bauran Kebijakan Makroekonomi (High-Level Policy Dialogue on Macroeconomic Policy Mix).

Tema berikutnya adalah "Mendorong Operasionalisasi Transaksi dalam Mata Uang Lokal (LCT) untuk Meningkatkan Stabilitas Makroekonomi dan Keuangan di Wilayah ASEAN".

Negara anggota ASEAN mengembangkan Pedoman Kerangka Kerja Sama Penyelesaian Mata Uang Lokal atau Guideline on ASEAN Local Currency Settlement (LCS) Cooperation Framework pada tahun 2019, sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengurangi ketergantungan pada dollar AS, memperkuat keterkaitan global, dan mengurangi risiko terkait. Kerangka LCS ASEAN bertujuan mendorong penggunaan mata uang lokal dalam wilayah ASEAN untuk perdagangan Lintas Negara, penyelesaian investasi, dan kegiatan Lintas Negara lainnya, seperti pendapatan dan transfer. Selain itu, pandemi juga membuat inisiatif penggunaan penyelesaian mata uang lokal untuk transaksi perdagangan dan investasi ASEAN menjadi lebih penting.

Mengingat manfaat potensial LCS dan penggunaannya masih terbatas dalam transaksi internasional oleh negara-negara anggota ASEAN, sangat diperlukan peningkatan strategi untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi antarnegara ASEAN. Bidang kerja sama dalam kerangka yang disempurnakan itu disebut LCT.

Kerangka transaksi dengan mata uang lokal ini meliputi pasar uang dan valuta asing serta pembayaran Lintas Negara. Dalam hal ini, pengembangan kerangka LCT berkaitan dengan inisiatif pembayaran Lintas Negara untuk memastikan sinergi dalam mempromosikan penggunaan mata uang lokal di antara negara-negara ASEAN.

Pembentukan jaringan LCT di antara negara anggota ASEAN akan menjadi dasar bagi integrasi keuangan ASEAN lebih lanjut. Pada gilirannya, hal ini akan meningkatkan konektivitas dan memperkuat ketahanan terhadap guncangan eksternal.

Tiga sasaran yang harus dicapai adalah (a) mendorong operasionalisasi LCT untuk meningkatkan stabilitas makroekonomi dan keuangan di kawasan; (b) optimalisasi LCT melalui peningkatan likuiditas mata uang lokal dan efisiensi transaksi; (c) menghasilkan pandangan para ahli tentang operasionalisasi LCT sebagai strategi diversifikasi mata uang untuk mengurangi kerentanan/guncangan ekonomi global di masa depan. Selain itu, juga menjawab tantangan terkait ketergantungan yang tinggi pada dollar AS dalam perdagangan internasional.

Output tersebut meliputi pembentukan Satuan Tugas Transaksi Mata Uang Lokal ASEAN (ASEAN Local Currency Transaction Task Force) dan penyusunan Prinsip-prinsip Tingkat Tinggi tentang Kerangka Kerja Transaksi Mata Uang Lokal (High-Level Principles on LCT Framework).

- b. *Digital Economy*: "Memajukan Konektivitas Pembayaran, Mempromosikan Literasi Keuangan Digital dan Inklusi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, dan Memperkuat Ketangguhan dalam Sektor Keuangan"

Poin pertama dari PEDs ini adalah untuk memajukan konektivitas pembayaran. Sistem pembayaran di ASEAN telah mengalami perubahan signifikan selama satu dekade terakhir dengan adanya inovasi, perkembangan teknologi, dan munculnya perspektif pembayaran Lintas Negara yang efisien. Selama bertahun-tahun, negara anggota ASEAN telah meluncurkan beberapa inisiatif untuk mempromosikan interoperabilitas dan konektivitas sistem pembayaran ritel dan grosir, termasuk melalui *cross-border QR payment linkage*.

Terdapat peluang untuk memperluas kerja sama bilateral dalam konektivitas pembayaran di ASEAN secara multilateral, sebagai bagian dari upaya memperkuat integrasi ekonomi kawasan. Perjanjian multilateral dapat mempersingkat rantai pemrosesan dan memperbesar manfaat pembayaran Lintas Negara. Dalam konteks ini, ASEAN harus memanfaatkan kesatuan kawasan untuk mempercepat inisiatif sistem pembayaran Lintas Negara. Tidak hanya meningkatkan perdagangan dan rantai nilai intra-ASEAN,

tetapi juga menguntungkan masyarakat secara inklusif, terutama UMKM, pekerja migran, dan wisatawan.

Hal ini bertujuan untuk memajukan konektivitas pembayaran ASEAN, termasuk hubungan *cross border payment linkage* (QR dan *fast payment*). Oleh karena itu, dibentuklah Peta Jalan Konektivitas Pembayaran Regional (Regional Payment Connectivity/RPC Roadmap) terkait rencana perluasan peserta Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama RPC (Memorandum of Understanding on Cooperation on RPC).

Poin kedua diimplementasikan dalam bentuk "Tindakan Kolaboratif terhadap Isu-isu Terkini Ekonomi Digital". Jalur alternatif untuk layanan pembayaran digital semakin banyak dieksplorasi dalam konteks bank sentral menerbitkan mata uang digital mereka sendiri. Mata uang digital yang diterbitkan bank sentral atau *central bank digital currency* (CBDC) dapat mencakup opsi dan fitur yang secara khusus dirancang untuk melakukan pembayaran digital guna mengurangi inefisiensi dengan mempersingkat rantai nilai pembayaran.

ASEAN dapat memanfaatkan peluang ini untuk membahas CBDC sebagai isu utama, meninjau perkembangan CBDC di kawasan, mengkaji dampak kebijakan bank sentral, dan menumbuhkan pemahaman bersama serta kemungkinan inisiatif, termasuk eksperimen teknologi untuk kawasan. Selain itu, juga mengeksplorasi lebih lanjut penggunaan CBDC untuk mendukung konektivitas pembayaran regional.

Di sisi lain, pesatnya perkembangan kemajuan teknologi dan perluasan dunia maya telah meningkatkan cakupan dan tingkat keparahan potensi serangan siber. Kebijakan harus dibuat untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara optimalisasi manfaat inovasi digital dan mitigasi risiko untuk mendorong inovasi teknologi dan terus menuai nilai darinya. Diskusi lebih lanjut serta peningkatan kapasitas untuk kawasan ini penting dilakukan, termasuk pengembangan perangkat (*toolkit*) dan standar pemecahan masalah untuk serangan siber.

Jalur kritis lainnya untuk menerapkan digitalisasi industri keuangan adalah kehadiran mata uang digital. Meningkatnya paparan aset kripto saat ini belum dibarengi dengan kerangka

regulasi yang memadai untuk mengatur aktivitas dan layanan aset kripto di wilayah tersebut.

Diskusi mengenai aset kripto di ASEAN masih perlu ditingkatkan karena belum sejalan dengan perkembangannya yang pesat. Negara-negara ASEAN harus secara progresif mendiskusikan pemanfaatan organisasi internasional untuk mencapai pemahaman bersama tentang regulasi dan pengawasan aset kripto.

Terkait isu tersebut, terdapat empat sasaran, yaitu:

1. Pembahasan CBDC sebagai *frontier issue* di kawasan;
2. Peninjauan menyeluruh terhadap Kerangka Integrasi Perbankan ASEAN (ASEAN Banking Integration Framework/ABIF) untuk secara bertahap menggabungkan perkembangan digitalisasi. Inisiatif ini akan dimulai dengan mengidentifikasi pandangan anggota mengenai proposal untuk meningkatkan atau memperluas ABIF, termasuk pengalaman dan tantangan yang dihadapi;
3. Terkait Platform Ketahanan Siber dan Berbagi Informasi (Cyber Resilience and Information Sharing Platform/CRISP), penting dibahas pengembangan perangkat keamanan siber dan standar penanganan untuk serangan siber.
4. Pembahasan regulasi dan pengawasan terkait aset kripto dalam suatu dialog kebijakan di forum ASEAN ataupun acara pendukung.

Keempat sasaran tersebut dapat digali lebih jauh dan menghasilkan lima *output* yang berkaitan, yakni:

1. Diskusi awal terkait interoperabilitas CBDC;
2. Metrik untuk mencapai target kuantitatif Dewan Stabilitas Keuangan (Financial Stability Board/FSB) dalam mempromosikan interoperabilitas lintas negara;
3. Diskusi tentang pengembangan perangkat keamanan siber dan standar pemecahan masalah untuk serangan siber di bawah Platform Ketahanan Siber dan Berbagi Informasi (Cyber Resilience and Information Sharing Platform/CRISP);
4. Laporan Kemajuan Pedoman Komite Kerja Kerangka Kerja

- Integrasi Perbankan ASEAN (Working Committee ASEAN Banking Integration Framework (WC-ABIF) untuk menggabungkan aspek digitalisasi;
5. Diskusi untuk mencapai pemahaman bersama tentang pengaturan dan pengawasan aset kripto.

Tema ketiga yang berhubungan dengan inklusi keuangan digital menunjukkan komitmen ASEAN untuk memperkuat inklusi keuangan melalui layanan keuangan digital dan konektivitas pembayaran regional. Literasi keuangan dan digital sangat penting untuk memastikan manfaat dari inisiatif keuangan digital yang dibagikan kepada masyarakat di ASEAN.

Hal ini dapat ditranslasikan ke dalam dua sasaran. Pertama, mempromosikan inklusi dan literasi keuangan digital di ASEAN dengan memasukkan aspek-aspek yang relevan dari praktik terbaik internasional, termasuk The G20 Financial Inclusion Framework in Harnessing Digitalization to Increase Productivity, Sustainable and Inclusive Economy for Women, Youth, and MSMEs. Hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan negara anggota ASEAN.

Sasaran ini direalisasikan dengan pelaksanaan Festival Inklusi Keuangan Digital (Digital Financial Inclusion Festival/Festival DFI) yang mencakup seminar tentang literasi keuangan digital, pengenalan inklusi keuangan digital, penggunaan perangkat literasi keuangan digital, dan *showcase platform*. Selain itu, inklusi keuangan digital ASEAN untuk mendukung inklusi ekonomi juga diupayakan dengan memperkuat literasi keuangan digital melalui Pedoman Implementasi Penguatan Literasi Keuangan Digital di ASEAN (Implementation Guideline to Strengthen Digital Financial Literacy in ASEAN).

- c. *Sustainability*: "Memajukan Pembiayaan Transisi untuk Mendukung Keuangan Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau"

Poin ini membahas keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*). Mengatasi perubahan iklim menuju keberlanjutan adalah salah satu kekuatan struktural paling signifikan yang membentuk

ekonomi global. Dampak stabilitas makroekonomi dan keuangan dari perubahan iklim dapat berasal dari risiko fisik ataupun risiko transisi. Selain itu, bank sentral didorong untuk memberikan contoh, dengan memasukkan pertimbangan keberlanjutan dalam kebijakan mereka, serta memfasilitasi pembiayaan transisi yang terjangkau dan adil.

Di ASEAN, tantangan dalam agenda perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan telah menunjukkan kebutuhan akan pembiayaan. Setiap negara anggota ASEAN perlu bertindak signifikan untuk merumuskan dan mengembangkan mekanisme pembiayaan berkelanjutan.

Salah satu jalur penting lainnya adalah berperan dalam memberikan insentif kepada lembaga keuangan agar berpartisipasi dalam pembiayaan berkelanjutan. Secara umum, otoritas keuangan dapat merancang insentif dan disinsentif terhadap sistem keuangan domestik dan regional—termasuk korporasi—untuk mendorong pengembangan keuangan berkelanjutan dan mencegah pembiayaan terhadap proyek-proyek yang tidak berkelanjutan.

Topik keuangan berkelanjutan dijabarkan ke dalam empat tujuan sebagai Rencana Aksi Implementasi (Plan of Action for Implementation).

1. Penyertaan kegiatan transisi dalam Standar Plus Versi 2 ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance;
2. Penampilan platform negara yang telah mengembangkan mekanisme transisi energi dalam peta jalan negara mereka untuk keuangan berkelanjutan;
3. Seminar internasional tentang mekanisme pembiayaan transisi energi dan pengembangan platform negara untuk pembiayaan transisi;
4. Diskusi dan Seminar Kebijakan tentang Penyelarasan Kebijakan-kebijakan untuk Transisi Iklim.

Tujuan-tujuan di atas telah ditindaklanjuti dengan memasukkan aspek aktivitas transisi dalam Standard Plus Versi 2 dari ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance. Selanjutnya, telah diadakan seminar internasional terkait mekanisme pembiayaan transisi

energi dan pengembangan platform negara untuk pembiayaan transisi. Selain itu, diskusi dan seminar kebijakan tentang risiko terkait iklim sukses diselenggarakan sebagai hasil dari poin *Sustainable Finance* tersebut.

Hasil Spesifik Ketekuaan Indonesia di ASEAN 2023 di Jalur Integrasi Keuangan

Bank Indonesia telah menginisiasi ASEAN Leaders' Declaration on Advancing Regional Payment Connectivity and Promoting Local Currency Transaction (ALD on RPC and LCT). Deklarasi ini kemudian didukung oleh AFMGM dan diadopsi oleh para pemimpin ASEAN di KTT Ke-42 di Labuan Bajo, 9-10 Mei 2023.

Terdapat lima poin utama di dalam deklarasi tersebut. Pertama, meningkatkan konektivitas pembayaran regional (*advancing RPC*) melalui pembayaran digital Lintas Negara yang saling terhubung di kawasan pada tahun 2025. Kedua, mendorong penggunaan mata uang lokal untuk transaksi ekonomi dan keuangan antarnegara anggota ASEAN.

Ketiga, melanjutkan eksplorasi kerja sama lebih lanjut dalam memajukan konektivitas pembayaran regional dan pemanfaatan LCT. Selanjutnya, melibatkan mitra eksternal ASEAN, organisasi internasional, dan sektor swasta untuk membangun kerja sama dan kemitraan dalam memajukan konektivitas pembayaran regional dan pemanfaatan LCT. Poin terakhir terkait dengan penugasan kepada para menteri keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN untuk mengawasi implementasi RPC dan LCT. Hal itu dilakukan melalui bantuan dan koordinasi erat dengan badan sektoral terkait lainnya.

Sesuai dengan penugasan para pemimpin negara ASEAN kepada AFMGM, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan akan mengawal implementasi RPC dan LCT di kawasan. ASEAN telah menyetujui pembentukan gugus tugas (Task Force on LCT) untuk membangun Kerangka Kerja LCT yang sejalan dengan Prinsip-prinsip Tingkat Tinggi tentang Kerangka Kerja LCT yang telah disepakati.

Selanjutnya, pada KTT Ke-43 yang diselenggarakan pada 5-7 September 2023, para pemimpin negara ASEAN sepakat untuk mengusung ALD on Epicentrum of Growth (ALD EoG). Deklarasi para pemimpin ASEAN yang dimaksud mencakup semua narasi terkait

prioritas Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023, termasuk *concrete deliverables* di ASEAN. Terdapat *concrete deliverables* terkait PEDs yang diprioritaskan Bank Indonesia yang dideklarasikan oleh para pemimpin negara.

Pertama, terkait bauran kebijakan. Para pemimpin negara ASEAN telah mengakui bahwa ketahanan makroekonomi dan stabilitas keuangan menjadi landasan bagi ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan. Para pemimpin menyadari pentingnya memperkuat bauran kebijakan makroekonomi ASEAN agar negara-negara anggota ASEAN dapat menggunakan semua alat kebijakan yang tersedia untuk menjamin stabilitas perekonomian kita. Para pemimpin negara ASEAN juga bertekad untuk memperkuat kapasitas dalam mengelola risiko stabilitas keuangan, memperdalam integrasi dan stabilitas keuangan regional, dan meningkatkan kesiapan respons regional terhadap ketidakstabilan makroekonomi dan tantangan sistem keuangan.

Kedua, terkait RPC dan LCT. Para pemimpin negara ASEAN menugaskan menteri keuangan dan gubernur bank sentral untuk mengembangkan Kerangka Kerja Transaksi Mata Uang Lokal ASEAN, dengan koordinasi erat di antara badan-badan sektoral terkait, untuk mendorong penggunaan mata uang lokal di kawasan. Selain itu, menteri keuangan dan gubernur bank sentral perlu mengawasi implementasi dan kemajuan konektivitas pembayaran regional, mendorong kerja sama lebih lanjut di bidang aset digital, serta memperkuat koordinasi makroekonomi regional, termasuk dengan Mitra Plus 3 mengenai kesiapan operasional Multilateralisasi Inisiatif Chiang Mai.

Ketiga, terkait inklusi keuangan. Para pemimpin menugaskan menteri perekonomian, menteri keuangan, dan gubernur bank sentral di ASEAN untuk terus memainkan peran advokasi dalam mendorong akses terhadap keuangan, layanan keuangan digital, dan literasi bagi UMKM. Tujuannya adalah untuk mendukung inklusi keuangan UMKM dan meningkatkan kolaborasi dalam penciptaan lingkungan kondusif bagi implementasi promosi bisnis inklusif. Inisiatif regional itu merupakan bagian dari Rencana Aksi Promosi Bisnis Inklusif di ASEAN.

Peran ASEAN dalam Perekonomian Global

Dalam lingkup global yang berkembang pesat, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berdiri sebagai wadah kolaborasi dan integrasi ekonomi di antara keberagaman negara-negara anggotanya. Membentang di sepuluh negara di Asia Tenggara, inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan pasar yang terintegrasi dalam memfasilitasi aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil.

Menilik kiprah MEA, dapat ditemukan sebuah perjalanan transformatif yang berupaya membuka potensi kawasan ini, mendorong pertumbuhan berkelanjutan, dan memperkuat posisinya sebagai pemain yang tangguh dan kompetitif dalam ekonomi global.

Berbagai peran ASEAN melalui MEA diwujudkan pada tiga area.

Pertama, kawasan ekonomi yang semakin kompetitif, inovatif, dan inklusif. Tujuan integrasi ekonomi ASEAN adalah untuk menciptakan kawasan ekonomi yang stabil, sejahtera, dan berdaya saing tinggi.

Tiga elemen inti di bawah kawasan kompetitif adalah kebijakan kompetisi, perlindungan konsumen, dan hak kekayaan intelektual. Melalui tiga elemen tersebut, negara-negara anggota ASEAN berkomitmen untuk memperkenalkan kebijakan dan undang-undang persaingan nasional untuk memastikan persaingan yang setara dan menginkubasi budaya persaingan usaha yang sehat demi meningkatkan kinerja ekonomi regional.

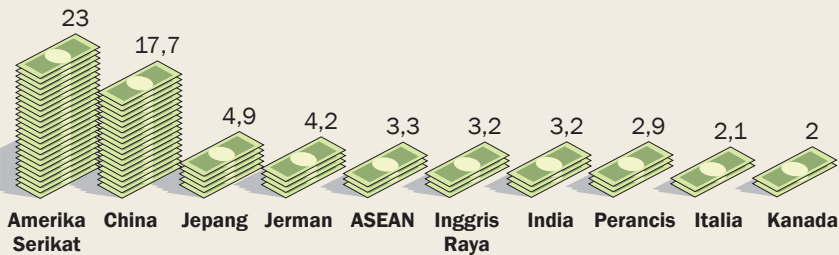
Kedua, peningkatan konektivitas dan pembangunan sektoral. Integrasi ekonomi regional di bawah MEA menuntut konektivitas yang lebih besar antarnegara anggota ASEAN dan di dalam negara. Transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, konektivitas energi, dan pariwisata adalah elemen kunci dari konektivitas fisik dan orang-ke-orang di kawasan ini.

Sektor lain, seperti pertanian, kehutanan, perikanan, ilmu

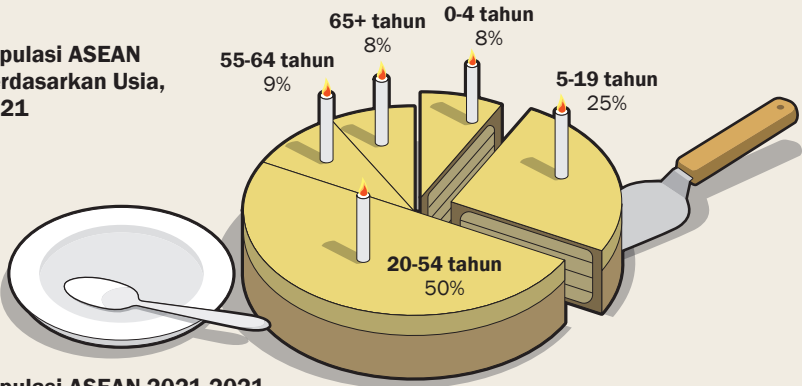
pengetahuan, dan teknologi juga turut memainkan peran penting dan saling melengkapi untuk mencapai pasar yang terintegrasi di bawah MEA. Oleh karena itu, ASEAN terus mendorong agar setiap elemen tersebut dapat terintegrasi dan memberikan manfaat, tidak hanya bagi setiap negara anggota, tetapi juga bagi kawasan.

Data PDB dan Populasi ASEAN

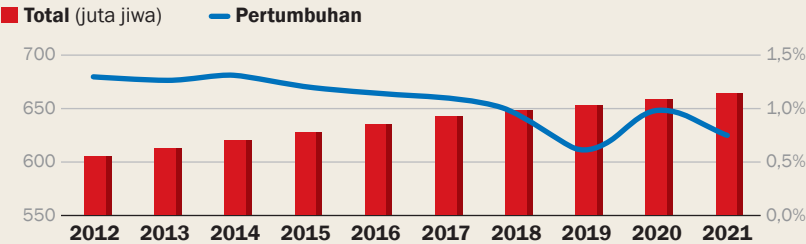
PDB 10 Ekonomi Terbesar di Dunia, 2021
(triliun dollar AS)



Populasi ASEAN Berdasarkan Usia, 2021



Populasi ASEAN 2021-2021



Sumber: ASEAN Statistical Yearbook 2022

Gambar 1.3 Data PDB dan Populasi ASEAN.

Ketiga, integrasi dengan perekonomian global. ASEAN beroperasi dalam lingkungan global yang semakin terhubung dan berjejaring. Pasar dan industri di kawasan juga saling bergantung dan terpapar lingkungan global. Membangun ASEAN sebagai kawasan yang dinamis dengan bisnis yang mampu bersaing secara internasional berarti melihat melampaui batas MEA.

Melalui Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement/ FTA) dan Closer Economic Partnership (CEP) serta peningkatan partisipasi dalam jaringan pasokan global, ASEAN berintegrasi ke dalam ekonomi global. ASEAN juga meningkatkan daya tarik pasar internalnya untuk investasi asing. Berbagai inisiatif kerja sama telah dilakukan, termasuk Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (The Regional Comprehensive Economic Partnership/ RCEP), yang prinsip-prinsipnya dilahirkan di bawah Ketekunan Indonesia.

Dasar dari RCEP ditetapkan pada KTT Ke-19 ASEAN, November 2011, di Bali, Indonesia. Pada KTT ini, para pemimpin dari sepuluh negara anggota ASEAN mengusulkan pembentukan perjanjian perdagangan bebas regional yang akan mencakup mitra-mitra perdagangan bebas ASEAN yang sudah ada. Tujuannya, untuk memperdalam integrasi ekonomi dan meningkatkan perdagangan dan investasi di kawasan ini.

Negosiasi RCEP secara resmi dimulai pada 2012. Selama bertahun-tahun, pembicaraan tersebut mencakup berbagai masalah untuk mengatasi beragam kebutuhan dan kekhawatiran ekonomi dari negara-negara yang berpartisipasi. Kompleksitas negosiasi ini disebabkan oleh perbedaan tingkat pembangunan ekonomi, prioritas perdagangan, dan dinamika politik di antara negara-negara anggota RCEP.

Kesepakatan akhir dicapai pada 15 November 2020, pada KTT Ke-4 RCEP yang diadakan secara virtual, karena pandemi Covid-19. Penandatanganan RCEP itu menandai momen penting dalam perdagangan internasional, menunjukkan komitmen negara-negara peserta untuk membuka pasar, kerja sama ekonomi, dan stabilitas regional.

RCEP diharapkan memiliki dampak besar bagi kawasan ASEAN, baik secara ekonomi maupun strategis. Bagi negara-

negara anggota ASEAN, pakta perdagangan ini menawarkan beberapa keuntungan:

a. Peningkatan peluang perdagangan

RCEP menciptakan pasar yang sangat besar dengan berkurangnya hambatan perdagangan. Hal itu memudahkan pelaku bisnis di negara-negara ASEAN untuk mengakses pasar negara-negara anggota lainnya. Peningkatan akses pasar ini diharapkan dapat meningkatkan ekspor, menarik investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

b. Ketahanan rantai pasok

Penekanan RCEP pada penyederhanaan peraturan dan langkah-langkah fasilitasi perdagangan dapat menghasilkan rantai pasok yang lebih efisien dan *robust* di kawasan ini. Peningkatan ketahanan ini dapat menguntungkan negara-negara ASEAN, terutama pada saat terjadi gangguan global, seperti pandemi Covid-19.

c. Daya tarik bagi investasi asing

Dengan RCEP yang menciptakan pasar lebih terintegrasi, negara-negara ASEAN berpotensi menjadi tujuan investasi asing langsung (FDI) yang lebih menarik. Investor dapat memilih untuk membangun basis produksi di kawasan ini, dengan mengambil keuntungan dari hambatan perdagangan yang lebih rendah, sekaligus mengakses berbagai pasar melalui satu platform.

d. Stabilitas ekonomi regional

Dengan mendorong integrasi dan kerja sama ekonomi, RCEP berkontribusi pada stabilitas regional dan mengurangi risiko perselisihan perdagangan di antara negara-negara anggota. Lingkungan ekonomi yang stabil dan dapat diprediksi akan mendorong pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan di negara-negara ASEAN.

e. Signifikansi geopolitik

Pembentukan RCEP juga memiliki implikasi geopolitik yang lebih luas. Hal ini memperkuat komitmen negara-negara yang berpartisipasi dalam perdagangan bebas dan kerja sama ekonomi pada saat sentimen proteksionisme meningkat di beberapa bagian dunia. Selain itu, masuknya China, Jepang, dan Korea Selatan ke dalam blok perdagangan yang sama semakin memperkuat hubungan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik.

Saat ini, ASEAN telah memiliki modalitas yang kuat untuk menjadi pusat pertumbuhan global. Hal ini dibuktikan oleh ASEAN yang mampu menjadi kawasan dengan ukuran ekonomi terbesar kelima di dunia pada tahun 2021. Merujuk data pada *ASEAN Statistical Yearbook 2022*, nilai produk domestik bruto (PDB) ASEAN pada tahun 2021 mencapai 3,3 triliun dollar AS. Jumlah tersebut hanya kalah dari AS (23 triliun dollar AS), China (17,7 triliun dollar AS), Jepang (4,9 triliun dollar AS), dan Jerman (4,2 triliun dollar AS).

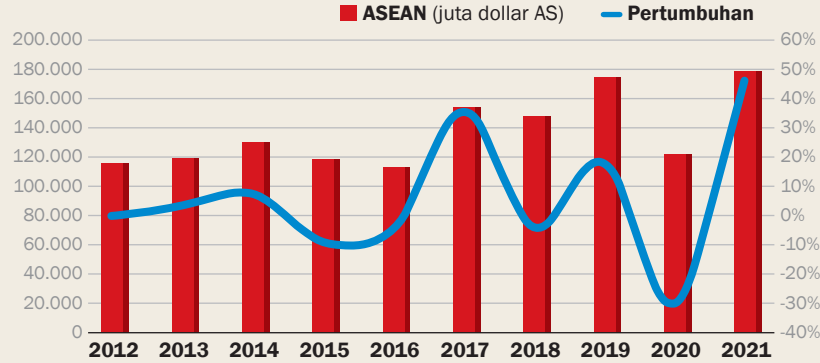
Selain itu, menunjuk data sepanjang 2021, jumlah populasi negara-negara yang tergabung ke dalam ASEAN mencapai 663,9 juta jiwa. Jumlah ini menempati posisi ketiga terbesar di seluruh dunia. Data tersebut juga memperlihatkan bahwa lebih dari separuh populasi ASEAN berada di usia produktif pada tahun 2021.

Jumlah penduduk yang besar, dengan mayoritas sedang berada dalam masa produktif, menjadi peluang bagi ASEAN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar semakin dominan berkontribusi secara global.

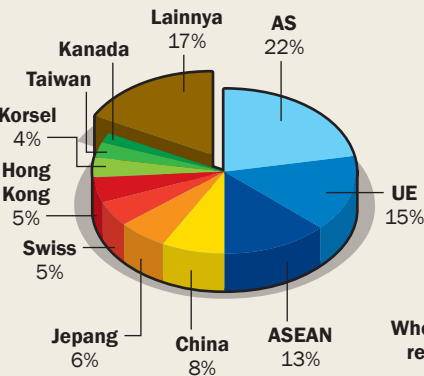
Dari sisi investasi, ASEAN terus menjadi tujuan utama investor asing. Situasi politik kawasan yang stabil mendorong nilai investasi asing yang masuk ke kawasan ASEAN pada 2021 menembus 179 miliar dollar AS. Jumlah tersebut melonjak 46,8% dibandingkan pada 2020. Menunjuk data *ASEAN Statistical Yearbook 2022*, AS menduduki peringkat pertama sebagai investor asing terbesar terhadap ASEAN.

Data FDI ASEAN

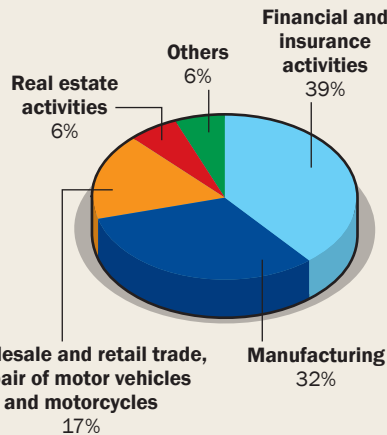
Arus Investasi Asing Langsung (FDI) ke ASEAN 2012-2021
(juta dollar AS)



FDI Berdasarkan Negara Asal, 2021



FDI Berdasarkan Industri, 2021



Sumber: ASEAN Statistical Yearbook 2022

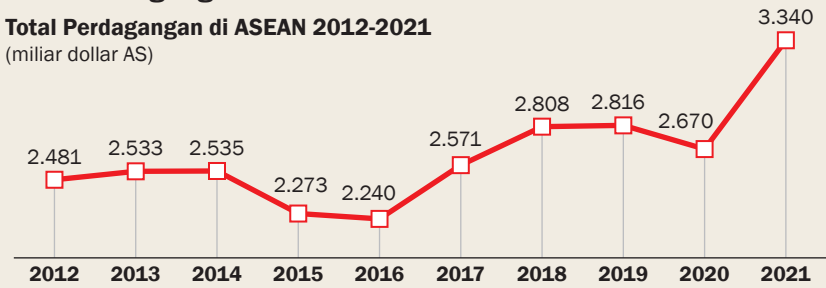
Gambar 1.4 Data FDI ASEAN.

Selain itu, porsi investasi asing langsung ke ASEAN terbesar tersalurkan kepada industri finansial dan asuransi. Adapun dari sisi perdagangan, secara umum total perdagangan ASEAN terus menunjukkan peningkatan selama 10 tahun terakhir, dengan Singapura, Thailand, dan Malaysia yang memiliki total perdagangan terbesar di kawasan ASEAN.

ASEAN sebagai salah satu motor penggerak ekonomi dunia terbukti dengan kuatnya ekspor yang didukung keanekaragaman sumber daya yang melimpah di kawasan Asia Tenggara.

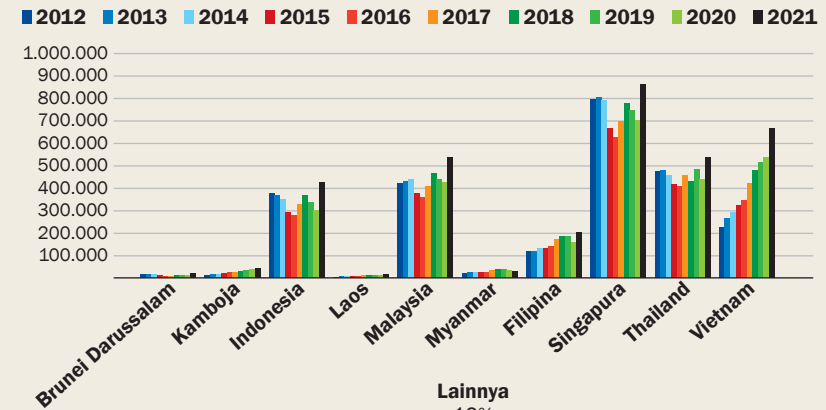
Data Perdagangan ASEAN

Total Perdagangan di ASEAN 2012-2021
(miliar dollar AS)

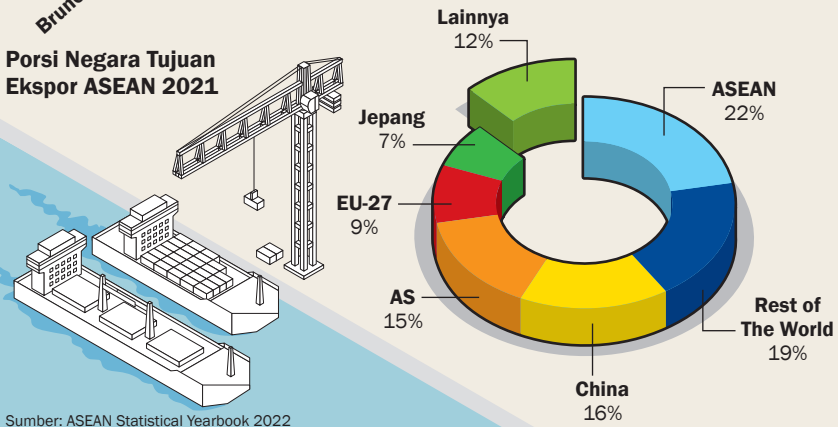


Total Perdagangan Per Negara ASEAN 2012-2021

(juta dollar AS)



Porsi Negara Tujuan Ekspor ASEAN 2021



Sumber: ASEAN Statistical Yearbook 2022

Gambar 1.5 Data Perdagangan ASEAN.

Merujuk ASEAN Statistical Yearbook 2022, pada periode 2019-2021 nilai perdagangan di antara sesama negara ASEAN menjadi yang terbesar di antara mitra dagang lain. Pada tahun 2021 saja, perdagangan intra-ASEAN menyumbang 370 miliar dollar AS atau

setara 21,7%, menempati posisi pertama dan melampaui China dengan porsi sebesar 16,4% serta AS sebesar 14,9%. Besarnya porsi ekspor di antara sesama anggota ASEAN menunjukkan harmonisasi dari setiap negara yang secara tidak langsung saling melengkapi dalam berbagai hal.

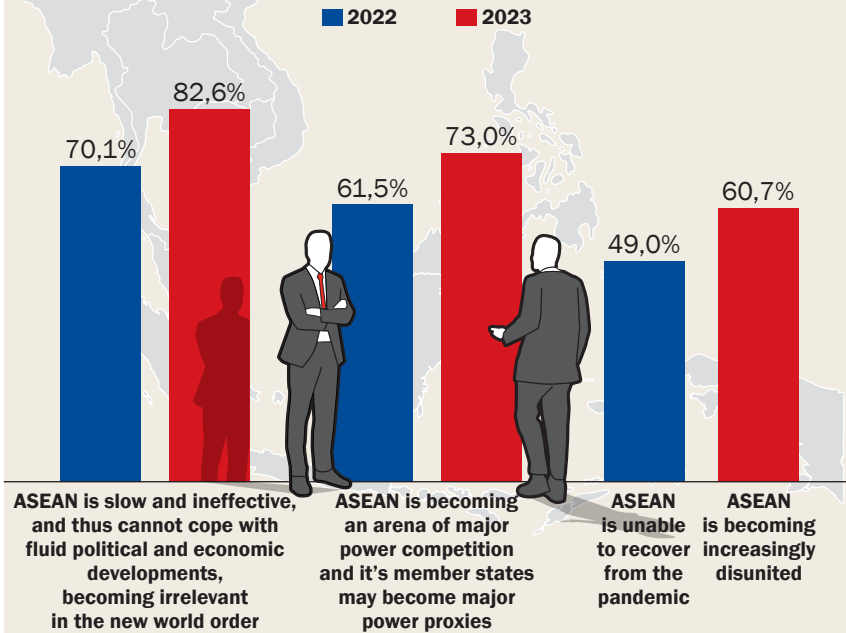
Namun, saat ini ASEAN menghadapi beberapa tantangan. Sebagaimana digambarkan pada hasil survei, *The State of Southeast Asia: 2023 Survey Report*, jika dibandingkan dengan hasil survei pada tahun 2022, masyarakat Asia Tenggara masih menyampaikan ketidakpuasannya terhadap ASEAN sebagai organisasi.

Berdasarkan hasil survei tersebut, 82,6% masyarakat Asia Tenggara menganggap ASEAN sebagai organisasi yang lamban dan tidak efektif, tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan politik yang dinamis, dan semakin tidak relevan dengan tataran dunia terkini. Selain itu, 73% responden menganggap ASEAN semakin menjadi arena persaingan kekuasaan (*power*), serta negara anggota ASEAN berpotensi menjadi proksi bagi negara adidaya. Selanjutnya, 60,7% responden menyatakan ASEAN semakin terpecah dan 49% responden menganggap ASEAN tidak dapat pulih dari pandemi.

Dalam menjawab keresahan masyarakat Asia Tenggara, konektivitas ASEAN telah muncul sebagai salah satu strategi penting untuk mengatasi tantangan dan peluang ekonomi di kawasan ASEAN. Konektivitas, dalam konteks ini, mengacu pada arus barang, jasa, manusia, dan modal yang lancar melintasi perbatasan. Hal itu mencakup infrastruktur fisik, hubungan kelembagaan, dan konektivitas digital, yang semuanya bertujuan untuk mendorong kolaborasi ekonomi dan pembangunan yang inklusif.

Salah satu pilar utama konektivitas ASEAN adalah pengembangan infrastruktur fisik, seperti jalan, rel kereta api, pelabuhan, bandara, dan jaringan energi. Meningkatkan infrastruktur transportasi dan logistik sangat penting untuk memfasilitasi pergerakan barang di dalam kawasan. Sistem transportasi yang efisien dan terhubung dengan baik dapat mengurangi biaya perdagangan dan meningkatkan akses pasar bagi bisnis sehingga meningkatkan perdagangan intraregional.

Hasil Survei Pandangan Masyarakat Asia Tenggara terhadap ASEAN



Sumber: The State of Southeast Asia: 2023 Survey Report

Gambar 1.6 Hasil Survei Pandangan Masyarakat Asia Tenggara terhadap ASEAN.

Selain itu, peningkatan hubungan infrastruktur Lintas Negara antarnegara anggota ASEAN membuka koridor ekonomi baru dan memungkinkan terciptanya jaringan produksi. Keterkaitan ini mendorong spesialisasi regional dan alokasi sumber daya yang efisien, yang mengarah pada peningkatan daya saing di tingkat global.

Di luar infrastruktur fisik, hubungan kelembagaan memainkan peran penting dalam mempromosikan konektivitas ASEAN. Harmonisasi prosedur bea cukai, peraturan dan standar perdagangan di antara negara-negara anggota dapat memperlancar pergerakan barang dan mengurangi hambatan perdagangan. ASEAN telah membuat langkah signifikan di bidang ini melalui inisiatif seperti ASEAN Single Window (ASW), yang memfasilitasi pertukaran data elektronik untuk bea cukai.

Pembentukan pengaturan pengakuan bersama (MRA) untuk profesi dan keterampilan juga mendukung mobilitas tenaga kerja terampil di kawasan ini. Hal ini memungkinkan para profesional, seperti insinyur, dokter, dan arsitek, untuk bekerja dengan lebih mudah melintasi perbatasan ASEAN. Dengan demikian, mengarah pada pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel dan responsif.

Konektivitas Digital

Di era digital, konektivitas digital menjadi semakin penting bagi pertumbuhan ekonomi. ASEAN secara aktif mempromosikan pengembangan infrastruktur digital, termasuk konektivitas internet, jaringan seluler, dan sistem pembayaran elektronik. Kerangka Kerja Integrasi Digital ASEAN dan Rencana Induk Konektivitas ASEAN 2025 menyoroti komitmen kawasan ini dalam memanfaatkan kekuatan teknologi digital untuk mempercepat integrasi ekonomi.

Konektivitas digital memungkinkan bisnis untuk mengakses pasar baru, memfasilitasi pertumbuhan e-dagang, serta mendorong inovasi dan kewirausahaan. Hal ini juga meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan akses yang lebih besar ke layanan perbankan dan produk keuangan bagi masyarakat yang kurang terlayani di kawasan ini.

Pendekatan komprehensif terhadap konektivitas ASEAN digunakan untuk mengatasi beberapa tantangan ekonomi yang dihadapi oleh kawasan ini. Salah satu tantangan tersebut adalah kesenjangan pembangunan di antara negara-negara anggota ASEAN.

Inisiatif konektivitas ini membantu menjembatani kesenjangan pembangunan dengan memfasilitasi aliran investasi, pengetahuan, dan teknologi ke wilayah-wilayah yang kurang berkembang. Hal itu akan mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan mengurangi kesenjangan pendapatan di dalam blok tersebut.

Sebelum adanya peningkatan konektivitas, negara-negara ASEAN menghadapi tantangan untuk mengakses pasar negara tetangga, karena birokrasi yang berbelit-belit dan infrastruktur yang tidak efisien. Dengan peningkatan hubungan transportasi dan digital, pebisnis dapat memperluas basis pelanggan mereka

dan mengakses peluang baru. Hal itu akan meningkatkan volume perdagangan dan pertumbuhan ekonomi.

Tantangan lain yang ingin diatasi oleh konektivitas ASEAN adalah produksi dan perdagangan yang terfragmentasi. Fragmentasi dalam proses produksi di beberapa negara ASEAN membatasi kemampuan kawasan ini untuk bersaing dalam skala global. Dengan konektivitas yang lebih baik, bisnis dapat membangun rantai pasok Lintas Negara dan memanfaatkan kekuatan tiap-tiap negara anggota. Efisiensi dan daya saing pun akan menjadi lebih tinggi.

Selain itu, konektivitas yang sebelumnya tidak memadai juga menghambat investasi di kawasan ini. Para investor sering kali terhalang oleh kurangnya infrastruktur dan konektivitas. Pembangunan infrastruktur yang modern dan terkoneksi baik membuat negara-negara ASEAN menjadi tujuan investasi yang lebih menarik. Pada gilirannya, hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Di sisi lain, ketidaksesuaian pasar tenaga kerja dan pembatasan pergerakan tenaga kerja terampil menghambat pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal. Namun, pengakuan bersama atas kualifikasi profesional dan mobilitas tenaga kerja terampil yang lebih mudah dapat mendorong pertukaran bakat sekaligus meningkatkan produktivitas dan transfer pengetahuan.

Kesimpulannya, konektivitas ASEAN berfungsi sebagai kekuatan transformatif, membuka potensi ekonomi kawasan, dan mengatasi berbagai tantangan yang menghambat pertumbuhan dan integrasinya. Dengan berfokus pada infrastruktur fisik, hubungan kelembagaan, dan konektivitas digital, ASEAN bertujuan untuk mendorong kolaborasi ekonomi, menarik investasi, dan menciptakan blok ekonomi yang lebih kompetitif dan terintegrasi.

Dengan negara-negara anggota ASEAN yang terus berkolaborasi dan berinvestasi dalam proyek-proyek konektivitas, kawasan ini siap untuk berkembang sebagai pemain dinamis dalam ekonomi global, mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakatnya.

Terkait peran Bank Indonesia, pada Ketekunan Indonesia di ASEAN Tahun 2023, agenda prioritas ekonomi di bawah

Bank Sentral mencanangkan upaya memajukan konektivitas pembayaran; mempromosikan literasi keuangan digital dan inklusi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif; serta penguatan ketangguhan dalam sektor keuangan di dalam *strategic thrust* ekonomi digital.

Dalam memajukan konektivitas pembayaran, dibentuklah Peta Jalan Konektivitas Pembayaran Regional (Regional Payment Connectivity/RPC Roadmap) terkait rencana perluasan peserta Nota Kesepahaman Kerja Sama RPC (Memorandum of Understanding on Cooperation on RPC). Inisiatif RPC mencakup beberapa modalitas *interlinkage*, yaitu (i) *QR-code*; (ii) *fast payment*; (iii) *application programming interface* (API); (iv) *real time gross settlement* (RTGS); dan (v) *data framework*.

ASEAN-5 sepakat untuk memprioritaskan *QR-code* dan *fast payment* sebagai fokus utama saat ini. Selanjutnya, pembahasan lebih dalam mengenai RPC akan dijelaskan pada Bab 4 Meningkatkan Konektivitas Pembayaran Lintas Negara di ASEAN.

BAB 2

Implementasi Bauran Kebijakan untuk Mendorong Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN

Tantangan ekonomi yang semakin kompleks, baik dari sisi domestik maupun global, memerlukan perubahan paradigma dalam perumusan kebijakan lebih holistik dari semua otoritas kebijakan, termasuk bank sentral. Bank sentral semakin dituntut untuk menghasilkan rumusan respons kebijakan yang inovatif, di luar kebijakan standar, guna memitigasi risiko perekonomian dalam upaya pencapaian beragam sasaran kebijakan (multiple policy objectives).

Saat ini, banyak bank sentral tidak lagi hanya bergantung pada instrumen kebijakan moneter, tetapi beralih ke paradigma bauran kebijakan untuk mencapai beragam sasaran. Pendekatan bauran kebijakan bank sentral memberi panduan untuk merumuskan respons kebijakan. Respons ini merupakan kombinasi dari beberapa instrumen, termasuk kebijakan moneter, makroprudensial, intervensi nilai tukar, dan manajemen aliran modal.

Kombinasi optimal respons bauran kebijakan bank sentral dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kondisi siklus ekonomi dan keuangan domestik, karakteristik ekonomi domestik, jenis guncangan (*shock*) dan risiko yang dihadapi, serta sasaran kebijakan yang hendak dicapai. Dalam konteks ini, Bank Indonesia menginisiasi pembahasan bauran kebijakan di antara negara-negara anggota ASEAN sebagai salah satu upaya mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil kesepakatan, baik dari level teknis (setingkat komite kerja/*working committee*) maupun *principals* (setingkat gubernur bank sentral dan menteri keuangan), telah disepakati perlunya penguatan bauran kebijakan di ASEAN untuk memastikan stabilitas ekonomi di kawasan. Selain itu, para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung pentingnya pembahasan bauran kebijakan di jalur keuangan untuk meningkatkan ketahanan makroekonomi dan stabilitas keuangan sebagai landasan bagi ASEAN menjadi episentrum pertumbuhan.



KOMPAS/BENEDIKTUS KRISNA YOGATAMA

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua dari kiri) dalam High-Level Seminar on Frameworks for Integrated Policy: Experiences and The Way Forward yang merupakan bagian dari rangkaian acara pertemuan menteri-menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara Asia Tenggara atau ASEAN Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting (AFMGM) ke-2, Jakarta, Selasa (22/8/2023). Turut hadir Deputy Gubernur Banko Sentral ng Pilipinas Francisco G Dakila (kiri), Gubernur Bank of Thailand Sethaput Suthiwartnarueput (kedua dari kanan), dan moderator acara Chief International Correspondent for Southeast Asia Bloomberg Haslinda Amin (kanan).

Pembahasan mengenai bauran kebijakan kembali mengemuka dalam forum internasional yang diketuai Indonesia. Tidak hanya di forum G20, saat ini pembahasan mengenai bauran kebijakan juga menjadi sorotan negara anggota ASEAN. Dalam kapasitas Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, Bank Indonesia mendorong pembahasan bauran kebijakan (*policy mix*) menjadi salah satu agenda ekonomi prioritas (*priority economic deliverables*/PEDs). Pentingnya bauran kebijakan ini terus digaungkan untuk menjaga momentum pemulihan.

Dalam konteks ekonomi yang terbuka, negara-negara kawasan seperti ASEAN memiliki tantangan tersendiri untuk memastikan stabilitas ekonomi dan keuangan, baik domestik maupun eksternal. Beberapa negara, termasuk negara anggota ASEAN, telah mengambil berbagai langkah kebijakan untuk mendorong pemulihan sekaligus meredam dampak yang masih terasa dari pandemi Covid-19.

Tidak dapat dimungkiri bahwa setelah pandemi, pemulihan ekonomi, baik di tingkat global maupun domestik, masih dihadapkan pada ketidakpastian dan tantangan baru, seperti fragmentasi geopolitik terus berlanjut yang diikuti dengan gangguan rantai pasok global, tekanan inflasi, serta harga pangan dan energi yang masih tinggi.

Kondisi ini telah mendorong negara-negara maju dan berkembang memperketat kebijakan moneter yang menyebabkan peningkatan beban keuangan utang negara. Dukungan kebijakan dari berbagai sektor sangat dibutuhkan guna menstabilkan pasar keuangan, mencegah krisis yang dapat menciptakan efek berkepanjangan (*scarring effects*), serta menjawab tantangan saat ini.

Sebagai upaya memastikan stabilitas ekonomi di tengah meningkatnya tantangan saat ini, ASEAN mengeksplorasi upaya implementasi bauran kebijakan yang terkalibrasi (*well-calibrated*), terencana (*well-planned*), dan terkomunikasikan dengan baik (*well-communicated*). Untuk mengupayakan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, sambil memitigasi risiko seperti inflasi dan volatilitas aliran modal, ASEAN akan membahas kerangka analisis sistematis yang dapat menjelaskan pengaturan kebijakan makroekonomi.

Hal itu dilakukan dengan mengeksplorasi implementasi Kerangka Kerja Kebijakan Terintegrasi (Integrated Policy Framework/IPF) dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Kerangka Kerja Stabilitas Makrofinansial (Macro-Financial Stability Framework/MFSF) dari Bank for International Settlements (BIS). Kedua kerangka kerja ini mempertimbangkan penerapan bauran kebijakan moneter, intervensi valuta asing (*foreign exchange intervention/FXI*), kebijakan makroprudensial (MPM), pengelolaan arus modal (*capital flow management/CFM*), dan kebijakan fiskal untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan keuangan.

IPF bertujuan untuk memberikan penilaian yang lebih sistematis tentang bauran kebijakan yang dapat membantu negara-negara mencapai tujuan pertumbuhan dan stabilitas dengan mempertimbangkan interaksi berbagai perangkat kebijakan (*policy tools*) yang ada. Sementara itu, MFSF menambahkan penggunaan kebijakan fiskal dan mikroprudensial serta bauran kebijakan yang didasarkan pada landasan kebijakan struktural yang kokoh.

Di tengah meningkatnya risiko ekonomi dan keuangan, kedua

kerangka kerja tersebut menjadi lebih relevan untuk dieksplorasi lebih lanjut oleh ASEAN. IPF dan MFSF diharapkan dapat menjadi referensi berharga dalam mengelola stabilitas, mendorong pertumbuhan, dan membantu negara, khususnya negara berkembang, menghadapi ketidakpastian dan volatilitas ekonomi serta keuangan global. Meskipun demikian, penerapan kerangka tersebut perlu disesuaikan dengan fundamental keuangan makro dan kondisi spesifik dari setiap negara anggota. Penerapan kerangka tersebut didasari pemahaman atas karakteristik bauran kebijakan dan risiko yang menyertai.

Pemahaman tentang prinsip-prinsip dalam melakukan berbagai kebijakan merupakan prasyarat untuk dapat mengakui bahwa bauran kebijakan merupakan kerangka kebijakan yang efektif. Agar implementasi kerangka kerja lebih tepat waktu dan tepat sasaran, tujuan bauran kebijakan dalam mencapai stabilitas ekonomi makro dan keuangan perlu dieksplorasi lebih lanjut, khususnya di ASEAN.

Konsep Bauran Kebijakan untuk Pemulihan dan Ketahanan Ekonomi

Kenaikan aliran modal internasional dan volatilitasnya meningkatkan kerentanan ketahanan ekonomi domestik negara penerima. Di satu sisi, aliran modal asing memperluas akses keuangan dan dana yang lebih murah bagi negara-negara penerima untuk membiayai perekonomiannya. Di sisi lain, aliran modal dalam jumlah besar dan cenderung tidak stabil (*volatile*), khususnya aliran modal jangka pendek, berisiko meningkatkan instabilitas kondisi ekonomi domestik.

Semakin tinggi ketergantungan suatu ekonomi terhadap sumber pembiayaan dari luar, semakin besar pula dampak dari gejolak di pasar keuangan global terhadap siklus *boom-bust* dari ekonomi tersebut (Avdjiev *et al.*, 2012; Borio *et al.*, 2011). Lebih jauh lagi, dengan semakin kuatnya keterkaitan sektor makro dengan keuangan (*macro-financial linkage*), instabilitas yang muncul akan berdampak pada naiknya risiko instabilitas sistem keuangan sebagaimana terjadi dalam empat dekade terakhir (Borio *et al.*, 2022).

Negara berkembang lebih rentan terhadap risiko volatilitas aliran modal internasional ketimbang negara maju. Salah satu penyebabnya, sistem kelembagaan dan pasar keuangan di negara

berkembang tidak sedalam di negara maju. Negara berkembang juga memiliki ketergantungan lebih besar terhadap dana eksternal yang menyebabkan sistem keuangannya menjadi lebih rentan terhadap fluktuasi kondisi eksternal.

Karena kondisi pasar keuangan global yang semakin terintegrasi, arus modal besar dan fluktuatif dari negara maju memiliki imbas (*spillover*) signifikan terhadap stabilitas makroekonomi dan keuangan negara berkembang, yaitu melalui jalur perdagangan, inflasi, harga aset, dan neraca korporasi (Tanboon *et al.*, 2016). Ekonomi negara berkembang yang umumnya masih rentan terhadap risiko arus modal dan terpengaruh oleh kondisi eksternal atau "siklus keuangan global" dapat membatasi otonomi kebijakan moneter untuk pencapaian tujuan domestik (Rey, 2015).

Aliran modal internasional yang deras dan fluktuatif meningkatkan komplikasi kebijakan moneter di negara berkembang. Terkait hal ini, setidaknya ada tiga aspek yang menjadi tantangan bagi bank sentral dalam melaksanakan kebijakan moneter.

Pertama, dampak kerentanan kondisi keuangan global terhadap independensi kebijakan moneter. Hal ini disebabkan bank sentral negara berkembang perlu memperhitungkan dampak *interest rate differential* (perbedaan suku bunga antara dua aset berbasis bunga serupa) yang dapat memengaruhi aliran modal asing dalam formulasi kebijakan untuk mencapai tujuan domestik. Perubahan aliran modal asing dapat mengganggu pencapaian tujuan perubahan kebijakan moneter tersebut.

Kedua, limpahan (*spillover*) keuangan global bisa melemahkan transmisi kebijakan moneter dan menghambat bank sentral dalam mengelola ekonomi dengan melakukan kebijakan nilai tukar.

Ketiga, perubahan kondisi keuangan global dapat memperburuk *trade off* kebijakan moneter, baik secara intratemporal—antara stabilitas inflasi dan *output*—maupun intertemporal—antara stabilitas inflasi dan *output* antarwaktu.

Dengan perkembangan tersebut, tantangan yang dihadapi otoritas kebijakan, termasuk bank sentral, dalam upaya pencapaian mandatnya menjadi semakin kompleks. Otoritas negara berkembang menghadapi tantangan dalam merumuskan kebijakan terkait pengelolaan arus modal yang besar dan fluktuatif untuk mencapai tujuan stabilitas

makroekonomi dan sistem keuangan (IMF, 2020). Bank sentral harus mempertimbangkan stabilitas sistem keuangan dalam formulasi kebijakannya, mengingat semakin kuatnya keterkaitan sektor makro dan keuangan. Selain itu, bank sentral juga dihadapkan pada masalah pengelolaan arus modal asing.

Berbagai kajian empiris menunjukkan bahwa dewasa ini keterkaitan sektor eksternal, makro, dan sistem keuangan (*macro-financial-external linkages*) semakin kuat sehingga guncangan global (*global shock*) tidak hanya dapat tertransmisi ke dalam instabilitas makro, tetapi juga pada instabilitas sistem keuangan.

Penguatan kerangka kebijakan moneter diperlukan untuk menjawab bertambahnya kompleksitas tantangan yang ada. Kerangka kebijakan moneter konvensional yang hanya berbasis pada instrumen tunggal (*single instrument*) kurang dapat menjawab kebutuhan bank sentral untuk mengelola berbagai tantangan yang muncul bersamaan. Oleh karena itu, bank sentral dewasa ini dituntut menghasilkan rumusan respons kebijakan yang inovatif, di luar kebijakan standar, guna memitigasi risiko perekonomian dalam upaya mencapai beragam sasaran kebijakan (*multiple policy objectives*) tersebut.

Bank sentral di beberapa negara, khususnya di negara berkembang, mulai menggunakan pendekatan alternatif dengan mengombinasikan berbagai instrumen yang ada untuk mencapai tujuan stabilitas domestik dan eksternal secara bersamaan. Dengan kata lain, bank sentral berupaya mengoptimalkan pengelolaan *impossible trinity* antara kebijakan suku bunga yang independen, nilai tukar, dan arus modal asing melalui bauran kebijakan bank sentral, yakni kombinasi kebijakan moneter, makroprudensial, dan pengelolaan aliran modal asing.

Pendekatan bauran kebijakan bank sentral memberikan ruang bagi bank sentral untuk merespons berbagai tantangan yang muncul secara bersamaan. Dengan pendekatan ini, bank sentral dapat mengimplementasikan prinsip Tinbergen. Setiap instrumen

Bank sentral juga dihadapkan pada masalah pengelolaan arus modal asing.

kebijakan yang ada dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang berbeda-beda. Dengan kata lain, bauran kebijakan (*policy mix*) bank sentral ini merupakan kombinasi beberapa instrumen kebijakan yang diformulasikan untuk mencapai sasaran yang beragam.

Pendekatan bauran kebijakan tersebut menyediakan kerangka kerja bagi perumusan respons kebijakan. Kombinasi beberapa instrumen itu meliputi kebijakan moneter, makroprudensial, intervensi nilai tukar, dan manajemen aliran modal untuk memitigasi risiko yang dihadapi perekonomian. Tentu saja, kombinasi kebijakan yang ditempuh perlu dikalibrasi untuk mengoptimalkan bauran kebijakan dan pencapaian sasaran yang ditentukan.

Kombinasi optimal respons bauran kebijakan bank sentral perlu mempertimbangkan siklus ekonomi dan keuangan, karakteristik ekonomi negara, jenis guncangan dan risiko yang dihadapi, serta sasaran kebijakan yang hendak dicapai. Dari sisi pencapaian sasaran stabilitas harga, penggunaan instrumen suku bunga kebijakan dan kebijakan lainnya perlu mempertimbangkan berbagai faktor. Termasuk di dalam pertimbangan itu, sumber tekanan inflasi, target dan dinamika perkembangan inflasi, kredibilitas bank sentral, serta siklus ekonomi dan level pemulihan ekonomi pascapandemi.

Di sisi pencapaian stabilitas sistem keuangan, penggunaan instrumen kebijakan makroprudensial antara lain juga dipengaruhi oleh karakteristik individual suatu negara. Karakteristik itu, antara lain, kondisi siklus keuangan, peran pembiayaan perbankan dalam perekonomian, tekanan di sektor perumahan, level utang dan kemampuan pembayaran utang, serta sumber dan dampak guncangan pada agen perekonomian dan institusi keuangan.

Adapun untuk sasaran pencapaian ketahanan eksternal, kebijakan intervensi nilai tukar perlu mempertimbangkan fungsinya sebagai garis pertahanan pertama (*the first line of defense*), fundamental nilai tukar, kecukupan cadangan devisa, dan tetap mengedepankan mekanisme pasar.

Efektivitas implementasi bauran kebijakan bank sentral dipengaruhi oleh karakteristik dan struktur perekonomian negara yang bersangkutan. Sebagai contoh, untuk memitigasi risiko gejolak volatilitas aliran modal dan keketatan pasar keuangan global, seperti

yang dihadapi sejumlah negara dewasa ini, pilihan respons kombinasi kebijakan yang optimal akan berbeda antara negara yang memiliki pasar valuta asing dalam dan dangkal.

Perbedaan kombinasi respons tersebut tetap berlaku meskipun kedua negara itu sama-sama menganut rezim nilai tukar fleksibel. Negara dengan pasar valuta asing yang dangkal dapat memilih untuk lebih menggunakan instrumen kebijakan intervensi dalam memitigasi risiko volatilitas nilai tukar. Sementara itu, bagi negara dengan pasar valuta asing dalam dan akses pasar terjaga, penyesuaian nilai tukar mengikuti dinamika pasar biasanya adalah pilihan yang optimal.

Jika suatu negara juga menghadapi risiko pengelolaan volatilitas aliran modal, penggunaan instrumen kebijakan manajemen aliran modal secara *preemptive* dan atau instrumen makroprudensial, yang dapat menurunkan dampak aliran modal asing (MPM/CFM) terhadap stabilitas sistem keuangan, dapat dipertimbangkan.

Pendekatan bauran kebijakan bank sentral telah ditempuh oleh beberapa bank sentral, termasuk pada masa setelah pandemi Covid-19. Periode setelah pandemi diwarnai tantangan kenaikan inflasi, pasar keuangan dunia yang ketat, serta kondisi ekonomi yang belum pulih. Terkait hal ini, bank sentral mengombinasikan kebijakan kenaikan suku bunga dengan intervensi nilai tukar untuk mencapai sasaran stabilitas harga dan nilai tukar.

Kenaikan suku bunga diarahkan untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap dalam batas yang terkendali dan memastikan tingkat imbal hasil investasi dalam negeri yang menarik. Selain itu, stabilisasi nilai tukar ditujukan untuk meminimalkan risiko *imported inflation* akibat depresiasi nilai tukar. Kebijakan ini dapat dikombinasikan dengan kebijakan makroprudensial yang diarahkan untuk mendorong pembiayaan perbankan bagi dunia usaha. Hal ini sangat diperlukan untuk menopang pemulihan ekonomi.

Bukti empiris menunjukkan bahwa implementasi pendekatan bauran kebijakan pada periode setelah Covid-19 memberikan manfaat bagi bank sentral dalam mengelola stabilitas makroekonomi, sistem keuangan. Pada saat yang sama, implementasi bauran kebijakan juga mendukung pemulihan ekonomi.

Kerangka Kerja Bauran Kebijakan Lembaga Internasional

Menyikapi semakin meluasnya praktik bauran kebijakan, otoritas kebijakan di sejumlah negara mendorong penetapan sebuah kesepahaman bersama (*common understanding*) tentang bauran kebijakan makroekonomi. Kerangka kerja untuk bauran kebijakan makroekonomi ini telah disusun oleh lembaga internasional, yaitu MFSF yang disusun BIS dan IPF yang disusun IMF sejak tahun 2020.

Di bawah Presidensi G20 Indonesia, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G20 mendesak BIS untuk segera menyelesaikan penyusunan MFSF dan mendorong IMF untuk segera menuntaskan penyusunan IPF yang telah dimulai sejak 2020 (G20, 2022). Kedua kerangka aturan tersebut menjadi bentuk kesepahaman bersama secara global tentang pentingnya penerapan bauran kebijakan makroekonomi oleh semua negara guna mengelola stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Inti dari langkah ini adalah menekan dampak negatif dari arus modal asing yang terjadi antarnegara.

Kerangka kerja kebijakan yang terintegrasi dapat membantu bank sentral menentukan instrumen yang sesuai dalam menghadapi masalah stabilitas harga, stabilitas sistem keuangan, nilai tukar, atau arus modal. Dalam penggunaan instrumen tersebut, bank sentral memerlukan asesmen yang cermat, yang bergantung pada tujuan kebijakan, kondisi spesifik ekonomi, ruang kebijakan, dan sifat dari guncangan.

Kerangka kerja kebijakan terintegrasi juga diharapkan dapat menjelaskan interaksi antarinstrumen, apakah saling melengkapi, menggantikan, atau terdapat konflik antarinstrumen. Selain itu, juga menjelaskan penggunaan instrumen secara bersamaan dan kalibrasi yang diperlukan.

i. Integrated Policy Framework — IMF

Integrated Policy Framework (IPF) IMF bertujuan memberikan pendekatan analitis yang sistematis bagi bank sentral dalam merumuskan bauran kebijakan yang tepat untuk mencapai stabilitas makroekonomi dan keuangan. Kerangka kebijakan ini ditujukan bagi negara-negara anggota IMF, terutama negara yang menganut rezim nilai tukar bebas.

IPF bertujuan mengkaji ulang formulasi kebijakan moneter,

intervensi nilai tukar, makroprudensial, dan manajemen aliran modal yang paling tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas keuangan di tengah berbagai risiko yang dihadapi. Risiko tersebut terutama terkait dengan meningkatnya risiko limpahan dari sektor eksternal dan semakin kuatnya keterkaitan antara sektor makrokeuangan (*macro-financial*) dan sektor eksternal. IPF mencermati secara simultan peran empat kebijakan, yakni kebijakan moneter, makroprudensial, intervensi nilai tukar, dan manajemen arus modal.

Kebijakan moneter ditujukan untuk mengelola permintaan dalam rangka menjaga stabilitas harga dan mengurangi fluktuasi *output*. Kebijakan moneter klasik menyatakan bahwa perbedaan suku bunga domestik dan global krusial dalam menentukan arus modal. Namun, studi empiris menunjukkan bahwa kebijakan moneter tidak selalu efektif dalam menghadapi guncangan eksternal. Gelos *et al.* (2022) tidak menemukan bukti pengaruh kebijakan moneter terhadap distribusi arus modal ke negara berkembang dalam jangka pendek ataupun jangka menengah.

Kurangnya efektivitas kebijakan moneter dalam mengatasi guncangan eksternal tersebut mendasari perlunya instrumen tambahan (Kalemlı-Özcan, 2019). Tanboon *et al.* (2016) juga menyarankan otoritas untuk menggunakan instrumen secara komplementer dibandingkan dengan hanya menggunakan satu instrumen.

Salah satu instrumen tambahan yang dimaksud adalah kebijakan makroprudensial. Kebijakan ini semakin kerap digunakan untuk mengelola pertumbuhan kredit yang pesat. Beberapa studi terkait penerapannya menemukan bahwa kebijakan makroprudensial merespons dinamika variabel keuangan domestik, khususnya pertumbuhan kredit (Aikman *et al.*, 2015; Brandao-Marques *et al.*, 2021; Nier *et al.*, 2020). Namun, beberapa penelitian menemukan bahwa kebijakan makroprudensial di negara berkembang juga merespons faktor eksternal, seperti suku bunga Amerika Serikat dan arus modal (IMF, 2020; Finger & Murphy, 2019).

Sejumlah studi menemukan bahwa kebijakan makroprudensial dapat menahan penumpukan kerentanan domestik yang bersumber dari kondisi keuangan global yang longgar dan mendukung ketahanan

terhadap guncangan. Kebijakan makroprudensial ditemukan efektif dalam memoderasi perkembangan kredit dengan dampak yang lebih besar di negara berkembang (IMF, 2020).

Selain itu, Brandao-Marques *et al.* (2021) menyatakan bahwa pengetatan makroprudensial yang merespons pelonggaran kondisi keuangan global dapat membantu menahan *tail risk* terhadap pertumbuhan ekonomi. Studi juga menemukan bahwa kebijakan makroprudensial yang *preemptive* lebih efektif dari yang sifatnya reaktif. Selain itu, pengetatan kebijakan makroprudensial teridentifikasi dapat meredam dampak guncangan global ke pertumbuhan ekonomi di negara berkembang.

Beberapa studi juga menemukan bahwa biaya penurunan *output* dalam jangka pendek relatif lebih rendah dibandingkan dengan efektivitas kebijakan makroprudensial dalam mengurangi risiko dan volatilitas *output* jangka panjang.

Namun, di sisi lain, kebijakan makroprudensial juga dapat menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan (*unintended consequences*). Kebijakan makroprudensial dapat "bocor" dengan mendorong penyediaan kredit oleh non-bank dan dari luar negeri (IMF, 2020). Pemotongan jalur ini dapat mengurangi efektivitas kebijakan makroprudensial.

Ahnert *et al.* (2018) menemukan, pengaturan valuta asing pada bank tampaknya berhasil memitigasi kerentanan terhadap ancaman instabilitas nilai tukar dan kondisi keuangan global. Namun, ketentuan tersebut dapat memindahkan kerentanan nilai tukar ke sektor lain.

Kebijakan makroprudensial juga dapat menghasilkan *external spillover*. IMF (2020) menemukan, pengaturan makroprudensial yang lebih ketat di suatu negara dapat meningkatkan ketahanan di negara lain. Hal itu dapat disebabkan stabilitas domestik yang lebih baik mendukung stabilitas arus modal dan perdagangan lintas negara. Akan tetapi, McCann dan O'Toole (2019) menemukan bahwa pengaturan makroprudensial yang lebih ketat di dalam negeri akan membuat bank meningkatkan *loan-to-value ratio* dan *loan-to-income ratio* dalam penyaluran kreditnya ke luar negeri.

Intervensi nilai tukar merupakan instrumen yang banyak digunakan, termasuk oleh bank sentral negara berkembang yang menganut *inflation targeting* dan sistem nilai tukar mengambang

bebas. Intervensi nilai tukar dapat digunakan untuk beberapa tujuan, termasuk untuk (i) mengendalikan inflasi; (ii) memupuk cadangan devisa; (iii) meredam volatilitas di pasar keuangan yang dangkal; (iv) menjaga stabilitas keuangan; serta (v) mencegah penguatan mata uang yang dapat mengurangi daya saing (Hofman *et al.*, 2020).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa intervensi nilai tukar di negara berkembang cenderung asimetris, yaitu lebih condong saat apresiasi mata uang pada periode arus modal masuk daripada saat depresiasi di arus modal keluar (Adler *et al.*, 2021; Chamon *et al.*, 2019), yang mungkin dimotivasi tujuan untuk memupuk cadangan devisa. Studi empiris menunjukkan, negara dengan cadangan devisa yang lebih tinggi menghadapi fluktuasi harga aset dan arus modal yang lebih rendah dibandingkan dengan negara yang cadangan devisanya lebih rendah (Sahay *et al.*, 2014).

Intervensi nilai tukar ditemukan berdampak pada nilai tukar di negara berkembang, setidaknya pada jangka pendek (Chamon *et al.*, 2019; Fratzscher *et al.*, 2019). Intervensi nilai tukar akan sangat efektif jika konsisten dengan fundamental dan *stance* dari kebijakan moneter (Adler *et al.*, 2014; Daude *et al.*, 2016; Menkhoff, 2013). Penjualan valas oleh bank sentral dapat mengurangi tekanan pasar keuangan sebagaimana ditunjukkan oleh negara yang memiliki akses likuiditas dollar melalui *swap lines* saat krisis keuangan global dan Covid-19 (Domanski *et al.*, 2016).

Penelitian Gelos *et al.* (2019) menemukan bahwa penjualan valas oleh bank sentral dapat efektif mengurangi arus modal keluar akibat guncangan eksternal. Akumulasi cadangan devisa diketahui dapat mengurangi kerentanan eksternal dan menjadi justifikasi untuk memupuk cadangan devisa secara *precautionary* dalam rangka pemenuhan kecukupan. Pemanfaatan intervensi nilai tukar untuk memupuk cadangan devisa perlu mempertimbangkan biaya sterilisasi (Rodrik, 2006; Yeyati, 2008) dan risiko pada neraca keuangan bank sentral (Filardo & Yetman, 2012).

Kebijakan manajemen arus modal (*capital flow managements/CFM*) ditemukan efektif dalam mengubah komposisi arus modal guna memitigasi risiko stabilitas keuangan. Beberapa jenis CFM juga ditemukan dapat mengurangi kerentanan sistem keuangan, meningkatkan otonomi kebijakan moneter (Aizenman *et al.*, 2016;

Pasricha *et al.*, 2018) serta membantu mengatasi tekanan nilai tukar.

Studi menemukan dampak *precautionary* CFM lebih efektif dibandingkan dengan kebijakan CFM yang reaktif. Klein (2012) menemukan bahwa kebijakan CFM yang selalu diberlakukan untuk banyak jenis aset (bersifat seperti dinding) lebih efektif untuk otonomi kebijakan moneter dibandingkan dengan kebijakan temporer untuk sekelompok jenis aset. Namun, di sisi lain, CFM dapat mengalihkan arus modal ke negara lain yang memiliki karakteristik ekonomi yang mirip sehingga memiliki dampak yang tidak diperkirakan.

Penggunaan instrumen makroprudensial CFM dan intervensi nilai tukar secara bersamaan dengan tepat dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi otonomi kebijakan moneter untuk mencapai stabilitas domestik. Pendekatan ini lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan instrumen tunggal. Kebijakan makroprudensial ditemukan dapat mengurangi kerentanan keuangan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan kebijakan moneter yang dapat mengakibatkan biaya kesejahteraan (*welfare cost*) lebih besar.

Cordella *et al.* (2014) menemukan bahwa saat menghadapi guncangan negatif, negara berkembang secara bersamaan meningkatkan suku bunga untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan melakukan pelonggaran makroprudensial untuk meminimalkan dampak kontraksi suku bunga ke *output*.

Contoh lainnya adalah pengetatan kebijakan makroprudensial bersamaan dengan akomodasi kebijakan moneter lebih efektif dalam menahan risiko akibat kondisi keuangan global yang longgar terhadap pertumbuhan ekonomi. Kombinasi antara kebijakan moneter dan intervensi nilai tukar dapat membantu mengurangi dampak guncangan eksternal dibandingkan dengan hanya menggunakan satu instrumen.

Dalam jangka panjang terdapat dampak yang perlu diperhatikan bank sentral dalam penggunaan instrumen-instrumen tersebut. Intervensi nilai tukar dapat mendorong korporasi meningkatkan pinjaman luar negerinya. Berbagai studi tidak menemukan dampak langsung dari intervensi nilai tukar terhadap perkembangan dan reformasi keuangan dalam jangka panjang.

Intervensi nilai tukar juga berpotensi berdampak terhadap kredibilitas bank sentral karena adanya asosiasi tujuan yang lebih

dari satu (*multiple objective*) dengan praktik yang tidak transparan dan konsisten. Studi dampak kebijakan ini terhadap pertumbuhan jangka panjang juga masih terbatas.

IMF (2020) menyampaikan bahwa IPF diperuntukkan bagi upaya mencapai tujuan makroekonomi dan keuangan. Namun, ada kemungkinan IPF digunakan selain untuk tujuan tersebut, yaitu (i) membuat nilai tukar *undervalued* untuk membatasi apresiasi nilai tukar dan menjaga daya saing; (ii) menyubstitusi dari konsolidasi fiskal atau pengetatan moneter yang dibutuhkan; dan (iii) menghambat kompetisi dan penemuan harga untuk tujuan proteksi dan mengurangi fungsi pasar valas.

ii. Macro-Financial Stability Framework — BIS

Macro-Financial Stability Framework (MFSF) merupakan sebuah kerangka operasi bersama kebijakan moneter (termasuk intervensi nilai tukar), kebijakan mikro dan makroprudensial, serta kebijakan fiskal (termasuk CFM) dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi yang berbasis fondasi dari kebijakan struktural. Fokus MFSF adalah penggunaan kebijakan yang bersifat *countercyclical* untuk mengatasi isu prosiklikalitas.

Fluktuasi arus modal dan nilai tukar dapat menimbulkan *trade-off* bagi kebijakan moneter. Pertama, terdapat *trade-off* intra-temporal antara inflasi dan *output* yang bergerak ke arah berlawanan. Kedua, *trade-off* inter-temporal, yaitu ketidakseimbangan keuangan di masa depan yang timbul saat inflasi rendah.

Karena karakteristik struktural pada negara berkembang, *trade-off* ini bisa lebih berat bagi negara berkembang dibandingkan dengan bagi negara maju. Instrumen tambahan dapat mengurangi *trade-off* jika digunakan dalam kerangka kebijakan yang jelas dan koheren.

MFSF bertujuan mencapai stabilitas makro serta keuangan domestik dan eksternal, melalui operasi bersama berbagai kebijakan. Kebijakan moneter dan fiskal adalah dua pilar utama. Adapun kebijakan makroprudensial, manajemen arus modal, intervensi valuta asing, dan intervensi pasar domestik adalah instrumen pelengkap yang dapat mendukung kebijakan moneter dan fiskal yang sehat serta memitigasi *trade-off*. Perangkat kebijakan pelengkap dirancang untuk mengatasi dampak atau limpahan dari kondisi keuangan global.

MFSF mencakup lima elemen, yakni kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, kebijakan intervensi valuta asing, dan manajemen arus modal. Setiap kebijakan tersebut memiliki tujuan dan fokus yang berbeda. Kebijakan fiskal memiliki dua tujuan utama, yaitu memastikan terwujudnya kesinambungan fiskal dan mengendalikan fluktuasi siklikal yang berlebihan pada perekonomian.

Kesinambungan fiskal penting untuk menjaga ekspektasi dan mengurangi sensitivitas berlebihan ekonomi domestik terhadap kondisi keuangan global. Dengan demikian, persepsi bahwa kebijakan fiskal terlalu dominan dibandingkan dengan kebijakan moneter tidak akan muncul sehingga ekspektasi terhadap inflasi dan kepercayaan investor tetap terjaga.

Fluktuasi arus modal dan nilai tukar dapat menimbulkan trade-off bagi kebijakan moneter.

Di sisi lain, kebijakan moneter berfokus pada upaya menjaga stabilitas harga dan menekan ketidakstabilan makroekonomi dan keuangan. Dengan menjaga stabilitas harga, kebijakan moneter memberikan jangkar yang membuat perekonomian lebih tahan terhadap guncangan. Ekspektasi inflasi yang terjangkar

akan membuat ekonomi memiliki bantalan yang baik dalam menghadapi berbagai kemungkinan guncangan, termasuk guncangan yang berasal dari kondisi keuangan global dan fluktuasi nilai tukar.

MFSF mengusung tiga kebijakan komplementer atau bersifat pelengkap—kebijakan makroprudensial, intervensi valas, dan manajemen arus modal—untuk mendukung kebijakan fiskal dan moneter tersebut.

Kebijakan makroprudensial secara umum bertujuan meminimalkan tantangan kebijakan moneter dan fiskal. Caranya dengan memperkuat ketahanan sistem keuangan terhadap kerentanan, baik kerentanan keuangan domestik maupun global.

Studi empiris menemukan bahwa kebijakan makroprudensial memiliki dampak yang relatif lebih kuat terhadap kredit dibandingkan dengan terhadap harga aset, sementara terhadap pertumbuhan ekonomi atau inflasi tampak lemah atau tidak pasti. Hasil ini

mendasari penggunaan kebijakan makroprudensial untuk mengatasi risiko stabilitas sistem keuangan (Kuttner & Shim, 2016; Richter *et al.*, 2019).

Kebijakan makroprudensial juga memiliki efek yang bervariasi. Dari sisi pertumbuhan kredit, secara khusus, rasio pinjaman terhadap nilai (*loan to value/LTV*) dan rasio pembayaran cicilan utang dan jumlah pendapatan (*debt service to income/DSTI*) maksimum memberikan dampak yang lebih besar dan lebih terlihat dibandingkan dengan kebijakan *countercyclical capital buffer* (CCB) (Borio, 2018; Borio *et al.*, 2022; Kuttner & Shim, 2016).

Kelemahan dari kebijakan makroprudensial adalah instrumen ini sangat rentan terhadap bias kelambanan (*inaction bias*) akibat sulitnya memodelkan siklus keuangan serta kesulitan memprediksi titik balik jika terjadi tekanan pada ekonomi politik (Cerutti *et al.*, 2017; Claessens, 2015). Keterbatasan inilah yang mendasari kesimpulan bahwa kebijakan makroprudensial perlu digunakan bersamaan dengan kebijakan lainnya karena bersifat komplementer dan bukan alat substitusi.

Kebijakan intervensi nilai tukar merupakan salah satu elemen yang sangat penting bagi MFSE. Intervensi nilai tukar memiliki tujuan membangun penyangga terhadap arus keluar dan depresiasi mata uang di masa depan serta menahan dampak fluktuasi kondisi keuangan global terhadap ekonomi domestik. Intervensi ini sangat berguna bagi negara berkembang yang sangat rentan terpengaruh kondisi keuangan global.

Intervensi nilai tukar membantu mengatasi tekanan dari ketidakstabilan keuangan global dalam tiga cara utama. Pertama, melalui pengaruhnya terhadap nilai tukar, sehingga secara langsung dapat mengelola perubahan nilai tukar yang tidak diinginkan dan mencegah dampak negatif kepada kondisi keuangan, inflasi, dan aktivitas ekonomi. Studi empiris yang dilakukan oleh Gabaix dan Maggiori (2015) menjelaskan bahwa intervensi nilai tukar membantu meningkatkan independensi kebijakan moneter karena dapat menyerap sebagian beban dari kebijakan suku bunga.

Kedua, cadangan devisa menyediakan proteksi terhadap potensi depresiasi besar di masa depan. Oleh karenanya, cadangan devisa bisa menjadi bagian integral dari jaring pengaman keuangan suatu negara.

Studi yang dilakukan oleh BIS (2022) menjelaskan bahwa pada saat terjadi *taper tantrum* pada tahun 2013 dan 2015, pandemi Covid-19 pada tahun 2020, dan pengetatan kondisi global, negara berkembang dengan cadangan devisa lebih besar lebih mampu menjaga nilai tukarnya dari depresiasi yang besar.

Ketiga, intervensi nilai tukar dapat menahan imbas kondisi keuangan global (*global spillover*) ke ekonomi domestik. Hofmann *et al.* (2019) menjelaskan bahwa pembelian valas oleh bank sentral dapat membatasi dampak apresiasi nilai tukar dan pelonggaran kondisi keuangan yang mendorong tumbuhnya kredit domestik. Kelemahan dari intervensi nilai tukar adalah *trade-off* yang dihadapi bank sentral saat menggunakan instrumen ini.

Biaya untuk memupuk cadangan devisa terbilang besar. Apalagi jika suku bunga mata uang cadangan devisa sangat rendah dan suku bunga domestik sangat tinggi. Selain itu, dalam jangka panjang, intervensi nilai tukar dapat menghambat perkembangan pasar *hedging* dan keuangan domestik lain yang dapat membuat ekonomi lebih rentan. Oleh karena itu, intervensi nilai tukar harus dijalankan sesuai kebutuhan dan menjadi pelengkap dari kebijakan lain. Akumulasi cadangan devisa juga perlu mempertimbangkan analisis biaya dan manfaatnya.

Kebijakan manajemen aliran modal (CFM) merupakan kebijakan yang ditujukan untuk melengkapi kebijakan makroprudensial dan intervensi valas demi mencapai tujuan stabilitas keuangan secara keseluruhan. Kebijakan ini menyasar perbankan, surat berharga negara, saham, atau sektor properti. Beberapa negara maju juga menerapkan CFM karena adanya risiko dari fluktuasi investasi asing terhadap pasar perumahan (*housing*) di dalam negerinya.

Berdasarkan studi empiris yang dilakukan oleh Borio *et al.* (2022), beberapa negara berkembang telah menggunakan CFM untuk mengarahkan arus modal ke sektor perbankan, obligasi, ekuitas, dan properti. Studi ini juga menjelaskan bahwa negara berkembang telah menerapkan pengetatan CFM selama periode arus modal masuk meningkat, dan sebaliknya, ketika periode arus modal keluar.

Namun, instrumen ini juga memiliki kelemahan: dampak yang dihasilkan cenderung bersifat sementara dan masih banyak terjadi kebocoran (Bruno *et al.*, 2017). Oleh karena itu, CFM sering digunakan

ketika kebijakan lain tidak mencukupi untuk mengatasi risiko yang disebabkan oleh arus modal.

Keketuaan Indonesia untuk Pemulihan ASEAN

Pascapandemi Covid-19, tantangan yang dihadapi pemangku kebijakan di beberapa negara dalam upaya mendorong pemulihan dan menjaga ketahanan ekonomi menjadi semakin kompleks. Kondisi global yang diwarnai meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan pasar keuangan dunia, fenomena inflasi yang persisten tinggi (*stubborn inflation*), kebijakan suku bunga yang tetap tinggi untuk waktu yang lebih lama (*higher for longer*), serta isu ketahanan energi dan pangan memunculkan risiko yang perlu terus dicermati dan diwaspadai dampaknya terhadap perekonomian domestik.

Ketidakpastian perekonomian global meningkat disertai tren pertumbuhan yang melambat. Proses perbaikan ekonomi global pascapandemi Covid-19 diwarnai oleh adanya divergensi pemulihan. Hal itu menunjukkan perekonomian negara berkembang pulih relatif lebih cepat dibandingkan dengan negara maju.

Selain adanya divergensi pemulihan, kecepatan pemulihan pertumbuhan ekonomi global juga lebih lambat dari prakiraan, disebabkan oleh penyesuaian struktur pemulihan ekonomi global yang lebih didominasi sektor jasa. Dampak *forward* dan *backward linkages* (pengganda) sektor jasa tersebut relatif lebih kecil dari sektor lain. Daya dukungnya pada permintaan ekspor global juga tidak besar, sehingga dampak rambatannya pada pemulihan ekonomi global relatif terbatas.

Prospek penurunan inflasi global berjalan lambat. Situasi ini dipengaruhi oleh inflasi di negara maju yang masih tetap tinggi akibat berlanjutnya tekanan inflasi jasa, keketatan pasar tenaga kerja, dan meningkatnya harga minyak. Tekanan inflasi global yang masih tinggi mendorong tetap tingginya suku bunga kebijakan moneter di negara maju, terutama Federal Funds Rate (FFR) Amerika Serikat. Meski berlanjut, pengetatan kebijakan moneter di negara maju diperkirakan hampir mencapai puncaknya dan akan menurun pada tahun 2024.

Suku bunga global yang tetap tinggi dalam waktu lebih lama mengakibatkan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Perkembangan tersebut menyebabkan aliran modal ke negara berkembang menurun dan tekanan nilai tukar negara berkembang

semakin tinggi. Pelemahan nilai tukar dapat berakibat pada kenaikan inflasi barang impor (*imported inflation*) dan meningkatkan risiko kerentanan sistem keuangan.

Di sisi struktural, isu ketahanan energi dan pangan semakin mengemuka seiring dengan berlanjutnya ketegangan geopolitik dan transisi menuju ekonomi hijau. Gangguan rantai pasok akibat pandemi Covid-19 dan ketegangan geopolitik, terutama perang di Ukraina, berdampak pada kenaikan harga energi dan pangan global serta meningkatnya risiko ketersediaan energi dan pangan yang cukup.

Isu ini juga semakin mengemuka dengan adanya proses transisi menuju ekonomi hijau. Jika tidak dilakukan secara terukur dan gradual, proses transisi tersebut berpotensi menambah disrupsi ketahanan energi dan pangan global.

Peningkatan kewaspadaan terhadap risiko global lebih relevan terutama untuk negara-negara di ASEAN. Sebab, sebagai perekonomian kecil terbuka (*small open economy*), negara-negara di kawasan ASEAN lebih rentan terhadap dampak negatif rambatan gejolak perekonomian global. Otoritas kebijakan di negara ASEAN, baik moneter maupun fiskal, diharapkan dapat merumuskan dan mengimplementasikan respons kebijakan yang tepat. Kebijakan itu untuk memitigasi risiko rambatan gejolak global demi menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Selain itu, juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga berkelanjutan dan inklusif.

Dalam konteks ini, pada Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, Bank Indonesia menginisiasi pembahasan bauran kebijakan di antara negara anggota ASEAN sebagai salah satu upaya untuk mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Secara spesifik, Bank Indonesia mendorong penguatan rancangan dan implementasi bauran kebijakan di ASEAN untuk meningkatkan ketahanan makroekonomi dan stabilitas keuangan sebagai landasan bagi ASEAN menjadi episentrum pertumbuhan.

Implementasi Bauran Kebijakan di Negara Berkembang

Dalam praktiknya, bauran kebijakan lebih sering diterapkan oleh negara berkembang yang lebih rentan terhadap dampak rambatan perekonomian global, terutama akibat arus modal yang besar dan

berfluktuasi. Selain instrumen kebijakan moneter tradisional, seperti suku bunga, bank sentral negara berkembang juga menggunakan kebijakan stabilisasi nilai tukar, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan manajemen aliran modal.

Pendekatan yang dilakukan setiap bank sentral berbeda, sesuai dengan karakteristik dan kondisi ekonomi negara masing-masing. IMF (2020) dan BIS (2020) mendokumentasikan implementasi bauran kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral negara berkembang.¹

Dalam merumuskan kebijakan moneter, bank sentral negara berkembang tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi domestik, tetapi juga oleh faktor eksternal dan stabilitas sistem keuangan (IMF, 2020). Beberapa negara, seperti Indonesia dan Meksiko, mempertimbangkan faktor eksternal, seperti kebutuhan untuk menarik modal dari investor asing dalam perumusan kebijakan moneternya.

Sementara di Thailand, penetapan suku bunga juga mempertimbangkan stabilitas sistem keuangan. Suku bunga ditetapkan lebih tinggi daripada yang dibutuhkan untuk mengendalikan inflasi karena lebih ditujukan untuk memitigasi risiko stabilitas sektor keuangan seiring tingginya tingkat utang rumah tangga dan bisnis.

Bank sentral negara berkembang menggunakan beberapa instrumen untuk beberapa tujuan (BIS, 2020). Sebagian besar bank sentral anggota menganut prinsip Tinbergen, yaitu satu instrumen untuk satu tujuan. Kebijakan moneter umumnya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro; sementara kebijakan makroprudensial ditujukan untuk memitigasi risiko stabilitas keuangan domestik; dan kebijakan intervensi nilai tukar dan manajemen aliran modal untuk mendukung pencapaian stabilitas eksternal.

Akan tetapi, dalam praktiknya, beberapa instrumen dapat memengaruhi beberapa tujuan secara bersamaan. Singapura menyebutkan bahwa meski kebijakan makroprudensial terutama ditujukan untuk mengatasi risiko keuangan sistemik, kebijakan ini juga dapat memengaruhi tujuan lainnya seiring peranan harga aset terhadap stabilitas harga dan sistem keuangan.

¹ IMF (2020) meliputi diskusi dengan tujuh bank sentral, yaitu Brasil, Indonesia, Korea Selatan, Meksiko, Peru, Thailand, dan Malaysia. BIS (2020) meliputi sembilan bank sentral di negara berkembang Asia yang menjadi anggota Kelompok Kerja ACC, yaitu China, Hong Kong, India, Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

Penggunaan kombinasi instrumen dengan cara yang saling melengkapi disebut dapat memperkuat efektivitas kebijakan. Selain itu, juga membantu mengurangi beberapa dampak samping yang tidak diinginkan dari kebijakan. Survei IMF (2020) menemukan bahwa instrumen-instrumen dapat digunakan secara bersamaan atau bergantian sesuai efektivitasnya. Brasil dan Peru menggunakan kombinasi intervensi nilai tukar, manajemen aliran modal, dan makroprudensial, sehingga kebijakan moneter dapat lebih fokus pada stabilitas harga domestik.

Dalam beberapa kasus, penggunaan instrumen manajemen aliran modal disesuaikan sepanjang siklus bisnis. Sementara, kebijakan makroprudensial digunakan saat terdapat banyak aliran modal asing masuk ke dalam negeri.

Bank sentral negara berkembang menilai nilai tukar penting karena dampaknya terhadap stabilitas moneter dan keuangan, bukan bertujuan untuk menargetkan level nilai tukar tertentu (BIS, 2020). Nilai tukar tertransmisi melalui tiga jalur, yaitu jalur perdagangan, inflasi, dan keuangan. Jalur perdagangan dan inflasi cenderung semakin berkurang pengaruhnya, sedangkan jalur keuangan menjadi semakin penting.



DOKUMENTASI BI

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam diskusi kebijakan pada rangkaian pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN, di Bali, 29 Maret 2023.

Saat periode normal, tidak ada jalur yang mendominasi. Adapun dalam periode bergejolak, jalur keuangan menjadi dominan. Depresiasi mata uang bersifat ekspansioner saat periode normal, tetapi bersifat kontraktif saat periode bergejolak. Sumber utama kondisi keuangan global yang berdampak ke pasar keuangan domestik adalah kebijakan moneter dari negara maju, minat risiko investor global, dan kekuatan dollar AS.

Perumusan kebijakan terhadap nilai tukar dan aliran modal dilakukan melalui pemantauan likuiditas valuta asing, termasuk kecepatan perubahan nilai tukar, dan dampak aliran modal pada harga aset untuk memastikan kelancaran fungsi pasar (BIS, 2020). Pada kondisi normal, nilai tukar bergerak fleksibel sesuai dengan mekanisme pasar.

Bank sentral India, Korea, Malaysia, Filipina, dan Thailand menyebutkan, peran nilai tukar sebagai peredam guncangan (*shock absorber*). Oleh karena itu, respons awal dalam menghadapi tekanan nilai tukar adalah membiarkan nilai tukar bergerak menyesuaikan. Meskipun demikian, bank sentral siap untuk melakukan intervensi saat volatilitas nilai tukar berlebihan. Kebijakan intervensi nilai tukar ditujukan untuk menghindari volatilitas nilai tukar dan aliran modal (BIS, 2020).

IMF (2020) mencatat, tujuan Korea dan Thailand mengintervensi pasar valas adalah untuk mengendalikan nilai tukar yang dapat memengaruhi daya saingnya. Sebagian besar negara memanfaatkan peluang guna memupuk cadangan devisa, terutama setelah terjadi krisis keuangan global.

Cadangan devisa tersebut digunakan untuk memitigasi risiko saat terjadi volatilitas nilai tukar. Malaysia dan Meksiko misalnya, menggunakan cadangan devisanya untuk menahan depresiasi. Brasil, Indonesia, dan Peru juga menggunakan cadangan devisa guna mengurangi volatilitas nilai tukar, meskipun pada intensitas yang lebih rendah.

Thailand menyebutkan, intervensi nilai tukar untuk memastikan pasar berfungsi dengan baik (BIS, 2020). India melakukan intervensi sebagai respons terhadap volatilitas yang berlebihan, sementara intervensi Malaysia ditujukan untuk memitigasi risiko dari dinamika nilai tukar yang berlebihan dan fluktuatif.

Selain intervensi di pasar spot, bank sentral juga melakukan intervensi di pasar lain. India, misalnya, melakukan operasi di pasar derivatif mata uang *over-the-counter* dan yang diperdagangkan di bursa. Adapun Thailand juga melakukan intervensi secara verbal.

Bank sentral negara berkembang juga menerapkan kebijakan arus modal dan makroprudensial untuk mengelola fluktuasi nilai tukar dan arus modal yang berlebihan (BIS, 2020). Arus keluar yang besar dapat berdampak pada pengetatan kondisi keuangan, mendisrupsi intermediasi, dan memengaruhi *stance* kebijakan moneter.

Beberapa bank sentral menggunakan kebijakan manajemen aliran modal ketika intervensi dinilai tidak memadai. Di Thailand misalnya, manajemen aliran modal dapat digunakan jika volatilitas nilai tukar

disebabkan oleh aliran spekulatif dari bukan penduduk. Indonesia menggunakan instrumen manajemen aliran modal bersama dengan kebijakan suku bunga ketika volatilitas nilai tukar dinilai persisten.

Adapun India menggabungkan intervensi dengan manajemen aliran modal untuk memastikan

pengurangan volatilitas nilai tukar bertahan lama. Penggunaan kebijakan makroprudensial untuk mencapai tujuan stabilitas keuangan domestik secara umum meningkat.

Strategi yang digunakan setiap negara untuk menghadapi guncangan eksternal dipengaruhi oleh sejarah dan persepsinya (IMF, 2020).² Pengalaman krisis Asia di Indonesia, Korea, dan Thailand; krisis Tequila di Meksiko; dan hiperinflasi di Peru akan memengaruhi strategi bank sentral dalam menghadapi guncangan.

Strategi juga dipengaruhi beberapa kekhawatiran lama, seperti persepsi yang lebih negatif dari bank sentral di Brasil ketika mata uang terdepresiasi sehingga respons kebijakan moneter tidak sepenuhnya bergantung pada siklus bisnis. Contohnya, Brasil menahan suku bunga saat kondisi eksternal memburuk pada tahun 2018,

Instrumen kebijakan ekonomi makro harus dikembangkan dan diintegrasikan ke dalam strategi bauran kebijakan.

² Pengalaman tersebut seperti krisis Asia di Indonesia, Korea Selatan, dan Thailand; krisis Tequila di Meksiko; dan hiperinflasi di Peru.

sementara gap inflasi dan *output* berada pada zona negatif. Strategi juga memperhitungkan karakteristik struktural, seperti dolarisasi (penggunaan dollar AS dalam ekonomi) di Peru, serta kerentanan neraca sektor swasta di Malaysia dan Thailand.

Penggunaan bauran kebijakan umumnya terasosiasi dengan kondisi makroekonomi yang stabil saat ekonomi menghadapi tekanan, meski tidak selalu didasari kerangka kebijakan yang sistematis dan memerlukan sejumlah biaya (IMF, 2020). Selain itu, terdapat risiko efek samping yang tidak diinginkan dari penggunaan berbagai instrumen (BIS, 2020).

Filipina menyebutkan, potensi kerugian finansial akibat perubahan penilaian dan biaya sterilisasi dari kebijakan intervensi nilai tukar. Sementara Thailand mengemukakan, intervensi nilai tukar dapat mengurangi insentif sektor swasta untuk mengelola fluktuasi nilai tukar dengan alat lindung nilai yang tepat serta dapat menimbulkan tuduhan manipulasi nilai tukar.

Selain itu, intervensi nilai tukar yang berlebihan dapat menyebabkan distorsi harga dan menghambat efisiensi pasar. Di sisi lain, tidak melakukan intervensi juga dapat menimbulkan konsekuensi.

Menurut Thailand, volatilitas nilai tukar yang berlebihan dapat menghambat proses penyesuaian pelaku ekonomi dan merugikan bagi perekonomian. Liberalisasi aliran modal juga dapat memunculkan dampak yang tidak diinginkan. Upaya liberalisasi untuk mendorong arus yang lebih besar, baik arus masuk maupun keluar, umumnya dihadapkan pada kendala keengganan perusahaan domestik untuk merepatriasi asetnya dari luar negeri saat terjadi depresiasi nilai tukar.

Ruang kebijakan juga bisa terbatas saat kebijakan yang diperlukan berada di luar kewenangan bank sentral. Meski demikian, dalam situasi tersebut, bank sentral berpandangan, ada mekanisme untuk tetap bisa menjaga stabilitas.

Di Indonesia, bank sentral terus berkoordinasi dengan otoritas keuangan, Kementerian Keuangan, dan kementerian lainnya untuk memastikan kebijakan yang selaras dan terkoordinasi. Demikian pula Singapura yang berkoordinasi dengan berbagai lembaga untuk mencegah konflik antarkebijakan. Adapun India mencatat mekanisme koordinasi formal dan informal untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dengan otoritas lainnya.

Berdasarkan temuan di atas, implementasi bauran kebijakan perlu dilakukan dengan mengikuti panduan tertentu agar tidak berpotensi menimbulkan konsekuensi jangka panjang terhadap struktur perekonomian dan sistem keuangan. Pilihan instrumen bauran kebijakan tidak ditujukan untuk menjaga level nilai tukar (*misalignment exchange rate*) dan mendisrupsi penyesuaian natural dinamika perekonomian.

Penggunaan instrumen kebijakan aliran modal dan intervensi nilai tukar tidak seharusnya ditujukan untuk menjaga nilai tukar pada level tertentu guna meningkatkan kinerja ekspor. Penggunaan instrumen intervensi nilai tukar berpotensi mengganggu proses pendalaman pasar keuangan. Secara umum, diperlukan panduan untuk menentukan jenis dan waktu implementasi suatu instrumen tertentu dalam konteks bauran kebijakan, tergantung karakteristik ekonomi negara, jenis guncangan, dan risiko yang dihadapi.

Proses perumusan bauran kebijakan di bank sentral juga perlu didukung ketersediaan perangkat pemodelan kuantitatif agar bisa menghasilkan pilihan kombinasi instrumen kebijakan yang tepat sesuai guncangan yang dihadapi. Perangkat pemodelan kuantitatif juga diperlukan untuk melakukan simulasi berbagai skenario kebijakan.

Upaya pemodelan kerangka kebijakan terintegrasi oleh bank sentral terdiri atas model berbasis teori yang berskala besar dan model berukuran lebih kecil (BIS 2020). Model berukuran kecil lebih ditujukan untuk menilai risiko stabilitas keuangan. Hal itu disebabkan model besar berbasis teori dinilai tidak mempertimbangkan kemungkinan perubahan hubungan antarvariabel saat ada tekanan terhadap stabilitas keuangan.

Model berbasis teori juga biasanya tidak memasukkan dampak instrumen kebijakan selain tingkat suku bunga. Dengan demikian, model kecil dapat menjadi komplemen penggunaan model teori berskala besar dalam mendukung proses perumusan bauran kebijakan bank sentral.

Dinamika Pembahasan ASEAN untuk Pengarusutamaan Bauran Kebijakan

Inisiatif memperkuat penerapan bauran kebijakan makroekonomi dilakukan melalui pembahasan bauran kebijakan yang menjadi salah

satu agenda prioritas Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. Agenda ini juga telah disepakati bersama untuk dibahas di bawah Komite Kerja Liberalisasi Neraca Modal (Working Committee Capital Account Liberalization/WC-CAL).

Secara umum, pembentukan WC-CAL telah dimulai pada tahun 2003 bersamaan dengan pembentukan dua komite kerja lainnya guna mendorong kawasan ekonomi terpadu. WC-CAL dibentuk untuk mengintegrasikan pasar keuangan, mendukung liberalisasi jasa keuangan, dan membangun pasar modal yang berkelanjutan.

Anggota WC-CAL terdiri dari perwakilan bank sentral dan kementerian keuangan dari negara-negara anggota ASEAN. Dalam pertemuan WC-CAL, setiap negara anggota menyampaikan analisis terkait kesehatan arus modal dalam *heatmap*. WC-CAL juga merupakan wadah untuk melakukan dialog kebijakan tentang—tetapi tidak terbatas pada—arus modal dan mekanisme pengamanan (*safeguard mechanism*) untuk mencermati perumusan kebijakan untuk menjaga stabilitas keuangan di kawasan.

Selain itu, WC-CAL juga merupakan wadah bagi negara anggota dalam mendiskusikan inisiatif yang relevan untuk mempromosikan integrasi dan stabilitas keuangan. Selain pemetaan *heatmap*, WC-CAL juga menyusun Prinsip-prinsip Panduan ASEAN tentang Kerangka Kerja Penyelesaian Mata Uang Lokal (*ASEAN Guiding Principles on Local Currency Settlement Framework/LCSF*) yang disepakati bersama pada 2019. Pembahasan lebih lanjut atas inisiatif ini akan dijabarkan dalam Bab 3 mengenai ASEAN *LCT Framework*.

Kerja sama regional dapat mendorong pengelolaan arus modal secara lebih efektif.³ Lebih lanjut, proses liberalisasi neraca modal (CAL) yang saat ini sedang berjalan di ASEAN mengarah pada kerja sama kebijakan ekonomi makro di antara negara-negara anggota ASEAN.

Guna menyuarakan pentingnya bauran kebijakan dalam perumusan kebijakan, salah satu upaya yang diinisiasi Bank Indonesia dalam Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 adalah melalui pemahaman bersama mengenai bauran kebijakan yang dapat dijadikan resep bagi negara berkembang untuk “sembuh” dari tantangan terkini.

³ Asian Development Bank, *The Road to ASEAN Financial Integration: A Combined Study on Assessing the Financial Landscape and Formulating Milestones for Monetary and Financial Integration in ASEAN*, (Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank), 2013.

IMF dan BIS telah mengkaji kerangka kebijakan yang menggabungkan peran kebijakan moneter dengan kebijakan ekonomi makro lainnya. Kebijakan itu termasuk intervensi valuta asing, langkah kebijakan makroprudensial, pengelolaan arus modal, serta kebijakan fiskal yang berpotensi menjadi Pedoman dalam mengimplementasikan bauran kebijakan ekonomi makro. Dengan memanfaatkan kajian tersebut, Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 menginisiasi pembahasan dan dialog kebijakan antarnegara dengan melibatkan perwakilan BIS untuk memaparkan MFSF dalam pertemuan pertama WC-CAL pada tahun 2023.

Dalam penjelasan BIS, MFSF bertujuan mencapai stabilitas makro serta keuangan domestik dan eksternal dengan menerapkan bauran kebijakan yang berbeda, antara lain kebijakan moneter dan fiskal, intervensi valuta asing, dan intervensi pasar keuangan domestik. Langkah bauran kebijakan yang diambil secara umum digunakan untuk dapat meratakan siklus *boom-bust* dengan tetap mempertimbangkan kondisi negara masing-masing.

Dalam pertemuan, beberapa anggota meminta klarifikasi lebih lanjut tentang MFSF sebagai salah satu perangkat kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh negara berkembang. Dalam kesempatan ini, BIS menekankan perlunya memperkuat fundamen dan mengambil langkah-langkah lanjutan untuk mencegah ketidakseimbangan keuangan.

Mengingat pentingnya peningkatan pemahaman terkait pengaturan kebijakan serta pemanfaatan kajian kerangka kerja yang sistematis, WC-CAL menyepakati perlunya meningkatkan hubungan dengan institusi-institusi keuangan internasional untuk mendapatkan akses terkini dalam kajian yang sesuai dengan pembahasan di ASEAN.

Upaya penguatan kerja sama ini menjadi salah satu prioritas tahunan (*annual priorities*) WC-CAL. Secara umum, inisiasi pembahasan upaya memperkuat implementasi bauran kebijakan oleh Bank Indonesia pada Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 memperoleh respons yang baik dalam pertemuan ASEAN. Hal itu mengingat negara kawasan cenderung menghadapi tantangan yang sama dan memiliki kondisi sosial, ekonomi, ataupun geografis yang relatif sama.

Dengan demikian, penguatan dialog kebijakan menjadi sarana krusial untuk mendorong upaya ASEAN memperkuat resiliensi

regional. Dialog kebijakan juga diharapkan bisa menjadi bagian dari usaha bersama ASEAN dalam menghadapi tantangan global di luar isu liberalisasi neraca modal (*capital account liberalization*).

Hasil diskusi dalam pertemuan setingkat komite kerja selanjutnya dilaporkan dalam pertemuan setingkat deputi. Pada akhirnya, hasil diskusi disampaikan kepada gubernur bank sentral serta menteri keuangan negara-negara anggota ASEAN. Dalam pertemuan, gubernur bank sentral dan menteri keuangan menegaskan kembali komitmen ASEAN untuk menjaga stabilitas keuangan guna mengatasi tantangan multidimensi dengan melakukan penguatan bauran kebijakan yang meliputi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan keuangan, dan reformasi struktural.

Dalam hal ini, kebijakan moneter akan fokus pada stabilisasi inflasi inti yang dapat dilengkapi dengan intervensi valuta asing dan langkah-langkah manajemen arus modal jika diperlukan. Komitmen ini dituangkan dalam dua kesepakatan *principals* atau setingkat gubernur bank sentral dan menteri keuangan ASEAN melalui Joint Statement of the ASEAN Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting (AFMGM) Ke-9 dan Ke-10 di bawah Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. Dalam kesepakatan itu, ASEAN menekankan pentingnya penguatan bauran kebijakan makroekonomi ASEAN untuk menjawab tantangan global saat ini.

Sebagai bentuk tindak lanjut penguatan bauran kebijakan serta upaya mengarusutamakan bauran kebijakan (*mainstreaming the policy mix*), ASEAN menyelenggarakan seminar tingkat tinggi sebagai acara pendukung (*sideline events*) AFMGM. Pelaksanaan dua seminar ini merupakan sarana untuk meningkatkan kerja sama ekonomi regional dan bilateral serta mendorong berbagi pelajaran dan kebijakan.

Seminar pertama dengan topik "Enhancing Policy Calibration for Macro-Financial Resilience" digelar untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya peran otoritas untuk merumuskan respons kebijakan serta perlunya penerapan kebijakan yang adaptif dengan instrumen beragam untuk mengatasi meningkatnya tantangan global.

Seminar ini juga menjelaskan beberapa contoh penerapan bauran kebijakan di ASEAN, seperti di Indonesia dan Filipina. Penerapan bauran kebijakan Bank Indonesia meliputi kebijakan moneter untuk stabilitas makroekonomi agar inflasi terjaga, kebijakan

makroprudensial yang akomodatif, dan kebijakan sistem pembayaran untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital.

Sementara di level nasional, bauran kebijakan Indonesia melibatkan koordinasi antarpihak berwenang. Oleh karena itu, instrumen kebijakan ekonomi makro harus dikembangkan dan diintegrasikan ke dalam strategi bauran kebijakan untuk memastikan dampak kebijakan yang lebih luas dan efektif.

Guna mewujudkan tema "Epicentrum of Growth", ASEAN diharapkan mampu menjadi forum terdepan dalam mengimplementasikan berbagai instrumen kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Berbagai respons kebijakan telah digunakan secara ekstensif di kawasan ASEAN. Implementasi bauran kebijakan tersebut perlu digunakan secara seimbang untuk mencapai stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian ekonomi global yang bergejolak saat ini.

Selain itu, Bank Indonesia bekerja sama dengan Bank of Thailand menyelenggarakan seminar kedua dengan judul "Frameworks for Integrated Policy: Experiences and the Way Forward". Acara ini menjadi wujud diseminasi dan berbagi pelajaran mengenai penerapan implementasi bauran kebijakan. Beragam tantangan dan permasalahan yang dihadapi negara di ASEAN semakin mengonfirmasi bahwa *no one size fits all policy*. Oleh karena itu, optimalisasi kerangka kebijakan yang dapat mengintegrasikan berbagai instrumen kebijakan diperlukan untuk menyeimbangkan interaksi antarinstrumen kebijakan yang diimplementasikan.

Seiring dengan besarnya tantangan dalam penerapan bauran kebijakan, koordinasi yang kuat di antara pengambil kebijakan diperlukan untuk memastikan kebijakan diterapkan secara efektif. Koordinasi juga dibutuhkan mengingat pentingnya menjaga komunikasi terkait bauran kebijakan. Sebab, bauran kebijakan dapat bersifat multiobjektif.

Pada kegiatan tersebut disampaikan contoh keberhasilan implementasi bauran kebijakan ekonomi oleh beberapa negara ASEAN, seperti Indonesia, Thailand, dan Filipina. Penerapan bauran kebijakan perlu dilandasi oleh kerangka kerja konseptual (*conceptual framework*) yang kuat dan koordinasi di antara pembuat kebijakan sehingga kebijakan bisa tepat sasaran.

Seminar mengindikasikan bahwa ASEAN telah menjadi pelopor dalam penerapan bauran kebijakan melalui penerapan berbagai perangkat kebijakan, termasuk intervensi nilai tukar, manajemen aliran modal, dan kebijakan makroprudensial di tengah ketidakpastian global. Sejalan dengan beragamnya kondisi negara-negara ASEAN, diperlukan fleksibilitas dalam operasionalisasi bauran kebijakan sesuai dengan kondisi dan kesiapan negara masing-masing.

Capaian dan Langkah ke Depan Bauran Kebijakan

Sebagaimana disampaikan pada ASEAN's Leaders' Declaration, para pemimpin negara ASEAN mengakui bahwa ketahanan makroekonomi dan stabilitas keuangan adalah landasan bagi ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan. Para pemimpin juga menyadari pentingnya penguatan bauran kebijakan makroekonomi agar negara ASEAN dapat menggunakan semua instrumen yang tersedia untuk memastikan stabilitas ekonominya.

Pada pembahasan di tingkat komite kerja, inisiatif Bank Indonesia terkait bauran kebijakan menjadi bagian dari salah satu prioritas tahunan WC-CAL pada 2023, yaitu memperkuat hubungan dengan institusi-institusi keuangan internasional melalui pembahasan perangkat kebijakan ekonomi seperti yang telah dilakukan IMF dan BIS.

Selain itu, *co-chairs* WC-CAL telah mengusulkan agenda prioritas tahunan WC-CAL pada 2024, yaitu penguatan proses dialog kebijakan (*policy dialogue*). Usulan ini didasari oleh perkembangan dialog kebijakan yang dianggap cukup terbatas di antara negara anggota ASEAN, baik dalam hal memajukan upaya liberalisasi neraca modal maupun dalam upaya mengimplementasikan tindakan pengamanan arus modal (*capital account safeguard measures*).

Mengingat tinjauan mandat komite kerja yang akan datang, pembahasan dalam WC-CAL berpotensi berkembang ke masalah ekonomi makro, keuangan, dan kebijakan yang lebih luas. Dengan demikian, inisiatif pembahasan terkait bauran kebijakan, penguatan kerja sama dengan organisasi internasional, serta agenda prioritas WC-CAL penguatan proses dialog kebijakan diharapkan dapat membantu upaya negara-negara anggota ASEAN dalam memperkuat resiliensi makroekonomi.

Peningkatan pemahaman negara anggota ASEAN tentang IPF dan

MFSF merupakan upaya ASEAN mengarusutamakan bauran kebijakan. Upaya itu telah dilakukan sepanjang Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 melalui berbagai platform. Di antaranya melalui diskusi dalam rapat komite kerja dan penyelenggaraan acara pendukung, termasuk dialog kebijakan tingkat tinggi (*high-level policy dialogue*) mengenai bauran kebijakan makroekonomi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Bank of Thailand pada 22 Agustus 2023.

Selain itu, gubernur bank sentral dan menteri keuangan ASEAN berkomitmen memperkuat bauran kebijakan di ASEAN, sebagaimana tertuang dalam Joint Statement of the ASEAN Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting (AFMGM) Ke-9 dan Ke-10. Lebih lanjut, para pemimpin negara ASEAN juga menuangkan penguatan bauran kebijakan sebagai salah satu upaya memperkuat ketahanan dan kemampuan ASEAN bangkit kembali dan bergerak maju secara cepat dan efektif dalam ASEAN Leaders' Declaration on ASEAN as an Epicentrum of Growth periode September 2023.

Di bawah Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, bauran kebijakan semakin dikenal dan dipahami di ASEAN sebagai kerangka kebijakan yang penting untuk diterapkan, terutama di tengah tantangan dan ketidakpastian global saat ini. Untuk memastikan bauran kebijakan makroekonomi dipahami, diterapkan, dan diakui, ASEAN juga melibatkan IMF dan BIS untuk berdiskusi dan bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN agar lebih memahami konteks regional sekaligus meningkatkan implementasi bauran kebijakan makroekonomi.

Para pemimpin negara-negara ASEAN bertekad memperkuat kapasitas dalam mengelola risiko stabilitas keuangan, memperdalam integrasi dan stabilitas keuangan regional, serta meningkatkan kesiapan respons regional terhadap ketidakstabilan makroekonomi dan tantangan sistem keuangan.

Di masa mendatang, upaya mengarusutamakannya diharapkan dapat meningkatkan pemahaman otoritas akan bauran kebijakan. Pada gilirannya, pemahaman tersebut dapat mendorong pemanfaatan bauran kebijakan oleh otoritas dalam menavigasi tantangan ekonomi. Dalam aspek ini, implementasi IPF dari IMF dan MFSF dari BIS diharapkan berjalan dengan terintegrasi dan bekerja beriringan sebagai bauran kebijakan makroekonomi yang diterapkan di ASEAN.

Inovasi dengan Bauran Kebijakan

Tantangan yang semakin kompleks mendorong bank sentral melakukan inovasi kebijakan dengan menggunakan berbagai instrumen untuk mencapai tujuan stabilitas domestik dan eksternal. Pilihan kebijakan yang terdeviasi dari pendekatan kebijakan moneter konvensional tersebut terjadi karena latar belakang, kondisi, dan karakteristik negara yang berbeda satu sama lain.

Bank sentral di negara berkembang, misalnya, di samping menggunakan kebijakan moneter tradisional seperti suku bunga, juga menerapkan kebijakan stabilisasi nilai tukar, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan manajemen arus modal guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Praktik kebijakan ini dilatarbelakangi karakteristik perekonomian negara berkembang yang rentan terhadap rambatan gejolak pasar keuangan global. Oleh karena itu, instrumen yang digunakan harus bersifat bauran kebijakan.

Fenomena tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong pengembangan Kerangka Kerja Kebijakan Terintegrasi (Integrated Policy Framework/IPF) dari Dana Moneter Internasional (IMF). IPF bertujuan mengkaji ulang formula kebijakan moneter, nilai tukar, makroprudensial, dan manajemen aliran modal yang paling tepat guna membantu negara-negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas keuangan di tengah berbagai risiko yang dihadapi. Risiko itu terutama terkait dengan meningkatnya risiko limpahan dan semakin eratnya keterkaitan antara sektor makrokeuangan (*macro-financial linkages*) dan sektor eksternal.

IPF mempertimbangkan secara simultan peran empat kebijakan, yakni moneter, nilai tukar, makroprudensial, dan manajemen aliran modal. Kebijakan moneter ditujukan untuk mengelola permintaan dalam rangka menjaga stabilitas harga dan mengurangi fluktuasi *output*. Adapun intervensi nilai tukar dapat digunakan untuk beberapa tujuan, termasuk untuk

mengendalikan inflasi, memupuk cadangan devisa, meredam volatilitas di pasar keuangan yang dangkal, menjaga stabilitas keuangan, serta mencegah penguatan mata uang yang dapat mengurangi daya saing (Hofman *et al.*, 2020).

Kebijakan manajemen arus modal ditemukan efektif dalam mengubah komposisi arus modal guna memitigasi risiko stabilitas keuangan. Kebijakan makroprudensial semakin kerap digunakan untuk mengelola pertumbuhan kredit dan menahan penumpukan kerentanan domestik yang bersumber dari kondisi keuangan global yang longgar dan mendukung ketahanan terhadap guncangan.

Penggunaan instrumen makroprudensial, manajemen aliran modal, dan intervensi nilai tukar secara bersamaan dan tepat dapat memberikan ruang yang lebih besar untuk otonomi kebijakan moneter bagi pencapaian stabilitas domestik. Metode penggunaan tersebut juga lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan instrumen tunggal.

Seperti halnya IMF, Bank for International Settlements (BIS) melalui pengembangan Kerangka Kerja Stabilitas Makrofinansial (Macro-Financial Stability Framework/MFSF) juga merekomendasikan praktik perumusan kebijakan di bank sentral yang mencakup kombinasi penggunaan beberapa instrumen. Instrumen ini termasuk kebijakan makroprudensial, kebijakan intervensi nilai tukar, dan manajemen aliran modal.

BIS mencatat bahwa krisis keuangan dunia pada tahun 2008-2009 telah mendorong dan menekankan pentingnya sisi makroprudensial dalam sebuah kerangka kebijakan. Hasilnya, negara maju menggunakan kebijakan makroprudensial untuk mencapai stabilitas keuangan. Sementara itu, digunakan pula kombinasi kebijakan instrumen suku bunga dengan intervensi nilai tukar, kebijakan makroprudensial, dan manajemen aliran modal untuk menghadapi risiko yang muncul dari volatilitas aliran modal dan nilai tukar.

Konsep bauran kebijakan telah banyak diadopsi dan diimplementasikan oleh beberapa bank sentral di dunia, termasuk Indonesia. Bank Indonesia, sebagai salah satu pelopor paradigma bauran kebijakan bank sentral, turut aktif mendorong

IMF dan BIS untuk terus menyempurnakan konsep IPF dan MFSF sehingga dapat dijadikan panduan bagi negara anggota. Selain itu, mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis yang berubah sangat cepat, Bank Indonesia terus melakukan penguatan untuk mendukung implementasi transformasi bauran kebijakan.

Untuk mendukung operasionalisasi konsep bauran dalam proses perumusan kebijakan, Bank Indonesia mengembangkan sebuah alat kuantitatif dalam bentuk pemodelan yang dapat mempertimbangkan analisis siklus ekonomi dan keuangan secara terintegrasi, mendukung kerangka analisis dan asesmen mekanisme transmisi keterkaitan sektor makrokeuangan eksternal, serta mempertimbangkan *trade-off* dan interaksi antarkebijakan, dan mampu menyimulasikan dampak dari berbagai kombinasi kebijakan.

Model bauran kebijakan tersebut akan mengedepankan lima prinsip penajaman dari kebijakan moneter nonkonvensional yang dalam hal ini ditujukan untuk mengoptimalkan pengelolaan trilema pada kebijakan moneter dengan tetap mempertimbangkan efektifitas implementasinya dalam kondisi perekonomian terbuka (*small open economy*) seperti Indonesia. Kelima prinsip tersebut ialah:

- a. Melanjutkan kerangka kebijakan untuk mencapai target inflasi sebagai tujuan utama dari kebijakan moneter.
- b. Mengintegrasikan kebijakan moneter dan makroprudensial.
- c. Mengelola dinamika arus modal dan nilai tukar.
- d. Memperkuat strategi komunikasi kebijakan sebagai bagian dari instrumen kebijakan.
- e. Memperkuat koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dan pemerintah.

Pada model bauran kebijakan Bank Indonesia (BIPOLMIX), instrumen kebijakan moneter, makroprudensial, dan nilai tukar diposisikan untuk saling melengkapi dalam mencapai fungsi objektif Bank Indonesia, yaitu stabilitas harga, stabilitas nilai tukar, serta stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi.

Arah kebijakan didasarkan pada konsepsi adanya hubungan

erat antara pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, termasuk stabilitas sistem keuangan. Kebijakan moneter tetap diarahkan untuk mencapai kestabilan harga dengan mempertimbangkan harga aset (finansial dan properti) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

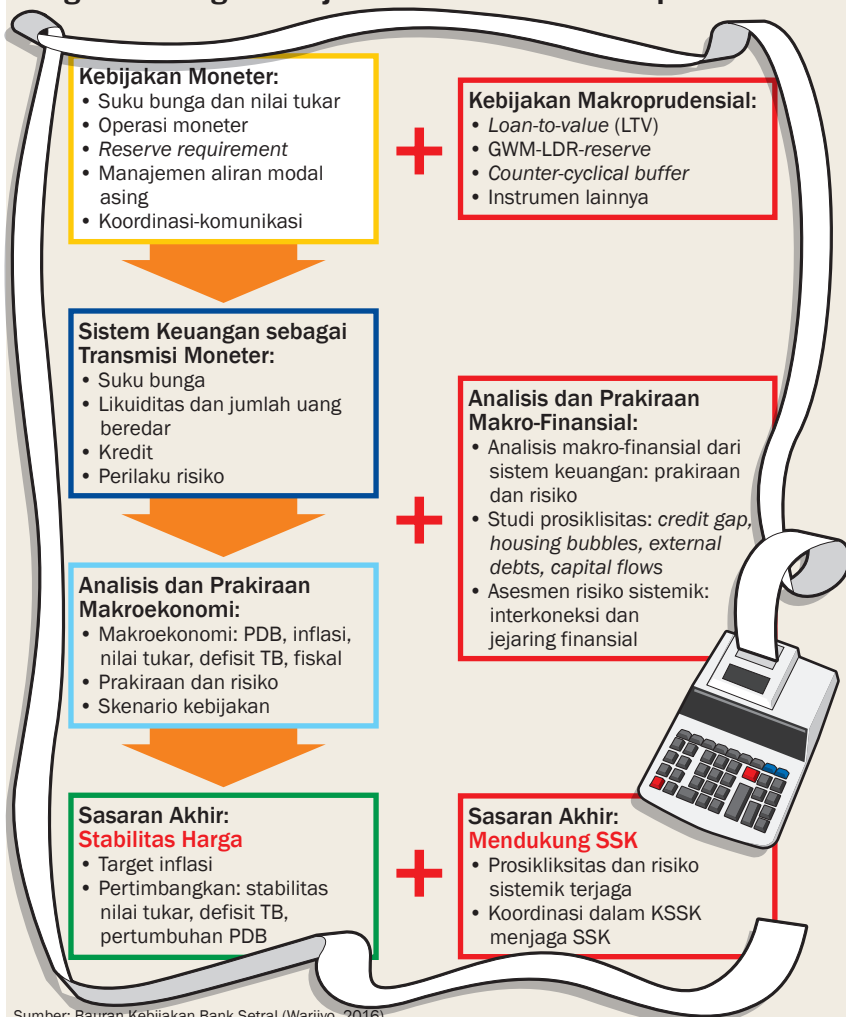
Kebijakan makroprudensial mencakup pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan dengan pemantauan keseluruhan sistem keuangan menggunakan perspektif makrofinansial dan berfokus pada fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas. Hal itu ditujukan untuk mendorong peningkatan pembiayaan perbankan bagi dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional.

Instrumen kebijakan makroprudensial juga diarahkan untuk membatasi risiko sistemik dalam mendukung terjaganya stabilitas sistem keuangan. Sementara itu, kebijakan nilai tukar dapat memperkuat efektivitas kebijakan moneter dalam mencapai stabilitas harga ataupun kebijakan makroprudensial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dari pengaruh perekonomian global.

Seiring dengan pengembangan dan implementasi model BIPOLMIX, Bank Indonesia juga memperkuat kerangka sistem pemodelan perumusan kebijakan. Sistem pemodelan ini mengintegrasikan proyeksi dan simulasi kebijakan sehingga dapat diperoleh pandangan yang koheren atas kondisi perekonomian, implikasi kebijakan, dan riset serta analisis lanjutan yang perlu dilakukan.

Selain itu, Bank Indonesia juga menyesuaikan proses pengambilan keputusan untuk bauran kebijakan, terutama terkait integrasi proses proyeksi dan simulasi kebijakan moneter dan makroprudensial. Hal ini dilakukan agar proses perumusan kebijakan dapat berjalan secara terintegrasi dan dilengkapi pertimbangan yang terukur berdasarkan informasi terkini.

Integrasi Kerangka Kebijakan Moneter dan Makroprudensial



Gambar 2.1 Integrasi Kerangka Kebijakan Moneter dan Makroprudensial.



BAB 3

Mendorong Penggunaan Mata Uang Lokal untuk Meningkatkan Stabilitas Makroekonomi dan Keuangan



KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Penandatanganan nota kesepahaman pembentukan Satuan Tugas Nasional Local Currency Transaction antara lembaga otoritas keuangan dan sejumlah kementerian terkait, di Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Volume perdagangan dan investasi intra-ASEAN meningkat secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Menanggapi peningkatan ini, sekaligus untuk mengurangi ketergantungan terhadap dollar AS di kawasan, pada tahun 2019, negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk memperkuat kerja sama bilateral antarnegara dengan mendorong penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dan investasi lintas negara melalui penyusunan Pedoman bersama kerangka local currency settlement (LCS). Pada 2023, Indonesia menggagas penguatan penggunaan mata uang lokal melalui LCS menjadi local currency transaction (LCT).

Sebagai salah satu upaya mendukung *strategic thrust* Indonesia pada pilar pemulihan ekonomi (*recovery and rebuilding*) dan sebagai upaya mendukung stabilitas ekonomi, Bank Indonesia menginisiasi pembahasan penguatan penggunaan mata uang lokal di ASEAN. Penjajakan ini dilakukan melalui strategi diversifikasi mata uang dengan mempromosikan Kerangka Transaksi Mata Uang

Lokal atau yang dikenal dengan Local Currency Transaction (LCT) Framework.

Secara umum, beberapa negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina, telah menandatangani *memorandum of understanding* (MoU)/*letter of intent* (LoI) secara bilateral untuk menyepakati LCS. Selanjutnya, dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara ASEAN telah menggunakan mata uang lokal sebagai alat tukar dalam penyelesaian transaksi perdagangan dengan negara lain, antara lain Indonesia-China, Indonesia-Korea Selatan, Indonesia-Jepang, dan Malaysia-Thailand.

Meninjau lingkungan strategis dan perkembangan ekonomi global saat ini, penggunaan mata uang lokal menjadi lebih relevan sehingga diperlukan penguatan untuk mendorong implementasinya. Sebelumnya, pengembangan penggunaan mata uang telah dilakukan melalui penyusunan Pedoman Local Currency Settlement Framework (LCSF) di bawah naungan kelompok kerja Capital Account Liberalization (CAL) pada 2019. Namun, mempertimbangkan cakupan LCSF yang masih terbatas dan kebutuhan untuk mengembangkan pasar mata uang lokal, ada dorongan untuk memperkuat LCSF.

Tren Diversifikasi Mata Uang di Sejumlah Negara

Dalam beberapa tahun terakhir, tren diversifikasi mata uang pada cadangan devisa ataupun penggunaannya sebagai alat pembayaran transaksi antarnegara tengah menjamur di berbagai belahan dunia. Bank Sentral Rusia (The Central Bank of Russian Federation/CBR) telah mengambil langkah untuk mendiversifikasi komposisi mata uang cadangan devisanya dalam beberapa dekade terakhir dengan menambahkan franc Swiss, renminbi China, hingga yen Jepang, selain emas yang menjadi pilihan utama mereka.

Hal yang serupa terjadi di Bank Sentral China. Sejalan dengan volatilitas hubungan diplomatik antara Washington dan Beijing, Bank Sentral China (People's Bank of China/PBoC) juga melakukan diversifikasi cadangan devisa dengan meningkatkan porsi emas dan aset-aset alternatif dalam portofolio cadangan devisa China. Selain emas dan aset-aset alternatif, China juga memiliki investasi besar di Dana Pembangunan China-Afrika dan menjalankan kerja sama dengan negara-negara di Amerika Latin.

Selain dalam hal cadangan devisa, diversifikasi penggunaan mata uang dari *hard currencies* menuju mata uang lokal juga menjadi tren dalam transaksi antarnegara. Rusia adalah contoh negara yang tengah intensif mengakselerasi penggunaan mata uang lokal untuk berbagai transaksi internasionalnya.

Strategi diversifikasi mata uang di Rusia tidak hanya berfokus pada cadangan devisa yang tersimpan di bank sentral, tetapi juga pada transaksi internasionalnya. Rusia menghendaki pembelian minyak dan gasnya dibayar dengan menggunakan rubel Rusia. Strategi tersebut saat ini cukup membuahkan hasil. Kendati saat ini tengah dikucilkan oleh negara-negara Barat atas keputusannya melakukan operasi militer khusus di Ukraina, Rusia cenderung memiliki kinerja perekonomian yang relatif terjaga meski sempat goyah beberapa waktu lalu.

Dengan mempertimbangkan berbagai sanksi ekonomi yang ditujukan kepada Rusia oleh negara-negara Barat, beberapa negara lain, seperti India dan China, juga mengakselerasi penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional demi menjaga kedaulatan ekonomi mereka. Saat ini, Bank Sentral India (Reserve Bank of India/RBI) tengah gencar memberikan izin kepada importir dan eksportir India untuk menyelesaikan transaksi dalam mata uang rupee.

Mekanisme ini memungkinkan pembayaran faktur ataupun penyelesaian transaksi ekspor dan impor lainnya dalam rupee India dengan kurs yang telah ditentukan. Dalam proses ini, transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal melibatkan bank-bank yang ada di negara mitra dagang India untuk membuka rekening rupee khusus dengan bank mitra di India. Salah satu negara yang telah bekerja sama dengan India untuk menggunakan mekanisme tersebut adalah Rusia. RBI berharap langkah ini menyederhanakan proses bisnis perdagangan serta berpotensi menciptakan transaksi bilateral antarnegara yang berkelanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Arslanap, Eichengreen, dan Simpson-Bell (2022) dari Dana Moneter Internasional (IMF) menunjukkan bahwa penurunan dominasi dollar AS sebagai mata uang cadangan devisa sejumlah negara di dunia tidak diikuti oleh peningkatan pangsa *hard currencies* lainnya, seperti pound sterling, yen, dan euro yang selama ini merupakan komponen utama Special

Drawing Rights IMF. Di sisi lain, peningkatan pangsa yang cukup signifikan justru terjadi pada mata uang negara-negara berkembang, terutama renminbi China.

Hal ini menunjukkan mata uang negara-negara berkembang juga sudah mendapatkan apresiasi yang cukup baik di mata dunia. Dengan demikian, saat ini menjadi momentum potensial untuk mengembangkan LCT di tengah tren diversifikasi mata uang menuju mata uang negara-negara berkembang tersebut.

Selain diversifikasi mata uang cadangan devisa di sejumlah negara, belakangan ini juga ramai pembicaraan mengenai rencana beberapa negara di Amerika Latin untuk mengembangkan mata uang bersama (*common currency*), layaknya euro di Benua Eropa. Langkah besar tersebut juga didorong oleh volatilitas nilai tukar di negara-negara Amerika Latin yang berdampak negatif bagi stabilitas perekonomian negara-negara di kawasan tersebut. Meski demikian, penerapan *common currency* juga memiliki tantangan tersendiri. Tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa dampak negatif dari mata uang bersama cenderung melebihi manfaat yang dapat diambil dari kebijakan tersebut, seperti diutarakan oleh Feldstein (2012).

Potensi LCS Indonesia dengan Negara-negara ASEAN

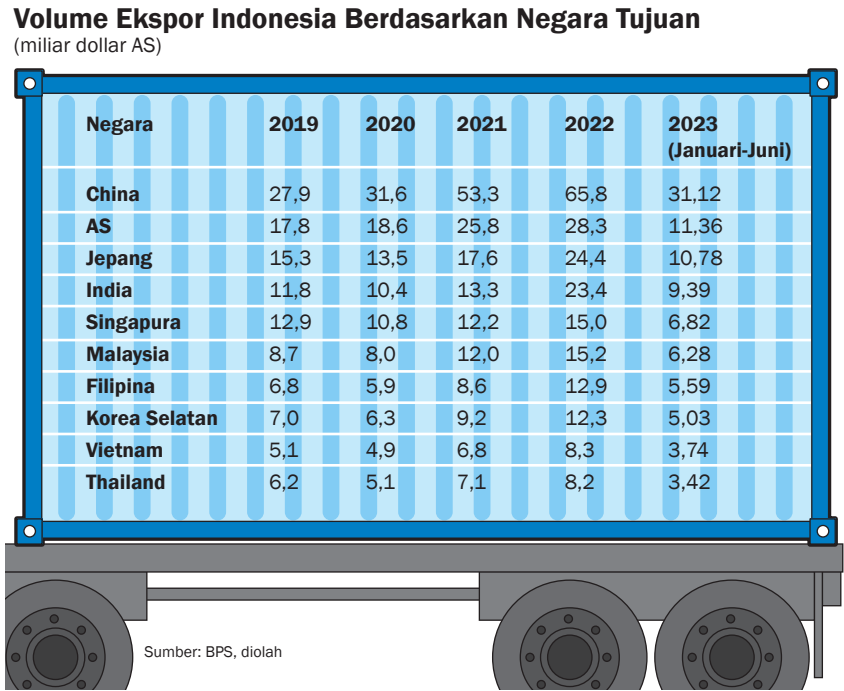
Negara-negara ASEAN yang memiliki kedekatan geografis dengan Indonesia tentu menjadi mitra dagang yang strategis, baik sebagai negara tujuan ekspor maupun asal impor. Berbagai program kerja sama perdagangan khusus antarnegara ASEAN juga memberikan insentif tambahan bagi eksportir dan importir di kawasan untuk saling menjual atau membeli barang dan jasa lintas negara.

Dengan melihat pentingnya posisi negara-negara ASEAN dalam kegiatan ekspor dan impor nasional, diperlukan kerangka transaksi yang dapat mendukung transaksi ekonomi untuk dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Pengembangan LCS merupakan salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi transaksi ekonomi antarnegara ASEAN karena menggunakan kurs yang kompetitif serta penyelesaian transaksi yang mengikuti zona waktu regional (*ASEAN timezone*).

Manfaat penggunaan mata uang lokal dalam transaksi ekonomi antarnegara juga dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat

dalam kehidupan sehari-hari. Volatilitas *hard currencies* dapat memengaruhi pergerakan harga kebutuhan pokok sehari-hari, terutama kebutuhan pokok yang berasal dari impor. Apabila terjadi lonjakan harga *hard currencies*, harga kebutuhan pokok impor yang dibayar dengan menggunakan *hard currencies* tersebut juga bisa naik. Fenomena ini dikenal dengan istilah inflasi impor (*imported inflation*).

Dengan melihat dinamika tujuan ekspor Indonesia dari tahun ke tahun, negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam cenderung selalu menjadi negara-negara tujuan utama eksportir Indonesia. Secara kolektif, total volume ekspor rata-rata ke lima negara tersebut mencapai lebih dari 44 miliar dollar AS. Angka ini bahkan lebih tinggi dari China ataupun Amerika Serikat, yang masing-masing tercatat 41,1 miliar dollar AS dan 21,8 miliar dollar AS.



Gambar 3.1 Volume Ekspor Indonesia Berdasarkan Negara Tujuan.

**Volume Impor Indonesia
Berdasarkan Negara Asal**
(miliar dollar AS)

Negara	2019	2020	2021	2022	2023 (Januari-Juni)
China	43,2	38,2	53,6	65,2	29,31
Singapura	20,2	13,9	18,5	22,6	9,38
Jepang	16,1	11,0	15,5	17,4	8,34
AS	9,3	8,4	11,6	11,7	5,73
Korea Selatan	8,7	7,1	9,8	12,2	5,57
Malaysia	7,8	7,0	9,6	12,7	5,29
Thailand	9,1	6,3	8,9	10,7	5,15
Australia	5,5	4,5	9,4	9,7	4,27
India	4,1	3,6	7,1	9,0	3,94
Hong Kong	5,1	4,0	5,6	4,6	1,95

Sumber: BPS, diolah

Gambar 3.2 Volume Impor Indonesia Berdasarkan Negara Asal.

Dari sisi impor, dengan melihat dinamika tujuan ekspor Indonesia dari tahun ke tahun, negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand yang merupakan tujuan ekspor utama Indonesia juga cenderung menjadi negara-negara utama asal impor Indonesia. Secara keseluruhan, total rata-rata volume impor dari negara-negara tersebut lebih dari 38 miliar dollar AS. Angka ini jauh lebih besar daripada volume impor Indonesia dari Amerika Serikat yang tercatat sebesar 10,2 miliar dollar AS.

Meskipun negara-negara ASEAN memiliki peran strategis dengan pangsa yang besar pada kegiatan ekspor dan impor nasional, penggunaan mata uang lokal negara-negara tersebut masih sangat minim. Berdasarkan data ekspor impor yang telah disampaikan sebelumnya, nilai transaksi ekspor impor negara-negara ASEAN dengan Indonesia secara keseluruhan lebih besar daripada transaksi dengan Amerika Serikat.

Di sisi lain, persentase penyelesaian transaksi dalam dollar AS masih sangat besar, yakni mencapai 94 persen untuk ekspor dan 80 persen

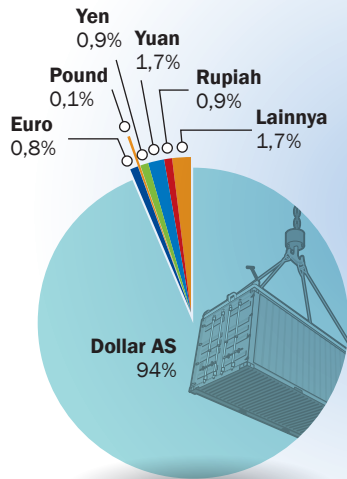
untuk impor. Berdasarkan angka tersebut, kita dapat membayangkan jika terjadi gejolak besar nilai tukar negara-negara ASEAN terhadap dollar AS, kegiatan ekspor dan impor Indonesia dengan kawasan ASEAN sangat mungkin mendapat gangguan yang cukup signifikan.

Dari sisi investasi, negara-negara ASEAN juga memiliki peran yang sangat strategis sebagaimana dalam kegiatan ekspor dan impor. Kedekatan geografis negara-negara ASEAN dan berbagai kerja sama ekonomi regional mendorong investasi lintas negara di kawasan ASEAN.

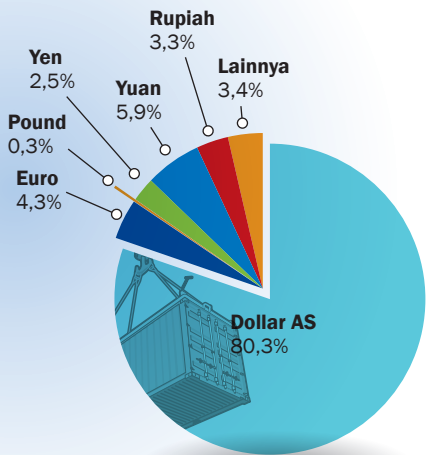
Berdasarkan data IMF, terlihat bahwa kontribusi negara-negara ASEAN terhadap aliran masuk investasi langsung asing ke Indonesia cukup signifikan. Bahkan, Singapura menjadi negara asal investasi langsung asing terbesar ke Indonesia secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Secara keseluruhan, rata-rata aliran investasi langsung asing ke Indonesia dari Singapura, Malaysia, dan Thailand mencapai hampir 80 miliar dollar AS setiap tahun.

Persentase Valuta Setelmen Ekspor dan Impor Indonesia 2023
(Januari-Juni)

Valuta Setelmen Ekspor Indonesia

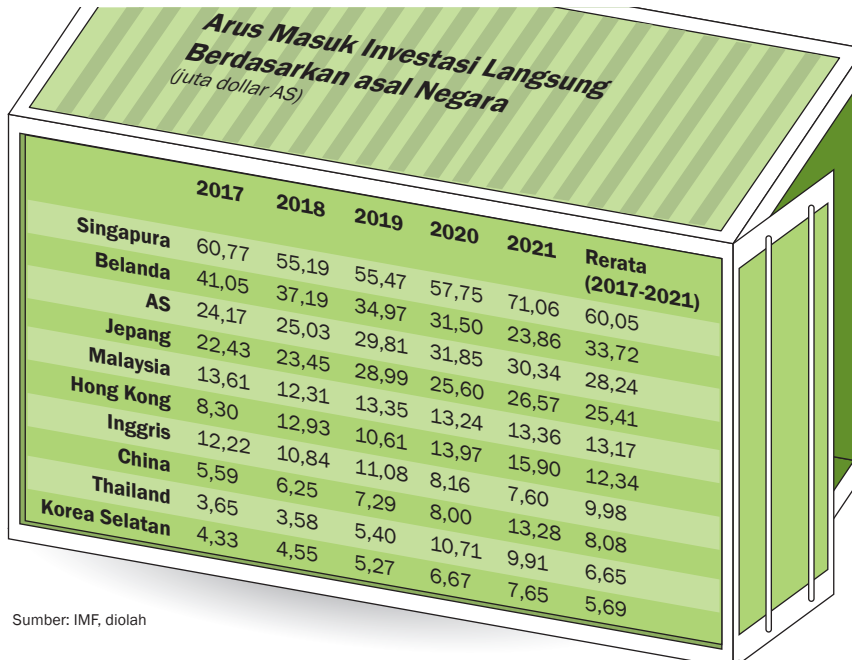


Valuta Setelmen Impor Indonesia



Sumber: SEKI BI

Gambar 3.3 Persentase Valuta Setelmen Ekspor dan Impor Indonesia.



Sumber: IMF, diolah

Gambar 3.4 Arus Masuk Investasi Langsung Berdasarkan Asal Negara.

Di sisi lain, negara-negara ASEAN juga menjadi tujuan investasi langsung bagi perusahaan-perusahaan Indonesia yang ingin mengembangkan bisnis. Berdasarkan data IMF, kontribusi negara-negara ASEAN terhadap aliran keluar investasi langsung asing dari Indonesia cukup signifikan.

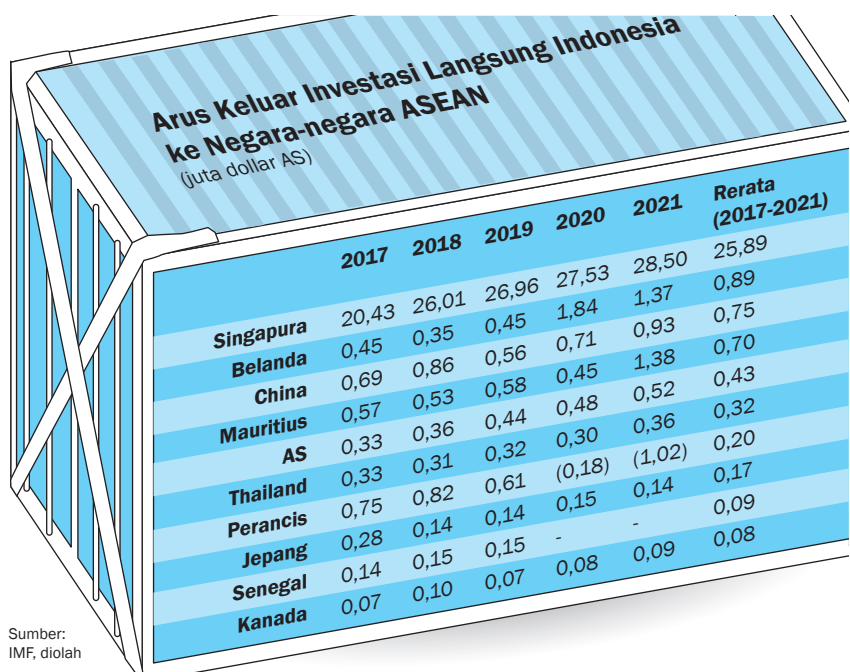
Singapura menjadi negara tujuan investasi langsung asing dari Indonesia yang terbesar secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Secara keseluruhan, rata-rata aliran investasi asing langsung dari Indonesia ke Singapura dan Thailand lebih dari 25 miliar dollar AS setiap tahun.

Sejalan dengan ketimpangan penggunaan mata uang yang terjadi dalam ekspor dan impor, ketimpangan penggunaan mata uang juga terjadi dalam aliran investasi langsung, baik ke dalam maupun ke luar negeri. Dengan melihat adanya ketimpangan penggunaan mata uang antara dollar AS dan mata uang lokal tersebut, Bank Indonesia secara aktif menginisiasi penggunaan mata uang lokal dengan negara-negara mitra dagang utama, termasuk negara-negara ASEAN yang memiliki

kedekatan geografis dan merupakan mitra dagang strategis Indonesia. Upaya ini disambut baik oleh negara-negara mitra dagang utama yang juga memiliki visi yang sama untuk mengurangi ketergantungan terhadap dollar AS.

Hingga saat ini, Indonesia telah menjalankan kerangka LCS dengan Thailand dan Malaysia untuk kawasan ASEAN. Di tahap komitmen, Bank Indonesia telah menandatangani *Letter of Intent* (Lol) LCS dengan Bank Sentral Filipina (Bangko Sentral ng Pilipinas/BSP) dan MoU LCT Monetary Authority of Singapore (MAS). Sementara di luar kawasan ASEAN, Indonesia telah menjalankan kerangka LCS dengan Jepang dan China.

Pada tahap komitmen, Bank Indonesia telah menandatangani MoU pemanfaatan LCT dengan Bank Sentral Korea (Bank of Korea/BoK) dan Bank Sentral India (Reserve Bank of India/RBI). Kerangka LCS yang saat ini telah berjalan dengan Thailand, Malaysia, Jepang, dan China akan dikembangkan menjadi LCT.



Gambar 3.5 Arus Keluar Investasi Langsung Indonesia ke Negara-negara ASEAN.

LCT sebagai Upaya Diversifikasi Mata Uang Transaksi Bilateral Indonesia

Pada dasarnya, kebijakan-kebijakan yang diadopsi sejumlah negara untuk mendiversifikasi mata uang cadangan devisa serta mengembangkan mata uang bersama kawasan bertujuan untuk mengurangi ketergantungan suatu negara terhadap mata uang tertentu. Ketergantungan yang tinggi terhadap mata uang tertentu, khususnya *hard currencies*, untuk transaksi ekonomi menyebabkan perekonomian Indonesia lebih rentan terhadap guncangan global (*global shock*).

Kerentanan tersebut sejalan dengan karakteristik pasar keuangan domestik yang masih berkembang (belum cukup dalam) serta persepsi terhadap produk keuangan Indonesia yang dianggap sebagai aset berisiko. Hal ini merupakan ancaman yang cukup besar terhadap stabilitas sistem keuangan dan ekonomi nasional.

Di Indonesia, Bank Indonesia sudah mengembangkan kerangka kebijakan *local currency settlement* (LCS), yang kini tengah dalam proses untuk diperkuat menjadi *local currency transaction* (LCT). Kebijakan ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan pada penggunaan *hard currencies*, misalnya dollar AS, dalam transaksi-transaksi internasional. Pada dasarnya, LCT merupakan transaksi ekonomi dan keuangan berdasarkan kerja sama lintas negara (*cross-border*) yang dilakukan melalui bank menggunakan mata uang lokal negara masing-masing.

Pengembangan LCS menjadi LCT dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal:

- a. Cakupan *line of business* LCS masih terbatas, yakni hanya untuk *current account* (CA) dan *direct investment* (DI).
- b. *Line of business* di pasar keuangan perlu dikaitkan dengan sistem pembayaran (SP) untuk mendukung transaksi dengan mata uang lokal.
- c. Partisipan di pasar keuangan masih terbatas, yakni bank *Appointed Cross Currency Dealer* (ACCD), dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan partisipan di sistem pembayaran.
- d. Nasabah LCT masih terbatas dan nilai transaksinya masih didominasi *wholesale*.
- e. Pasar valas non-dollar AS belum dalam dan likuiditasnya terbatas.

Secara umum, perbedaan utama antara LCS dan LCT terletak pada *underlying* transaksi dan aspek sistem pembayaran. *Underlying* transaksi adalah seluruh kegiatan ekonomi yang mendasari pelaksanaan LCS. Pada LCS, *underlying* transaksi yang diperkenankan meliputi *current account* (CA) dan *direct investment* (DI).

Sementara pada LCT, lingkup *underlying* diperluas menjadi *current account* (CA), *financial account* (FA), dan *capital account* (KA). Dari aspek sistem pembayaran, LCT akan mengadopsi inisiatif pembayaran Lintas Negara (*cross-border payment initiatives*).

Dalam kerja sama LCS Indonesia dan negara mitra saat ini, transaksi CA meliputi perdagangan barang dan jasa internasional, pendapatan primer, dan pendapatan sekunder. Transaksi perdagangan barang dan jasa internasional serta pendapatan sekunder mencakup transaksi yang dilakukan melalui pembayaran Lintas Negara, misalnya pembayaran QR, *fast payment*, atau metode pembayaran Lintas Negara lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan bank sentral negara mitra.

Pendapatan primer dan sekunder termasuk pendapatan dari investasi (yaitu dividen dan bunga), remunerasi untuk karyawan, pengiriman uang pekerja, dan transaksi CA lainnya.

Sementara *direct investment* (DI) meliputi, pertama, investasi yang menghasilkan setidaknya 10 persen kepemilikan ekuitas entitas *investee* (di negara mitra). Kedua, pinjaman antarperusahaan kepada suatu entitas (di negara mitra) dalam kelompok entitasnya. Ketiga, belanja modal dalam entitas atau proyek yang tidak berhubungan (di negara rekanan) melalui perjanjian tanpa pembentukan pendirian dengan ketentuan entitas menyumbangkan modal sekurang-kurangnya 10 persen dari biaya proyek.

Untuk kerangka LCT yang saat ini tengah dikembangkan, *underlying* transaksi akan mencakup CA, FA, dan KA. Transaksi FA meliputi investasi langsung atau DI; investasi portofolio, termasuk melalui pembayaran lintas negara seperti pembayaran QR, *fast payment*, atau metode pembayaran lintas negara lainnya; serta investasi lainnya.

Sementara transaksi KA meliputi transfer modal internasional serta akuisisi dan pelepasan aset nonproduksi dan nonkeuangan secara internasional.

Selain memperluas cakupan *underlying*, kerangka LCT juga

menambahkan inisiatif pembayaran lintas negara (*cross-border payment*) untuk mendukung kelancaran pembayaran antarnegara. Dalam hal penyelenggaraan, peran Bank ACCD dalam LCT diperkuat melalui penunjukan bank tertentu yang memiliki kemampuan dalam mendukung pengembangan transaksi ekonomi, pasar keuangan dan *cross border payment* dengan negara mitra LCT, yang berdasarkan pada kriteria *Size*, *Interconnectedness*, *Complexity*, dan *Substitutability* (SICS) sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Dalam kerangka LCS ataupun LCT, bank-bank asing dapat membuka rekening dalam denominasi rupiah di bank-bank yang beroperasi di Indonesia, demikian pula sebaliknya. Pembukaan rekening ini, dikenal sebagai *Special Purpose Non-Resident Account*, bertujuan mendukung penyelesaian transaksi dalam mata uang lokal.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank, bank-bank yang ditunjuk untuk melakukan penyelesaian kegiatan dan transaksi keuangan tertentu untuk kepentingan pelaksanaan LCS dikenal dengan istilah bank ACCD.

Rekening khusus milik bank ACCD dari negara mitra dalam mata uang rupiah, yang dibuka pada bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan LCS, dikenal dengan istilah rekening *Special Purpose Non-Resident Account* (SNA). Selanjutnya, rekening-rekening SNA yang dibuka oleh bank-bank asing tersebut memiliki subrekening di luar negeri yang disebut dengan rekening sub-SNA.

Rekening-rekening sub-SNA ini dapat dimiliki oleh nasabah untuk digunakan sebagai sarana pembayaran. Namun, rupiah yang terdapat di rekening sub-SNA tidak dapat ditarik tunai atau dipergunakan di luar negeri. Dengan demikian, kebijakan untuk tidak menginternasionalisasi rupiah tetap berlaku.

Dalam praktiknya, penyelesaian transaksi dalam rupiah tetap dilakukan di Indonesia, begitu pun sebaliknya. Pada saat nasabah dari luar negeri melakukan pembayaran dalam rupiah menggunakan rekening sub-SNA mereka, yang dilakukan adalah melakukan transfer dana dalam rupiah dari rekening SNA rupiah milik bank luar negeri ke rekening rupiah lainnya yang terdapat di bank dalam negeri (*book-keeping basis*).

Melalui LCT, Indonesia dan negara-negara mitra dagang tidak perlu mengembangkan mata uang bersama yang belum tentu dapat memberikan dampak positif yang maksimal bagi perekonomian nasional. Meski demikian, Indonesia dan negara mitra dapat mulai mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan *hard currencies* dalam transaksi ekonomi.

Kebijakan LCT memiliki sejumlah manfaat, baik bagi perekonomian secara makro maupun bagi pelaku usaha yang memanfaatkan program ini. Seperti yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, transaksi LCT dapat membantu mengurangi ketergantungan pada *hard currencies* yang rentan menimbulkan volatilitas perekonomian. Bagi pelaku usaha, LCT juga dapat memberikan manfaat. Dengan adanya penawaran langsung (*direct quotation*), nasabah bisa mendapatkan kurs valuta negara mitra LCT yang lebih efisien.

Terkait lindung nilai, LCT dapat meningkatkan efisiensi *hedging* melalui transaksi valuta asing. Dengan adanya sub-SNA, nasabah dapat membuka rekening rupiah di negara mitra untuk bertransaksi, termasuk melakukan remitansi. Selain itu, saldo rekening sub-SNA negara mitra dapat diinvestasikan secara lokal di negara mitra. Terkait pembiayaan, nasabah bisa mendapatkan pembiayaan untuk perdagangan dan investasi dalam mata uang lokal. Yang tidak kalah penting, nasabah dapat melakukan pengiriman dana lebih cepat (dalam zona waktu Asia).

Kerja Sama LCT di Kawasan

Strategi diversifikasi mata uang menjadi salah satu agenda dalam perdagangan dan investasi internasional sebagai upaya mengurangi risiko volatilitas nilai tukar di sejumlah negara. Menyikapi ketergantungan terhadap penggunaan mata uang tertentu yang mendominasi transaksi perdagangan serta dalam rangka memperkuat resiliensi pasar keuangan domestik, Bank Indonesia telah mengimplementasikan skema kerja sama *local currency settlement* (LCS) yang kini tengah dikembangkan menjadi *local currency transaction* (LCT). Inisiatif tersebut diharapkan dapat turut mengembangkan pasar mata uang regional, meningkatkan akses dan partisipasi pelaku pasar, serta meningkatkan efisiensi biaya transaksi dari *foreign exchange* dan *hedging*.

Transaksi Bilateral

Definition	Product	Pricing	Participant	Infrastructure	
Perluasan definisi	• Scope of area	• Underlying	Kuotasi harga	Penguatan Peran Bank ACCD	Interlink QR, fast payment, and securities settlement
Local Currency Settlement (LCS)					
Penyelesaian transaksi yang dilakukan secara bilateral oleh pelaku usaha di Indonesia dan negara mitra dengan menggunakan mata uang masing-masing.	Transaksi forex dan transfer dana mata uang lokal.	Current account dan direct investment.	Kurs transaksi (direct quotation).	Bank ACCD.	OTC-correspondent banking QR (trade).
Local Currency Transaction (LCT)					
Transaksi ekonomi dan keuangan berdasarkan kerja sama lintas negara (cross-border) yang dilakukan melalui bank menggunakan mata uang lokal negara masing-masing	• Transaksi forex dan transfer dana mata uang lokal. • Inisiatif cross border payment.	Current account, financial account, dan capital account.	• Kurs transaksi (direct quotation). • Kurs acuan non dollar AS.	Bank ACCD yang dipilih dengan memperhatikan kemampuan memfasilitasi transaksi ekonomi, pasar keuangan dan cross border payment berdasarkan kriteria SICS sesuai ketentuan Bank Indonesia.	• OTC-correspondent banking • QR (trade, secondary income, dan portfolio investment). • Fund settlement: fast payment cross border, RTGS multi-currency. • Securities settlement: BI-S4 dan KSEI.

Gambar 3.6 Transaksi Bilateral.

Selain itu, hubungan perdagangan antara Indonesia dan negara mitra juga diharapkan meningkat melalui LCT. Hal itu karena kebijakan ini dapat meningkatkan pembukaan rekening rupiah di negara mitra, membuka potensi untuk melakukan remitansi antara Indonesia dan negara mitra, mendapatkan pembiayaan untuk perdagangan dan investasi melalui bank ACCD, serta memungkinkan pengiriman dana yang lebih cepat.

Secara umum, penyelesaian transaksi bilateral oleh pelaku usaha di Indonesia dan negara mitra didorong menggunakan mata uang negara mitra melalui bank ACCD. Kerja sama antara Indonesia dan negara mitra dimulai sejak ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) LCS secara bilateral antara Indonesia dan Malaysia serta Indonesia dan Thailand pada 23 Desember 2016.

Kerja sama LCS kemudian dikembangkan melalui penandatanganan *letter of intent* (LoI) antara Indonesia dan Filipina pada 5 April 2019. Berikutnya, MoU antara Indonesia dan Jepang pada 5 Desember 2019, MoU antara Indonesia dan China pada 22 September 2020, MoU antara Indonesia dan Singapura pada 4 November 2022, serta MoU antara Indonesia dan Korea Selatan.

Penandatanganan MoU dan pelaksanaan kerja sama tersebut dilakukan oleh otoritas yang membawahkan *foreign exchange arrangements*. Dalam hal ini, otoritas yang terlibat adalah Bank Indonesia (BI), Bank of Thailand (BOT), Bank Negara Malaysia (BNM), Banko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), Bank of Korea (BOK), Kementerian Keuangan Jepang, dan People's Bank of China (PBoC).

Melalui penandatanganan MoU, kedua belah pihak atau otoritas yang terkait sepakat untuk membentuk kerangka kerja yang memfasilitasi lembaga-lembaga keuangan dalam menggunakan mata uang lokal untuk menyelesaikan perdagangan bilateral dan investasi langsung antara entitas di negara asal dan negara mitra.

Selain itu, melalui MoU, kedua otoritas terkait sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam pemantauan, pengawasan, dan pertukaran informasi terkait transaksi penyelesaian mata uang. Upaya mendorong penggunaan mata uang lokal dilakukan melalui diskusi secara berkala untuk memastikan perbaikan berkelanjutan dalam implementasi yang dilakukan secara bertahap.

Perkembangan Pembahasan LCT di ASEAN

Pembahasan terkait pemanfaatan mata uang lokal merupakan salah satu agenda utama dalam forum diskusi Working Committee Capital Account Liberalization (WC-CAL). Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, WC-CAL memiliki peran penting dalam mendorong integrasi keuangan ASEAN. Selain itu, diskusi terkait CAL juga diharapkan memperkuat ketahanan keuangan jangka panjang serta sistem keuangan secara keseluruhan, mendorong aliran modal yang berkelanjutan, dan mengembangkan pasar modal mata uang lokal.

Volume perdagangan dan investasi antarnegara anggota ASEAN terus meningkat. Menanggapi peningkatan perdagangan dan untuk mengurangi ketergantungan terhadap *hard currencies*, pada tahun 2019 ASEAN sepakat untuk memperkuat kerja sama bilateral antarnegara anggota dengan mendorong penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan Lintas Negara dan investasi.

Hal ini diwujudkan melalui penyusunan Pedoman Kerangka Penyelesaian Mata Uang Lokal (Local Currency Settlement Framework/ LCSF). Pedoman LCSF mencakup perdagangan barang dan jasa serta investasi langsung di antara negara anggota. LCSF juga dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan pada *hard currencies*, memperkuat ikatan regional, dan memitigasi risiko yang muncul.

Setelah Pedoman LCSF diterapkan dan *memorandum of understanding/letter of intent* atas pemanfaatan LCS disepakati di antara beberapa negara anggota, Bank Indonesia memandang perlu adanya upaya lanjutan untuk mendorong implementasi LCS. Selain itu, juga meninjau rasio terhadap total perdagangan yang masih rendah dan masih memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan.

Usulan pengembangan LCSF pertama kali dikemukakan dalam pertemuan setingkat deputi pada Senior Level Committee (SLC) yang diselenggarakan Februari 2023. Pertemuan SLC merupakan pertemuan khusus bank sentral di ASEAN untuk membahas agenda prioritas jalur keuangan yang merupakan ranah kebijakan bank sentral.

Dalam kesempatan ini, Bank Indonesia menyampaikan usulan PEDs Indonesia, salah satunya adalah mendorong operasionalisasi LCT untuk meningkatkan stabilitas makroekonomi dan keuangan di kawasan. Guna mendorong pemanfaatan dan operasionalisasi LCS serta pengembangan lebih lanjut, Bank Indonesia mengusulkan

pembentukan tim khusus yang ditugaskan untuk mengembangkan kerangka LCSF yang telah dimiliki ASEAN. Selanjutnya, pembahasan diperdalam melalui pertemuan ASEAN Central Bank Deputies Meeting (ACDM) serta ASEAN Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting (AFMGM).

Dalam Joint Statement of the 9th AFMGM, gubernur bank sentral dan menteri keuangan ASEAN mendorong pembahasan kerangka kerja pemanfaatan mata uang lokal. Hal ini didasari atas telah terjalannya kerja sama secara bilateral antarnegara ASEAN. Selain itu, juga dalam rangka mendorong penggunaan mata uang lokal untuk meningkatkan perdagangan dan arus investasi langsung di ASEAN. Dukungan AFMGM juga ditunjukkan melalui dukungannya terhadap pembentukan gugus tugas (*task force*) yang bertugas membahas perkembangan serta implementasi penggunaan mata uang lokal untuk meningkatkan perdagangan dan arus investasi langsung di kawasan.

Tidak berhenti di sini, komitmen tingkat tinggi juga ditunjukkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada 9-11 Mei 2023 dengan salah satu dokumen hasil KTT ASEAN dari pilar ekonomi, yaitu Deklarasi Pemimpin ASEAN pada Peningkatan Konektivitas Pembayaran Regional dan Transaksi Mata Uang Lokal (ASEAN Leaders' Declaration on Advancing Regional Payment Connectivity and Local Currency Transaction).

Tindak lanjut kesepakatan prinsip untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dan investasi diinisiasi melalui pembentukan ASEAN LCT Task Force (selanjutnya disebut TF LCT) di bawah naungan WC-CAL. Dalam diskusi, Bank Indonesia mengajukan diri untuk menjadi salah satu *co-chairs* TF LCT bersama Bank of Thailand. Secara umum, TF LCT bertujuan untuk mengembangkan Kerangka Kerja LCT, berdasarkan Pedoman LCSF yang telah disusun sebelumnya, untuk mempromosikan penggunaan mata uang lokal lebih lanjut dan menjadikannya sebagai salah satu dasar untuk memperkuat integrasi keuangan ASEAN.

Di samping itu, TF LCT juga bertujuan mendukung penggunaan LCT melalui inisiatif pembayaran Lintas Negara untuk transaksi grosir dan ritel serta mendiskusikan potensi peningkatan konektivitas pembayaran di ASEAN. Selain itu, juga berupaya mengatasi risiko yang terkait dengan ketergantungan pada mata uang asing utama

(*hard currencies*) dalam transaksi di antara negara ASEAN serta antara ASEAN dan mitra dagang non-ASEAN.

Merujuk pada Joint Statement dari 9th AFMGM dan hasil pembahasan 42nd ASEAN Summit, Bank Indonesia telah melakukan korespondensi dengan Bank of Thailand (BOT) dan National Bank of Cambodia (NBC) selaku *co-chairs* WC-CAL untuk menindaklanjuti pembentukan TF LCT ASEAN. Pada Mei 2023, WC-CAL melalui ASEAN Secretariat (ASEC) telah menyirkulasikan *term of reference* (ToR) pembentukan TF LCT ASEAN kepada negara-negara anggota ASEAN.

Selanjutnya, pada Juli 2023, pertemuan informal WC-CAL digelar untuk membahas pembentukan TF melalui finalisasi ToR dan penunjukan *co-chairs* TF LCT ASEAN. Dalam pertemuan ini, Bank Indonesia dan Bank of Thailand ditetapkan sebagai *co-chairs* TF LCT ASEAN guna memastikan kelangsungan jadwal dan *deliverables* serta memudahkan koordinasi dengan *co-chair* WC-CAL.

Berdasarkan hasil pembahasan, TF LCT ASEAN direncanakan menyiapkan dua *deliverables* utama, yaitu penyusunan High Level Principles on ASEAN LCT Framework (HLP on ASEAN LCTF), yang telah mendapat dukungan gubernur bank sentral dan menteri keuangan se-ASEAN melalui pertemuan AFMGM pada Agustus 2023, serta penyusunan kerangka ASEAN LCT yang akan dilaporkan ke AFMGM pada Maret 2024.

Selanjutnya, HLP on ASEAN LCTF diharapkan dapat menjadi Pedoman bagi negara-negara anggota ASEAN untuk menyempurnakan Pedoman ASEAN LCSF yang sudah ada sejak tahun 2019 dan mengembangkan Kerangka ASEAN LCT. HLP juga disusun untuk menjawab beberapa tantangan yang terjadi dalam implementasi LCSF, seperti perlunya peran aktif dari otoritas, fleksibilitas dalam pengaturan administrasi devisa asing (*foreign exchange administration*), serta perlunya mengatasi isu ketidakefisienan dalam penetapan harga (*pricing inefficiency*).

Bank Indonesia telah mengambil inisiatif untuk menyusun draf awal Prinsip-prinsip Tingkat Tinggi (High Level Principles/HLP) dengan mengacu pada struktur dokumen serupa yang pernah disepakati ASEAN, yaitu (i) ASEAN High-Level Principles on Consumer Protection (2017); (ii) ASEAN Sustainable Banking Principles (2021); dan (iii) The ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance.

Dalam kerangkanya, konsep ASEAN LCT Framework diusulkan mencakup berbagai aspek yang lebih luas dibandingkan dengan Pedoman ASEAN LCSF yang terutama hanya mencakup area administrasi pertukaran valuta asing serta pemantauan dan pelaporan. Pada konsep ASEAN LCT Framework ini, selain kedua area tersebut, juga terdapat area penguatan peran otoritas serta pengembangan infrastruktur pasar keuangan dan sinerginya dengan inisiatif pembayaran lintas negara (*cross-border payment initiatives*).

Oleh karena itu, dibutuhkan penjabaran yang lebih komprehensif dan memayungi seluruh upaya yang perlu dilakukan ke depan agar dapat menyentuh keseluruhan ekosistem di ASEAN.

Dalam implementasinya, Prinsip-prinsip Tingkat Tinggi (HLP) tidak bersifat preskriptif dan akan memperhatikan keunikan penerapan ketentuan dan kebijakan di negara masing-masing. Hal itu, antara lain, terkait administrasi pertukaran valuta asing, neraca pembayaran

(*balance of payment*), dan sistem pembayaran (*payment system*). Prinsip-prinsip itu juga dapat diterapkan secara bertahap sesuai kesiapan setiap negara anggota ASEAN.

Sejalan dengan penyelenggaraan AFMGM pada 25 Agustus 2023, Bank Indonesia menandatangani MoU secara

Bank Indonesia dan Bank of Thailand ditetapkan sebagai co-chairs TF LCT ASEAN.

bilateral antara Indonesia, Thailand (Bank of Thailand), dan Malaysia (Bank Negara Malaysia) untuk memperluas LCT. Dalam pertemuan ini, Gubernur Bank Indonesia mendorong negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk bergabung dalam penandatanganan MoU dan pelaksanaan penggunaan mata uang lokal. Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat mendorong stabilitas makroekonomi, sistem keuangan, serta mengatasi dampak global untuk menjawab tantangan pemulihan di kawasan.

Selanjutnya, pada pertemuan AFMGM Ke-10, para gubernur bank sentral dan menteri keuangan ASEAN menyepakati Prinsip-prinsip Tingkat Tinggi (HLP) yang telah disusun oleh gugus tugas (*task force/TF*). Secara umum, penyusunan HLP dijabarkan pada lima area kunci

yang secara keseluruhan mencakup 5 (lima) prinsip utama. Penjelasan singkat mengenai cakupan prinsip-prinsip pada lima area kunci itu adalah sebagai berikut:

1. Area 1: Peran otoritas (The Role of Authority). Area pertama menegaskan perlunya penguatan peran otoritas dalam merumuskan kebijakan dan pengaturan untuk mendukung implementasi ASEAN LCT Framework, terutama dalam mengatasi risiko likuiditas (*liquidity risk*) dan risiko mata uang (*currency risk*) serta memperkuat koordinasi dan komunikasi di antara para pemangku kepentingan, seperti melalui kampanye kolaboratif dan terarah. Pentingnya area kunci ini mempertimbangkan bahwa saat ini kesadaran mengenai implementasi *framework* LCS masih terbatas.
2. Area 2: Regulasi/Administrasi Pertukaran Valuta Asing (Foreign Exchange Administration/Regulation/FEA). Prinsip kedua menyatakan bahwa kerangka LCT perlu memungkinkan pengaturan FEA (Foreign Exchange Adminsitration) yang lebih fleksibel namun tetap mempertimbangkan keselarasan dengan peraturan domestik, pengembangan pasar keuangan, termasuk kebijakan non-internasionalisasi mata uang. Selain itu, area kunci ini juga mencakup penyediaan likuiditas, efisiensi pembentukan harga, dan pengembangan pasar keuangan mata uang lokal.
3. Area 3: Infrastruktur dan Pengaturan Pasar Keuangan (Financial Market Infrastructure and Arrangements). Area ini menggarisbawahi perlunya upaya untuk mendorong pembentukan infrastruktur sektor keuangan yang terintegrasi (*integrated*), dapat beroperasi bersama (*interoperable*), dan saling terhubung (*interconnected*) di antara negara-negara anggota ASEAN dalam rangka mendorong pembentukan harga yang jelas, transparan, dan efisien.
4. Area 4: Keterkaitan Kerangka LCT dan Inisiatif Pembayaran Lintas Negara (LCT Framework and Cross-Border Payment Initiatives Interlinkage). Prinsip pada area ini menegaskan perlunya upaya memastikan adanya sinergi antara LCT Framework dan inisiatif pembayaran lintas negara (ASEAN

Cross-Border Payment) melalui keterlibatan partisipan terkait. Hal ini ditujukan untuk mendukung transaksi yang lebih murah, cepat, aman, dan inklusif.

5. Area 5: *Monitoring*, Data/Informasi, dan Teknologi (Monitoring, Data/Information, and Technology). Area ini menegaskan perlunya upaya pengembangan pelaporan yang komprehensif dan *monitoring* untuk memastikan pertukaran dan perlindungan data yang aman dan selaras dengan mitigasi risiko melalui penggunaan teknologi digital.

Ke depan, target penyelesaian seluruh aktivitas kerja gugus tugas LCT diharapkan selesai pada awal 2024 atau pada pertemuan pertama AFMGM tahun 2024 di bawah Ketetuaan ASEAN Laos 2024. Prinsip-prinsip Tingkat Tinggi (HLP) yang disusun diharapkan dapat menjadi acuan bersama yang tidak mengikat (*non-binding*) bagi negara anggota untuk menetapkan peraturan guna mempromosikan penggunaan mata uang lokal di ASEAN dan memfasilitasi kolaborasi yang akan datang antarnegara anggota.

Kolaborasi Bank Indonesia dengan Berbagai Pihak Terkait dengan Penggunaan Mata Uang Lokal

Dengan melihat besarnya manfaat dari pengurangan ketergantungan terhadap *hard currencies* untuk berbagai transaksi ekonomi, baik bagi perekonomian secara makro maupun bagi pelaku usaha, Pemerintah Indonesia juga turut memberikan perhatian yang besar pada akselerasi penggunaan mata uang lokal dalam transaksi-transaksi internasional. Bahkan, Pemerintah Indonesia telah menjadikan *local currency settlement* (LCS) sebagai salah satu kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Bank Indonesia bersama berbagai kementerian dan lembaga terkait berkolaborasi untuk mendukung pengembangan penggunaan mata uang lokal dalam fasilitasi transaksi perdagangan internasional. Kolaborasi tersebut telah diresmikan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Nasional Local Currency Transaction (LCT) yang ditandai

dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Bank Indonesia dan sembilan kementerian/lembaga terkait pada 5 September 2023, yang diselenggarakan sejalan dengan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN. Penandatanganan ini juga disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Hasil kolaborasi lintas kementerian/lembaga tersebut di antaranya berupa implementasi insentif kepabeanan untuk mempercepat proses kliring bea cukai (*custom clearance*) bagi transaksi perdagangan yang dilakukan melalui LCS. Kebijakan ini diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan asosiasi bank ACCD pada Februari 2023. Selain itu, dalam hal komunikasi dan edukasi, Bank Indonesia bersama asosiasi pelaku pasar dan bank ACCD serta kementerian/lembaga terkait telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi hingga edukasi di sejumlah daerah, baik dalam maupun luar negeri.

Penguatan reformasi regulasi juga dilakukan di mana Bank Indonesia terus berkoordinasi dalam penilaian, pengaturan, dan pengembangan untuk mentransformasi LCS menjadi LCT. Penguatan tersebut menuntut keterkaitan antara LCS dengan sistem pembayaran dan pasar keuangan sehingga perlu melibatkan pelaku terkait di sistem pembayaran dan pasar keuangan.

Skema LCS Indonesia dengan ASEAN dan Negara Lain (Kerja Sama Bilateral)

Terdapat perbedaan antara transaksi LCS dan transaksi valuta asing pada umumnya. Perbedaan tersebut di antaranya ada pada aspek aset yang mendasari (*underlying*), ambang batas (*threshold*), dan instrumen yang dapat digunakan.

Terkait *underlying*, tidak seluruh kegiatan ekonomi dapat dijadikan *underlying* transaksi LCS. Cakupan *underlying* transaksi LCS cenderung lebih terbatas dibandingkan dengan *underlying* transaksi valuta asing yang umum sebagaimana diatur pada Pasal 11 PADG Nomor 24/10/PADG/2022 tentang Pelaksanaan Transaksi di Pasar Valuta Asing beserta penjelasan lebih lanjut yang tertera pada Lampiran V dari PADG tersebut.

Selain itu, tidak seluruh instrumen derivatif nilai tukar dapat

digunakan dalam transaksi LCS. Meskipun cakupan *underlying* transaksi LCS dan penggunaan instrumen derivatif cenderung lebih terbatas, pelaku LCS memiliki keunggulan dari sisi *threshold* transaksi. Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 24/10/PADG/2022, jumlah tertentu (*threshold*) untuk transaksi yang bersifat beli valuta asing terhadap rupiah adalah 100.000 dollar AS atau ekuivalennya per bulan per pelaku transaksi di pasar valuta asing. Di sisi lain, untuk pengguna LCS, *threshold* tersebut bisa menjadi lebih besar.

1. Indonesia-Thailand

Implementasi penyelesaian transaksi dengan skema LCS pertama kali dilakukan pada 2 Januari 2018, yaitu antara Indonesia dan Thailand serta Indonesia dan Malaysia. Sejak implementasi hingga triwulan I-2023, transaksi LCS pada kedua negara, yakni Thailand dan Malaysia, menunjukkan perkembangan positif. Pemanfaatan kerangka LCS antara Indonesia dan Thailand saat ini telah meliputi transaksi-transaksi *current account* dan investasi langsung (*direct investment*). Sementara untuk *threshold* transaksi ditetapkan sebesar ekuivalen 200.000 dollar AS. Instrumen derivatif yang dapat digunakan dalam kerangka LCS Indonesia-Thailand meliputi *forward* dan *swap*.

Selain itu, Indonesia dan Thailand saat ini juga telah memiliki kerja sama *quick response* (QR) Lintas Negara. Dengan demikian, kegiatan pembayaran masyarakat Indonesia tingkat ritel di Thailand sudah dapat menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang terkoneksi dengan perbankan nasional.

Sebaliknya, wisatawan asal Thailand yang datang ke Indonesia dapat menggunakan QR dari negaranya untuk melakukan pembayaran di Indonesia. Fitur QR *cross-border* antara Indonesia dan Thailand diresmikan pada 29 Agustus 2022. Berdasarkan pemetaan sektor dan industri, transaksi dengan Thailand yang menggunakan skema LCS didominasi oleh industri makanan dan minuman, aksesoris kendaraan, peralatan pabrik, perhotelan, industri pengolahan, otomotif, perdagangan besar dan eceran, serta real estat. Sebagian besar kegiatan ekspor impor dengan skema ini masih terpusat di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat.

2. Indonesia-Malaysia

Sejalan dengan Thailand, pemanfaatan kerangka LCS antara Indonesia dan Thailand saat ini telah meliputi transaksi-transaksi *current account* dan *direct investment*. Sementara untuk *threshold* transaksi ditetapkan sebesar ekuivalen 200.000 dollar AS. Instrumen derivatif yang dapat digunakan dalam kerangka LCS Indonesia-Malaysia sedikit lebih luas dibandingkan dengan kerangka LCS Indonesia-Thailand, yakni *spot*, *forward*, *swap*, CCS, dan DNDF.

Sama seperti kerja sama LCS Indonesia-Thailand, Indonesia dan Malaysia juga telah memiliki kerja sama QR *cross-border* yang diresmikan pada 8 Mei 2023. Kerja sama ini bertujuan memudahkan wisatawan asal Malaysia yang berkunjung ke Indonesia dalam bertransaksi. Demikian pula bagi WNI yang berkunjung ke Malaysia, transaksi yang dilakukan di negeri jiran itu menjadi semakin mudah.

Transaksi yang terjadi dari dan ke Malaysia saat ini didominasi oleh industri listrik, minyak sawit, penerbangan, makanan dan minuman, produk kesehatan, perkebunan, transportasi, industri pengolahan, serta perdagangan besar dan eceran. Sebagian besar perusahaan yang terlibat berlokasi di Pulau Jawa, Bangka Belitung, Riau, dan Palembang. Berdasarkan perkembangan transaksi hingga saat ini, masih terdapat banyak peluang mendorong transaksi LCS untuk pengusaha di luar Pulau Jawa.

3. Negara Lain

Pada 28 Agustus 2020, implementasi kerja sama dengan skema LCS kembali dilakukan, yaitu antara Indonesia dan Jepang. Implementasi dilakukan melalui penyempurnaan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank dan penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 22/20/PADG/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Jepang Menggunakan Rupiah dan Yen melalui Bank.

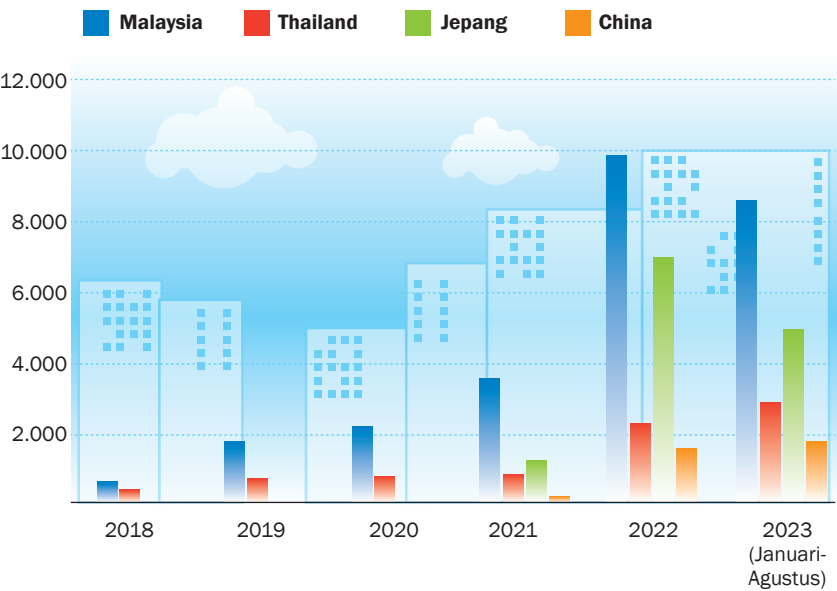
Pengaturan pada setiap skema kerja sama dapat berbeda antarnegara sesuai kesepakatan dan regulasi yang berlaku di setiap negara. Transaksi LCS Indonesia-Jepang wajib didukung oleh *underlying* transaksi berupa transaksi berjalan (*current account*) dan

investasi langsung (*direct investment*). Meski demikian, *threshold* transaksi valas tanpa dokumen *underlying* cukup besar dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia, yaitu di bawah 500.000 dollar AS. Transaksi LCS dengan Jepang merupakan kontributor terbesar dalam pertumbuhan transaksi LCS pada 2022.

Implementasi keempat yang dilakukan adalah skema LCS antara Indonesia dan China yang dimulai 6 September 2021 melalui penerbitan PADG Nomor 23/16/PADG/2021 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Tiongkok Menggunakan Rupiah dan Yuan melalui Bank.

Dalam dua tahun terakhir, total volume transaksi LCS Indonesia telah melampaui transaksi dengan Thailand. Hal ini ditunjukkan dengan lokasi perusahaan yang telah memanfaatkan skema LCS yang lebih luas dibandingkan dengan negara lain. Beberapa lokasi perusahaan tersebar di Jakarta, Banten, Surabaya, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, dan Kalimantan.

Perkembangan Pelaku Transaksi LCS



Sumber: ANTASENA

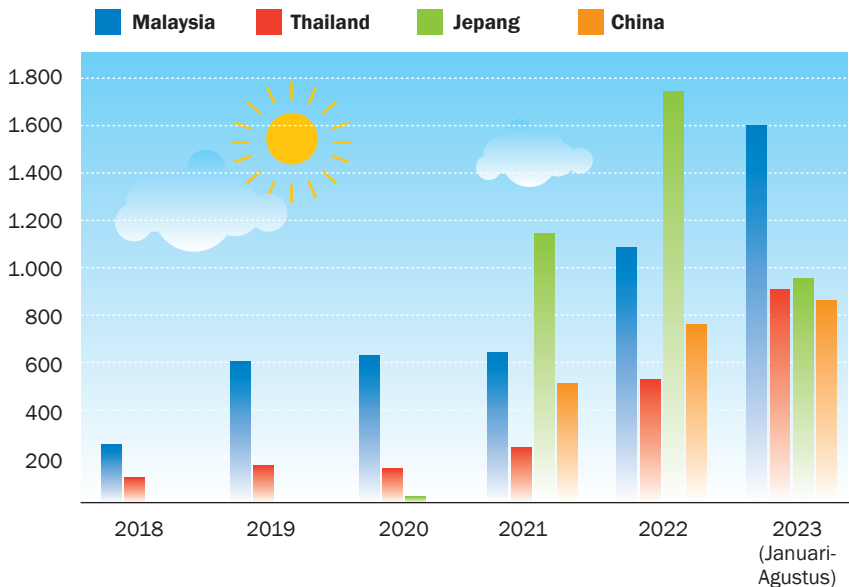
Gambar 3.7 Perkembangan Pelaku Transaksi LCS.

Saat ini, pemanfaatan kerangka LCS antara Indonesia dengan Jepang dan China telah meliputi transaksi-transaksi *current account* dan *direct investment*, sejalan dengan Thailand dan Malaysia. Meski demikian, *threshold* transaksi untuk kerangka LCS Indonesia-Jepang dan Indonesia-China berbeda dengan kerangka LCS dengan Malaysia dan Thailand. Untuk kerangka LCS Indonesia-Jepang, *threshold* transaksi ditetapkan sebesar ekuivalen 500.000 dollar AS, sementara untuk kerangka LCS Indonesia-China tidak terdapat *threshold* transaksi sehingga setiap transaksi memerlukan *underlying*. Hal ini sesuai dengan kebijakan manajemen nilai tukar renminbi oleh Bank Sentral China (People's Bank of China/PBoC).

Fitur QR *cross-border* antara Indonesia dengan Jepang dan China masih belum tersedia. Ke depan, Indonesia diharapkan memiliki kerja sama QR *cross-border* dengan negara-negara yang merupakan mitra LCS dengan Indonesia.

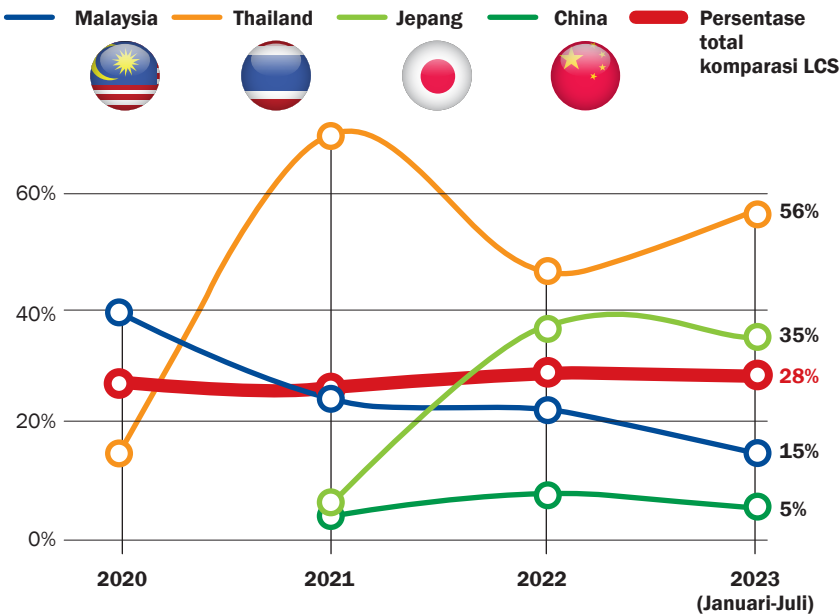
Perkembangan Volume Transaksi LCS

(juta dollar AS)



Gambar 3.8 Perkembangan Volume Transaksi LCS (juta dollar AS).

Perkembangan Persentase Penggunaan Rupiah



Sumber: LLD

Gambar 3.9 Perkembangan Persentase Penggunaan Rupiah.

Saat ini, kerja sama LCS antara Indonesia dan seluruh negara mitra sedang dalam proses pengembangan menjadi LCT dengan penambahan fitur-fitur sebagaimana disampaikan pada bagian sebelumnya. Pengembangan tersebut akan dilakukan bertahap dengan memperhatikan kesiapan di domestik ataupun di negara mitra.

Sejak pertama kali diimplementasikan pada tahun 2018, total volume LCS antara Indonesia dengan Thailand dan Malaysia meningkat lebih dari 400 persen pada 2022, yakni dari semula 0,34 miliar dollar AS menjadi 1,6 miliar dollar AS. Selanjutnya, selama periode Januari-April 2023, transaksi LCS dengan keempat negara mitra sudah mencapai 2,11 miliar dollar AS.

Dengan menimbang potensi yang ada, upaya khusus diperlukan untuk meningkatkan pemanfaatan mata uang lokal dalam perdagangan dan investasi. Kolaborasi nasional yang telah diejawantahkan melalui Satuan Tugas (Satgas) Nasional perlu ditingkatkan untuk mengakselerasi penggunaan mata uang lokal guna mendukung kegiatan ekspor-impor nasional.

Selain itu, diversifikasi mata uang dalam mendukung transaksi bilateral Indonesia dengan negara mitra perlu ditingkatkan. Hal ini mempertimbangkan masih tingginya ketidakpastian ekonomi global, tingginya volatilitas di pasar keuangan global, memanasnya tensi geopolitik di kawasan dan global, serta kondisi pasar keuangan domestik yang belum dalam. Sejauh ini, implementasi LCS telah menunjukkan perkembangan positif, meski pangsa terhadap total perdagangan masih relatif kecil dan pembentukan harga (*quotation*) LCS masih dapat dioptimalkan.

Selain itu, cakupan *line of business (eligible underlying)* LCS saat ini juga masih terbatas pada transaksi *current account* dan investasi langsung (*direct investment*) serta belum terintegrasi dengan inisiatif pembayaran Lintas Negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat kerangka kerja sama LCS yang berjalan. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia memandang perlunya pengembangan LCS untuk diperkuat menjadi *local currency transactions (LCT)*.

Perkembangan LCS Indonesia dengan ASEAN dan Negara Lain

Saat ini Indonesia sudah memiliki kerja sama LCS dengan empat negara, yaitu Malaysia, Thailand, Jepang, dan China. Untuk memfasilitasi transaksi LCS dengan keempat negara tersebut, hingga Agustus 2023 sudah ada 20 bank ACCD untuk seluruh skema kerja sama. Jumlah bank tersebut dapat berubah sesuai perkembangan bisnis perbankan maupun keputusan dari Bank Indonesia ataupun bank sentral negara mitra.

Dari sisi volume, secara umum transaksi LCS di Indonesia menunjukkan perkembangan positif sejak 2018. Pada tahun 2023, transaksi LCS hingga Agustus 2023 mencapai 4,3 miliar dollar AS.

Adapun transaksi LCS pada keseluruhan tahun 2022 mencapai 4,11 miliar dollar AS atau lima kali lebih besar dibandingkan total transaksi pada 2020 yang tercatat 797 juta dollar AS. Transaksi LCS dengan Jepang dan Malaysia menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan transaksi LCS pada tahun 2022, yakni dengan volume transaksi masing-masing mencapai 1,74 miliar dollar AS dan 1,08 miliar dollar AS.

Dari sisi pelaku, tren peningkatan jumlah pelaku juga terjadi sejalan dengan tren peningkatan volume transaksi. Pada tahun 2023,

transaksi LCS hingga Juni 2023 sudah digunakan oleh 18.301 pelaku transaksi.

Adapun pelaku transaksi LCS pada tahun 2022 mencapai 20.892 pelaku, hampir tujuh kali lebih besar dibandingkan dengan jumlah pelaku transaksi pada 2020 yang tercatat 3.056 pelaku.

Dari sisi penggunaan mata uang, porsi penggunaan rupiah dalam LCS Framework dengan empat negara mitra tercatat sekitar 28 persen selama periode Januari-Agustus 2023. Hingga Agustus 2023, persentase penggunaan rupiah paling besar terdapat pada kerangka LCS Indonesia-Thailand, kemudian diikuti oleh kerangka LCS Indonesia-Jepang, kerangka LCS Indonesia-Malaysia, dan terakhir kerangka LCS Indonesia-China.

Hingga saat ini, persentase penggunaan LCS terhadap total perdagangan dengan negara mitra masih relatif terbatas. Namun, angkanya berada dalam tren yang terus meningkat.

- Untuk kerja sama LCS Indonesia-Thailand, persentase LCS terhadap total perdagangan tercatat 0,6 persen pada 2018. Pada tahun 2022, angkanya telah mencapai 2,8 persen. Pada periode Januari-Juni 2023, persentase LCS Indonesia-Thailand tercatat 7,6 persen.
- Untuk kerja sama LCS Indonesia-Malaysia, persentase LCS terhadap total perdagangan tercatat 1,4 persen pada tahun 2018. Pada tahun 2022, angkanya telah mencapai 3,9 persen. Pada periode Januari-Juni 2023, persentase LCS Indonesia-Malaysia tercatat sebesar 10,7 persen.
- Untuk kerja sama LCS Indonesia-Jepang, persentase LCS terhadap total perdagangan selama periode September-Desember 2020 tercatat sebesar 0,5 persen. Pada tahun 2022, angkanya telah mencapai 4,2 persen. Adapun selama periode Januari-Juni 2023, persentase LCS Indonesia-Jepang tercatat sebesar 3,9 persen.
- Untuk kerja sama LCS Indonesia-China, persentase LCS terhadap total perdagangan selama periode September-Desember 2021 tercatat sebesar 1,2 persen. Pada tahun 2022, persentasenya sedikit menurun menjadi 0,6 persen, sejalan dengan peningkatan preferensi eksportir China untuk menerima pembayaran dalam renminbi China. Pada periode Januari-Juni 2023, persentase LCS Indonesia-China tercatat 0,9 persen.

Transformasi LCS Menjadi LCT

Tren penggunaan LCS semakin meningkat setiap tahun. Namun, Bank Indonesia masih melihat potensi yang besar bagi pengembangan *framework* LCS lebih lanjut dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Cakupan lini usaha (*line of business*) LCS masih terbatas, yakni hanya untuk *current account* (CA) dan *direct investment* (DI).
- b. *Line of business* di pasar keuangan (*financial market*) perlu dikaitkan dengan sistem pembayaran (SP) untuk mendukung transaksi dengan mata uang lokal.
- c. Partisipan di pasar keuangan masih terbatas, yakni bank ACCD, dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan partisipan di SP.
- d. Nasabah LCT masih terbatas dan nilai transaksinya masih didominasi *wholesale*.
- e. Pasar valas selain dollar AS belum dalam dan likuiditasnya terbatas.

Dengan mempertimbangkan *concern* tersebut, upaya *leap frog* diperlukan untuk memperkuat Kerangka Kerja Sama Transaksi Bilateral dalam mata uang lokal yang disebut dengan *local currency transaction* (LCT).

Penguatan yang dilakukan pada *framework* LCT meliputi tiga pilar utama yang terdiri dari:

- a. *Underlying* transaksi yang lebih luas:
 - Pada transaksi LCS, *underlying* transaksi yang diperkenankan meliputi *current account* (CA) dan *direct investment* (DI).
 - Pada transaksi LCT, *underlying* transaksi diperluas menjadi *current account* (CA), *financial account* (FA), dan *capital account* (KA).
- b. *Interlinking* LCT dengan pasar keuangan dan sistem pembayaran:
 - Peran Bank ACCD dalam kerangka LCT diperkuat melalui pemilihan yang didasarkan pada kriteria *Size*, *Interconnectedness*, *Complexity*, dan *Substitutability* (SICS) sesuai ketentuan Bank Indonesia.
- c. *Currency arrangement* yang lebih akomodatif.



DOKUMENTASI BI

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pada pers pada rangkaian pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN di Bali, Maret 2023

Dalam lingkup pembahasan LCT di ASEAN, pencapaian peningkatan LCT di bawah Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 adalah telah dibentuknya TF LCT dan telah diberikannya *endorsement* atas High Level Principles (HLP) on the ASEAN LCT Framework.

Selanjutnya, *deliverables* TF LCT dalam mengesahkan dan menerapkan Kerangka Kerja LCT diharapkan dapat diselesaikan pada awal 2024 atau pada pertemuan pertama AFMGM di bawah Keketuaan ASEAN Laos 2024. Penyelesaian ini didukung oleh para pemimpin negara ASEAN dan dituangkan dalam ASEAN Leaders' Declaration on ASEAN as an Epicentrum of Growth periode September 2023.

Pada masa mendatang, transaksi di kawasan dapat dilakukan dengan menggunakan mata uang lokal berdasarkan kerja sama bilateral di negara-negara anggota ASEAN dengan pendekatan multilateral di negara ASEAN. Selanjutnya, hal ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan kawasan, yaitu kemampuan kawasan untuk menahan dampak global, khususnya dari negara maju.

BAB 4

Meningkatkan Konektivitas Pembayaran Lintas Negara di ASEAN



KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Petugas Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menunjukkan cara pembayaran zakat dengan memindai kode batang (*barcode*) di robot zakat (*rozak*) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/3/2023). Pembayaran zakat, infak, dan sedekah sekarang lebih mudah dengan kehadiran teknologi seperti penggunaan QRIS dan pembayaran nontunai lainnya.

Pascapandemi Covid-19, perekonomian pulih lebih cepat dengan adanya perubahan perilaku masyarakat yang semakin nirsentuh (contactless). Perkembangan platform dan ekonomi digital menjadi salah satu penyangga dan akselerator pertumbuhan ekonomi, baik di Indonesia maupun di ASEAN, di tengah berbagai tantangan global. Di kawasan ASEAN, Indonesia memiliki peran penting dalam ekonomi digital karena sekitar 40 persen dari total nilai transaksi ekonomi digital ASEAN berasal dari Indonesia.

Berawal dari presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022, pengembangan pembayaran lintas negara (*cross-border payment*) merupakan salah satu agenda prioritas. Dalam mewujudkannya, interoperabilitas yang dicapai melalui kerja sama Lintas Negara internasional

perlu diperkuat di tengah meningkatnya digitalisasi ekonomi dan keuangan. Termasuk dalam hal ini, percepatan digitalisasi menuju inklusi ekonomi-keuangan, remitansi, perdagangan ritel, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pengembangan sistem pembayaran digital di kawasan ASEAN diharapkan dapat memberikan solusi yang aman, nyaman, dan efisien. Konektivitas pembayaran ASEAN, yang saat ini masih bersifat bilateral, ke depan akan diperluas menjadi kerja sama multilateral sebagai bagian dari upaya memperkuat integrasi ekonomi di kawasan. Untuk mewujudkan tujuan ini, interoperabilitas dan interkoneksi sistem pembayaran antarnegara di kawasan ASEAN perlu menjadi perhatian utama, terutama terkait dengan penyediaan infrastruktur dan akses antarnegara yang memungkinkan perpindahan barang, jasa, dan modal dengan cepat.

Salah satu inisiatif yang dijalankan Indonesia dalam keketuaan ASEAN 2023 adalah *ASEAN-led cross-border payment connectivity from ASEAN to global*. Sebagai langkah awal, Bank Indonesia bersama Bank Negara Malaysia (BNM), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Bank of Thailand (BoT) menginisiasi pengembangan konektivitas pembayaran regional (*regional payment connectivity/RPC*).

Implementasi konektivitas pembayaran lintas negara diharapkan dapat mendukung dan memfasilitasi perdagangan lintas negara, investasi, pendalaman keuangan, pengiriman uang, pariwisata, dan kegiatan ekonomi lainnya. Selain itu, kerja sama tersebut juga diharapkan dapat memfasilitasi ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan sangat bermanfaat bagi UMKM agar lebih efisien dalam memasuki pasar global.

Lima negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Filipina, menjadi inisiator kerja sama RPC untuk menghubungkan sistem pembayaran antarnegara di kawasan ASEAN. Kelompok ASEAN-5 ini sepakat untuk memprioritaskan *QR code* dan *fast payment* sebagai fokus utama kerja sama. Adapun *settlement* transaksi tersebut menggunakan mekanisme *local currency settlement* (LCS).

Implementasi RPC dimulai dengan pengembangan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) *cross-border* dan keterhubungan *fast payment* multilateral untuk membentuk interkoneksi antarsistem

pembayaran instan (*instant payment systems/IPS*) sehingga memungkinkan transfer antarnegara secara seketika (*real time*). Selanjutnya, jangkauan kerja sama QRIS diperluas ke negara lain dan perlu dikaitkan dengan kerangka kerja untuk mendorong penggunaan uang lokal. Hal ini bertujuan mendukung kegiatan perdagangan dan investasi internasional sehingga tercipta transaksi ritel dan *wholesale* Lintas Negara yang efisien.

Isu Strategis dan Tantangan

Perekonomian nasional menunjukkan resiliensi dan pemulihan lebih cepat dengan ditopang perbaikan fundamen ekonomi domestik, seperti peningkatan konsumsi, investasi, dan ekspor. Selain itu, pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 juga didukung oleh potensi besar pertumbuhan ekonomi digital dalam dua tahun terakhir. Pertumbuhan ini salah satunya dilatarbelakangi oleh perilaku masyarakat yang semakin nirsentuh, lebih sering mengandalkan layanan e-dagang dan *on-demand*, seperti *ride hailing*, layanan pesan antar makanan (*online food delivery*), dan logistik daring.

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2023), ekonomi dan platform digital menjadi salah satu penyangga (*buffer*) dan akselerator pertumbuhan ekonomi, baik di Indonesia maupun di ASEAN, di tengah berbagai tantangan global saat ini. Indonesia memiliki peran penting dalam ekonomi digital ASEAN, karena sekitar 40 persen dari nilai total transaksi ekonomi digital ASEAN berasal dari Indonesia.

Menurut hasil studi Google, Temasek, dan Bain & Company, nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2022 mencapai 77 miliar dollar AS atau tumbuh 22 persen secara tahunan (yoy) dan diprediksi meningkat hampir dua kali lipat hingga 130 miliar dollar AS pada tahun 2025.

Perkembangan digitalisasi yang semakin pesat juga telah mendisrupsi sektor keuangan di Indonesia. Tuntutan akan layanan keuangan yang cepat, efisien, dan aman semakin menguat seiring dengan preferensi konsumen terhadap layanan yang bersifat *seamless*. Sebagai regulator sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki mandat untuk memberikan arah kebijakan pengembangan sistem pembayaran di masa depan. Hal ini bertujuan menjadikan ruang

inovasi sistem pembayaran terus terbuka, dengan mitigasi risiko yang memadai dalam koridor pengembangan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mengakselerasi digitalisasi pembayaran serta menavigasi dan mengintegrasikan ekonomi dan keuangan digital, Bank Indonesia meluncurkan Cetak Biru atau *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025). BSPI 2025 memiliki lima visi yang sekaligus dirumuskan menjadi target akhir (*end-state*) dari arah kebijakan jangka panjang Bank Indonesia. Hal ini bertujuan membentuk ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang sehat serta mampu menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia sebagai lembaga bank sentral.

Pada visi BSPI 2025, seluruh aspek sistem pembayaran Indonesia menjadi pertimbangan, termasuk instrumen, mekanisme, lembaga, infrastruktur, dan aspek *cross-border*, serta sinergi dan koordinasi kelembagaan. Upaya untuk merealisasikan visi BSPI 2025 memerlukan perencanaan matang dengan *milestones* yang jelas dan didukung sumber daya yang memadai.

Untuk itu, Bank Indonesia telah menetapkan lima inisiatif dalam kerangka BSPI 2025. Implementasi inisiatif tersebut akan dilakukan melalui kolaborasi produktif dengan industri dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan industrial, *regulatory*, dan kolaboratif. Lima inisiatif ini dijabarkan lebih lanjut dalam program-program strategis Bank Indonesia yang akan diimplementasikan secara bertahap dalam rentang waktu tahun 2019 sampai tahun 2025.

Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022 mengangkat pengembangan pembayaran lintas negara (*cross-border payment*) sebagai salah satu agenda prioritas. Guna mewujudkannya, interoperabilitas yang dicapai melalui kerja sama Lintas Negara internasional perlu diperkuat di tengah meningkatnya digitalisasi ekonomi dan keuangan, termasuk percepatan digitalisasi menuju inklusi ekonomi-keuangan, remitansi, perdagangan ritel, dan UMKM. Untuk mendukung hal ini, diperlukan perwujudan pembayaran lintas negara yang lebih cepat, murah, transparan, dan mudah diakses oleh siapa pun dengan mengedepankan keamanan.

Seiring dengan perkembangan inovasi dan teknologi, berkembangnya perspektif pembayaran lintas negara yang efisien juga menjadi fokus bank sentral di dunia. Pembayaran lintas negara

memiliki beberapa tantangan, antara lain tingginya biaya transaksi, proses yang cenderung lambat, akses terbatas, dan kurangnya transparansi.

Guna memperbaiki kondisi itu, dibutuhkan berbagai terobosan, baik di sisi teknologi maupun regulasi. Selain itu, diperlukan juga penguatan kerja sama antarnegara untuk mewujudkan ekonomi digital yang lebih inklusif sehingga dapat memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat, negara, dan industri.

Sistem pembayaran di kawasan ASEAN berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik tiap negara (Boks: Karakteristik Pembayaran Lintas Negara di ASEAN). Dalam adopsi sistem pembayaran digital, terjadi peningkatan inovasi yang signifikan,

di antaranya *mobile wallets*, *QR code*, *mobile banking*, *internet banking*, *virtual credit cards*, dan *wire transfers*.

Dari sisi teknologi, digitalisasi tersebut menjadi pendorong berbagai inovasi sistem pembayaran yang diharapkan mampu menjembatani kebutuhan keterhubungan sistem pembayaran antarnegara.

Jika sebelumnya sistem pembayaran antarnegara identik dengan biaya tinggi dan waktu pemrosesan yang lama, kehadiran sistem pembayaran digital di kawasan ASEAN telah menjadi solusi yang aman, nyaman, dan efisien untuk mengatasi kendala tersebut.

Selain itu, konektivitas pembayaran ASEAN saat ini masih bersifat bilateral sehingga dapat diperluas menjadi kerja sama multilateral sebagai bagian dari upaya penguatan integrasi ekonomi di kawasan. ASEAN menunjukkan komitmen yang kuat untuk membangun praktik tata kelola data dan sistem pembayaran digital yang baik serta terus memodernisasi sistem pembayaran antarnegara melalui standardisasi dan pengembangan infrastruktur.

Dalam satu dekade terakhir, ASEAN mengalami transformasi sektor keuangan yang pesat. Hal ini didorong oleh derasnya arus digitalisasi, terutama pada area pembayaran digital. Kondisi ini turut dipercepat

Sistem pembayaran di ASEAN berkembang seiring dengan kebutuhan dan masyarakat dan karakteristik tiap negara.

oleh pandemi Covid-19 yang menyebabkan peran pembayaran digital semakin penting dalam mendukung pemulihan ekonomi di kawasan ASEAN. Perdagangan antarnegara yang sempat turun, karena pembatasan aktivitas akibat Covid-19, secara bertahap mulai kembali pulih, turut ditopang oleh digitalisasi pembayaran antarnegara.

Peningkatan pembayaran antarnegara di kawasan ASEAN menjadi salah satu inisiatif untuk integrasi sektor keuangan yang tercantum dalam ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint 2025. Motivasi utama pemilihan prioritas ini adalah agar tersedia layanan pembayaran antarnegara yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif sehingga memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dan perekonomian dunia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, perdagangan internasional, pembangunan global, dan inklusi keuangan.

Untuk mewujudkan upaya itu, interoperabilitas dan interkoneksi sistem pembayaran antarnegara di kawasan ASEAN perlu menjadi perhatian utama. Terutama, terkait penyediaan infrastruktur dan akses antarnegara yang memungkinkan perpindahan barang, jasa, dan modal semakin cepat melalui pembayaran antarnegara.

Inisiatif Memajukan Konektivitas Pembayaran di Kawasan

Kolaborasi merupakan tonggak penting untuk mendorong pemulihan ekonomi dan integrasi keuangan yang memberikan manfaat kepada masyarakat, termasuk pelaku UMKM, pekerja migran, dan turis. Hal ini sejalan dengan inisiatif Indonesia dalam keketuaan ASEAN 2023, yaitu *ASEAN-led cross-border payment connectivity from ASEAN to global*.

Sebagai langkah awal untuk mendukung perekonomian dan mendorong inklusi keuangan di kawasan ASEAN, Bank Indonesia bersama Bank Negara Malaysia (BNM), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Bank of Thailand (BoT) menginisiasi pengembangan konektivitas pembayaran regional (*regional payment connectivity/RPC*). Inisiatif ini telah diformalkan melalui penandatanganan *memorandum of understanding* (MoU) RPC pada 14 November 2022.

Penandatanganan MoU RPC merupakan langkah awal untuk memberikan contoh nyata dari Asia Tenggara kepada dunia tentang

manfaat penerapan *Roadmap* G20 untuk meningkatkan pembayaran Lintas Negara. Momentum tersebut merupakan pertama kalinya di dunia, lima bank sentral di kawasan—dengan penuh optimisme—sepakat untuk memperkuat dan meningkatkan kerja sama konektivitas sistem pembayaran dalam upaya bersama mengatalisasi pemulihan ekonomi regional dan global.

Kerja sama RPC diharapkan mampu menjawab tantangan ekonomi global dan regional ke depan. Implementasi konektivitas pembayaran Lintas Negara ini diyakini dapat mendukung dan memfasilitasi perdagangan Lintas Negara, investasi, pendalaman keuangan, pengiriman uang, pariwisata, dan kegiatan ekonomi lainnya. Selain itu, kerja sama tersebut juga diharapkan dapat memfasilitasi ekosistem keuangan yang lebih inklusif—yang sangat bermanfaat bagi UMKM—agar lebih efisien dalam memasuki pasar global.

Pada forum ASEAN, pembahasan mengenai RPC berada di bawah naungan Working Committee on Payment and Settlement Systems (WC-PSS) dan menjadi salah satu agenda prioritas. WC-PSS akan menjadi wadah untuk mengeksplorasi penguatan dan perluasan cakupan RPC yang sebelumnya telah disepakati ASEAN-5 kepada negara anggota ASEAN lainnya. Eksplorasi pengembangan perlu terus dilakukan mengingat kesiapan infrastruktur sistem pembayaran tiap-tiap negara yang berbeda dan menjadi kendala implementasi RPC.

Inisiatif RPC mencakup beberapa modalitas *interlinkage*, yaitu (i) QR code; (ii) *fast payment*; (iii) *application programming interface* (API); (iv) *real time gross settlement* (RTGS); dan (v) *data framework*.

ASEAN-5 sepakat untuk memprioritaskan QR code dan *fast payment* sebagai fokus utama saat ini. Beberapa negara di ASEAN telah memiliki inisiatif kerja sama bilateral untuk layanan pembayaran menggunakan QR code dan *fast payment*. Adapun *settlement* transaksi tersebut menggunakan mekanisme *local currency settlement*.

Indonesia mendeklarasikan untuk turut berkontribusi pada RPC. Bank Indonesia berkontribusi dalam pengembangan RPC di negara-negara ASEAN, khususnya ASEAN-5, dari sisi mikro seperti QR hingga konsep terkait dengan *fast payment* sampai dengan tahun 2024.

Pada Joint Statement of the 9th ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM), gubernur bank sentral dan menteri keuangan ASEAN menyambut baik perkembangan

jaringan pembayaran (*payment network*) yang saling terhubung di seluruh kawasan, menjadikan ASEAN sebagai pemimpin global dalam konektivitas pembayaran dan mendorong perluasan untuk menyertakan anggota ASEAN lainnya.

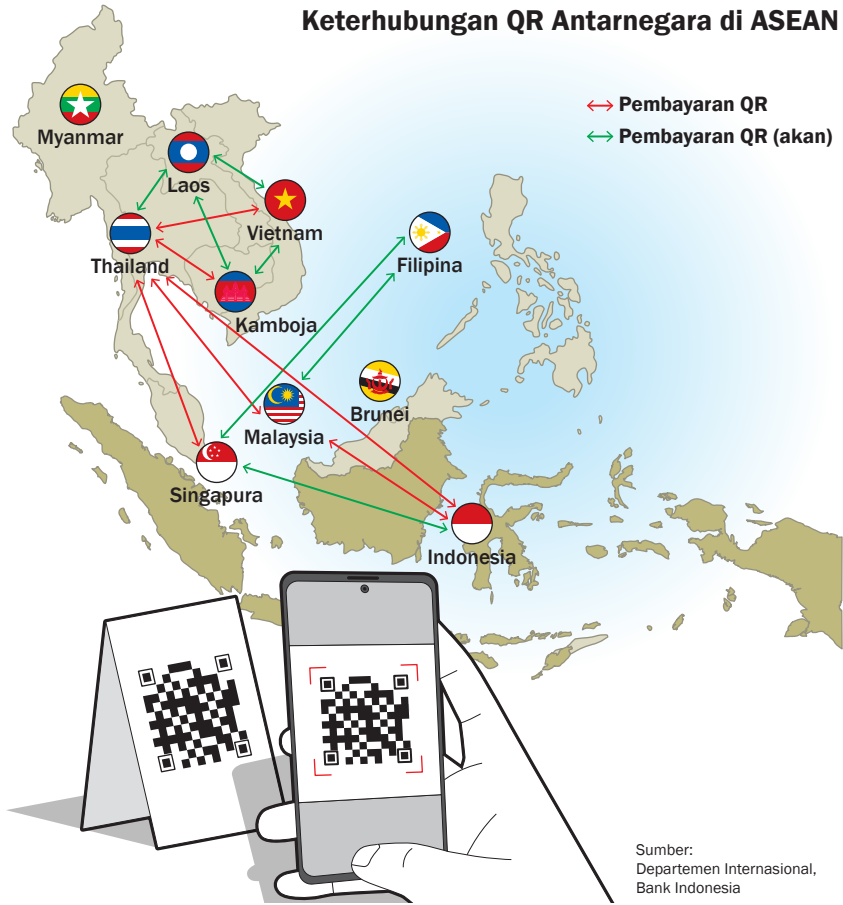
Dalam KTT ASEAN Mei 2023 disepakati ASEAN Leaders' Declaration on Advancing Regional Payment Connectivity and Local Currency Transaction. Dalam deklarasi ini, pemimpin negara-negara ASEAN berkomitmen untuk memajukan konektivitas pembayaran regional dengan memanfaatkan peluang yang dibawa oleh inovasi untuk memfasilitasi pembayaran Lintas Negara yang *seamless* dan aman dengan mempertimbangkan keadaan tiap-tiap negara.

Selain itu, para pemimpin negara ASEAN juga mendukung kerja sama lebih lanjut dalam memajukan konektivitas pembayaran regional dan memfasilitasi interoperabilitas sistem pembayaran Lintas Negara, meningkatkan infrastruktur, dan mempercepat adopsi pembayaran digital.

Dalam Joint Statement of the 10th AFMGM yang diadopsi pada Agustus 2023, para gubernur bank sentral dan menteri keuangan ASEAN pada Agustus 2023 menyambut baik selesainya Peta Jalan Konektivitas Pembayaran Regional (RPC *Roadmap*) untuk ASEAN yang menjabarkan *timeline* bagi anggota ASEAN lainnya di luar ASEAN-5 untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang RPC.

Pertemuan tersebut menyambut baik Vietnam sebagai peserta RPC yang baru. Selain itu, juga menantikan akses negara-negara anggota ASEAN yang tersisa ke RPC dan perluasan ke negara-negara tetangga lainnya di luar ASEAN. Bersama dengan agenda *local currency transaction* (LCT), rencana pengembangan RPC telah didukung oleh para pemimpin ASEAN melalui ASEAN Leaders' Declaration Epicentrum of Growth.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, kesepakatan itu berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, termasuk sektor pariwisata yang menjadi salah satu sektor ekonomi utama di kawasan ASEAN. Interkoneksi pembayaran juga akan mendukung perluasan pasar bagi sebagian pelaku usaha, memfasilitasi peningkatan penyelesaian pembayaran menggunakan mata uang lokal, mendorong ekosistem ekonomi dan keuangan kawasan yang lebih inklusif, serta mengembangkan kawasan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan.



Gambar 4.1 Keterhubungan QR Antarnegara di ASEAN.

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, ASEAN-5 sepakat untuk memprioritaskan QR code dan *fast payment* sebagai fokus utama kerja sama RPC. Penyelesaian prosedur (*settlement*) transaksi tersebut menggunakan mekanisme *local currency settlement*.

i. QR Code

Awal terbukanya gerbang konektivitas pembayaran kawasan ASEAN dimulai dari kerja sama QR antarnegara. Kerja sama sistem pembayaran tersebut beroperasi berdasarkan format kode QR

standar dengan memastikan adanya kompatibilitas di antara berbagai penyedia layanan pembayaran (*payment service providers*) di kawasan ASEAN.

Transaksi antarnegara di kawasan ASEAN dapat dilakukan hanya dengan memindai QR untuk transaksi pembayaran seketika (*real time*) selama 24 jam dalam 7 hari. Dengan demikian, pengguna tidak perlu lagi mencari tempat penukaran uang atau menggunakan kartu debit atau kartu kredit untuk bertransaksi.

Dalam perspektif lebih luas, kolaborasi ini juga akan mendukung tujuan ASEAN untuk memiliki konektivitas sistem pembayaran yang memungkinkan pembayaran antarnegara yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau dengan tetap memperhatikan kesiapan tiap negara yang terlibat.

Sejak tahun 2021 hingga saat ini setidaknya sudah ada enam implementasi kerja sama QR antarnegara di kawasan ASEAN (Gambar 4.1), yaitu antara Malaysia dan Thailand, lalu Singapura-Filipina, Indonesia-Thailand, Thailand-Vietnam, Singapura-Malaysia, dan Indonesia-Malaysia. Dengan adanya kerja sama QR antarnegara tersebut, masyarakat yang berkunjung ke negara ASEAN cukup menggunakan aplikasi telepon pintar (*smartphone*) untuk memindai kode QR, selanjutnya transaksi dapat langsung dilakukan.

Transaksi antarnegara ini diselesaikan secara langsung menggunakan mata uang negara masing-masing dan menghilangkan kerumitan konversi mata uang. Terkait dengan hal ini, warga negara Indonesia, misalnya, cukup membayar dengan rekening rupiah untuk bertransaksi di Thailand dan Malaysia. Begitu juga sebaliknya untuk warga negara Thailand dan Malaysia.

Sejak Agustus 2022, berdasarkan data Bank Indonesia, transaksi QRIS antarnegara Indonesia dengan Thailand dan Malaysia menunjukkan perkembangan positif. Nilai transaksi QRIS antarnegara *inbound* (ke Indonesia) pada Agustus 2023 dengan Thailand mencapai Rp 185 juta, sedangkan dengan Malaysia mencapai Rp 7,12 miliar. Sementara itu, secara volume, tercatat 810 transaksi dengan Thailand dan 17.151 transaksi dengan Malaysia.

Adapun transaksi QRIS antarnegara *outbound* (dari Indonesia) dengan Thailand mencapai Rp 8,05 miliar, sementara dengan Malaysia Rp 803 juta. Volumennya mencapai 18.698 transaksi dengan Thailand

dan 2.911 transaksi dengan Malaysia. Perkembangan ini menjadi salah satu indikator bahwa inisiatif QR antarnegara telah berkontribusi positif terhadap peningkatan integrasi ekonomi dan keuangan digital.

Pada salah satu acara pendukung (*side-event*) keketuaan ASEAN 2023, yaitu Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023 yang diselenggarakan pada 7-10 Mei 2023, dalam sesi *Leader's Insight*, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa perluasan keterhubungan QR antarnegara bertujuan untuk memperkuat ekonomi dan inklusi keuangan di kawasan. Sejalan dengan itu, juga dimaksudkan untuk mendorong pemberdayaan UMKM melalui peningkatan pembelian produk dalam negeri dan ekspansi akses pasar global, serta merupakan salah satu capaian penting dari kepemimpinan Indonesia dalam keketuaan ASEAN tahun 2023.

Sementara dalam sesi *Casual Talk* FEKDI 2023 yang menghadirkan Gubernur Bank Sentral ASEAN-5, dibahas berbagai upaya untuk meningkatkan inklusi pembayaran digital di ASEAN melalui interoperabilitas pembayaran antarnegara. Berbagai diskusi mengenai kemajuan pembayaran regional yang dikemas dalam FEKDI 2023 tersebut merupakan bukti bahwa negara-negara ASEAN terus memperkuat kerja sama dan mendorong berbagai alternatif kebijakan untuk menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, baik di kawasan maupun global.

Dari sisi industri, pada FEKDI 2023 juga telah dibahas isu mengenai *Forging Cross-Border Economic Interlinkages* untuk mendorong peran sektor swasta, risiko dan tantangan, serta peluang dalam inisiatif pembayaran lintas negara. Hal ini dilatarbelakangi kesadaran bersama bahwa upaya untuk mendukung inisiatif sistem pembayaran di kawasan ASEAN tidak hanya bergantung pada pemerintah dan otoritas. Hal itu juga membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan sektor swasta yang akan menjadi prasyarat dalam mengoptimalkan manfaat inovasi digital dan memastikan mitigasi risiko secara bersamaan.

Terhubungnya pembayaran QR antarnegara dan sistem pembayaran cepat di kawasan ASEAN merupakan bentuk penguatan kerja sama dalam kerangka RPC untuk mendorong pembayaran antarnegara yang lebih cepat, lebih murah, lebih transparan, dan lebih inklusif, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

Interkoneksi ini juga sejalan dengan inisiatif G20 dalam mengembangkan Peta Jalan Penguatan Pembayaran Antar negara dan sekaligus menjadi sebuah capaian yang signifikan dari keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Kerja sama ini akan memberikan lebih banyak pilihan bagi pengguna layanan transaksi pembayaran lintas negara, sekaligus menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, mendorong inklusi ekonomi dan keuangan digital di kawasan ASEAN.

ii. *Fast Payment*

Upaya selanjutnya untuk memperkuat interkoneksi di kawasan ASEAN adalah melalui kerja sama sistem pembayaran cepat (*fast payment system interlinking*). Pada 25th Working Committee on Payment and Settlement Systems Meeting di Laos, 30 September 2022, disampaikan, untuk mendukung kerja sama sistem pembayaran cepat di kawasan ASEAN, negara-negara anggota ASEAN dapat memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada di setiap negara, komunikasi yang efektif, dukungan dari bank sentral, dan mengacu pada standar internasional.

Terkait dengan hal itu, contoh implementasi kerja sama sistem pembayaran cepat antar negara di kawasan ASEAN yang telah mencapai tahap implementasi adalah antara Singapura dan Thailand, melalui koneksi pada sistem pembayaran cepat kedua negara, yaitu PayNow dengan PromptPay yang dikenal sebagai *PayNow-PromptPay Linkage* (PPPN) sejak April 2021. Koneksi sistem pembayaran cepat domestik kedua negara ini menjadi yang pertama di dunia.

Sebelum tersedia PPPN, transfer antara masyarakat Singapura dan Thailand membutuhkan biaya cukup tinggi, termasuk biaya konversi nilai tukar serta waktu penyelesaian transaksi selama 1-3 hari. Pengguna PPPN di kedua negara dapat melakukan pembayaran instan (*instant payment*) hingga nominal transaksi 1.000 dollar Singapura (734 dollar AS) atau 25.000 baht Thailand (764 dollar AS) per hari. Selain lebih murah dan lebih cepat, PPPN juga dipandang lebih aman karena mengadopsi mitigasi risiko Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)⁴.

⁴ Committee on Payments and Market Infrastructures, "Interlinking Payment Systems and the Role of Application Programming Interfaces: A Framework for Cross Border Payments", Report to G20, July 2022.

Keterhubungan sistem pembayaran cepat antara Singapura dan Thailand itu kemudian dilanjutkan oleh Thailand dengan Malaysia, yaitu PromptPay dengan DuitNow pada Juni 2021, lalu Singapura dengan Malaysia, yaitu PayNow dengan DuitNow pada akhir tahun 2022.

Dalam upaya mendorong terwujudnya transaksi lintas negara yang lebih murah, mudah, aman, inklusif, dan transparan, negara-negara di ASEAN mewujudkan konektivitas sistem pembayaran Lintas Negara berbasis *fast payment*. Salah satu upaya Bank Indonesia dalam memperkuat konektivitas sistem pembayaran Lintas Negara adalah dengan menjalin kerja sama dengan Bank Negara Malaysia (BNM), Banko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Bank of Thailand (BoT) untuk bersama-sama melakukan eksplorasi potensi konektivitas pembayaran berbasis *fast payment* di kawasan.

Kerja sama tersebut juga melibatkan Bank for International Settlements (BIS) dalam menjajaki potensi konektivitas pembayaran berbasis *fast payment* di kawasan melalui pelaksanaan proyek Nexus. Kerja sama tersebut sekaligus menjadi kelanjutan dari Nota Kesepahaman (NK) Kerja Sama Konektivitas Pembayaran Kawasan yang ditandatangani oleh kelima bank sentral pada 14 November 2022.

Nexus, sebuah proyek BIS Innovation Hub (BISIH), merupakan proyek sistem pembayaran yang mengeksplorasi upaya untuk membangun *fast payment* domestik agar lebih cepat, murah, transparan, serta dapat meningkatkan aksesibilitas pembayaran Lintas Negara negara (*cross-border*). Pembayaran Lintas Negara negara sering kali lambat, dengan pengalaman pengguna (*user experience*) yang lemah dan relatif mahal, baik bagi individu maupun bisnis. Di sisi lain, di lebih dari 60 negara saat ini, pembayaran domestik mencapai tujuannya dalam hitungan detik melalui *fast payment* dengan biaya hampir gratis bagi pengirim atau penerima. Hal ini dimungkinkan terjadi karena semakin tersedianya sistem pembayaran instan (*instant payment systems/IPS*).

Dengan demikian, pembayaran Lintas Negara juga berpotensi untuk ditingkatkan secara signifikan dengan menghubungkan IPS domestik di banyak negara. Pada April 2021, misalnya, Singapura dan Thailand menghubungkan IPS mereka yang memungkinkan pelanggan dari

lembaga keuangan yang berpartisipasi untuk mengirim pembayaran melintasi perbatasan hanya dengan menggunakan nomor telepon penerima. Pada Februari 2023, cara ini diikuti oleh tautan IPS antara Singapura dan India.

Pelajaran yang didapat dari proyek Nexus ini adalah bahwa *proof of concept* dari Nexus menunjukkan, menghubungkan IPS secara multilateral adalah layak secara teknis dan dapat memiliki potensi manfaat signifikan bagi individu ataupun bisnis di seluruh dunia. Meski demikian, proyek ini harus mengatasi sejumlah tantangan, karena setiap IPS memiliki standar teknis, proses bisnis, dan persyaratan peraturan yang berbeda.

Ada perbedaan besar antara desain IPS dan skema *proxy* yang berbeda setiap negara. Sulit untuk mengharapkan industri beralih ke satu desain standar/standar tunggal. Dengan demikian, penting untuk menemukan cara mengakomodasi perbedaan tersebut, baik melalui alat yang mendukung interoperabilitas teknis, seperti standar ISO 20022 untuk format pesan dan API, maupun melalui metode untuk mempromosikan interoperabilitas bisnis. Misalnya, skema Lintas Negara negara yang memberikan IPS aturan jelas untuk interaksi tiap-tiap negara dengan IPS lainnya. Selain itu, terdapat tantangan teknis lainnya, seperti isu verifikasi data. Setiap inisiatif bilateral baru membutuhkan integrasi teknis yang kompleks dan negosiasi hukum berbagai pihak.

Nexus diharapkan dapat mengatasi tantangan itu dengan mempermudah *interlink* beberapa sistem *fast payment* pada jaringan terdistribusi melalui pendekatan standar dan multilateral. Setiap IPS perlu menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk dapat terhubung dan berkomunikasi dengan Nexus, tetapi ini akan menjadi upaya satu kali daripada diulang setiap kali terhubung ke negara baru.

Saat ini, Bank Indonesia bersama BIS, BNM, BSP, MAS, dan BoT melakukan kajian dan pendalaman terkait dengan potensi konektivitas pembayaran berbasis *fast payment* yang akan meliputi skema organisasi dan tata kelola, model bisnis dan adopsi komersial, serta teknologi dan operasional (Proyek Nexus Tahap III). Proyek ini dilaksanakan mulai April 2023 dan direncanakan akan berakhir pada Maret 2024.

Hasil (*output*) yang diharapkan dari pendalaman melalui Proyek

Nexus Tahap III ini adalah konektivitas sistem pembayaran lintas negara berbasis *fast payment* sebagai infrastruktur sistem pembayaran untuk memfasilitasi pembayaran ritel yang dapat diakses setiap saat. Infrastruktur sistem pembayaran ini juga dapat mendorong transaksi lintas negara yang lebih murah, mudah, aman, inklusif, dan transparan. Berbagai manfaat lain adalah akses sistem pembayaran lintas negara yang mampu menjangkau UMKM, memfasilitasi remitansi, termasuk untuk pekerja migran Indonesia, serta memudahkan transaksi bagi para wisatawan.

Capaian dan Langkah ke Depan Implementasi Pembayaran Ritel Lintas Negara

Bank sentral ASEAN-5 (Singapura, Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Filipina) melakukan eksplorasi guna mewujudkan konektivitas pembayaran regional (*regional payment connectivity*/RPC). Upaya ini dimulai dengan QRIS *cross-border* serta keterhubungan *fast payment* multilateral. Selanjutnya, akan terus diupayakan untuk membentuk interkoneksi antarsistem pembayaran instan (*instant payment systems*/IPS) sehingga memungkinkan transfer antarnegara secara seketika (*real time*).

Eksplorasi itu dilakukan melalui pendekatan yang terstandardisasi dengan model bisnis platform multilateral. Nantinya dimungkinkan terdapat *gateway* yang berperan sebagai *hub* untuk memastikan interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi antar-IPS atau sistem pembayaran atau partisipan lainnya yang terlibat. Penggunaan model bisnis ini turut mendukung dan sesuai dengan karakteristik pembayaran lintas negara (*cross-border payment*) yang diharapkan di negara ASEAN (Boks: Karakteristik Pembayaran Lintas Negara di ASEAN).

Salah satu inisiatif pembayaran ritel lintas negara (*cross-border retail payment*) yang telah diimplementasikan di kawasan ASEAN adalah pengembangan QR antarnegara. QR antara Malaysia dan Thailand dilakukan sejak 18 Juni 2021, sementara Singapura dengan Filipina sejak 8 November 2021, Indonesia dengan Thailand sejak 29 Agustus 2022, Thailand dengan Vietnam sejak 17 November 2022, Singapura dengan Malaysia sejak 31 Maret 2023, dan Indonesia dengan Malaysia sejak 8 Mei 2023.

Sejarah QR antara Indonesia dan Thailand dimulai dengan fase *sandbox* sejak 9 September 2021, sementara dengan Malaysia dimulai sejak 28 Januari 2023, dan pada 17 Agustus 2023 dimulai tahap uji coba QRIS antara Indonesia dan Singapura. Fase *sandbox* merupakan fase percontohan proyek yang bertujuan untuk memastikan kelancaran interkoneksi dan membuka jalan bagi pelanggan, Pedagang, dan operator untuk peluncuran implementasi penuh. Inisiasi pembayaran QR antarnegara ini disambut baik oleh warga negara Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Singapura yang akan merasakan manfaat penggunaannya dalam transaksi.

Selanjutnya, jangkauan kerja sama QRIS diperluas dengan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang melalui penandatanganan nota kerja sama terkait pembayaran berbasis kode QR. Kerja sama pembayaran berbasis kode QR ini untuk mengakselerasi kerja sama dalam penerapan dan interoperabilitas pembayaran Lintas Negara negara dengan menggunakan kode QR, yakni QR Code Indonesian Standard (QRIS) dan Japan Unified QR Code (JPQR). Kerja sama ini akan membangun kerangka yang memfasilitasi pembayaran berbasis QR *code* kedua negara, termasuk untuk pihak ketiga seperti operator sistem pembayaran.

Kerja sama itu juga diharapkan dapat mendorong digitalisasi sistem pembayaran, baik di Indonesia maupun Jepang. Selain itu, konektivitas pembayaran juga perlu dikaitkan dengan kerangka kerja untuk mendorong penggunaan uang lokal dalam rangka mendukung kegiatan perdagangan dan investasi internasional sehingga tercipta transaksi ritel dan *wholesale* Lintas Negara yang efisien.

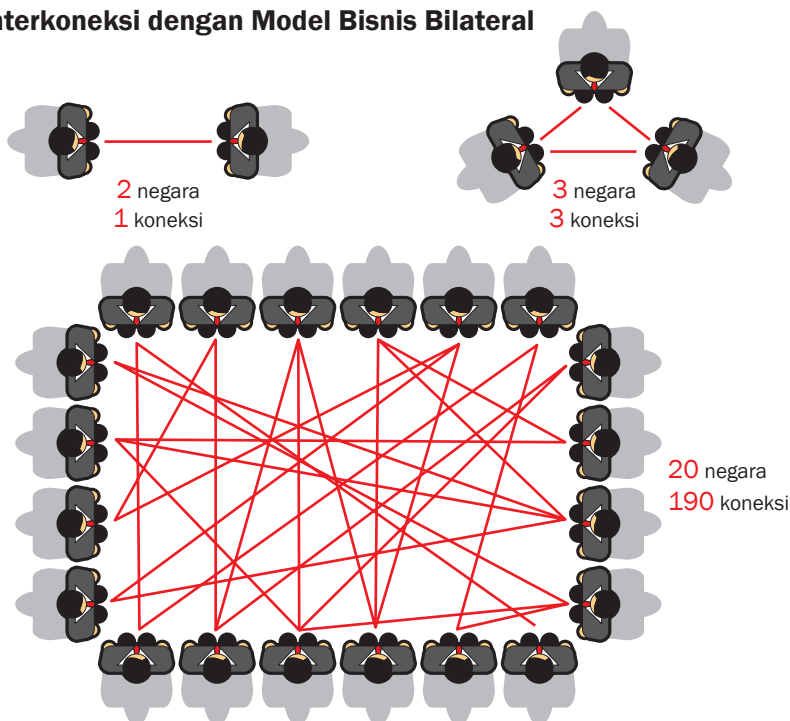
Sejalan dengan perkembangan pembayaran lintas negara berbasis kode QR, pembayaran lintas negara berbasis *fast payment* juga turut berkembang. Saat ini terdapat tiga sistem pembayaran instan (*instant payment system/IPS*) di kawasan ASEAN yang telah terkoneksi, antara lain PromptPay Thailand dengan PayNow Singapura serta PayNow Singapura dengan UPI India.

Beberapa sistem pembayaran tersebut terhubung satu sama lain dengan menggunakan model bisnis *interlinking bilateral link*, melalui perjanjian bilateral serta mekanisme integrasi dengan format *message* yang berbeda-beda, belum terdapat standar khusus pada mekanisme integrasi tersebut. Dalam praktiknya, keterhubungan dengan model

bisnis melalui perjanjian bilateral dengan banyak negara yang berbeda sangat tidak efisien dan akan semakin kompleks. Sebab, setiap IPS memiliki standar teknis, proses bisnis, dan persyaratan regulasi yang berbeda.

Setiap inisiatif bilateral baru membutuhkan integrasi teknis yang kompleks dan negosiasi hukum dari berbagai pihak serta akan memperbanyak perjanjian bilateral antarnegara dengan ilustrasi seperti Gambar 4.2. Oleh karena itu, pendekatan multilateral menjadi alternatif solusi untuk dapat menjembatani isu *interlinking bilateral link*. Bank Indonesia (BI), Bank Negara Malaysia (BNM), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Bank of Thailand (BoT) bersama-sama melakukan eksplorasi potensi konektivitas pembayaran berbasis *fast payment* di kawasan, salah satunya melalui proyek Nexus.

Interkoneksi dengan Model Bisnis Bilateral



Sumber: (BIS, 2023)

Gambar 4.2 Interkoneksi dengan Model Bisnis Bilateral.

Karakteristik Pembayaran Lintas Negara di ASEAN

Pada tahun 2023 Indonesia didapuk untuk memegang keketuaan ASEAN. Posisi keketuaan ASEAN ini merupakan yang kelima kalinya bagi Indonesia. Dengan mengusung tema "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth", Indonesia berupaya menjadikan ASEAN tetap berperan penting dan relevan baik bagi masyarakat ASEAN maupun bagi dunia, khususnya kontribusi sebagai motor perdamaian ataupun kesejahteraan kawasan.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita keketuaan ASEAN 2023, Pemerintah Indonesia bersama negara ASEAN lainnya telah menyusun tiga pilar agenda ekonomi prioritas (*priorities economic deliverables/PEDs*), yaitu (i) *rebuilding regional growth, connectivity, and new competitiveness (recovery rebuilding)*; (ii) *accelerating inclusive digital economy transformation and participation (digital economy)*; dan (iii) *promoting sustainability economic growth for a resilient future (sustainability)*.

Ketiga pilar tersebut bermakna bahwa ASEAN tetap kuat untuk secara bersama menyongsong pertumbuhan dari kawasan yang krusial sebagai pusat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi global.

Pada pilar ekonomi digital (*digital economy*), Indonesia berupaya untuk memperkuat inklusi keuangan dan literasi digital. Dalam hal ini, setiap negara ASEAN perlu meningkatkan kapasitas dalam memformulasikan strategi edukasi finansial secara nasional dan meningkatkan interkonektivitas sistem pembayaran regional. Pemanfaatan digitalisasi menjadi salah satu prioritas utama untuk memperkuat konektivitas pembayaran di wilayah ASEAN sehingga dapat mendukung perekonomian dan mendorong inklusi keuangan.

Sistem pembayaran antarnegara di kawasan ASEAN memiliki beberapa karakteristik. Pertama, adanya integrasi

dan interoperabilitas. Terkait dengan hal itu, sistem pembayaran antarnegara di kawasan ASEAN bertujuan untuk menciptakan jaringan yang lancar dan saling terhubung sehingga memungkinkan pelaku bisnis dan individu melakukan pembayaran dengan mudah. Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, kompatibilitas dan standardisasi infrastruktur pembayaran, format *messaging*, dan protokol perlu ditingkatkan.

Kedua, adanya konektivitas sistem pembayaran melalui berbagai inisiatif di kawasan ASEAN. Contohnya adalah inisiatif RPC yang bertujuan membentuk keterhubungan antarsistem pembayaran domestik sehingga memungkinkan transfer antarnegara secara seketika (*real time*). Ketiga, perkembangan pembayaran *real time* yang merupakan fitur utama dari sistem pembayaran antarnegara di kawasan ASEAN. Pembayaran *real time* bertujuan untuk mendukung transfer dana secara instan sehingga meningkatkan kecepatan dan efisiensi transaksi antarnegara.

Karakteristik keempat adalah harmonisasi regulasi di kawasan ASEAN. Negara ASEAN berkolaborasi untuk menyusun harmonisasi regulasi terkait dengan pembayaran antarnegara. Hal ini termasuk menyelaraskan persyaratan *know your customer* (KYC), langkah-langkah mitigasi risiko APU-PPT, dan regulasi perlindungan data.

Kelima adalah kebutuhan peningkatan faktor keamanan. Sistem pembayaran antarnegara di kawasan ASEAN harus mengutamakan keamanan dari risiko penipuan, pelanggaran data, dan akses yang tidak sah. Mekanisme autentikasi yang kuat, protokol enkripsi, dan sistem pemantauan penipuan digunakan untuk menjamin terjaganya integritas dan kerahasiaan transaksi.

Keenam, perlu upaya menjadikan biaya transaksi yang lebih rendah. Terkait dengan hal ini, ASEAN terus berupaya mengurangi biaya transaksi pembayaran antarnegara melalui standardisasi struktur harga dan mekanisme konversi mata uang asing yang kompetitif sehingga transaksi antarnegara lebih terjangkau dan mudah diakses.

Ketujuh, pengembangan pembayaran antarnegara di kawasan ASEAN dengan mengedepankan pencapaian inklusi keuangan.

Banyak upaya dilakukan tiap-tiap negara ASEAN untuk memastikan individu ataupun pebisnis, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau dengan akses terbatas ke layanan perbankan konvensional, dapat berpartisipasi dalam transaksi antarnegara melalui inisiatif pembayaran yang inovatif dan inklusif.

Karakteristik kedelapan, adanya kolaborasi dan kemitraan antarnegara ASEAN serta kerja sama dengan organisasi internasional dan lembaga keuangan untuk memperkuat sistem pembayaran antarnegara. Kemitraan tersebut dibentuk untuk meningkatkan adopsi teknologi, bertukar pandangan terkait praktik terbaik (*best practices*), dan tantangan pada pembayaran antarnegara.

Jurnalis televisi bersiap siaran seputar kegiatan KTT ke-43 ASEAN di Media Center KTT ASEAN di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (5/9/2023).



The image shows a female journalist with short dark hair, wearing a red blazer, speaking into a black microphone. She is positioned in the lower right foreground, facing left. Behind her is a large, circular backdrop with a white stylized logo at the top and the text "ASEAN INDONESIA 2023" in large white capital letters on a purple and blue background. A small Indonesian flag is visible on the left side of the backdrop. The background also features a pattern of yellow and white floral motifs.

ASEAN
INDONESIA
2023

BAB 5

Menavigasi Ekonomi Digital untuk Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Sektor Keuangan

Revolusi digital, didorong perkembangan teknologi yang pesat, membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan serta memacu perkembangan ekonomi dan keuangan digital di Indonesia. Hal ini, antara lain, terlihat dari pola dan perilaku masyarakat dalam bertransaksi pembayaran dan mengakses layanan jasa keuangan.

Pola konsumsi masyarakat bergeser dari aktivitas konvensional secara fisik menjadi aktivitas ekonomi menggunakan platform digital. Perubahan ini menuntut fasilitas layanan jasa keuangan dan sistem pembayaran yang *mobile*, cepat, tetapi tetap aman.

Tren digitalisasi yang meningkatkan efisiensi ini berpotensi meningkatkan *output* perekonomian. Di sisi lain, tren ini juga mendisrupsi fungsi konvensional dan menimbulkan risiko keamanan siber. Oleh karena itu, dibutuhkan keseimbangan antara inovasi dan terjaganya mitigasi risiko agar stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran tetap terpelihara.

Ekonomi digital perlu dinavigasi agar dapat menjawab berbagai isu dan tantangan terkini. Hal ini sejalan dengan salah satu pilar strategis Ketetuaan Indonesia di ASEAN 2023 pada jalur ekonomi, yaitu *Accelerating Inclusive Digital Economy Transformation and Participation (Digital Economy)*.

Tren digitalisasi pada sistem pembayaran dan layanan jasa keuangan membawa banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Digitalisasi sistem pembayaran memiliki capaian penting terkait reformasi peraturan, pengembangan infrastruktur sistem pembayaran ritel, dan standarisasi sistem pembayaran.

Digitalisasi juga mempercepat fungsi intermediasi layanan jasa keuangan sehingga dapat menjangkau kebutuhan dari populasi yang *underserved* dan *underbanked*. *Underserved* adalah kelompok yang kurang terlayani sektor perbankan, sedangkan *underbanked* sudah memiliki akses layanan keuangan, tetapi masih sederhana.

Pemanfaatan teknologi juga mendorong akselerasi digitalisasi perbankan serta kemunculan inovasi model bisnis seperti *financial technology (fintech)* dan *bigtech*. Di sisi lain, inovasi teknologi juga memunculkan risiko dan tantangan baru yang perlu dicermati.

Isu keamanan siber, privasi data, manajemen risiko, standardisasi, perlindungan konsumen, interkoneksi, dan interoperabilitas semakin mengemuka. Isu lain seperti perkembangan aset kripto dan inisiatif mata uang digital bank sentral (*central bank digital currency/CBDC*) juga perlu dicermati.

Digitalisasi tidak hanya membuka peluang, tetapi juga tantangan baru. Oleh karena itu, pengambilan kebijakan perlu seimbang agar dapat mendorong inovasi tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran. Kebijakan yang diambil juga harus lentur (*agile*) sehingga dapat menyesuaikan dengan perubahan yang cepat dan dinamis.

Kebijakan Bank Indonesia adalah terus mendukung kegiatan ekonomi keuangan digital, sekaligus stabilitas sistem keuangan demi stabilitas moneter dan sistem keuangan yang terjaga.

Sejalan dengan hal tersebut, ekonomi digital di ASEAN harus terus didorong agar dapat meningkatkan kemampuan bersaing secara global. Sektor privat dinilai masih menjadi pemimpin dalam inovasi teknologi. Adapun pemerintah mendukung dari sisi kebijakan. Oleh karena itu, kolaborasi kuat diperlukan.

Kerja sama internasional juga diperkuat untuk menjawab tantangan dari semua isu digitalisasi. Menavigasi ekonomi digital juga diperlukan untuk memperoleh informasi terkini terkait teknologi guna memetakan risiko dan manfaatnya.

Lingkungan Strategis dan Tantangan Ekonomi Digital

Perkembangan ekonomi digital yang didorong inovasi teknologi membawa peluang sekaligus tantangan dalam sistem keuangan. Mengutip *remarks* dari Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pada ASEAN High Level Seminar 2023, *"the pandemic has shown the important role of digital infrastructure as a backbone of resilience for the global economy as well as a driver for growth and inclusion"*.

Peluang dan tantangan yang muncul bersamaan dengan berbagai inovasi dalam sistem keuangan digital mesti disadari. Untuk

mengoptimalkan potensi dan manfaat keuangan digital, penting bagi negara-negara ASEAN untuk bekerja sama dalam memikirkan kembali lanskap keuangan baru guna mendukung akselerasi ekonomi digital.

i. Perkembangan Ekonomi Digital dan Sistem Keuangan

Perkembangan digitalisasi yang pesat sangat memengaruhi lanskap sistem keuangan. Digitalisasi mentransformasi tatanan sistem keuangan serta interaksi antara lembaga keuangan, pasar keuangan, infrastruktur pasar keuangan, serta perusahaan nonkeuangan dan rumah tangga. Interaksi ini dalam penyediaan pembiayaan yang semula fokus pada ekonomi berbasis konvensional (*physical economy*) menjadi ekonomi berbasis digital (*virtual economy*).

Hal ini tecermin dari pertumbuhan penetrasi internet yang pesat, dengan *gross merchandise value* (GMV) ekonomi digital ASEAN sebesar 200 miliar dollar AS pada 2022. Ekonomi digital Indonesia tumbuh 22 persen secara tahunan, didorong perkembangan e-dagang sebagai penopang utama (Temasek & Bain, 2022).

Digitalisasi juga mempercepat fungsi intermediasi layanan jasa keuangan sehingga dapat menjangkau kebutuhan dari *underserved* dan *underbanked population*. Lebih lanjut, pemanfaatan teknologi mendorong akselerasi digitalisasi perbankan serta kemunculan inovasi model bisnis seperti *fintech* dan *bigtech*. Akselerasi perkembangan digitalisasi perbankan juga dipicu pandemi Covid-19 yang mendorong masyarakat beraktivitas ekonomi secara digital.

Penetrasi perbankan digital di negara maju dan berkembang di Asia Pasifik semakin solid. Survei McKinsey (2021) menunjukkan 88 persen responden dari negara berkembang merupakan pengguna aktif perbankan digital. Sementara pengguna aktif di negara maju sebesar 90 persen responden. Persentase ini merefleksikan gap adopsi perbankan digital yang semakin sempit antara negara maju dan berkembang di kawasan Asia Pasifik. Hal ini didukung oleh faktor pandemi yang mendorong industri perbankan meningkatkan maturitas digital.

Persaingan usaha semakin meningkat, didorong perkembangan industri *fintech* yang pesat, yang mendisrupsi lanskap perbankan konvensional. Hal ini kian mendorong industri perbankan bertransformasi dengan mengembangkan produk keuangan digital

demi meningkatkan tingkat daya saing (DS Innovate, 2021).

Potensi perkembangan bank digital pun semakin terbuka, dengan rata-rata tingkat penetrasi internet di ASEAN yang mencapai 70 persen (Statista, 2023) serta kemunculan berbagai inovasi teknologi di sektor jasa keuangan. Menurut laporan Temasek & Bain (2022), potensi pasar bagi bank digital baru bergantung pada tingkat maturitas digital sistem perbankan tradisional yang sudah lebih dahulu ada serta kemampuannya menjangkau populasi *unbanked*.

Filipina, Indonesia, dan Vietnam merupakan negara-negara di ASEAN dengan potensi pasar bank digital baru yang solid. Hal itu dilatari masih rendahnya tingkat maturitas digital perbankan tradisional dan tingkat inklusi terbatas, yang berdampak pada tingginya populasi *unbanked*.

Potensi pasar bank digital di Malaysia dan Thailand cenderung lebih moderat, karena tingkat populasi *unbanked* lebih rendah dan regulasi perbankan yang lebih ketat. Hal ini menjadi penghalang bagi bank digital baru untuk memasuki pasar.

Adapun Singapura memiliki potensi minimum bagi perkembangan bank digital baru, karena maturitas digital sistem perbankan tradisional relatif sudah matang dan mampu melayani kebutuhan jasa perbankan berbagai segmen masyarakat dengan baik.

Secara umum, adopsi perbankan digital di Indonesia tumbuh pesat, didukung 200 juta pengguna internet. Menurut laporan Twimbit (2023), lebih dari 72 juta orang merupakan pengguna layanan perbankan digital dari sejumlah bank besar di Indonesia. Hal ini tecermin dari rata-rata rasio belanja teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) terhadap pendapatan bank yang berkisar 3 persen.

Saat ini investor perusahaan teknologi juga meramaikan digitalisasi perbankan. Mereka mengakuisisi bank tradisional dan mengubah model bisnisnya menjadi bank digital. Hal ini menunjukkan pasar perbankan digital tidak hanya didominasi bank besar yang menjadi *incumbent*, tetapi juga diramaikan oleh pemain baru dari hasil *re-branding*, merger, dan akuisisi, serta kolaborasi bank dengan *fintech* dan perusahaan pembiayaan.

Perkembangan pesat perbankan digital diiringi ekosistem regulasi yang kian matang. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2021 mendefinisikan Bank Digital sebagai Bank Berbadan

Hukum Indonesia (BHI) yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat atau menggunakan kantor fisik terbatas. OJK juga meluncurkan Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan untuk mendorong inovasi digital perbankan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian, aspek keamanan, tingkat kesehatan perbankan, dan kepercayaan masyarakat.

Lanskap sistem keuangan digital tidak terlepas dari kehadiran *fintech* sebagai salah satu sektor keuangan digital dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara. Walaupun akses layanan perbankan belum merata, adopsi ponsel pintar yang tinggi dan potensi pasar yang besar membuat ASEAN menjadi *hotspot* perkembangan industri *fintech*.

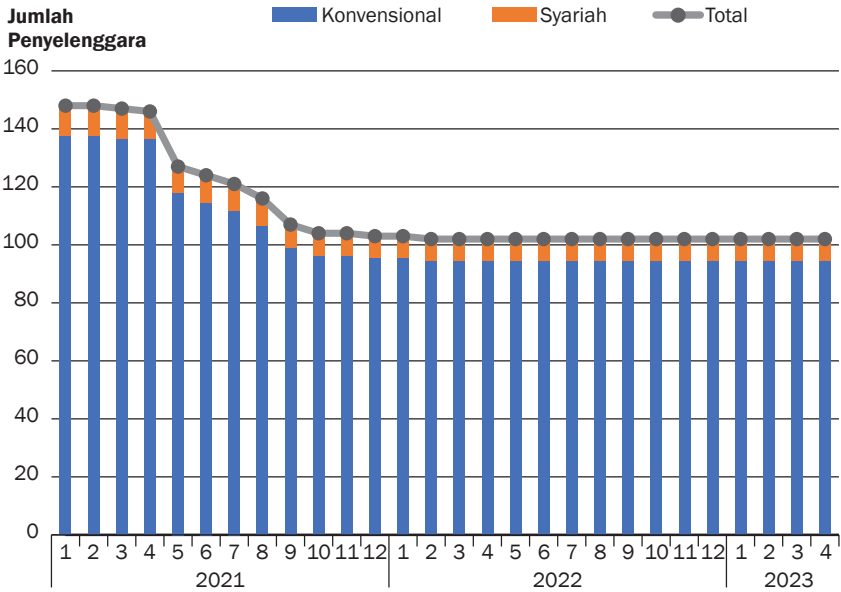
Di Filipina, pasar *fintech* dalam negeri berkembang pesat dengan 136 perusahaan pada 2023. Sebagian besar bergerak di lini usaha pinjaman, pembayaran, dan remitansi. Industri *fintech* Filipina menjawab kebutuhan pembiayaan masyarakat yang didominasi segmen individu (43 persen), korporasi (32 persen), dan UMKM (19 persen) (Quimba, 2023). Regulator lokal, seperti Securities Exchange Commission (SEC), Banko Sentral ng Pilipinas (BSP), dan the Insurance Commission of the Philippines, memiliki posisi yang akomodatif terhadap perkembangan inovasi *fintech* dalam meningkatkan inklusi keuangan (Quintero & Panganiban, 2023).

Sementara itu, Vietnam memiliki *pace* pertumbuhan *fintech* paling pesat di ASEAN, setelah Singapura, dengan prakiraan nilai pasar 18 miliar dollar AS pada 2024 (Acclime, 2023). Tingkat inklusi keuangan di Vietnam yang masih rendah memberi ruang bagi perusahaan *fintech* untuk tumbuh, dari 47 perusahaan pada 2017 menjadi 260 perusahaan pada 2022, menurut State Bank of Vietnam.

Perkembangan pesat tersebut tidak luput dari inisiatif regulator yang akomodatif melalui peluncuran Vietnam's National Digital Transformation Program to 2025 dan investasi penopang industri *fintech* yang nilainya besar, yakni 410 juta dollar AS. Angka investasi ini merupakan kedua tertinggi di ASEAN setelah Singapura (Acclime, 2023).

Di Indonesia, perkembangan pesat *fintech* sejalan dengan populasi *unbanked* yang masih tinggi, keterbatasan akses pendanaan UMKM, dan masih adanya gap pembiayaan yang belum dapat dilayani jasa keuangan tradisional.

Perkembangan Penyelenggara *Fintech Lending* di Indonesia



Sumber: OJK (2023)

Gambar 5.1 Perkembangan Penyelenggara *Fintech Lending* di Indonesia.

Menurut OJK, ada 102 perusahaan *fintech lending* berbasis konvensional dan syariah pada April 2023. Jumlah penyelenggara *fintech lending* cenderung berkurang dalam beberapa tahun terakhir (Gambar 5.1). Hal ini sejalan dengan moratorium perizinan *fintech lending* sejak 2020. Moratorium ini merupakan upaya OJK menata perizinan industri ini, baik penyempurnaan pada aspek regulasi maupun sistem informasi (OJK, 2022).

Meski demikian, Statistik Fintech OJK per April 2023 menunjukkan kinerja industri terjaga. Industri *fintech lending* memiliki *outstanding* pembiayaan Rp 50,53 triliun dan menopang sektor produktif dengan penyaluran pembiayaan Rp 6,42 triliun dengan porsi tertinggi di sektor perdagangan.

Sektor perbankan memiliki ekosistem regulasi yang ketat. *Fintech* dapat menjadi produk komplementer perbankan untuk melayani segmen masyarakat yang tidak terjangkau perbankan konvensional.

Kolaborasi antara perusahaan *fintech* dan bank tersebut untuk menyalurkan pembiayaan ke populasi *unbanked*.

Perluasan ekosistem keuangan digital juga didorong upaya grup perusahaan teknologi besar (*bigtech*) yang masuk ke layanan keuangan. Di Tanah Air, grup perusahaan teknologi besar terus memperluas aktivitas usahanya. Caranya, dengan membentuk ekosistem digital yang mencakup e-dagang dan layanan jasa keuangan, seperti perbankan, *fintech*, multipembiayaan, reksa dana, dan lokapasar kripto. Hal tersebut berkontribusi pada peningkatan interkoneksi *bigtech* dan sistem keuangan melalui penyaluran kredit—secara langsung dan *channeling*—serta penempatan dana pihak ketiga.

Laporan Temasek & Bain (2022) juga menunjukkan akselerasi digital semakin mendorong perkembangan berbagai industri penopang ekonomi digital dan sistem keuangan digital di beberapa negara ASEAN lain:

1. Malaysia

Malaysia mencatatkan GMV ekonomi digital 21 miliar dollar AS (tumbuh 21 persen secara tahunan), sebagian besar merupakan kontribusi pertumbuhan e-dagang dan platform perjalanan daring. GMV e-dagang 14 miliar dollar AS, sedangkan GMV platform perjalanan daring, yang pemulihannya lebih pesat dibandingkan 2021, sebesar 2 miliar dollar AS. Dalam subsektor sistem keuangan digital, platform investasi berkontribusi signifikan dengan *asset under management* (AUM) 7 miliar dollar AS pada 2022 atau tumbuh 40 persen secara tahunan. Layanan pembayaran digital turut menopang lanskap layanan keuangan digital dengan *gross transaction value* (GTV) 166 miliar dollar AS pada 2022.

2. Filipina

Nilai ekonomi digital atau GMV tumbuh 22 persen secara tahunan menjadi 20 miliar dollar AS. Pemulihan layanan platform perjalanan daring yang tumbuh 180 persen secara tahunan dengan GMV senilai 1 miliar dollar AS turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi digital domestik. Sebagian besar subsektor sistem keuangan digital ditopang subsektor layanan pembayaran

digital dan pengiriman remitansi, yang masing-masing memiliki GTV 75 miliar dollar AS dan 4 miliar dollar AS pada 2022.

3. Singapura

GMV ekonomi digital Singapura pada 2022 sebesar 18 miliar dollar AS, didukung transaksi e-dagang senilai 8,2 miliar dollar AS dan layanan platform perjalanan daring yang tumbuh 125 persen secara tahunan sehingga memiliki GMV 4 miliar dollar AS. Maturitas sistem keuangan digital berhasil mendorong layanan pengiriman remitansi Singapura dengan GTV tertinggi di ASEAN, yakni 7,3 miliar dollar AS.

4. Thailand

Nilai ekonomi digital Thailand mencatatkan tren positif dengan GMV 35 miliar dollar AS atau tumbuh 17 persen secara tahunan pada 2022. Pertumbuhan subsektor sistem keuangan digital turut didorong pertumbuhan platform investasi yang pesat, dengan pertumbuhan AUM 33 persen secara tahunan.

5. Vietnam

GMV ekonomi digital di Vietnam 23 miliar dollar AS atau yang tertinggi di kawasan ASEAN. Sebagian besar didorong sektor e-dagang (GMV 14 miliar dollar AS) dan media daring (GMV 4,3 miliar dollar AS). Layanan pinjaman merupakan subsektor sistem keuangan digital dengan pertumbuhan paling pesat, yakni 114 persen secara tahunan atau *lending loan book* 5 miliar dollar AS pada 2022.

Menurut Harun (2019), akselerasi sistem keuangan digital membawa manfaat, khususnya pada empat aspek, yakni intermediasi keuangan, inklusi keuangan, resiliensi keuangan, dan efisiensi keuangan.

Pertama, melalui pemanfaatan teknologi dengan penggunaan *omni-channel* dalam intermediasi keuangan, konsumen dapat mengambil keputusan transaksi secara *seamless* dengan kanal-kanal terintegrasi. Pemanfaatan teknologi juga mendorong keterbukaan informasi sehingga risiko informasi yang asimetris dapat diminimalisasi antarpelaku ekonomi.

Kedua, terkait inklusi keuangan, penggunaan *omni-channel* dapat mendukung inklusivitas karena kemampuannya melayani berbagai golongan masyarakat dan menjawab kebutuhan konsumen hingga ke daerah pelosok. Dana Moneter Internasional atau IMF (2019) menggarisbawahi, penggunaan layanan pembayaran digital dapat berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan. Selain itu, inklusi keuangan dan penurunan informasi yang asimetris dapat membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengakses pembiayaan pada sektor jasa keuangan. Sejalan dengan peningkatan layanan keuangan digital di Indonesia selama beberapa tahun terakhir, indeks inklusi keuangan sebesar 85,10 persen pada 2022, meningkat dibandingkan 2019 yang sebesar 76,19 persen (OJK, 2022).

Ketiga, digitalisasi sistem keuangan dapat berkontribusi pada peningkatan resiliensi keuangan. Layanan keuangan digital dapat mendiversifikasi produk jasa keuangan yang bisa mengurangi konsentrasi risiko pada suatu atau beberapa produk keuangan tertentu.

Keempat, layanan keuangan digital dapat meningkatkan transaksi dengan biaya yang lebih murah.

Digitalisasi sistem keuangan tidak luput dari beberapa potensi risiko, yaitu mikrofinansial dan makrofinansial (Financial Stability Board/FSB, 2017). Risiko mikrofinansial ini terdiri dari risiko finansial dan risiko operasional. Risiko finansial dapat muncul dari *maturity mismatch*, *liquidity mismatch*, dan risiko *leverage*.

Maturity mismatch terjadi akibat ketidakcocokan antara tanggal jatuh tempo pinjaman dan sumber dana. *Liquidity mismatch* terjadi karena dana untuk memenuhi kebutuhan penarikan dana belum tersedia, antara lain akibat belum jatuh tempo.

Sementara risiko *leverage* muncul akibat penggunaan pinjaman/utang dari pihak lain sebagai sumber pendanaan. Risiko operasional rentan timbul dalam bentuk risiko tata kelola, serangan siber, dan ketergantungan dengan pihak ketiga.

Adapun risiko makrofinansial terdiri dari risiko penularan akibat keterkaitan antarlembaga keuangan yang meningkat, risiko prosiklikalitas didorong perilaku investor yang percaya diri berlebihan, dan risiko volatilitas berlebih ketika perpindahan dana antarinstansi jasa keuangan semakin mudah dengan memanfaatkan teknologi digital.

Perkembangan pesat digitalisasi sistem keuangan juga menimbulkan gap data yang mempersulit proses asesmen risiko. Selain itu, juga timbul gap peraturan yang belum bisa sepenuhnya mengakomodasi perkembangan digitalisasi sistem keuangan.

Dengan berbagai potensi dan tren perkembangan sistem keuangan digital tersebut, perkembangan sistem keuangan digital di kawasan ASEAN masih menghadapi masalah struktural. Masalah pertama, tingkat penetrasi internet yang tinggi belum didukung tingkat literasi keuangan yang merata antarnegara di kawasan. Hal ini terefleksi dari survei Finlit S&P Global 2022 yang menunjukkan hanya 30 persen populasi di Asia Tenggara yang tergolong *financial literate*.

Masalah kedua, disparitas kualitas infrastruktur TIK antarnegara di ASEAN yang menunjukkan kesenjangan digital. Tingkat penetrasi internet di Kamboja, Laos, dan Myanmar di bawah 50 persen, sedangkan Singapura, Malaysia, dan Thailand lebih dari 80 persen (Kasuhik, 2021).

Aspek keamanan data juga menjadi kekhawatiran yang semakin besar di tengah perkembangan inovasi keuangan digital. Bahkan, Interpol (2021) menemukan bahwa ancaman atau serangan di dunia digital di ASEAN menunjukkan tren yang cukup mengkhawatirkan. Sektor perbankan ASEAN merupakan salah satu target serangan *phishing* yang menyumbang 21,30 persen dari total entitas, dengan *phishing* tertinggi pada 2020. Selain itu, 2,7 juta *ransomware* terdeteksi pada tiga triwulan pertama 2020.

ii. Sistem Pembayaran di Era Digital: Mata Uang Digital Bank Sentral

Digitalisasi ekonomi dan keuangan menggeser preferensi masyarakat ke arah layanan keuangan yang serba cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Fenomena ini merata di dunia, termasuk Indonesia dan kawasan ASEAN.

Arus digitalisasi ekonomi dan keuangan lebih kuat di masa pandemi Covid-19. Perilaku transaksi masyarakat semakin bergeser ke arah daring seiring dengan pembatasan mobilitas sosial.

Pandemi juga mengerek adopsi aset kripto secara masif, termasuk derivasinya berupa DeFi dan *metaverse*. Selain itu, juga memicu fenomena yang dikenal dengan sebutan *cryptoization*. Disrupsi digital

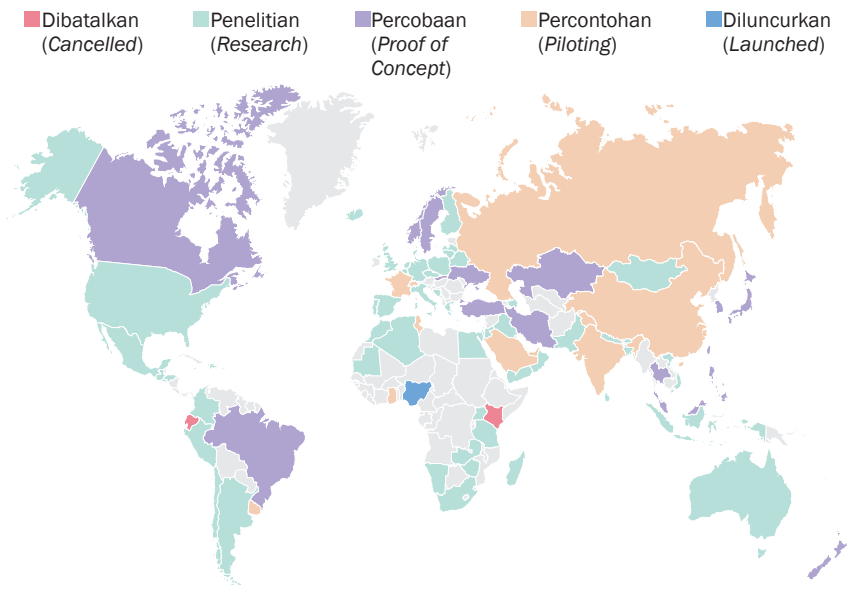
tidak lagi sebatas isu *shadow banking*, tetapi telah merambah pada isu *shadow currency* dan *shadow central banking*.

Situasi ini memaksa komunitas bank sentral global, termasuk Bank Indonesia dan bank sentral lainnya di kawasan ASEAN, untuk menyesuaikan pendekatan kebijakannya. Transformasi digital sebatas digitalisasi sistem pembayaran sudah tidak memadai.

Konteks transformasi digital memungkinkan akses publik terhadap bentuk uang digital yang tepercaya (*digital trusted money*). Tujuannya, memenuhi kebutuhan masyarakat akan transaksi yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal di era digital serta menjamin efektivitas pelaksanaan misi bank sentral saat ini dan masa depan.

Mata uang digital bank sentral (*central bank digital currency/CBDC*) merupakan solusi berkelanjutan. CBDC diyakini dapat menggabungkan kebutuhan transaksi masyarakat di era digital dengan kebutuhan bank sentral untuk menjaga keberlanjutan sistem keuangan. CBDC melengkapi kendala keuangan saat ini dengan berfungsi sebagai alat penting untuk memenuhi misi bank sentral di era digital.

Perkembangan Proyek CBDC



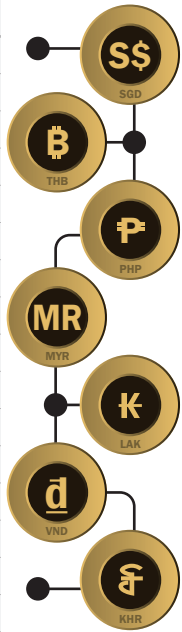
Sumber: CBDC Tracker (2023)

Gambar 5.2 Perkembangan Proyek CBDC.

Proyek CBDC di Negara ASEAN

Proyek	Status
Project Mariana	Research
Project Chedar Phase I x Project Ubin+	Research
Project Ubin+	Piloting
Project Orchid	Cancelled
Project Jasper + Ubin	Proof of Concept
Project Inthanon	Proof of Concept
Project Inthanon-Lion Rock	Proof of Concept
Project m-Bridge	Research
Thailand CBDC	Proof of Concept
Philippines CBDC	Cancelled
CBDCPH	Research
E-ringgit	Proof of Concept
Malaysia CBDC	Research
Laos CBDC	Proof of Concept
Vietnam CBDC	Research
Project Bakong	

Sumber: CBDC Tracker (2023)



Gambar 5.3 Proyek CBDC di Negara ASEAN.

CBDC adalah versi digital mata uang fiat yang diterbitkan bank sentral yang dapat digunakan masyarakat, dunia usaha, serta lembaga keuangan untuk transaksi dan pembayaran. Pada 2023, sebanyak 130 negara yang merepresentasikan 98 persen produk domestik bruto (PDB) dunia telah memulai penelitian dan eksperimen mengeksplorasi CBDC.

Proyek CBDC tersebut terbagi menjadi berbagai tahap pengembangan, yakni perencanaan, pembuktian konsep, prototipe, penelitian, atau produksi. CBDC berpotensi memberikan manfaat bagi sistem pembayaran, termasuk peningkatan efisiensi, keamanan, dan aksesibilitas.

Secara global, terdapat 156 proyek CBDC yang dikembangkan, di antaranya 92 proyek ritel CBDC dan 44 perkembangan proyek *wholesale* CBDC. Dalam perkembangan proyek *wholesale* CBDC, 10 di antaranya dalam tahap percontohan, 4 proyek dalam tahap pembuktian konsep, 22 proyek dalam tahap riset, dan 1 proyek dibatalkan (CBDC Tracker, 2023).

Adapun negara yang mengembangkan proyek ritel CBDC, 3 di antaranya sudah diluncurkan, 7 proyek dalam tahap percontohan, 19 proyek dalam tahap pembuktian konsep, 59 proyek dalam tahap riset, dan 8 proyek dibatalkan. Beberapa proyek pengembangan CBDC tidak hanya dilakukan secara domestik, tetapi atas kerja sama beberapa negara.

Negara-negara anggota ASEAN juga mengembangkan CBDC. Namun, hingga kini Brunei Darussalam, Myanmar, dan Timor Leste belum memublikasikan dan mengembangkan proyek CBDC.

Karakteristik masalah dan kebutuhan yang berbeda dari setiap negara ataupun regional membuat topik eksplorasi CBDC cukup beragam. Salah satunya adalah pemanfaatan CBDC untuk pembayaran lintas negara (*cross-border transaction*). CBDC diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan pembayaran lintas negara yang biasanya lambat, mahal, dan tidak efisien.

Untuk mengatasi tantangan ini, bank sentral dan pembuat kebijakan mengeksplorasi berbagai opsi teknologi yang memungkinkan transaksi CBDC Lintas Negara berjalan lancar dan aman, termasuk di regional ASEAN. Dalam Joint Statement dari ASEAN Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting (AFMGM) Ke-9 disebutkan, diskusi dan eksplorasi CBDC untuk pembayaran Lintas Negara di ASEAN menjadi salah satu topik yang ditunggu.

Pilihan teknologi CBDC terus berkembang, termasuk beberapa teknologi baru yang menjanjikan dan dapat digunakan. Teknologi baru yang sering dikaitkan dengan CBDC adalah teknologi buku besar terdistribusi (*distributed ledger technology*/DLT). Meski sering dikaitkan dengan DLT, solusi platform teknologi CBDC pada prinsipnya bersifat netral. Sebab, dalam praktiknya, platform CBDC tidak selalu menggunakan DLT.

Sistem teknologi terpusat yang digunakan di sebagian besar sistem pembayaran saat ini juga bisa jadi pilihan. Model hibrida yang menggabungkan platform terdistribusi dan terpusat juga menjadi pilihan di beberapa negara (Soderberg *et al.*, 2022).

Untuk CBDC Lintas Negara, teknologi DLT adalah salah satu opsi yang menjanjikan. Sifatnya yang terdesentralisasi meningkatkan transparansi dan keamanan (BIS, 2020) sehingga ideal untuk mengelola operasi keuangan Lintas Negara dengan risiko penipuan

dan manipulasi yang lebih rendah. Transaksi yang tercatat di DLT dapat dengan mudah diaudit dan dilacak, mengurangi risiko penipuan dan mempermudah kegiatan pengawasan.

Bank of Thailand (BoT) dan Hong Kong Monetary Authority (HKMA) memiliki proyek percontohan CBDC Lintas Negara negara yang sukses menggunakan teknologi DLT pada 2020. Proyek ini menunjukkan potensi pembayaran Lintas Negara yang hemat biaya dan menggambarkan peran DLT dalam meningkatkan inklusi keuangan dan transparansi (BoT & HKMA, 2020).

Skema DLT yang banyak dikembangkan pada bank sentral dunia cenderung menggunakan skema diizinkan (*permissioned*). Skema tersebut berbeda dengan yang digunakan pada Bitcoin atau Ethereum yang bersifat tanpa izin (*permissionless*). Secara sederhana, perbedaan keduanya terletak pada fleksibilitas kepesertaan.

Pada skema *permissionless*, siapa saja dapat berpartisipasi, sedangkan pada skema *permissioned*, kepesertaan hanya terbatas untuk individu/entitas yang ditunjuk. Dengan akses yang terbatas, salah satu keuntungan yang ditawarkan dari skema *permissioned* adalah peserta dapat memastikan hanya entitas tepercaya yang menjadi bagian dari jaringan (WEF, 2021). Dengan demikian, risiko terhadap aktivitas berbahaya dapat diminimalisasi.

Selain DLT, opsi menggunakan sistem terpusat (*centralized*) seperti pada sistem keuangan saat ini juga dapat dipertimbangkan. Sistem terpusat akan lebih efisien daripada sistem pembayaran lintas negara saat ini yang mengandalkan bank koresponden. Namun, terdapat tantangan keamanan dan transparansi.

Solusi sistem terpusat dapat dilakukan melalui integrasi sistem pembayaran seperti *real time gross settlement* (RTGS) atau platform lain yang dioperasikan bank sentral negara masing-masing. Sistem *TARGET Instant Payment Settlement* (TIPS) Bank Sentral Eropa adalah contoh infrastruktur penyelesaian terpusat yang dapat digunakan untuk transaksi lintas negara CBDC.

Perkembangan teknologi memunculkan banyak opsi. Eksplorasi di sejumlah negara juga memunculkan kajian berbagai teknologi yang masing-masing memiliki karakteristik dan manfaat. Project Ubin yang dilakukan Monetary Authority of Singapore (MAS) misalnya, memanfaatkan *Interledger Protocol* (ILP) yang mengedepankan

interkoneksi antarjaringan. Adapun Bahama menggunakan standar tokenisasi seperti ERC-20 dan ERC-721 yang bersifat fleksibel untuk diimplementasikan di sistem terpusat dan DLT.

Pilihan teknologi CBDC terbaik untuk pembayaran lintas negara akan bergantung pada sejumlah faktor, termasuk kebutuhan khusus bank sentral dan peraturan negara masing-masing. Pelaksanaan kajian melalui *proof of concept/prototyping* dan kolaborasi dengan industri sangat penting untuk memastikan implementasi CBDC menggunakan teknologi paling cocok dengan kebutuhan negara masing-masing.

iii. Isu Keamanan Siber dan Diskusi Kebijakan Bank Sentral

Perkembangan ekonomi digital yang memengaruhi lanskap sistem keuangan dan sistem pembayaran, termasuk kehadiran inovasi dalam sistem keuangan dan sistem pembayaran, membawa manfaat dan peluang. Perkembangan ini juga menciptakan tantangan dalam isu keamanan siber.



DOKUMENTASI BI

Suasana Pertemuan CRISP di Legian, Bali, Juli 2023.

Dalam rangkaian Keketuaan ASEAN 2023, Bank Indonesia telah menyelenggarakan pertemuan Digital and Technology Network (DTN) ASEAN Cybersecurity Resilience Information Sharing Platform (CRISP). Pertemuan tahunan antarbank sentral di ASEAN ini diselenggarakan untuk mengatasi hambatan dan memahami peristiwa ancaman dunia maya di wilayah ASEAN.

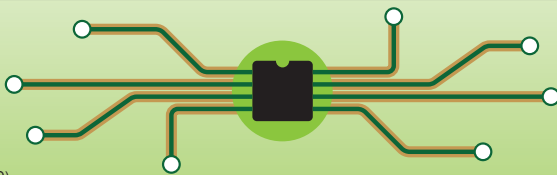
Pertemuan CRISP juga mempelajari metode praktis dari anggota DTN dan dapat langsung diterapkan serta melahirkan inisiatif kerja sama dan koordinasi untuk pencegahan dan mitigasi di bidang keamanan siber.

Bank Indonesia mengadakan dua kali pertemuan CRISP 2023. Pertemuan pertama, 7th ASEAN Cybersecurity Resilience and Information Sharing Platform (CRISP) Digital and Technology Network (DTN) Meeting, secara daring menggunakan platform Zoom pada 17 April 2023. Adapun CRISP kedua atau 8th ASEAN CRISP and DTN Meeting digelar secara tatap muka di The Stone Hotel Legian, Bali, pada 26-27 Juli 2023.

Laporan ISC2 pada Cybersecurity Workforce Study

Jumlah rata-rata karyawan di setiap tugas (menurut ukuran perusahaan)

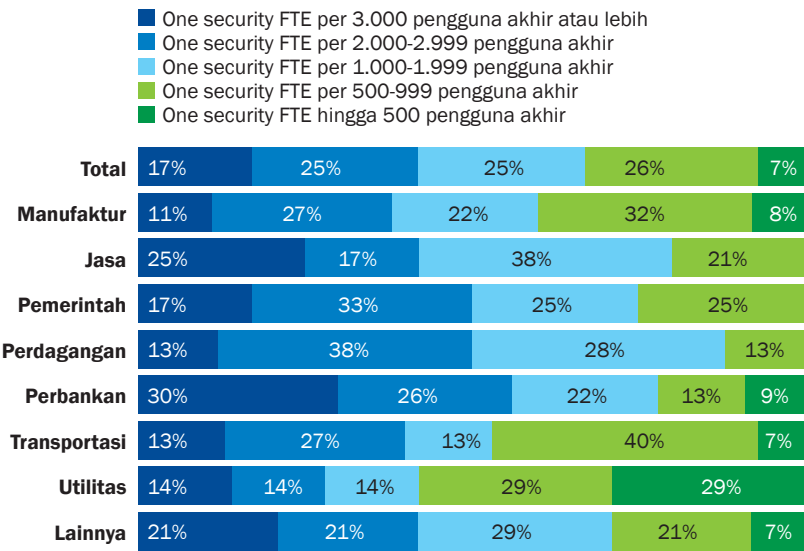
Tugas tim keamanan siber	Total	1-99	100-499	500+
Operasi Keamanan	22	23	21	22
Administrasi Keamanan	15	17	16	15
Manajemen risiko	13	13	14	13
Kepatuhan (Compliance)	12	12	13	12
Keamanan Teknologi Operasional	11	11	11	11
Pengembangan Perangkat Lunak yang Aman	10	9	9	10
Pengujian Penetrasi	8	8	8	9
Forensik	8	7	8	8



Sumber: ISC2 (2019)

Gambar 5.4 Laporan ISC2 pada Cybersecurity Workforce Study.

Laporan Gartner pada "Tips and Guidelines for Sizing Your Information Security Organization"



Gambar 5.5 Laporan Gartner pada "Tips and Guidelines for Sizing Your Information Security Organization".

Dalam pertemuan CRISP Ke-7, Bank Indonesia mengadakan survei terkait kebijakan dan implementasi kontrol di bidang keamanan siber. Kebijakan ini mengangkat aspek *people, process, and technology* sebagai tiga aspek paling dominan untuk meningkatkan ketahanan siber. Hasil survei tersebut menjadi pembandingan kebijakan bank-bank sentral terkait keamanan siber.

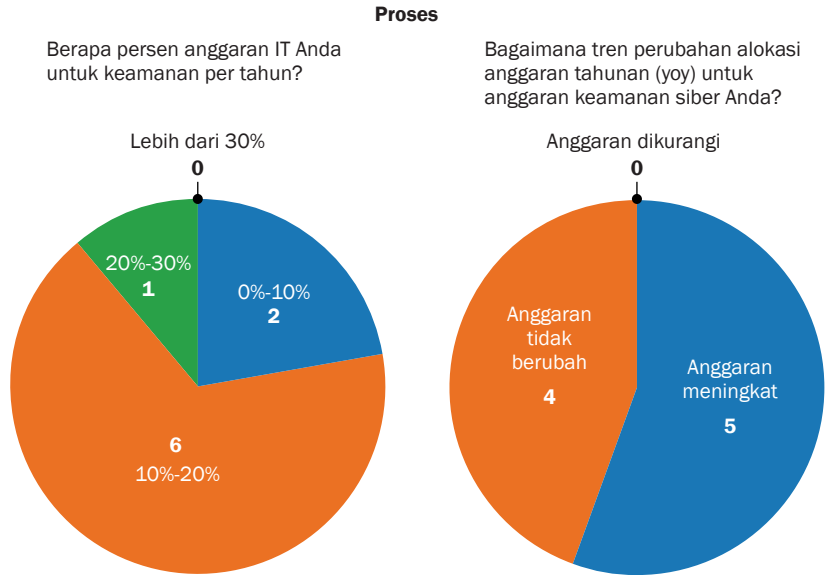
Dalam survei terkait aspek *people*, diamati jumlah sumber daya manusia (SDM) di bidang keamanan siber menjadi salah satu tantangan bagi peserta pertemuan. Hanya tiga bank sentral yang memiliki SDM keamanan siber hingga 1 persen dari total SDM. Enam bank sentral lain yang ikut dalam survei memiliki jumlah SDM keamanan siber kurang dari 1 persen dari total SDM.

Apabila merujuk pada survei dan penelitian ISC2 (2019) dan Gartner (2014), rasio staf keamanan teknologi informasi (TI) dengan total SDM beragam, tergantung dari jenis industri. ISC2 melaporkan,

total jumlah pegawai untuk peran *security operations, administration, risk management, compliance, operational technology security, secure software development, penetration testing, dan forensics* adalah 100 orang untuk perusahaan dengan ukuran jumlah pegawai lebih dari 500 orang. Sementara Gartner melaporkan rasio *one security FTE per 3.000 or more end users* adalah 17 persen.

Dalam aspek *process*, perhatian pada alokasi anggaran di bidang keamanan siber. Di tengah peningkatan risiko keamanan siber, tidak semua bank sentral memiliki kenaikan anggaran tahunan untuk ketahanan siber. Dari sembilan bank sentral yang mengikuti survei, hanya lima bank sentral yang anggaran keamanan sibernya naik. Hal ini menjadi tantangan karena biaya investasi perangkat keamanan siber relatif mahal dan kelangkaan SDM di bidang keamanan siber membuat biaya SDM cenderung lebih tinggi.

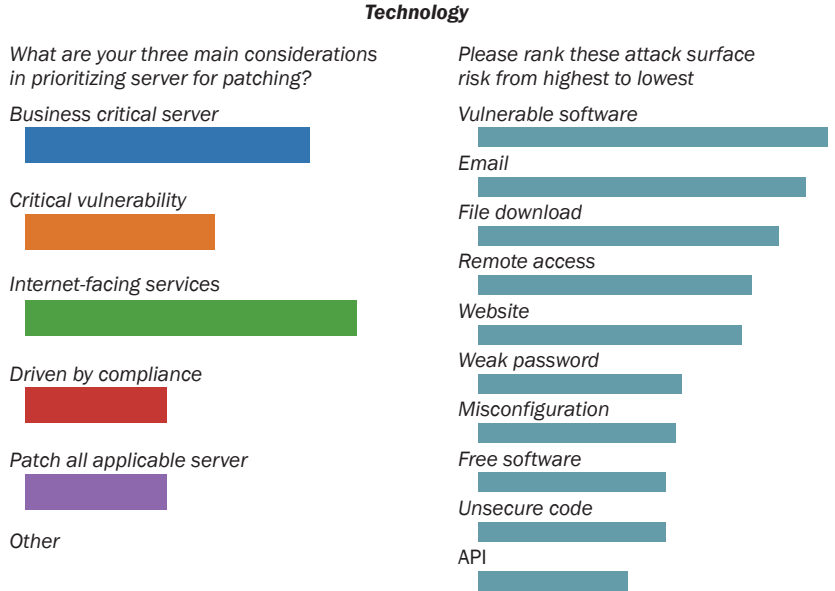
Hasil Survei Terkait Kebijakan dan Implementasi Kontrol pada Aspek Proses



Sumber: 7th CRISP DTN Meeting (2023)

Gambar 5.6 Hasil Survei Terkait Policy dan Implementasi Kontrol pada Aspek Process.

Hasil Survei Terkait Kebijakan dan Implementasi Kontrol pada Aspek Teknologi



Sumber: 7th CRISP DTN Meeting (2023)

Gambar 5.7 Hasil Survei Terkait *Policy* dan Implementasi Kontrol pada Aspek *Technology*.

Dalam aspek *technology* disimpulkan serangan siber dilakukan paling banyak dengan menargetkan kerentanan pada perangkat lunak dan melalui *e-mail phishing*. Adapun mengunduh fail dan akses jarak jauh menjadi teknologi yang sering ditargetkan peretas untuk menyerang bank sentral. Data dalam survei ini penting karena memberikan potret tren dan pola serangan yang selalu berubah.

Inisiatif ASEAN dalam Menavigasi Ekonomi Digital

i. Inisiatif ASEAN Terkait Sistem Keuangan

Merespons perkembangan pesat inovasi sistem keuangan digital, negara-negara ASEAN melanjutkan berbagai komitmen regional. ASEAN Economic Community 2025 on Financial Integration menggarisbawahi semangat ASEAN untuk mewujudkan integrasi sektor jasa keuangan.

Untuk memaksimalkan potensi di tengah momentum era digital,

berbagai kerangka kerja yang berfokus pada ekonomi digital dengan memperhatikan tata kelola data telah dibangun. Kerangka kerja itu di antaranya the Bandar Seri Begawan Roadmap, the ASEAN Digital Master Plan 2025, ASEAN Framework on Digital Data Governance, dan the ASEAN Digital Integration Framework.

Selain itu, *public-private partnership* juga dijalin dengan melibatkan regulator dan industri jasa keuangan, salah satunya ASEAN Financial Innovation Network (AFIN) yang merupakan hasil kerja sama nirlaba antara Monetary Authority of Singapore (MAS) dan International Finance Corporation (IFC). AFIN bertujuan memfasilitasi inovasi dan kerja sama antara institusi keuangan untuk mendorong transformasi digitalisasi perbankan dan sektor keuangan lain di kawasan (World Bank, 2019).

AFIN juga menyediakan API Exchange Platform (APIX) sebagai wadah kerja sama bank, *fintech*, dan industri keuangan nonbank lainnya di ASEAN yang menyediakan lokapasar *fintech* daring dan platform *sandbox* bagi institusi keuangan demi mendorong inovasi keuangan digital serta inklusi keuangan (Peyton, 2018).

Keketuaan ASEAN 2023 juga memberiperhatian pada perkembangan sistem keuangan digital yang tecermin dari pilar Agenda Ekonomi Prioritas (*Priority Economic Deliverables /PEDs*), terutama pilar pemulihan-pembangunan kembali (*recovery-rebuilding*) dan ekonomi digital.

Pilar pemulihan-pembangunan kembali membahas upaya integrasi perbankan ASEAN di era digital melalui pertemuan ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) dan agenda perkembangan liberalisasi keuangan di bawah ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) dan Free Trade Agreements.

Pilar ekonomi digital memaknai upaya konektivitas pembayaran melalui inisiatif Regional Payment Connectivity (RPC) sebagai langkah besar untuk memperdalam integrasi ekonomi kawasan. Di Indonesia, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) sesuai ruang lingkup kewenangan masing-masing sesuai dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Koordinasi dapat berupa uji coba/pengembangan inovasi,

pengembangan ekosistem pengaturan berbasis teknologi dan pengawasan berbasis teknologi, pertukaran data dan/atau informasi, pembahasan isu yang sedang berkembang terkait ITSK, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan aspek lain. BI juga mengembangkan dan memanfaatkan *supervisory technology (suptech)* untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perizinan, pelaporan, dan pengawasan.

Dengan berbagai potensi dan inisiatif, lanskap sistem keuangan digital di kawasan ASEAN yang semakin maju dan terkoneksi menjadi semakin nyata. Pemanfaatan teknologi digital di sektor keuangan yang menurunkan biaya transaksi dapat meningkatkan efisiensi dan menjangkau entitas Lintas Negara.

Namun, sejumlah masalah struktural, seperti kesenjangan literasi dan inklusi keuangan, kesenjangan digital, serta risiko keamanan siber, dapat memperlambat akselerasi digital sistem keuangan di ASEAN. Oleh karena itu, perbaikan kesenjangan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur TIK serta peningkatan kapasitas keamanan siber di tingkat regional merupakan praperysyarat untuk mewujudkan sistem keuangan digital yang inklusif.

Integrasi keuangan regional yang semakin dalam berpotensi meningkatkan interkoneksi antarinstansi finansial Lintas Negara. Namun, hal ini juga dapat meningkatkan kerentanan sistem keuangan (ADB, 2020). Maka, peningkatan dan penguatan kerja sama dalam pengawasan Lintas Negara merupakan hal yang krusial.

Perkembangan digitalisasi yang pesat mengakselerasi layanan keuangan Lintas Negara dan mendukung integrasi pasar sejalan dengan visi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2025. Cetak biru MEA 2025, yang disepakati pada 2015, berupaya menciptakan ekonomi ASEAN yang terintegrasi dan kohesif guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, serta berdaya tahan menghadapi tekanan dan volatilitas ekonomi global.

Salah satu upaya untuk mengakselerasi transaksi perdagangan dan investasi sekaligus menjaga stabilitas keuangan regional melalui pembentukan ABIF dan Panduan ABIF pada 2015. Integrasi perbankan merupakan proses menghubungkan sektor perbankan di berbagai yurisdiksi melalui aktivitas perbankan Lintas Negara. Saat ini layanan perbankan disediakan melalui pembukaan kantor cabang dan

pembentukan anak perusahaan secara Lintas Negara.

ABIF menjadi dasar bagi negara-negara ASEAN untuk memberikan akses pasar dan fleksibilitas operasional yang lebih besar bagi *Qualified ASEAN Banks* (QAB) sesuai kesiapan yurisdiksi masing-masing. QAB diharapkan menjadi katalisator untuk mendorong aktivitas perbankan dalam memfasilitasi perdagangan dan investasi di ASEAN.

Proses ABIF terdiri atas dua tahap. Tahap pertama adalah proses multilateral yang diatur Panduan ABIF, yaitu memenuhi prinsip-prinsip ABIF, karakteristik QAB, dan proses penerimaan QAB. Tahap kedua, negosiasi perjanjian bilateral terkait penerimaan QAB dan pengaturan resiprokal. Komitmen negara *home* dan *host* perihal cakupan kesepakatan dimasukkan ke dalam komitmen jadwal pada Annex ASEAN Framework Agreement of Services (AFAS).

Keleluasaan akses pasar dan fleksibilitas operasional kepada QAB disepakati negara *home* dan *host* secara resiprokal dalam perjanjian bilateral. Selain memfasilitasi operasionalisasi proses integrasi perbankan di ASEAN, ABIF juga memformulasikan inisiatif penguatan kerangka pengaturan perbankan dan kerja sama untuk menjaga stabilitas keuangan dalam proses integrasi keuangan kawasan.

Untuk menutup gap terkait kerangka prudensial perbankan di ASEAN yang berpotensi menghambat proses integrasi perbankan, Steering Committee for Capacity Building Initiatives (SCCB) membangun kapasitas, terutama bagi negara BCLMV (Brunei Darussalam, Cambodia, the Lao People's Democratic Republic, Myanmar, and Vietnam), guna mendorong koherensi peraturan. Koherensi memprioritaskan peraturan yang fokus pada kerangka permodalan dan likuiditas Basel III dan IFRS 9.

Era digitalisasi keuangan mengubah model bisnis perbankan cukup signifikan dan membuka akses bagi pemain baru nonbank di sektor jasa keuangan sehingga mengakselerasi integrasi perbankan. Berbagai produk/jasa keuangan dapat diberikan dengan biaya yang lebih kompetitif disertai kemudahan akses dan kecepatan bertransaksi di level domestik dan secara Lintas Negara. Layanan keuangan di area pembayaran dan remitansi juga semakin terakselerasi melalui digitalisasi. Perkembangan tersebut mengubah perilaku konsumen dalam bertransaksi keuangan dan mendorong transformasi lanskap keuangan global.

Dalam jangka menengah dan panjang, digitalisasi keuangan akan mengakselerasi aktivitas keuangan perbankan yang bersifat Lintas Negara sehingga berpotensi mengurangi minat terhadap integrasi perbankan ASEAN yang berbasis *commercial presence* (mode 3).

Konsep integrasi perbankan berbasis *commercial presence* mensyaratkan bank membuka kantor cabang dan/atau anak perusahaan di negara *host* untuk menyediakan layanan keuangan. Pembukaan kantor cabang dan/atau anak perusahaan di negara *host* meningkatkan biaya hangus (*sunk costs*) dan biaya operasional sehingga memerlukan komitmen jangka panjang dibandingkan investasi portofolio.

Di era digital, pendekatan integrasi perbankan berbasis *commercial presence* kurang menguntungkan, terutama di negara yang tidak menerapkan restriksi akses pasar terhadap kantor cabang atau anak perusahaan bank asing.

Kebutuhan pembukaan kantor cabang dan anjungan tunai mandiri (ATM) semakin berkurang seiring dengan peningkatan aktivitas digital dan penurunan kebutuhan uang tunai. Berdasarkan Financial Access Survey (FAS) IMF, jumlah kantor cabang bank komersial di negara berpendapatan tinggi dan di beberapa negara berpendapatan menengah-tinggi turun pada 2013-2019. Penurunan ini terutama disebabkan efisiensi bank dan ekspansi layanan keuangan digital (Espinosa-Vega *et al.*, 2020, IMF, 2019).

Sementara itu, jumlah kantor cabang bank komersial dan jumlah ATM untuk setiap seratus ribu orang turun di beberapa negara ASEAN, seperti Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Perkembangan ini memengaruhi minat dan rencana bisnis bank dalam berekspansi dengan skema *commercial presence* di negara *host*.

Transformasi model bisnis bank akibat digitalisasi juga memengaruhi pendekatan pengaturan dan pengawasan perbankan di kawasan ASEAN. Otoritas di negara-negara ASEAN menerapkan pendekatan beragam dalam mengatur dan mengawasi aktivitas digital bank. Sebagian otoritas mengeluarkan Pedoman dan perizinan khusus bagi perusahaan yang bisnis modelnya fokus pada penyediaan teknologi keuangan serta perizinan untuk bank digital (Singapura, Malaysia, Filipina).

Secara umum, otoritas perlu menyeimbangkan dukungan terhadap inovasi keuangan dan persaingan bebas dengan tujuan menjaga stabilitas sistem keuangan dan memastikan terjaganya *level playing field*. Profil risiko bank dengan model bisnis bank digital berbeda dari bisnis konvensional. Akan tetapi, mitigasi risiko, seperti persyaratan kecukupan modal sesuai tingkat risiko, mesti tetap efektif. Otoritas regulator juga perlu mengasesmen risiko secara lebih berhati-hati, termasuk risiko operasional dan siber terkait penyediaan jasa keuangan Lintas Negara dalam pengembangan konsep integrasi perbankan.

Harmonisasi pengaturan dan pengawasan keuangan secara global semakin penting dan memerlukan dukungan penguatan koordinasi dan kerja sama antarotoritas keuangan. Dalam hal pengaturan dan pengawasan berbeda signifikan antara yurisdiksi *home*, yakni institusi keuangan tersebut berasal, dan yurisdiksi *host*, yakni institusi keuangan menyediakan layanan keuangan digital, maka potensi arbitrase pengaturan dan pengawasan akan semakin besar.

Merespons berbagai risiko digitalisasi keuangan, penguatan koordinasi antara *home-host* dan dengan otoritas nonkeuangan semakin diperlukan, antara lain terkait dengan penanganan *anti-money laundering and counter-terrorism financing* (AML/CFT) dan *Know Your Customer and Know Your Customer's Customer* (KYC/KYCC), serangan siber, keamanan data dan informasi, serta perlindungan konsumen/investor.

Dengan kemajuan teknologi, keberhasilan integrasi perbankan yang diukur berdasarkan keberadaan fisik perbankan berpotensi kurang diminati. Tingkat integrasi perbankan yang hanya diukur dari jumlah QAB dan perjanjian bilateral di kawasan serta ekspansi jaringan bank dan pembiayaan dari *indigenous ASEAN banks* di negara *host* berpotensi menjadi kurang representatif. Hal ini mempertimbangkan penyediaan layanan keuangan Lintas Negara dapat dilakukan secara digital tanpa membuka kantor cabang di negara *host*.

Di luar skema *commercial presence*, peran bank dalam memfasilitasi kegiatan perdagangan dan investasi melalui transaksi pembayaran Lintas Negara berbasis digital (interoperabilitas QR *payment* di ASEAN) dan *local currency settlement/transaction* sudah berkembang pesat.

Sejumlah bank di kawasan ASEAN telah bekerja sama untuk

memfasilitasi transaksi pembayaran Lintas Negara melalui skema *local currency settlement* menggunakan respons cepat (QR) yang terkoneksi antarnegara ASEAN. Bank yang dinyatakan sebagai *Appointed Cross Currency Dealer* (ACCD)⁵ telah mendukung kegiatan transaksi perdagangan dan investasi di kawasan ASEAN.

Transaksi *local currency settlement* antara Indonesia dengan Malaysia dan Thailand berkembang positif, yakni 1,6 miliar dollar AS atau lima kali lipat sejak pertama kali diimplementasikan pada 2018. Adapun interoperabilitas QR untuk pembayaran ritel telah berjalan antara Thailand dengan Kamboja, Vietnam, Malaysia, Indonesia, dan Singapura; Malaysia dengan Kamboja, Thailand, dan Indonesia; Indonesia dengan Thailand dan Malaysia; Vietnam dengan Thailand; serta Kamboja dengan Thailand dan Malaysia.

ii. Inisiatif ASEAN Terkait Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC)

Proyek Garuda: Menjaga Kedaulatan Rupiah di Era Digital

Bank Indonesia telah meluncurkan Proyek Garuda yang memayungi inisiatif eksplorasi desain CBDC Indonesia, yang kemudian disebut "rupiah digital". Proyek Garuda merupakan proyek berskala nasional yang diluncurkan pada 30 November 2022 di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan RI.

Hal ini dilatarbelakangi evolusi uang, mulai dari era barter, komoditas, uang kartal, hingga uang elektronik atau metode pembayaran digital. Hal yang menonjol adalah pergeseran transaksi pembayaran yang tidak lagi mengandalkan perpindahan secara fisik, tetapi cukup mengandalkan perpindahan pencatatan di rekening. Pembayaran di ekosistem ritel menggunakan alat bayar kartu, uang elektronik, atau kanal kode QR. Meskipun, disadari, hal ini tidak menafikan keberadaan uang tunai yang masih diminati.

Di satu sisi, fenomena ini berpotensi meningkatkan inklusi dan efisiensi sistem keuangan, termasuk pembayaran lintas negara, serta menjadi fondasi keuangan terdesentralisasi yang menawarkan akses instan ke beragam produk keuangan. Di sisi lain, aset kripto

⁵ ACCD adalah bank yang ditunjuk oleh otoritas kedua negara untuk memfasilitasi pelaksanaan *local currency settlement* (LCS) melalui pembukaan rekening mata uang negara mitra di negara masing-masing.

dan *stablecoins* juga membawa risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan transaksi terlarang. Penggunaannya secara masif dapat memengaruhi efektivitas kebijakan bank sentral yang meliputi risiko stabilitas keuangan, *shadow currency*, *shadow central banking*, serta berimplikasi pada sistem moneter internasional di level global.

Hal ini mendorong Bank Indonesia untuk mengisi gap yang ada, yakni ketiadaan *trusted money* yang bisa menjangkau ekosistem berbasis desentralisasi. UU P2SK telah menyatakan bahwa *legal tender* juga melekat pada mata uang rupiah dalam bentuk digital (selain kertas dan logam).

Melalui kehadiran rupiah digital, masyarakat akan memiliki akses terhadap uang digital yang bebas risiko dalam denominasi rupiah. Adapun bank sentral tetap dapat menjaga layanan publiknya dengan tingkat layanan terbaik di era digital sekaligus menjaga kepercayaan terhadap rupiah.

Dalam White Paper Proyek Garuda oleh Bank Indonesia, dijelaskan bahwa rupiah digital dibangun berdasarkan tiga prinsip utama yang mengacu pada Report Group of Central Banks (2021). Pertama, tidak

mengganggu pelaksanaan mandat bank sentral di bidang moneter dan makroprudensial serta memberi nilai tambah bagi pelaksanaannya.

Kedua, berjalan bersama uang lain yang sudah ada, termasuk berdampingan dengan infrastruktur sistem pembayaran domestik dan internasional saat ini. Ketiga, memiliki fitur yang dapat menjaga dan mendorong inovasi dan efisiensi sehingga meningkatkan inklusi dan menciptakan opsi pembayaran lintas negara yang lebih cepat, lebih murah, lebih transparan, dan lebih inklusif atau interoperabilitas.

Selain itu, terdapat tiga kunci penggerak utama yang mendasari pengembangan rupiah digital oleh Bank Indonesia. Pertama, respons Bank Indonesia sebagai bank sentral dengan otoritas tunggal dalam penerbitan mata uang, termasuk mata uang digital. Kedua, upaya memperkuat peran Bank Indonesia di kancah internasional, terutama dalam diskusi global seputar CBDC. Ketiga, dukungan terhadap

Rupiah digital merupakan inisiatif berskala nasional yang memiliki dimensi kebanksentralan dan kenegaraan.

akselerasi inisiatif integrasi ekonomi keuangan digital nasional, yang antara lain telah didorong melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.

Rupiah digital merupakan inisiatif berskala nasional yang memiliki dimensi kebanksentralan dan kenegaraan sebagai upaya menjaga kedaulatan mata uang rupiah. Efektivitas implementasinya akan ditentukan melalui pembentukan ekosistem lintas sektoral secara *end-to-end* yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pada lini suplai hingga lini permintaan. Maka, dukungan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan rupiah digital.

Bank Indonesia merilis "Consultative Paper Proyek Garuda: Wholesale Rupiah Digital Cash Ledger (Tahap Immediate)" pada 31 Januari 2023. *Consultative paper* tersebut merupakan tindak lanjut dari penerbitan White Paper Proyek Garuda yang bertujuan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari pemangku kepentingan (*public-private collaboration*) tentang desain, dampak, dan manfaat rupiah digital sesuai kebutuhan saat ini dan masa depan.

Consultative paper tersebut menjelaskan desain pengembangan rupiah digital tahap *immediate state*, yaitu *wholesale* rupiah digital *cash ledger* yang meliputi pengenalan teknologi dan fungsi dasar, seperti penerbitan, pemusnahan, dan transfer dana. *Consultative paper* itu juga membahas dampak penerbitan rupiah digital pada sistem pembayaran, stabilitas keuangan, dan moneter. Penyampaian masukan melalui *consultative paper* tersebut diharapkan dapat menyempurnakan desain pengembangan rupiah digital.

Singapura: Project Ubin

Menurut Pemerintah Singapura, kemajuan teknologi keuangan yang dikenal sebagai *financial technology* bukan sebuah disrupsi atau gangguan. Akan tetapi, hal itu dapat menjadi peluang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan serta mendorong peningkatan keterampilan kerja masyarakat.

Salah satu metode pembayaran yang akan dikembangkan sebagai alat pembayaran adalah mata uang digital bank sentral atau CBDC (MAS, 2016). Monetary Authority of Singapore (MAS) menginisiasi pengembangan mata uang CBDC melalui aspek ritel dan *wholesale*. Singapura merupakan salah satu negara yang berkomitmen

mendorong efisiensi pembayaran melalui pemanfaatan CBDC sebagai alat pembayaran yang sah menggantikan fungsi uang kartal domestiknya (IMF, 2017).

Project Ubin MAS merupakan salah satu studi awal Bank Sentral Singapura untuk membahas mata uang digital sebagai alat pembayaran secara komprehensif dan mendetail (Lena dan How, 2021). Proyek ini merupakan kolaborasi antara Bank Sentral Singapura dan industri sejak 2016, untuk mengeksplorasi penggunaan *blockchain* dan *distributed ledger technology* (DLT) dalam kliring dan *settlement* pembayaran dan sekuritas.

Pemerintah Singapura berharap proyek ini dapat membantu MAS dan industri untuk membahas pemahaman tentang *financial technology* secara lebih mendalam dan komprehensif, termasuk perihal potensi dan manfaat yang dapat diperoleh melalui eksperimen praktis proyek tersebut. Proyek Implementasi CBDC di Singapura menjadi terobosan dalam mengembangkan alternatif sistem pembayaran yang lebih sederhana dan lebih efisien berdasarkan token digital yang dikeluarkan bank sentral.

Menurut CBDC Tracker dan Atlantic Council (2022), pengembangan implementasi ritel CBDC merupakan salah satu tujuan Project Ubin MAS tidak berlanjut. Laporan yang dirilis MAS (2022) menyatakan, salah satu alasan umum penerbitan CBDC ritel adalah mendorong inklusi keuangan dan mewujudkan sistem pembayaran yang lebih murah dan lebih cepat.

Namun, inklusi keuangan di Singapura bukanlah masalah yang berarti. Selain itu, Singapura sudah secara efektif meluncurkan sistem seperti FAST, PayNow, dan SGQR untuk menciptakan sistem pembayaran elektronik yang efisien dan efektif. Ketersediaan sistem pembayaran domestik yang luas, cepat, dan mudah diakses melalui sistem pembayaran berbasis bank mengurangi kebutuhan CBDC ritel saat ini.

Fitur desain mata uang digital berperan penting dalam mendorong implementasi CBDC di Singapura. Berdasarkan laporan yang dipublikasikan MAS (2022), terdapat beberapa hal yang dipertimbangkan dalam menentukan arsitektur CBDC.

Pertimbangan itu, antara lain, arsitektur yang diadopsi harus menjamin interaksi bank sentral dengan sektor perbankan ataupun

perusahaan keuangan lain yang sudah lebih dulu mendorong efisiensi sistem pembayaran. Selain itu, arsitektur yang dirancang juga bertujuan memfasilitasi akses yang mudah dan terbuka bagi peserta di jaringan, termasuk penerbit mata uang, platform pihak ketiga dan pengguna.

Pada Proyek Implementasi CBDC di Singapura, MAS (2021) menyatakan, teknologi yang digunakan adalah DLT *blockchain*. Alasannya, lembaga keuangan dan investor korporat diharapkan dapat melakukan pertukaran simultan dan *settlement* mata uang digital token dan aset sekuritas, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengurangi risiko penyelesaian.

Pada 2021, proyek pengimplementasian CBDC di Singapura berkembang menjadi dua proyek CBDC yang terdiri dari Proyek Dunbar dan Liquidity Management in a Multi-Currency Corridor Network' Project. Selama pengembangan CBDC melalui Proyek Dunbar, MAS bekerja sama dengan Reserve Bank of Australia, South African Reserve Bank, dan BIS Innovation Hub. Kerja sama itu untuk merancang dan mengembangkan platform yang dapat memfasilitasi penyelesaian transaksi CBDC dari negara masing-masing.

Proyek ini juga bertujuan untuk mengembangkan prototipe yang dapat menunjukkan bank komersial dapat bertransaksi secara langsung satu sama lain dengan menggunakan atau memanfaatkan *wholesale* CBDC di negara masing-masing. Hal ini menghilangkan kebutuhan akan perantara serta mengurangi waktu dan biaya transaksi Lintas Negara (BIS, 2022).

Kamboja: Project Bakong

National Bank of Cambodia (NBC) menerbitkan Project Bakong (CBDC ritel) dengan tujuan meningkatkan inklusi keuangan, efisiensi dan keamanan, serta mempromosikan penggunaan mata uang lokal Khmer riel. Di Kamboja, 78 persen masyarakat tidak memiliki rekening bank, tetapi lebih dari setengahnya memiliki ponsel pintar.

Kendati mata uang asli riel (KHR) telah stabil selama 20 tahun, masyarakat Kamboja masih menggunakan dollar AS. NBC ingin "mengurangi dollar" segmen ritel. Dengan kata lain, mendapatkan kembali kendali atas mata uang negara sehingga dapat mengimplementasikan kebijakan moneter dan mengembangkan sistem pembayaran secara efisien.

NBC menawarkan arsitektur hibrida atau terdapat penyedia layanan pembayaran yang akan menjembatani NBC dan masyarakat. Adapun akses yang ditawarkan NBC adalah berbasis akun. NBC merancang *wholesale* dan ritel CBDC menggunakan DLT dan Hyperledger Iroha sebagai platform *blockchain*.

Project Bakong dapat digunakan individu, Pedagang atau *merchant*, dan perbankan. Individu dapat mentransfer uang dan membeli dari Pedagang dengan aplikasi ponsel pintar sederhana. Pedagang mendapatkan sistem pembayaran cepat, tanpa uang tunai, dan aman. Bank juga dapat mengirimkan dana antarbank dengan biaya yang jauh lebih rendah.

NBC bermitra dengan pakar pengembang *blockchain*, Soramitsu, untuk memodernisasi pembayaran ritel negara dengan bantuan kerangka kerja *blockchain* Hyperledger Iroha. Dalam proses pengembangannya, Soramitsu bekerja sama dengan Hyperledger Linux Foundation. Soramitsu juga mengembangkan aplikasi dompet yang digunakan dalam bertransaksi dengan mata uang digital Bakong (Cambodia, 2020).

Pada 11 Agustus 2021, NBC menyatakan kerja sama transfer Lintas Negara pertama di dunia dengan Maybank. Saat ini, Bakong memiliki fitur transfer antarnegara Malaysia-Kamboja melalui kemitraan dengan Malayan Banking Berhad. Kerja sama ini merupakan upaya NBC mempermudah akses transfer ke Malaysia.

Thailand: Project Inthanon

Pada 2018, Bank of Thailand (BoT) memulai keterlibatan mereka dalam pengembangan CBDC dengan mengeksplorasi CBDC *wholesale* melalui Project Inthanon. Sejak saat itu, perkembangan teknologi mengubah cara konsumen dan bisnis bertransaksi satu sama lain. Menurut BoT (2021), hingga kini proyek CBDC ritel di Thailand telah melibatkan sejumlah penelitian terkait bank sentral bersama berbagai pemangku kepentingan dan mitra sektor swasta.

Pada Juli 2020, BoT melaksanakan berbagai kegiatan, seperti lokakarya *design thinking* bersama beberapa lembaga keuangan, perusahaan korporasi, dan *startup fintech*. Tujuannya, mengidentifikasi masalah dalam sistem pembayaran saat ini dan mengadakan diskusi terkait arsitektur CBDC yang optimal.

BOT juga memperluas perhatian terhadap CBDC sektor korporasi dan ritel. Pada 2020, mereka menjalin kemitraan dengan dua perusahaan domestik untuk menginvestigasi potensi penggunaan CBDC dalam mengatasi hambatan pembayaran di lingkungan bisnis.

Hal ini menjadi momen pertama BoT memperluas cakupan pengembangan CBDC ke kalangan pengusaha. Prototipe sistem CBDC dengan dua tingkat berhasil dibangun dan fungsi dasar dari CBDC telah tercapai. Fitur-fitur kompleks seperti tokenisasi faktur dan uang yang dapat diprogram dicapai melalui pemanfaatan *smart contract* (BIS, 2021).

Project Inthanon dilaksanakan Thailand untuk mengikutsertakan pemangku kepentingan menjajaki potensi penggunaan CBDC dalam dunia nyata serta untuk membangun infrastruktur keuangan digital negara. Saat ini, BoT belum merasa perlu segera mengeluarkan CBDC dalam skala ritel kepada masyarakat Thailand. Pada 2021-2022, Thailand akan lebih menitikberatkan pada penelitian dan pengembangan CBDC untuk penggunaan ritel, sekaligus memantau perkembangan bisnis, tren konsumen, dan kemajuan teknologi.

Pada Juli 2023, BoT mengumumkan akan memulai proyek percontohan untuk CBDC ritel di bawah pengawasan otoritas regulasi. Media lokal melaporkan, tiga penyedia pembayaran dan 10.000 pengguna akan terlibat dalam proyek yang berlangsung hingga Agustus ini. Tiga mitra yang akan bekerja sama dengan BoT tersebut adalah Bank of Ayudhya (Krungsri), Siam Commercial Bank, dan penyedia layanan pembayaran 2C2P yang berbasis di Singapura.

Tiga mitra ini telah mengembangkan aplikasi khusus bagi pengguna yang telah dipilih, yang mencakup dompet digital dan pemindai kode QR. Krungsri akan merekrut sekitar 2.000 anggota staf untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut serta melibatkan sekitar 100 Pedagang di sekitar kantor pusat bank. Mereka juga berencana memperluas jangkauan proyek ini ke cabang Ploenchit.

Eksplorasi BoT terhadap CBDC ritel bertujuan memberikan akses CBDC yang tepercaya dan aman bagi masyarakat. Pengembangan CBDC ritel akan mendukung perkembangan sektor keuangan masa depan yang berbasis teknologi dan berkontribusi pada perkembangan layanan keuangan yang lebih beragam dan inovatif.

Filipina: Project Agila-CBDCPH

Salah satu dampak positif pandemi Covid-19 dan karantina di masa pandemi adalah stimulus bagi proses digitalisasi layanan keuangan dan transaksi pembayaran di Filipina. Pada akhir 2020, sebanyak 20,1 persen dari total volume pembayaran bulanan di Filipina beralih ke bentuk digital atau meningkat dibandingkan dengan 2019 yang sebesar 14 persen (BSP, 2021). Adapun nilai transaksi pangsa pembayaran digital naik dari 24 persen pada 2019 menjadi 26,8 persen pada 2020.

Peningkatan mencolok dalam penggunaan pembayaran digital terjadi pada transaksi ritel yang memiliki frekuensi tinggi dan nilai rendah, seperti transaksi antarPedagang dan transfer dana elektronik antarindividu.

Untuk mendorong digitalisasi, Banko Sentral ng Pilipinas (BSP) pada Juni 2020 membentuk Technical Working Group (TWG) yang bertugas meneliti dampak kebijakan CBDC secara mendalam. TWG beranggotakan pihak Department of Economic Research (DER), Supervisory Policy and Research Department (SPRD), Technology Risk and Innovation Supervision Department (TRISD), Financial Inclusion Office (FIO), Payment System Oversight Department (PSOD), Payments and Settlements Department (PSD), dan General Counsel and Legal Services (OGCLS) (BSP, 2020).

BSP telah mengembangkan versi *wholesale* CBDC yang disebut Project Agila. Untuk uji coba, BSP menggunakan *blockchain* Hyperledger Fabric. Hyperledger Fabric dipilih sebagai platform utama karena teknologinya berdasarkan pada DLT dan terbukti efektif di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan laporan media Filipina, BSP meyakini DLT akan membuktikan nilainya dalam menguji berbagai skenario penggunaan Project Agila. Penggunaannya memungkinkan transfer dana antarlembaga, bahkan di luar jam kerja atau saat sistem pembayaran peso negara, Philippine Payment and Settlement System (PhilPaSS), tidak tersedia.

Proyek uji coba ini melibatkan sejumlah bank serta pemberi pinjaman yang berperan sebagai pengamat dan menguji penerapan CBDC *wholesale* dalam lingkungan *sandbox*. Para pemberi pinjaman itu adalah BDO Unibank, China Banking Corporation, Land Bank of the Philippines, Rizal Commercial Banking Corporation, Union

Bank of the Philippines, serta perusahaan *fintech* Maya Philippines. Beberapa pengamat lain juga akan terlibat, termasuk Citibank, China Bank Savings, Wealth Development Bank Corporation, dan penyedia pinjaman digital SeaBank Filipina.

Seperti halnya sejumlah negara di Asia Tenggara, Filipina juga tengah mempertimbangkan implementasi CBDC. Pada awal 2023, Filipina telah mengecualikan penggunaan peso digital untuk transaksi ritel. BSP menyadari metode pembayaran digital yang sudah ada mempercepat pencapaian tujuan inklusi keuangan. Sementara CBDC mungkin tidak akan berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan tersebut karena masyarakat Filipina telah memiliki beragam pilihan pembayaran ritel.

Di sisi lain, BSP meyakini CBDC *wholesale* dapat berperan dalam mengatasi hambatan pada transfer mata uang asing Lintas Negara berskala besar. Peran lain adalah mengurangi risiko eksposur penyelesaian terkait penggunaan uang bank komersial dalam transaksi ekuitas dan operasi fasilitas likuiditas *intraday*.

Vietnam: Vietnam CBDC

Eksplorasi CBDC di Vietnam berdasarkan keputusan 942/QTTg pada Juni 2021 untuk menjajaki percobaan uang virtual menggunakan teknologi *blockchain* dalam waktu tiga tahun. Hal ini merupakan respons aktif Vietnam dalam tren mata uang digital sebagai kedaulatan.

Pemerintah Vietnam memutuskan untuk mengadopsi teknologi *blockchain* dan DLT dalam pembangunan CBDC. Pertimbangannya, aplikasi mata uang kripto dan *blockchain* di Vietnam populer sehingga dapat membantu meningkatkan adopsi masyarakat terhadap CBDC.

Hingga kini Vietnam belum menentukan infrastruktur CBDC yang akan digunakan dan implikasi kebijakan terkait CBDC. Sebab, Vietnam masih berada dalam tahap riset sesuai dengan putusan Perdana Menteri Vietnam (Ngo, Vu Minh dan Nguyen, Huan Huu, 2022).

Malaysia: Malaysia CBDC

Bank Negara Malaysia (BNM) berencana meningkatkan penelitian dan eksperimen terkait penggunaan CBDC sebagai bagian dari infrastruktur moneter dan keuangan Malaysia. Fokus awal ditujukan

pada CBDC *wholesale*, sedangkan CBDC ritel tidak termasuk dalam cakupan aktivitas bank sentral.

CBDC diharapkan berperan signifikan dalam mengeksplorasi inovasi pembayaran terkait transaksi Lintas Negara, seperti penggunaan dan pengaturan multi-CBDC. Malaysia telah mencapai kemajuan penting dalam pelaksanaan Proyek Dunbar. BNM telah menjalin kemitraan dengan BIS Innovation Hub serta bank sentral lain, termasuk Reserve Bank of Australia, Monetary Authority of Singapore, dan South African Reserve Bank. Tujuan proyek ini adalah menguji coba penggunaan CBDC dan teknologi DLT dalam *settlement* lintas negara (Kementerian Komunikasi dan Digital Malaysia, 2023).

Laos: Dlak (Digital Lao Kip)

Bank of the Lao PDR (BOL) mulai mengeksplorasi CBDC, khususnya infrastruktur yang akan digunakan. Pada 2021, BOL mengumumkan telah menandatangani perjanjian kolaborasi dengan Soramitsu, perusahaan yang sama dengan yang digandeng Kamboja dalam mengembangkan Project Bakong.

Motivasi Laos memulai eksplorasi CBDC adalah pada saat pandemi Covid-19 pemerintah sulit menyalurkan bantuan langsung tunai. Masalah utamanya adalah inklusi keuangan Laos yang terhitung rendah.

CBDC diharapkan menjadi solusi bagi Laos dengan menghadirkan sistem pembayaran digital yang dapat membantu distribusi bantuan dari pemerintah dengan mudah dan instan. Selain itu, bantuan dapat dilacak untuk memastikan telah diterima dengan baik.

Berdasarkan laporan IMF pada 2019, BOL menerapkan undang-undang sistem pembayaran pada 2023 yang fokus utamanya adalah modernisasi tata kelola moneter. Caranya, dengan meluncurkan infrastruktur kliring pembayaran pada sistem perbankan yang akan meningkatkan efisiensi transaksi.

Nantinya, CBDC diharapkan dapat menjembatani transaksi ritel dengan menyediakan layanan bernilai rendah. Selain itu, transaksi bisa lebih mudah dan nyaman bagi pengguna serta memungkinkan masyarakat berpartisipasi lebih aktif di sektor e-dagang.

BOL memulai uji coba pembuktian konsep pada Februari 2023. CBDC Laos dikembangkan menggunakan Hyperledger Iroha, yakni

blockchain berizin untuk membantu bisnis dan lembaga keuangan mengelola aset digital. Uji coba ini fokus pada sistem *two-tier*.

Selama masa uji coba, bank sentral menerbitkan CBDC ke bank komersial yang kemudian mendistribusikannya kepada pengguna individu untuk diuji sebagai metode pembayaran di level ritel yang berpartisipasi. Proyek ini dilakukan setelah studi kelayakan selama setahun dan akan melibatkan Bakong, sistem pembayaran ritel digital yang didukung *blockchain* dan dikelola bank sentral Kamboja.

Uji coba ini bertujuan memperluas akses keuangan bagi penduduk Laos yang belum memiliki rekening bank melalui penyediaan layanan keuangan digital. Inovasi keuangan tersebut akan mempermudah pengiriman uang antarnegara dan mendukung perkembangan perdagangan melalui transaksi secara *real time*. Saat ini, proses transaksi digital di Laos memerlukan waktu hingga satu bulan.

iii. Inisiatif ASEAN Terkait Keamanan Siber

Salah satu inisiatif yang diangkat Bank Indonesia dalam pertemuan CRISP Ke-8 adalah tentang pentingnya membuat, memilah, menganalisis, dan mendistribusikan laporan insiden siber yang efektif dan tepat guna ketika terjadi insiden keamanan siber pada industri di sektor keuangan.

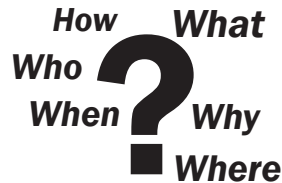
Untuk mendukung hal tersebut, pada pertemuan CRISP Ke-8, Bank Indonesia mengundang Emran Islam sebagai perwakilan Financial Stability Board (FSB) untuk menjadi narasumber dan mempresentasikan laporan FSB berjudul "Recommendations to Achieve Greater Convergence in Cyber Incident Reporting (CIR)". Laporan ini berisi tantangan operasional, ketepatan waktu, metode penyampaian laporan, serta koordinasi lintas sektor, lintas institusi, dan lintas negara.

Pemaparan dan diskusi dalam sesi CIR menyepakati pentingnya berbagi antarbank sentral di ASEAN. Kerangka kerja pelaporan insiden siber CIR yang dirumuskan FSB merupakan salah satu referensi bersama untuk mewujudkan kesamaan format laporan dalam pertukaran atau pelaporan insiden. Format laporan insiden CIR cukup luas sehingga pertemuan DTN CRISP perlu mendiskusikan lebih lanjut perihal komponen laporan dan manfaatnya bagi peserta pertemuan.

What are the key elements of incident reporting?

- Protocols and templates
- Coverage of required cyber incident reporting - which entities?
- Process and timelines for communicating cyber incidents
- Criteria for reporting
 - Definition of cyber incident - *A cyber event that: i. adversely affects the cyber security of an information system or the information the system processes, stores or transmits; or ii. violates the security policies, security procedures or acceptable use policies, whether resulting from malicious activity or not. (FSB Cyber Lexicon)*
 - Quantitative
 - Qualitative
 - Taxonomies
 - Severity and impact
- Usage of information by financial authorities
- Cooperation and coordination

Sumber: International Monetary Fund



Gambar 5.8 Kerangka Kerja Pelaporan Insiden Siber (CIR) FSB.

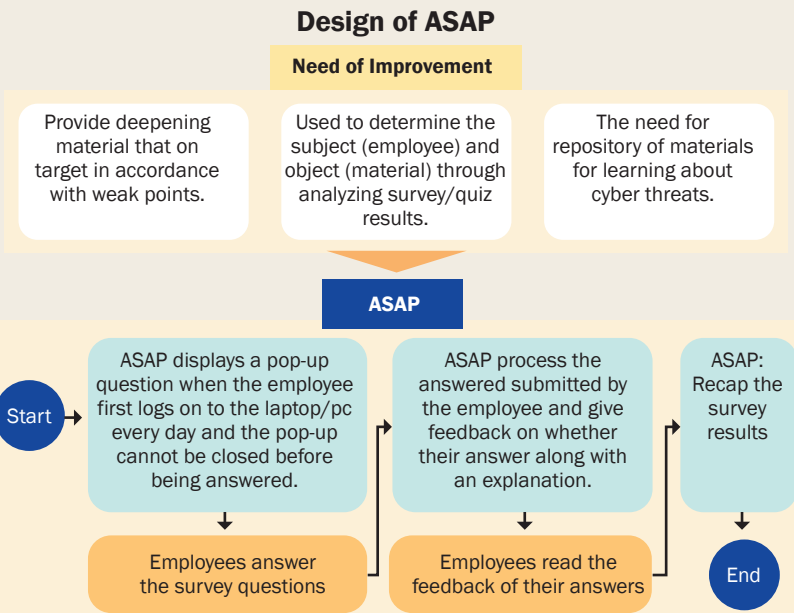
Diskusi penentuan format laporan insiden siber yang diprakarsai FSB juga diikuti bank sentral di ASEAN, di antaranya Bank Indonesia dan Monetary Authority of Singapore. Kesepakatan FSB perihal format laporan insiden siber akan menjadi masukan penting dan menjadi salah satu acuan dalam diskusi pertukaran informasi insiden siber di ASEAN.

Bank Indonesia dan Monetary Authority of Singapore, yang ikut berkontribusi dalam penyusunan format laporan insiden siber, dapat memperkenalkan format laporan yang disepakati pada FSB sebagai salah satu standar dalam pertukaran informasi insiden siber antarbank sentral se-ASEAN.

Pentingnya Membangun Kesadaran Siber

Kemajuan teknologi diharapkan konsisten membawa kemajuan bagi masyarakat luas dan menciptakan cara-cara baru yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih andal dibandingkan dengan cara manual. Keuntungan dari kemajuan teknologi belum tentu selalu dapat diserap dengan cepat oleh masyarakat. Masyarakat perlu diedukasi agar terbiasa, paham risiko, dan mempraktikkan penggunaan teknologi dengan tepat sehingga mendatangkan nilai manfaat seperti yang diharapkan.

Inovasi teknologi dalam sistem pembayaran yang semakin bervariasi menghadirkan manfaat dan tantangan. Selain implementasi teknologi yang tidak mudah, tantangan yang sering dihadapi adalah risiko keamanan siber yang lahir dari teknologi itu sendiri dan yang datang dari ketidakcermatan pengguna dalam memanfaatkan teknologi dengan bijak dan aman.



Sumber: Bank Indonesia (2023)

Gambar 5.9 Design Automatic Cyber-Security Awareness Platform (ASAP) Bank Indonesia.



DOKUMENTASI BI

Suasana Pertemuan CRISP.

Dalam DTN CRISP Meeting Ke-7, Bank Indonesia memaparkan *Automatic Cyber-Security Awareness Platform (ASAP)*, platform untuk membantu meningkatkan kepedulian terhadap keamanan siber bagi pegawai Bank Indonesia. Dalam diskusi dengan bank sentral lain, disimpulkan bahwa kepedulian merupakan masalah yang dihadapi semua bank sentral.

Peserta tertarik dengan konsep yang ditonjolkan ASAP, yaitu fitur pelaksanaan agar pegawai menjawab pertanyaan terkait kesadaran dan kepedulian keamanan siber sebelum memulai pekerjaan. Beberapa bank sentral menanyakan kemungkinan platform ASAP dipertimbangkan menjadi platform *open source* sehingga dapat digunakan instansi lain. Bank sentral Brunei Darussalam bahkan telah mengembangkan platform serupa ASAP.

Masih dalam CRISP Ke-7, Bank of Thailand memberikan pemaparan dengan judul “Thailand Cyber Fraud Situation and Technical Sharing for Bank of Thailand’s Case”. Dalam pemaparan ini disampaikan bahwa terdapat berbagai bentuk *phishing* yang menargetkan pengguna sistem operasi Android agar korban melakukan instalasi aplikasi berbahaya yang disiapkan oleh pelaku.

Aplikasi tersebut dapat mengambil alih perangkat korban dan melakukan *fraud* dengan menguras saldo rekening korban. Modus *phishing* seperti ini juga banyak terjadi di Indonesia dan disimpulkan bahwa *cyber awareness* kepada masyarakat harus terus ditingkatkan agar masyarakat tidak menjadi korban *fraud* dengan modus-modus baru yang terus berkembang.

Penguatan Kolaborasi ASEAN dalam Menavigasi Ekonomi Digital

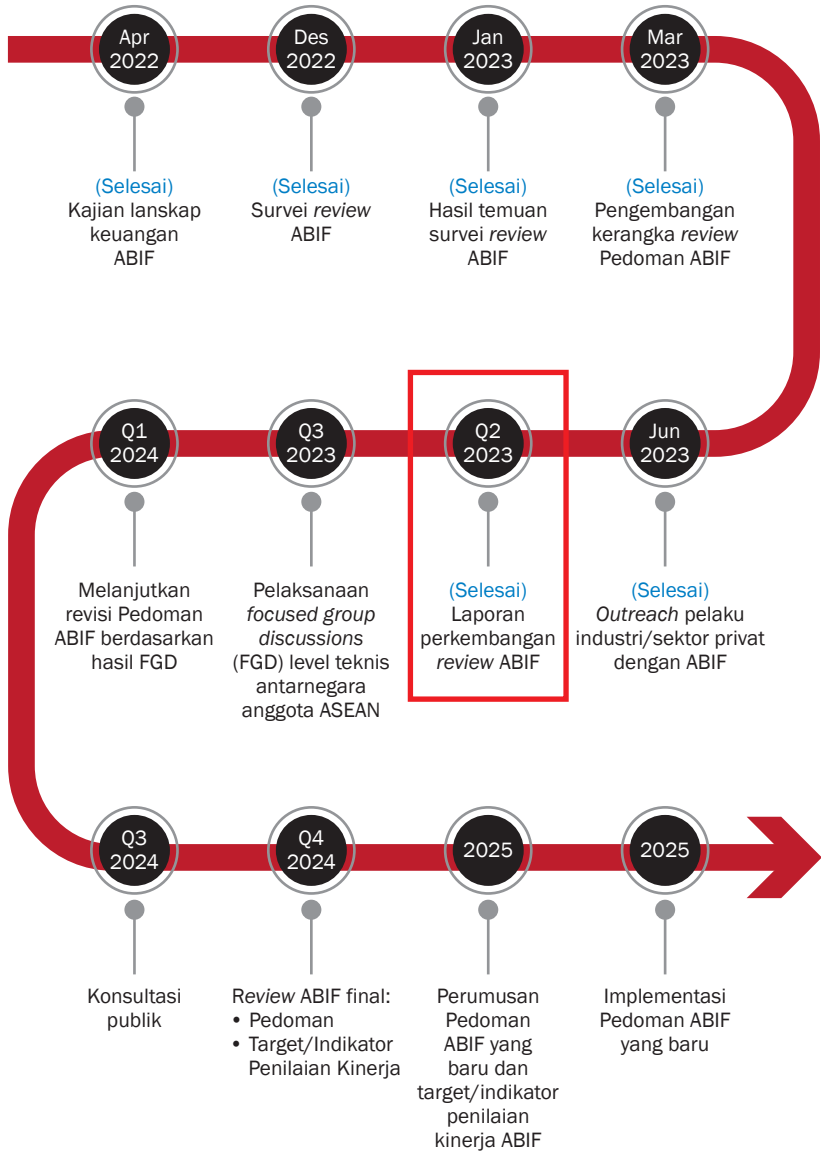
i. Kolaborasi ASEAN Terkait Sistem Keuangan

Perkembangan digitalisasi, terutama transaksi pembayaran, mendorong perlunya reuiu ABIF Guidelines untuk memastikan kerangka integrasi perbankan ASEAN tetap relevan di era digital. Mandat untuk meninjau ulang ABIF tercantum dalam ASEAN Strategic Action Plan (SAP) 2022-2025. Mengawali proses reuiu ABIF, telah dikaji perihal ASEAN Member States' Financial Landscape Toward Furthering ASEAN Banking Integration in the Digital Era (laporan AMS Financial Landscape). Kajian tersebut dilakukan tim konsultan yang dipimpin Profesor Shinobu Nakagawa dari Faculty of Economics, Saitama University of Japan.

Kajian AMS Financial Landscape menghasilkan enam rekomendasi penguatan integrasi perbankan ASEAN di era digital. Enam rekomendasi tersebut meliputi, pertama, penguatan kebijakan *cross-border liquidity provision* seperti *cross-boder collateral* (repo) atau *swap arrangement* untuk mengatasi kerentanan terkait *cross-border banking*. Kedua, standarisasi data pelaporan untuk memfasilitasi pertukaran informasi antarotoritas, antara lain melalui penggunaan *regtech* dan *suptech*. Ketiga, penguatan *supervisory colleges* dan pengembangan platform koordinasi dan kerja sama bagi otoritas *home* dan *host*.

Keempat, melanjutkan penguatan pengaturan QAB dan layanan nasional untuk penyediaan layanan keuangan oleh QAB. Kelima, membuka pendekatan unilateral atau pengenalan mutual terkait otorisasi penyediaan layanan keuangan yang tidak berdampak signifikan pada stabilitas keuangan. Keenam, penguatan kapasitas otoritas untuk mendukung kerja sama, koordinasi, dan kolaborasi yang lebih solid antarotoritas negara ASEAN dan meningkatkan standarisasi untuk mendukung digitalisasi.

Linimasa Review ABIF



Gambar 5.10 Linimasa Review ABIF.

Secara umum, negara anggota ASEAN (*ASEAN member states/AMS*) menilai masih perlu upaya lanjutan untuk mengetahui urutan prioritas rekomendasi dari hasil kajian AMS Financial Landscape yang akan menjadi acuan revidi ABIF. Merespons hal tersebut, revidi ABIF di bawah keketuaan Indonesia dan Vietnam selaku *co-chair* WC-ABIF periode 2022-2024 dilanjutkan.

Kelanjutannya melalui pelaksanaan *stocktake* atau survei ABIF revidi kepada AMS mengenai pembelajaran dan efektivitas implementasi ABIF saat ini sejalan dengan perkembangan digitalisasi serta prinsip-prinsip dasar, *output* dan *timeline* penyelesaian ABIF revidi (Oktober 2022). Selanjutnya, menyepakati temuan utama dari hasil survei ABIF revidi (Januari 2023) dan finalisasi kerangka revidi ABIF Guidelines (Februari 2023). Terakhir, diskusi dengan pelaku industri untuk menggali pandangan industri mengenai usulan ABIF *way forward* (Juni 2023).

Pada semester II-2023, AMS akan melakukan diskusi kelompok terarah untuk membahas isu-isu teknis terkait dengan konsep integrasi perbankan di masa mendatang. Adapun target penyelesaian ABIF revidi telah disepakati WC-ABIF dengan target implementasi ABIF pada 2025.

Temuan Utama Hasil Survei Revidi ABIF

Survei revidi ABIF bertujuan menggali pandangan AMS secara lebih holistik terkait arah ABIF di masa mendatang dengan mengacu pada prioritas rekomendasi dari hasil kajian AMS Financial Landscape. Fokus survei, antara lain, mengidentifikasi tantangan dan kelemahan ABIF Guidelines, efektivitas implementasi ABIF, dan preferensi AMS terhadap rekomendasi dari hasil kajian AMS Financial Landscape. Survei juga difokuskan pada prinsip-prinsip dasar merevidi ABIF serta *output*, *deliverables*, dan *timeline* penyelesaian revidi ABIF Guidelines.

Hasil survei ABIF menunjukkan ABIF Guidelines masih berperan penting dalam mendukung integrasi perbankan di kawasan. Akan tetapi, berbagai elemennya perlu diperkuat agar sejalan dengan perkembangan aktivitas keuangan digital dan prioritas rekomendasi dari kajian AMS Financial Landscape.

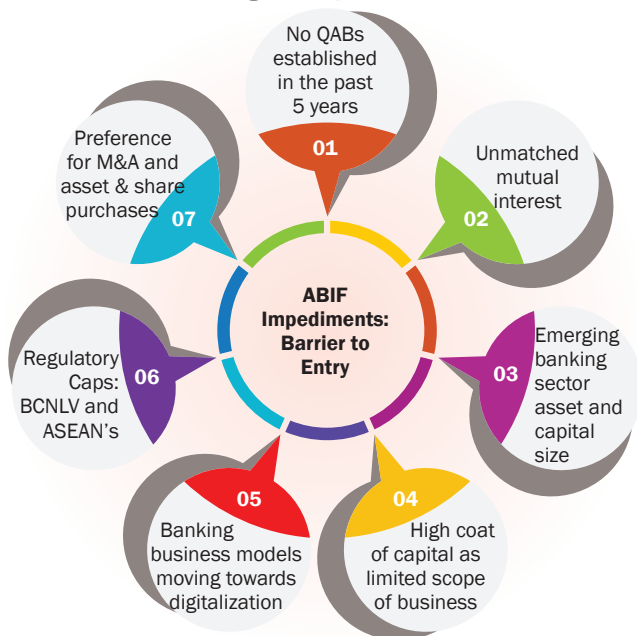
AMS memberikan dukungan terhadap empat rekomendasi sebagai acuan dalam revidi ABIF. Pada urutan pertama, AMS mendukung

rekomendasi nomor 6, yaitu penguatan kapasitas otoritas ASEAN dan standarisasi untuk mendukung digitalisasi. AMS mendukung rekomendasi nomor 3, yakni penguatan *supervisory colleges* dan pengembangan platform koordinasi dan kerja sama bagi otoritas *home* dan *host*.

Adapun rekomendasi nomor 4 mengenai penguatan pengaturan QAB dan perlakuan nasional untuk penyediaan layanan keuangan QAB. Rekomendasi nomor 2 mengenai standarisasi data pelaporan untuk memfasilitasi pertukaran informasi antarotoritas antara lain melalui penggunaan *regtech* dan *suptech*.

Progres penambahan jumlah QAB yang lambat dan negosiasi bilateral di kawasan sejak tahun 2019 disebabkan berbagai faktor, termasuk perubahan model bisnis bank dan lingkungan strategis. Divergensi hambatan untuk masuk di kawasan dan perbedaan struktur pasar keuangan, terutama ukuran pangsa aset dan kekuatan modal perbankan, menyebabkan ketertarikan satu sama lain di antara anggota ASEAN sulit tercapai.

Permasalahan dan Tantangan Implementasi ABIF



Gambar 5.11 Permasalahan dan Tantangan Implementasi ABIF.

Fleksibilitas operasional bagi QAB juga kurang relevan, terutama pada yurisdiksi yang tidak menerapkan perbedaan perlakuan akses pasar antara bank asing dan bank lokal, contohnya di Vietnam. Dalam kondisi ini, bank cenderung memilih ekspansi akses pasar di kawasan melalui skema pembelian aset, merger, dan/atau akuisisi. Skema itu relatif lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan skema ABIF, yakni bank perlu diakui lebih dulu sebagai QAB.

Perkembangan digitalisasi juga mempermudah bank memfasilitasi layanan keuangan secara Lintas Negara tanpa melalui pembukaan kantor cabang di negara *host*.

Kerangka Reviu ABIF

Sebagai bagian dari target pencapaian WC-ABIF pada triwulan I-2023, WC-ABIF telah menyepakati kerangka reviu ABIF Guidelines. Kerangka tersebut mengidentifikasi elemen-elemen dalam ABIF Guidelines yang perlu diperkuat, antara lain ABIF tujuan, prinsip, dan proses penerimaan untuk QAB.

Disepakati juga prinsip-prinsip dasar yang perlu dipenuhi dalam meninjau ulang ABIF Guidelines serta alur waktu penyelesaian ABIF reviu hingga 2025.

Revisi Elemen Utama ABIF Guidelines

1. Tujuan

Tujuan ABIF dapat diperkuat dengan mengeksplorasi konsep integrasi perbankan selain kehadiran secara komersial. Hal ini sejalan dengan rekomendasi dalam kajian lanskap keuangan AMS, yaitu penguatan pengaturan QAB dan perlakuan nasional untuk penyediaan layanan keuangan QAB. Berdasarkan hasil survei ABIF reviu, tujuan ABIF mendorong akses pasar dan fleksibilitas operasional yang lebih besar bagi QAB masih relevan.

Namun, skema kehadiran komersial dan fleksibilitas operasional bagi QAB, yang antara lain berupa izin pembukaan kantor cabang dan ATM, di era digital kurang menarik. Oleh karena itu, diperlukan skema alternatif.

2. Prinsip

- **Outcome driven**

Kerangka Reviu ABIF



Gambar 5.12 Kerangka Reviu ABIF.

Prinsip Review ABIF

- **Keterlibatan Aktif:** Proses *review* dilakukan berdasarkan kontribusi aktif dan konsensus dari negara anggota ASEAN atas seluruh aspek dalam Guideline.
- **Seimbang:** Proses *review* dilakukan dengan merevisi elemen dalam ABIF Guideline yang kurang efektif atau kurang relevan berdasarkan hasil rekomendasi dalam kajian lanskap keuangan AMS, dengan pandangan yang berimbang memperhatikan kemungkinan implementasi dan manfaatnya kepada negara anggota.
- **Netralitas teknologi:** Perluasan liberalisasi keuangan melalui kanal digital perlu memperhatikan tidak hanya potensi manfaatnya tetapi juga risiko yang menyertainya. Dengan demikian, perluasan liberalisasi keuangan memerlukan upaya mitigasi risiko misalnya melalui implementasi prinsip prudensial mengenai risiko operasional/siber dan penguatan kerja sama pertukaran data.
- **Fleksibel:** Dalam hal AMS menyepakati pendekatan yang lebih ketat sebagai persyaratan QAB misalnya dalam pemenuhan prinsip prudensial, maka AMS perlu mempertimbangkan divergensi status implementasi prinsip prudensial tersebut antara ASEAN-5 dan BCLMV.

Gambar 5.13 Prinsip Review ABIF.

Prinsip *outcome driven* dalam ABIF Guidelines bertujuan agar ABIF dapat memfasilitasi proses integrasi keuangan yang lebih dalam di kawasan. Hal ini untuk mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan negara ASEAN dengan tetap mengutamakan stabilitas sistem keuangan. Proses integrasi keuangan saat ini mengacu pada keberadaan QAB dengan skema kehadiran komersial. Berdasarkan hasil survei ABIF, prinsip ini masih relevan dengan fokus pada tiga sasaran utama, yaitu integrasi keuangan, pertumbuhan dan kesejahteraan, serta stabilitas sistem keuangan di kawasan.

Prinsip ini dapat diperkuat dengan memperluas integrasi keuangan yang tidak terbatas pada skema kehadiran komersial, tetapi mengikuti perkembangan aktivitas digitalisasi layanan keuangan di perbankan. Tujuan mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan di kawasan melalui integrasi perbankan berbasis digitalisasi dapat dicapai dengan pembentukan QAB digital sebagai pelengkap dari skema integrasi melalui QAB tradisional.

Dalam ABIF Guidelines saat ini, keberhasilan integrasi keuangan dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan di kawasan diukur melalui jumlah kesepakatan yang telah terjalin antarnegara ASEAN dan jumlah QAB yang telah terbentuk. Pengukuran juga melalui jumlah pembiayaan yang telah difasilitasi bank-bank asli ASEAN di negara *host* dan jumlah jaringan kantor cabang bank asli ASEAN di negara *host*.

Pengukuran dampak integrasi keuangan terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan di kawasan dapat diperkuat dengan memperluas cakupan indikator yang memasukkan kontribusi bank-bank asli ASEAN dalam transaksi mata uang lokal (*local currency transaction/LCT*) dan konektivitas pembayaran Lintas Negara (interoperabilitas pembayaran QR di ASEAN).

Di samping mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan kawasan, penting juga untuk memastikan stabilitas sistem keuangan terjaga, terutama yang bersumber dari risiko digitalisasi akibat peningkatan penyediaan layanan keuangan digital Lintas Negara.

Negara-negara ASEAN perlu hati-hati menerapkan kebijakan yang seimbang antara upaya mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan melalui implementasi standar prudensial untuk mengatasi risiko yang bersumber dari digitalisasi. Risiko itu di antaranya risiko operasional dan risiko siber.

Otoritas negara ASEAN perlu memastikan kecukupan kerangka pengaturan untuk mengatasi potensi risiko tersebut.

• Kelengkapan

Prinsip kelengkapan mencakup empat area kritis, yaitu prinsip prudensial, infrastruktur untuk stabilitas finansial, pembangunan kapasitas, dan karakteristik QAB. Secara umum, survei ABIF menunjukkan prinsip ini masih relevan. Namun, cakupan dan fokusnya dapat diperluas untuk mengakomodasi keberadaan QAB digital.

Pada aspek pertimbangan peraturan, diperlukan penguatan prinsip prudensial dan pembangunan kapasitas untuk memitigasi risiko keuangan terkait digital. Sementara perluasan aspek alur layanan transaksi keuangan digital memerlukan penguatan pengawasan, pengaturan *home-host*, dan resolusi perbankan Lintas Negara yang menjadi bagian dari infrastruktur untuk stabilitas finansial.

Perihal karakteristik QAB, negara-negara anggota ASEAN perlu menyepakati penyederhanaan kriteria QAB digital dibandingkan dengan kriteria untuk QAB tradisional, dengan mempertimbangkan cakupan aktivitasnya yang lebih fokus dan

terbatas. Usulan penguatan empat area kritikal pada prinsip kelengkapan adalah:

a. Prinsip prudensial.

Dalam konteks ABIF Guidelines, salah satu kriteria untuk meluncurkan integrasi perbankan di ASEAN adalah koherensi penerapan standar internasional Basel Core Principles for Effective Banking Supervision to Promote Safe and Sound Banks and Banking System antar-AMS. Upaya mendorong koherensi melalui pertukaran informasi perihal implementasi kerangka prudensial di negara masing-masing.

Di masa mendatang, AMS dapat mempertimbangkan standar internasional lain yang relevan untuk diadopsi guna memastikan perbankan tetap resilien menghadapi risiko operasional, termasuk risiko siber. AMS juga perlu mengidentifikasi dan mengatasi tantangan pertukaran data Lintas Negara dan mempertimbangkan perumusan prinsip tingkat tinggi dalam pertukaran data Lintas Negara sebagai bagian dari ABIF Guidelines.

b. Infrastruktur untuk stabilitas finansial.

Dalam konteks ABIF Guidelines saat ini, infrastruktur untuk stabilitas finansial terdiri atas tiga elemen, yaitu pengaturan kooperasi *home-host* yang kuat, protokol manajemen krisis yang kokoh, dan jaring pengaman yang efisien. Secara umum, cakupan pengaturan masih memadai dan relevan. Implementasi pengaturan kooperasi *home-host* yang kuat dapat dilakukan dengan memastikan ketersediaan informasi personel yang bertanggung jawab dalam penanganan krisis dan efektivitas mekanisme pertukaran informasi Lintas Negara.

Dalam jangka panjang, standardisasi peraturan data sebagaimana rekomendasi nomor 2 (*Standardized regulatory data to facilitate supervisory information exchanges by introducing regtech and suptech*) dari kajian lanskap keuangan AMS dapat dipertimbangkan untuk mendukung pertukaran data pengawasan secara tepat waktu.

Dari perspektif otoritas, negara-negara ASEAN dapat

mempertimbangkan beberapa rekomendasi dalam kajian, misalnya penerapan ISO 20022 sebagai alat pelaporan peraturan, termasuk adopsi pengidentifikasi entitas legal (*legal entity identifier/LEI*) untuk mengatasi risiko anti-pencucian uang (*anti-money laundering/AML*) dan pemberantasan pendanaan terorisme (*combatting the financing of terrorism/CFT*), serta kenali nasabahmu (*Know Your Customer/KYC*) dan kenali nasabah dari nasabahmu (*Know Your Customer's Customer/KYCC*).

Rekomendasi lain terkait implementasi *suptech*, yaitu pemanfaatan inovasi teknologi seperti mahadata dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) dan *machine learning* untuk keperluan data analitis berpotensi meningkatkan kapasitas pengawasan. Dengan demikian, mendukung stabilitas sistem keuangan lebih kuat.

Suptech berpotensi meningkatkan pemantauan, pengawasan, dan kemampuan analitik. Selain itu, juga menghasilkan indikator *real time* untuk mendukung pengawasan dan perumusan kebijakan yang bersifat *forward looking* serta mengatasi gap dalam pengawasan.

Penguatan pengaturan kooperasi *home-host* mengacu pada kesepakatan bilateral di antara negara ASEAN sejalan dengan rekomendasi dalam kajian lanskap keuangan ASEAN. Rekomendasi itu adalah *to establish and enhance supervisory colleges and a cooperation and coordination platform for home and host regulators with clear responsibilities for home supervisors*.

Adapun upaya untuk menciptakan protokol manajemen krisis yang kokoh, yang saat ini berfokus pada implementasi FSB's *key attributes for effective recovery and resolution regime*, masih relevan untuk dilanjutkan. Perihal pengaturan jaring pengaman, hasil survei ABIF mengindikasikan negara BCLMV dapat memanfaatkan pengaturan bilateral untuk memperkuat pengawasan dan resolusi bank yang efektif guna mendorong terjaganya stabilitas sistem keuangan.

c. Pembangunan kapasitas.

Implementasi pembangunan kapasitas fokus pada upaya untuk menutup gap kerangka pengaturan prudensial antara

negara BCLMV dan ASEAN-5. Upaya menutup gap tersebut umumnya melibatkan reformasi kerangka pengaturan di setiap negara yang memerlukan waktu cukup panjang. Seiring dengan berjalannya inisiatif pembangunan kapasitas, sebagian bank di negara BCLMV terlibat dalam aktivitas transaksi pembayaran Lintas Negara.

Penguatan pembangunan kapasitas mempertimbangkan penerapan standar internasional lain untuk memperkuat ketahanan terhadap risiko keuangan digital, termasuk menutup gap data pengawasan layanan keuangan Lintas Negara. Perluasan area pembangunan kapasitas diharapkan dapat meningkatkan peluang bank untuk mengikuti skema integrasi melalui QAB digital. Hasil survei ABIF menekankan penguatan ABIF Learning Roadmap saat ini melalui pembangunan kapasitas bilateral yang lebih sesuai target.

Temuan dalam kajian lanskap keuangan ASEAN yang juga menyoroti Steering Committee for Capacity Building berinisiatif melibatkan bank sentral dan otoritas keuangan di ASEAN untuk bertukar informasi dan pengalaman terkait pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Memperhatikan tren aktivitas perbankan Lintas Negara dan integrasi keuangan yang semakin meningkat, pembangunan kapasitas juga dapat diarahkan untuk memperkuat fungsi kerja sama antarlembaga dan pengembangan basis data pengaturan.

- d. Karakteristik QAB. Dalam konteks ABIF Guidelines saat ini, karakteristik QAB ditentukan sebagai berikut:
 - 1) Bank yang kuat dan terkelola dengan baik, yang dinilai berdasarkan rekam jejak dan rencana bisnis, kesehatan finansial dan tingkat permodalan, tata kelola dan kepemilikan, serta struktur grup korporasi. Penentuan kriteria bank yang kuat dan terkelola baik pada skema QAB tradisional memerlukan keberadaan kantor fisik di negara *host*, dengan mempertimbangkan fokus aktivitas QAB yang lebih luas, mencakup intermediasi/pembiayaan. Dalam konteks QAB digital, kriteria tersebut perlu ditinjau ulang dengan memperhatikan aspek proporsionalitas sesuai

cakupan operasi bank yang lebih terbatas pada layanan transaksi pembayaran.

Dalam konteks ABIF saat ini, kesiapan bank menjadi QAB dapat dilihat dari pangsa pasarnya di negara *home* serta kekuatan modal dan rencana bisnis yang mendukung pertumbuhan ekonomi di negara *host*. Pada QAB digital, penilaian kesiapan bank dapat dilihat dari besarnya kontribusi dan jenis layanan keuangan digital Lintas Negara yang telah disediakan di negara mitra dan aspek ketahanan operasional bank tersebut.

Kesehatan finansial dan tingkat permodalan QAB tradisional ditentukan dari kewajiban pemenuhan tingkat permodalan sesuai dengan profil risiko. Dilihat juga dari sisi regulasi bagi bank induk dalam memberikan bantuan finansial kepada cabang bank yang berlokasi di negara *host*. Dalam konteks QAB digital tanpa keberadaan fisik kantor cabang bank, maka otoritas juga perlu memperkuat pengaturan institusi Lintas Negara, termasuk mekanisme resolusinya.

Terkait aspek tata kelola dan kepemilikan QAB digital, perlu dukungan dari negara *home* untuk memastikan kerangka pengawasan telah memadai. Hal ini meliputi praktik tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan kontrol internal sesuai skala dan ukuran aktivitas layanan digital bank, serta kewenangan otoritas terhadap akses pihak ketiga yang digunakan bank.

Perihal struktur grup korporasi, negara *home* bertanggung jawab memastikan ketergantungan bank terhadap penyedia jasa pihak ketiga dalam aktivitas layanan keuangan digital tidak menghambat bank dalam memenuhi regulasi ataupun pengawasan otoritas. Kriteria lain yang dapat dipertimbangkan QAB digital adalah kontribusi bank terhadap pertumbuhan ekonomi atau rencana strategis nasional di negara *host*. Hal ini, misalnya, kontribusi QAB digital terhadap inklusi keuangan, inovasi digital, dan/atau keberlanjutan.

- 2) Bank asli ASEAN. Praktik saat ini, bank asli ASEAN yang menjadi kandidat QAB ditentukan negara *home* dan harus memenuhi persyaratan prudensial yang ditetapkan negara *host*. Dalam konteks QAB digital, definisi bank asli ASEAN mengacu pada bank tanpa keberadaan fisik di negara *host*, yang memberikan layanan keuangan/perbankan digital secara Lintas Negara.
- 3) Memenuhi syarat prudensial negara *host*. Bagi QAB digital, negara *host* dapat mempertimbangkan persyaratan prudensial kepada QAB sebagaimana yang dikenakan bagi bank di negara *host* yang melayani keuangan digital Lintas Negara. Aspek proporsionalitas perlu dipertimbangkan, misalnya bank yang menyediakan layanan keuangan digital dengan cakupan spesifik dapat dinilai berisiko relatif lebih rendah dibandingkan dengan QAB tradisional yang menyediakan layanan pinjaman di negara *host*. Dengan demikian, syarat prudensial QAB digital dapat lebih longgar. Layanan keuangan digital dengan cakupan spesifik itu misalnya perdagangan, investasi, dan transaksi pembayaran.

- **Progresivitas dan kesiapan anggota ASEAN.**

Hasil survei menunjukkan perbedaan kesiapan negara ASEAN dalam memenuhi persyaratan QAB berbasis kehadiran komersial menjadi salah satu faktor yang menghambat liberalisasi sektor perbankan. Usulan konsep QAB digital diharapkan menjadi solusi bagi negara ASEAN yang belum siap membuka jaringan kantor cabang bank di negara lain.

- **Inklusivitas dan transparansi.**

Prinsip ini bertujuan mendorong kesiapan negara ASEAN mengintegrasikan perbankan. Upaya penguatan inklusivitas dan transparansi dapat didorong melalui pertukaran *template* perjanjian bilateral, khususnya kepada negara BCLMV. Negara ASEAN yang telah siap mengadopsi integrasi perbankan di luar mode 3 (kehadiran komersial) juga didorong untuk berbagi pengalaman dengan negara ASEAN lainnya.

- **Timbal balik (Resiprokalitas).**

Dalam ABIF Guidelines saat ini, konteks akses pasar dan keleluasaan beroperasi dilakukan dua atau lebih negara ASEAN dengan prinsip saling menguntungkan. Cakupan usaha QAB yang diperbolehkan berpotensi menjadi tidak sama antarnegara ASEAN. Pada praktiknya, terdapat tantangan untuk mencapai timbal balik karena perbedaan ukuran aset dan permodalan sektor perbankan di antara negara ASEAN.

Kondisi tersebut menyebabkan AMS yang memiliki pangsa sektor perbankan lebih kecil dan permodalan yang lebih terbatas kesulitan memenuhi target jumlah QAB yang disepakati dengan negara mitra yang posisinya lebih kuat. Di sisi lain, perbankan negara mitra yang relatif lebih besar dan kuat tidak dapat meningkatkan ekspansinya karena kriteria timbal balik yang belum terpenuhi. Prinsip ini dinilai tetap diperlukan untuk menjaga *level playing field* antar-AMS.

3. Proses penerimaan

Sejalan dengan penerapan persyaratan prudensial yang proporsional dengan cakupan layanan perbankan selain kehadiran komersial untuk QAB digital, konsep ABIF Guidelines yang baru dapat mempertimbangkan penyederhanaan proses penerimaan QAB digital. Di samping itu, pendekatan pengawasan dan pengaturan untuk memastikan ketahanan operasional QAB tanpa keberadaan fisik di negara *host* perlu didiskusikan lebih lanjut.

ii. Kolaborasi ASEAN Terkait Digitalisasi Sistem Pembayaran

Di kancah internasional, mayoritas bank sentral dunia dan berbagai organisasi internasional secara intensif berupaya menemukan solusi untuk merespons perkembangan mata uang digital, termasuk CBDC. Dalam forum ASEAN CBDC melalui Joint Statement of the 9th ASEAN Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting (AFMGM) pada 31 Maret 2023, disepakati bahwa diskusi terkait eksplorasi CBDC akan dibahas pada forum WC-PSS meskipun baru merupakan kajian. Menindaklanjuti hal tersebut, pada 27th WC-PSS Meeting, CBDC dibahas dalam bentuk pembangunan kapasitas oleh Bank of International Settlements Innovation Hub (BISIH).

Kolaborasi dan sinergi pelaku industri bersama bank sentral di negara-negara ASEAN merupakan faktor kunci untuk menghadapi tantangan dan mewujudkan keterkaitan ekonomi Lintas Negara lebih luas. Perluasan konektivitas pembayaran regional (*regional payment connectivity*/RPC) di kawasan ASEAN menjadi salah satu topik utama pada 10th ASEAN Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting (AFMGM), 25 Agustus 2023, di Jakarta. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan lanjutan untuk memantau dan memperbarui perkembangan capaian dalam *priority economic deliverables* (PEDs). Salah satunya adalah memajukan konektivitas pembayaran serta mendorong literasi dan inklusi keuangan digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.

Kehadiran sistem pembayaran digital di kawasan ASEAN menjadi solusi yang aman, nyaman, dan efisien.

Deklarasi Pemimpin ASEAN tentang memajukan RPC dan mempromosikan LCT pada KTT ASEAN Mei 2023 akan membantu memfasilitasi pembayaran antarnegara yang lancar dan aman. Dalam konteks ini, para anggota telah menyepakati Peta Jalan RPC yang menguraikan jangka waktu anggota ASEAN bergabung dengan RPC. Dalam

deklarasi itu, para pemimpin negara di ASEAN berkomitmen untuk mempercepat implementasi RPC dan mendorong penggunaan mata uang lokal untuk transaksi antarnegara.

Skema RPC dan LCT merupakan bagian dari tiga PEDs Pilar Ekonomi Keketuaan ASEAN 2023. Penerapan skema RPC meliputi sistem pembayaran digital di negara kawasan, penggunaan Standar Kode Respons Cepat Indonesia (*QR Code Indonesian Standard*/QRIS), dan pembayaran cepat. Dengan demikian, pembayaran Lintas Negara di kawasan ASEAN akan lebih cepat, murah, dan inklusif.

Sejauh ini, ada lima negara ASEAN yang memiliki kesepakatan pembayaran transaksi menggunakan mata uang lokal, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Adapun Vietnam menjadi negara keenam di kawasan yang akan mengimplementasikan kesepakatan tersebut.

Sistem pembayaran di kawasan ASEAN berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik tiap negara. Dalam hal adopsi sistem pembayaran digital, inovasi meningkat signifikan, seperti pada dompet *mobile*, kode QR, perbankan *mobile*, perbankan internet, kartu kredit virtual, *wire transfers*, dan lainnya.

Dari sisi teknologi, digitalisasi mendorong inovasi sistem pembayaran yang diharapkan mampu menjembatani kebutuhan keterhubungan sistem pembayaran antarnegara. Sebelumnya, sistem pembayaran antarnegara identik dengan biaya tinggi dan waktu pemrosesan yang lama. Kini, kehadiran sistem pembayaran digital di kawasan ASEAN menjadi solusi yang aman, nyaman, dan efisien untuk mengatasi kendala tersebut.

ASEAN menunjukkan komitmen kuat untuk membangun praktik tata kelola data dan sistem pembayaran digital yang baik. Hal ini tecermin dari penyusunan kerangka kerja seperti Bandar Seri Begawan Roadmap, ASEAN Digital Master Plan 2025, ASEAN Framework on Digital Data Governance, dan ASEAN Digital Integration Framework yang menunjukkan fokus negara ASEAN tidak hanya pada keterhubungan antarnegara secara digital. Negara ASEAN berupaya agar kerangka kerja tersebut dapat koheren dan menyesuaikan dengan standar yang berlaku di negara masing-masing.

Saat ini, negara ASEAN terus memodernisasi sistem pembayaran antarnegara melalui standardisasi dan pengembangan infrastruktur. Negara ASEAN juga telah mengadopsi ASEAN Payments Policy Framework (APPF) sejak 2019 dan Implementing Policy Guidelines (IPG) sejak 2020 sebagai panduan dalam pembentukan sistem pembayaran ritel *real time* antarnegara. Untuk memfasilitasi pembayaran antarnegara tanpa batas, infrastruktur sistem pembayaran di kawasan ASEAN diharmonisasi melalui adopsi ISO20022.

Upaya perluasan pembayaran QR antarnegara di kawasan ASEAN tidak hanya melibatkan bank sentral dan otoritas terkait, tetapi juga melibatkan asosiasi industri sistem pembayaran. Pada 27th WC-PSS Meeting, ASEAN Bankers Association (ABA) menyampaikan usulan edukasi pembayaran QR antarnegara. Dalam usulan itu, *issuers-acquirers* dan *merchant* diharapkan mendukung penyampaian edukasi kepada konsumen. Hal ini untuk memastikan konektivitas

sistem pembayaran, melalui QR ataupun sistem pembayaran cepat di kawasan ASEAN, berlangsung baik dan lancar.

Untuk mendukung digitalisasi sistem pembayaran, ASEAN telah berupaya mengharmonisasi kebijakan dan kerangka kerja yang berbeda-beda di setiap negara. Dalam lingkup keamanan dan standardisasi data, telah disusun inisiatif Kerangka Kerja ASEAN dalam Tata Kelola Digital (ASEAN Framework on Digital Data Governance/DDG) sebagai panduan dalam pengembangan mekanisme aliran data Lintas Negara (*cross-border data flow/CBDF*). Hal ini dapat mendukung mitigasi risiko terkait keamanan data pembayaran antarnegara secara teknis dan legal. Upaya ini dilengkapi dengan pendirian ASEAN Cybersecurity Centre of Excellence di Singapura sebagai sarana negara ASEAN untuk bertukar pandangan, kerja sama, dan koordinasi dalam hal terkait ancaman keamanan siber serta menyelenggarakan program pembangunan kapasitas.

Berbagai inisiatif ASEAN tersebut merupakan upaya untuk menyesuaikan dengan perubahan lanskap sistem pembayaran yang semakin cepat serta mendorong inovasi dan digitalisasi. Upaya tersebut menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang memiliki harmonisasi dan standardisasi sehingga menjamin interoperabilitas dan interkoneksi sistem pembayaran antarnegara.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ASEAN tetap perlu memprioritaskan faktor keamanan sehingga dapat meminimalisasi disrupsi sistem pembayaran antarnegara saat muncul ancaman keamanan siber di salah satu negara anggota ASEAN.

iii. Kolaborasi ASEAN Terkait Keamanan Siber

Pada pertemuan CRISP Ke-8, Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia bertemu secara bilateral untuk bertukar informasi tentang pentingnya berbagi informasi perihal insiden siber. Insiden siber di sektor finansial Indonesia dan Malaysia cenderung mirip. Kemiripan itu dilihat dari pola serangan, kelompok pelaku, dan metode pelaku dalam mengelabui korban.

Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia menyepakati, informasi insiden siber yang dibagi tidak memuat informasi sensitif, seperti identitas korban, jumlah kerugian, sistem informasi yang terdampak,

dan informasi lain yang bersifat rahasia. Informasi yang dibagi lebih banyak berupa pelaku serangan, bentuk serangan, jenis serangan, identifikasi unik serangan (*indicator of compromised*), modus operandi, dan jenis sistem yang menjadi target.

Fokus pertukaran informasi adalah agar Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia memiliki informasi terkini dan dapat mendeteksi serangan siber, khususnya serangan yang mungkin belum terdeteksi di perangkat pendeteksi serangan.

Jika menguntungkan, pada pertemuan CRISP berikutnya, Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia dapat mengajukan perluasan kerja sama pertukaran informasi insiden siber kepada anggota jaringan digital dan teknologi (digital and technology network/DTN) CRISP. Dengan adanya perluasan kerja sama, diharapkan akan memberikan keuntungan yang besar kepada anggota DTN CRISP. Dengan demikian, seluruh anggota bisa memiliki informasi terkini, akurat, valid, dan sesuai dengan tren serangan di wilayah ASEAN.

Informasi tersebut diyakini akan membantu memperkuat ketahanan siber bank sentral dan sektor finansial yang diawasi bank sentral. Secara tidak langsung, memperkuat kerja sama di kawasan ASEAN.

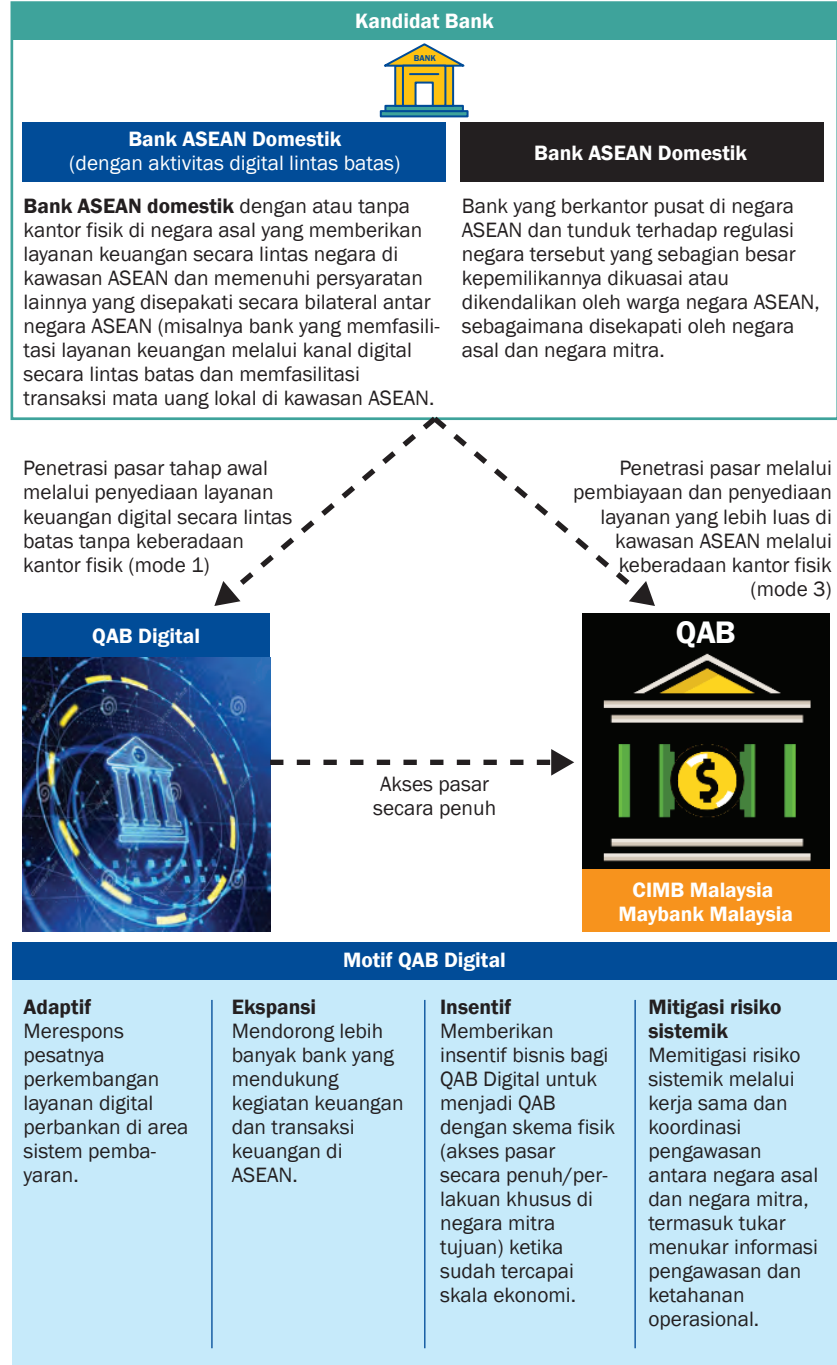
Capaian dan Langkah ke Depan Strategi Navigasi Ekonomi Digital

i. Usulan Penguatan ABIF

Capaian strategi navigasi ekonomi digital di ASEAN terutama terkait integrasi perbankan di era digital. Selain kehadiran komersial, perbankan berpotensi diintegrasikan melalui pembentukan QAB digital dengan cakupan kegiatan yang lebih spesifik, seperti layanan keuangan/perbankan digital Lintas Negara. Konsep QAB digital diharapkan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, mendorong transaksi perdagangan dan investasi yang lebih luas, serta meningkatkan inklusi keuangan dengan biaya yang lebih efisien.

Dengan usulan tersebut, bank yang belum memenuhi kriteria QAB tradisional, tetapi sudah aktif memfasilitasi dan/atau melayani keuangan/perbankan digital secara Lintas Negara, termasuk mendukung LCT dan interoperabilitas pembayaran QR di ASEAN, dapat dipertimbangkan sebagai kriteria QAB digital (Gambar 5.14).

Skema QAB Digital sebagai Alternatif QAB Saat Ini



Gambar 5.14 Skema QAB Digital sebagai Alternatif QAB saat ini.

Skema QAB digital mendukung andalan keketuaan Indonesia ASEAN yang berupaya mendorong penggunaan transaksi mata uang lokal dan interoperabilitas pembayaran QR di ASEAN. Penguatan ABIF di masa mendatang meliputi tiga aspek fundamental untuk mengatasi tantangan integrasi perbankan di tengah ketidakpastian global yang tinggi dan digitalisasi (Gambar 5.15).

Aspek pertama terkait pengaturan institusional. Aspek kedua berupa layanan aliran keuangan, termasuk layanan keuangan/perbankan digital. Aspek ketiga berupa pertimbangan peraturan untuk memastikan stabilitas keuangan terjaga.

Pengaturan institusional bertujuan memperluas integrasi perbankan untuk mendukung penyediaan layanan keuangan/perbankan Lintas Negara di ASEAN tanpa melalui kehadiran komersial. Pada praktiknya, otoritas AMS dapat mempertimbangkan untuk menetapkan layanan keuangan tertentu, misalnya terkait aktivitas pembayaran Lintas Negara berbasis digital, yang boleh dilakukan tanpa membuka kantor cabang di negara *host*. Berdasarkan hasil survei ABIF, mayoritas AMS menunjukkan minat untuk mengeksplorasi pendekatan integrasi perbankan selain skema kehadiran komersial.

Aliran layanan perbankan perlu mempertimbangkan perkembangan layanan transaksi keuangan digital, termasuk peran bank dalam memfasilitasi kegiatan LCT dan konektivitas pembayaran Lintas Negara di ASEAN. Usulan perluasan cakupan aliran layanan keuangan dalam konsep integrasi perbankan sejalan dengan inisiatif utama ASEAN yang dijalankan oleh komite kerja (*working committee/WC*) lain, yaitu WC Payment and Settlement Systems (WC-PSS) dan WC Capital Accounts Liberalization (WC-CAL).

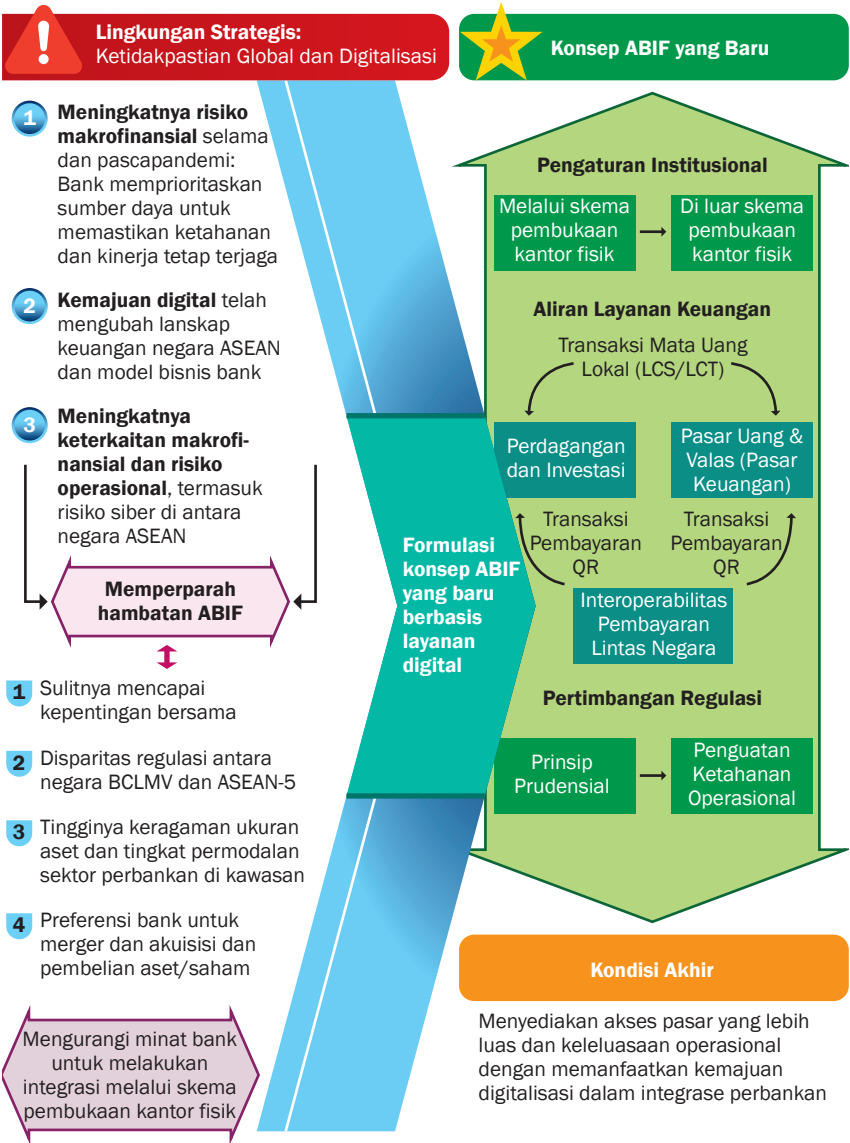
WC-CAL tengah mengembangkan kerangka LCT di ASEAN, sedangkan WC-PSS mengembangkan konektivitas pembayaran Lintas Negara melalui *interlinkage* pembayaran QR. Hal ini untuk mendukung perdagangan dan investasi serta transaksi pasar keuangan.

Pertimbangan pengaturan perlu memastikan kerangka pengaturan cukup untuk memitigasi dampak risiko digital dan memastikan ketahanan operasional perbankan dalam rangka menjaga stabilitas keuangan regional di era digital. ABIF Guidelines mensyaratkan bank tunduk pada Basel Core Principles for Effective Banking Supervision guna memastikan kandidat bank QAB adalah bank yang aman dan kuat.

ABIF Baru Berbasis Digital

Reformulasi ABIF

ABIF diharapkan dapat memajukan integrasi perbankan sejalan dengan upaya untuk mendukung perdagangan dan investasi, pasar keuangan dan memfasilitasi pembayaran QR di kawasan ASEAN.



Sumber: Bank Indonesia (2023)

Gambar 5.15 ABIF Baru Berbasis Digital.

Saat ini, koherensi pengaturan di kawasan untuk mendukung integrasi perbankan difokuskan pada implementasi kerangka permodalan dan likuiditas Basel III serta penerapan IFRS 9. Di masa mendatang, referensi standar prudensial yang perlu jadi acuan berpotensi diperluas, sejalan dengan perkembangan risiko dan kerentanan akibat digitalisasi, termasuk risiko operasional dan siber.

ii. Pandangan Industri mengenai Konsep Penguatan ABIF

Upaya penguatan ABIF perlu dilakukan secara komprehensif dan hati-hati. Hal ini untuk memastikan konsep ABIF yang baru tidak hanya mengakomodasi model bisnis bank dalam menyediakan layanan keuangan secara digital dan Lintas Negara, tetapi juga memastikan operasionalisasi ABIF telah memenuhi aspek prudensial yang memadai dan harmonis antarnegara.

Perumusan konsep ABIF yang baru melibatkan diskusi dengan pelaku industri, yaitu ASEAN Bankers' Association (ABA) dan Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) yang merupakan anggota ABA. Diskusi bertujuan memperoleh pandangan dan masukan dari perspektif industri mengenai tantangan implementasi ABIF saat ini dan penguatan ABIF ke depan.

Diskusi dengan ABA pada 8 Juni 2023 menghasilkan beberapa kesimpulan:

- a) Usulan konsep ABIF yang baru mendapat dukungan kuat ABA karena sejalan dengan perkembangan bisnis perbankan saat ini. Skema QAB digital yang mendukung interoperabilitas pembayaran QR di ASEAN dan LCT dinilai lebih relevan, sejalan dengan perkembangan inisiatif yang pesat terkait isu ini. Partisipasi QAB dalam interoperabilitas pembayaran QR di ASEAN dan LCT diharapkan mendorong perdagangan dan investasi di kawasan.
- b) Konsep QAB tradisional jadi kurang menarik karena beberapa bank sudah dapat beroperasi di regional tanpa perlu menjadi QAB. Di samping itu, pembentukan QAB tradisional memerlukan biaya yang relatif besar sehingga kurang efisien bagi bank.
- c) ABA menilai prinsip-prinsip ABIF masih relevan, tetapi perlu diselaraskan dengan konsep QAB digital pada tiga area fokus

yang diusulkan, yaitu pengaturan institusional, aliran layanan keuangan, dan pertimbangan pengaturan.

- d) Otoritas perlu memperhatikan tantangan regulasi yang berpotensi menghambat aliran data Lintas Negara, terkait perlindungan dan kerahasiaan data konsumen, kebijakan lokalisasi data, serta aspek kepatuhan dan kewajiban di antara pihak terkait. ABA menyampaikan pertimbangan untuk menyepakati prinsip tingkat tinggi terkait aliran data Lintas Negara untuk mendukung efektivitas skema QAB digital.

iii. Tindak Lanjut Reviu ABIF Guidelines

Perihal isu yang perlu dibahas lebih lanjut pada rangkaian diskusi kelompok terfokus, beberapa negara anggota WC-ABIF telah memberikan masukan dan pandangannya dalam pertemuan WC-ABIF Ke-14 pada 12 Juli 2023.

Pertama, identifikasi kerangka pengaturan di negara ASEAN untuk mendukung integrasi perbankan di luar skema QAB tradisional berbasis kehadiran komersial. Perlu melihat sejauh mana kerangka pengaturan di setiap negara ASEAN dapat mendukung skema QAB digital.

Kedua, penetapan definisi dan terminologi yang digunakan untuk menjelaskan skema integrasi perbankan berbasis QAB digital. Sebagai contoh, perlu disepakati kriteria bank yang berpotensi menjadi kandidat QAB digital, apakah harus berbentuk bank digital atau sesuai kriteria saat ini, yaitu bank asli ASEAN, baik bank digital maupun nondigital yang berkontribusi signifikan dalam penyediaan layanan keuangan/perbankan Lintas Negara di negara *host*. Sesuai usulan saat ini, bank digital yang ingin beroperasi dalam bentuk kehadiran komersial di negara *host* wajib memenuhi persyaratan dalam QAB tradisional.

Ketiga, cakupan aktivitas QAB digital perlu disepakati. Untuk mempermudah bank mendapatkan status QAB digital, dapat dipertimbangkan aktivitas yang lebih fokus, misalnya pada transaksi pembayaran Lintas Negara berbasis pembayaran QR di ASEAN dan LCT. Cakupan ini lebih sempit dibandingkan dengan aktivitas perbankan yang berisiko, seperti simpanan dan pinjaman.

Keempat, penentuan karakteristik QAB digital. Dapat

dipertimbangkan pemenuhan kriteria yang lebih longgar, terutama terkait beberapa standar prudensial, sejalan dengan fokus aktivitas QAB digital yang lebih spesifik atau terbatas.

Kelima, insentif untuk mendapatkan status QAB digital. AMS perlu mengidentifikasi dan mengoptimalkan manfaat yang dapat diperoleh bank dan otoritas melalui penerapan skema QAB digital. Dari sisi otoritas, skema QAB digital dapat memperkuat peran ABIF dalam memastikan stabilitas sistem keuangan di regional. Caranya, antara lain, melalui penguatan koordinasi dan kerja sama *home-host* serta memastikan efektivitas mekanisme pemulihan dan resolusi saat terjadi permasalahan operasional pada QAB digital.

Keenam, proses penerimaan bagi QAB digital. AMS perlu mendiskusikan usul perihal penyederhanaan tahapan proses penerimaan bagi QAB digital yang cakupan aktivitasnya lebih terbatas dan profil risikonya relatif lebih rendah dibandingkan dengan QAB tradisional.

Sementara itu, negara-negara ASEAN akan memperkuat kolaborasi penanganan siber melalui rangkaian pertemuan CRISP. Bank Indonesia memberikan kesempatan kepada peserta pertemuan CRISP untuk menyampaikan ide, topik, dan inisiatif baru yang bermanfaat untuk pertemuan CRISP berikutnya pada 2024 di Laos.

Inisiatif yang disampaikan peserta pertemuan antara lain kesulitan memperoleh talenta SDM di bidang keamanan informasi, program kesadaran keamanan siber, dan topik terkait keamanan *cloud*. Saat ini belum banyak universitas yang menyediakan jurusan keamanan siber di pendidikan tingkat sarjana. Padahal, permintaan SDM untuk keamanan siber cukup tinggi sehingga terjadi fenomena kelangkaan SDM siber.

Kelangkaan ini diperburuk tren perubahan dari teknologi *On Premise Infrastructure* ke *Cloud Infrastructure*, yakni diperlukan lebih banyak SDM yang memahami infrastruktur *cloud* dan memiliki pemahaman yang baik untuk keamanan *cloud*.

Inisiatif lain adalah mengundang narasumber dari industri finansial skala global dan instansi keamanan siber di tingkat global. Sebab, dalam merumuskan kebijakan dan memanfaatkan teknologi secara optimal, diperlukan referensi dan tolok ukur dari organisasi dengan maturitas keamanan siber yang lebih baik. Narasumber ini

diharapkan memberikan pandangan dan masukan tentang program dan upaya industri finansial global sehingga menjadi referensi yang baik bagi peserta.

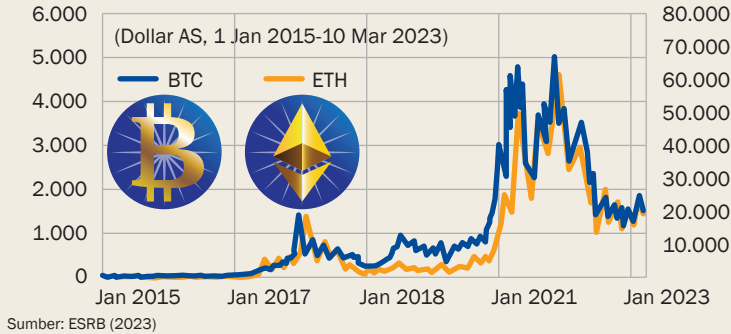
Inisiatif berikutnya adalah simulasi *tabletop* secara reguler untuk membangkitkan kesadaran pentingnya koordinasi ketika terjadi insiden siber. Pada pertemuan CRISP Ke-8, Bank Indonesia menginisiasi simulasi latihan *tabletop* untuk melatih koordinasi antarinstansi guna memastikan koordinasi yang diperlukan terjalin baik. Simulasi yang dimaksud terkait potensi krisis di sektor keuangan akibat serangan siber dan gejolak politik di suatu negara. Simulasi ini sangat bermanfaat bagi peserta sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu kegiatan rutin pada CRISP.

Inisiatif lain adalah studi banding ke penyedia layanan *cloud* ataupun industri finansial yang memiliki manajemen pengelolaan risiko insiden yang andal. Penggunaan infrastruktur *cloud* menjadi salah satu tren yang melahirkan tantangan baru dalam upaya keamanan. Anggota DTN CRISP berharap mendapat kesempatan untuk studi banding ke penyedia layanan *cloud* sehingga upaya mitigasi risiko yang lahir dari penggunaan infrastruktur *cloud* dapat maksimal, baik dari sisi kebijakan, teknologi, maupun manajemennya.

Perkembangan Aset Kripto serta Regulasi dan Supervisi Terkait Aset Kripto

Dalam kata sambutannya di ASEAN High Level Seminar, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menggarisbawahi, akselerasi digital di sektor keuangan dalam mendorong perkembangan industri aset kripto berpotensi mengancam stabilitas keuangan global. Hal ini berkaitan dengan peningkatan skala, kerentanan, dan keterhubungan dengan sistem keuangan tradisional. Oleh karena itu, perangkat pengaturan dan supervisi penting untuk mendukung inovasi aset digital yang bertanggung jawab dan memitigasi potensi transmisi risiko.

Tren Volatilitas Native Tokens

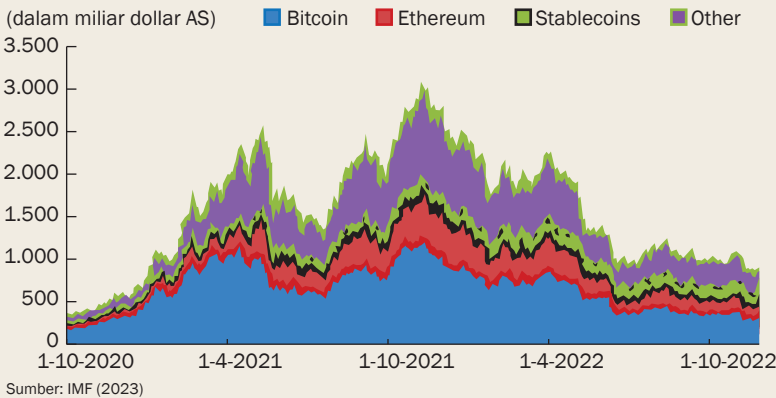


Gambar 5.16 Tren Volatilitas Native Tokens.

Perkembangan harga aset kripto secara global rentan bergejolak, terutama pada jenis *unbacked crypto asset*. Setelah sempat merasakan masa keemasan pada 2020-2021, aset kripto melemah signifikan pada awal 2023 (Gambar 5.16).

Beberapa episode kejatuhan kripto terjadi pada 2022, ukuran pasar kripto global jatuh dari level 3 triliun dollar AS pada November 2021 ke level di bawah 1 triliun dollar AS (Gambar 5.17). Di sisi lain, meskipun sudah melalui beberapa kejatuhan pasar, tingkat adopsi aset kripto masih menunjukkan tren yang meningkat terutama di negara berkembang. Menurut data Triple-A (2023), rata-rata tingkat kepemilikan aset kripto secara global berkisar 4,2 persen.

Kapitalisasi Pasar Aset Kripto



Gambar 5.17 Kapitalisasi Pasar Aset Kripto.

Gambar 5.18 menunjukkan bahwa di antara 20 negara dengan tingkat kepemilikan aset kripto tertinggi, terdapat beberapa negara ASEAN, seperti Vietnam yang menduduki peringkat ke-2 (21,19 persen), diikuti Filipina di peringkat ke-5 (13,43 persen), Singapura di peringkat ke-6 (11,5 persen), Thailand di peringkat ke-10 (9,61 persen), dan Indonesia di peringkat ke-19 (4,40 persen).

Global Crypto Adoption Rate

Per 16 Mei 2023

	Negara	Populasi	Pemilik	Persentase Pemilik
1	UEA	9.516.871	2.633.001	27,67%
2	Vietnam	98.858.950	20.301.468	20,54%
3	Singapura	6.014.723	837.851	13,93%
4	Iran	89.172.767	12.000.000	13,46%
5	AS	339.996.563	44.959.854	13,22%
6	Filipina	117.337.368	15.279.906	13,02%
7	Ukraina	36.744.634	3.784.697	10,30%
8	Venezuela	28.838.499	2.970.365	10,30%
9	Afrika Selatan	60.414.495	6.041.450	10,00%
10	Thailand	71.801.279	6.692.796	9,32%
11	India	1.428.627.663	103.317.638	7,23%
12	Brasil	216.422.446	15.113.232	6,98%
13	Pakistan	240.485.658	14.400.547	6,40%
14	Perancis	64.756.584	3.820.638	5,90%
15	Rusia	144.444.359	8.485.749	5,87%
:	:	:	:	:
23	Indonesia	277.534.122	12.615.365	4,55%

Sumber: Triple-A (2023)

Gambar 5.18 Global Crypto Adoption Rate.

Sementara itu, *stablecoin* juga berkembang di kawasan. Perkembangan ini ditandai dengan beberapa negara ASEAN, seperti Indonesia, Singapura, Filipina, Thailand, dan Vietnam, yang sudah memiliki *stablecoin* dengan mengacu pada mata uang lokal masing-masing.

Studi Nikkei Asia (2022) menemukan, Thailand dan Vietnam berpotensi untuk menjadi *hub* aktivitas perdagangan aset kripto di kawasan ASEAN. Nilai total perdagangan di negara masing-masing sebesar 135,9 miliar dollar AS dan 112,6 miliar dollar AS atau di atas Singapura (100 miliar dollar AS) yang dikenal sebagai *hub* keuangan regional.

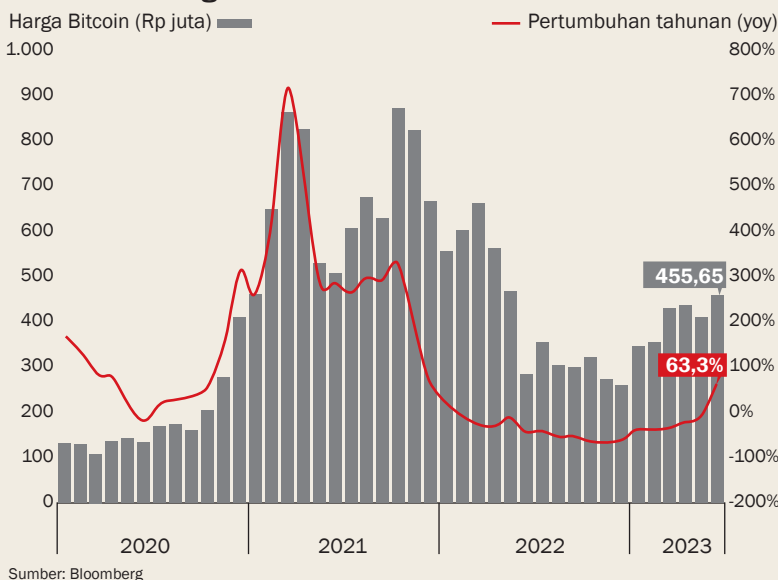
Hal ini didorong kecenderungan Thailand dan Vietnam, sebagai negara berpendapatan menengah, untuk mengirim remitansi

dalam bentuk aset kripto sebagai upaya untuk menghindari volatilitas nilai mata uang domestik dan biaya transaksi layanan jasa keuangan tradisional yang tinggi (Nikkei Asia 2022).

Kaproanasia (2022) menemukan, tingkat adopsi aset kripto yang tinggi di Filipina juga didukung potensi pasar remitansi yang besar serta ekosistem regulasi yang lebih rileks dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan. Penggunaan PHX, mata uang lokal *stablecoin* di Filipina, ditargetkan untuk menjawab kebutuhan domestik terkait layanan remitansi, yang didukung peluncuran ATM mata uang virtual di daerah paling pelosok (Coindesk, 2019).

Kebutuhan layanan remitansi di Vietnam juga difasilitasi *dong-backed stablecoin*, VNDC. Dengan proses *settlement* yang cepat dan nilai yang lebih stabil dibandingkan dengan *unbacked cryptocurrency*, *stablecoin* dinilai bisa menjembatani transaksi internasional dengan efisien (Zemp, 2023).

Grafik Tren Harga Bitcoin



Gambar 5.19 Grafik Tren Harga Bitcoin.



stabilitas makrofinansial. IMF (2023) memetakan potensi risiko makrofinansial yang terdiri dari *internal stability*, *external stability*, dan struktur sistem keuangan dengan dampak yang berbeda-beda tergantung dari tingkat adopsi aset kripto, *soundness* sistem keuangan, dan kebijakan *capital flow management* (CFM).

Perkembangan Jumlah Pedagang Kripto yang Terdaftar di Bappebti



Sumber: Bappebti, Diolah

Gambar 5.21 Perkembangan Jumlah Pedagang Kripto yang Terdaftar di Bappebti.

Pertama, pada level *internal stability*, tingkat adopsi aset kripto yang semakin meluas dapat mengganggu stabilitas kebijakan moneter, risiko SSK, dan kebijakan fiskal. Adanya risiko *currency substitution* di mana publik lebih condong untuk menggunakan aset kripto dibandingkan *fiat money* dapat membahayakan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Lebih lanjut, komposisi aset kripto yang tinggi pada portofolio investor domestik dapat memberikan eksposur (*direct* atau *indirect*) ke sistem keuangan tradisional sehingga berimplikasi pada SSK. Selain itu, penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran, antara lain, dapat mengurangi pendapatan pajak pemerintah akibat fitur *pseudonymous* dari aset kripto.

Kedua, untuk implikasi *external stability*, penggunaan aset kripto untuk alat pembayaran Lintas Negara dapat mendisrupsi lalu lintas *capital flow*. Selain itu, dengan masih adanya data gap terkait transaksi aset kripto didukung oleh perpindahan aset yang cepat dapat semakin mempersulit pola *capital flow*. Oleh karena itu, penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran Lintas Negara akan semakin sulit dipantau dan mendisrupsi kebijakan CFM.

Ketiga, aset kripto juga berpotensi menurunkan integritas sistem keuangan, didukung oleh fitur *anonymous*-nya, ekosistem aset kripto dapat menjadi sarana bagi transaksi-transaksi ilegal karena dapat luput dari proses *Know Your Customer* (KYC). Di samping itu, adanya transaksi *off-chain* dengan fiturnya yang dapat memfasilitasi transaksi agar lebih murah dan cepat dapat mengganggu aspek *transparency* dan *traceability* dari transaksi finansial (IMF, 2023).

Dengan berbagai potensi risiko yang ada, aset kripto bisa berkembang menjadi sumber risiko sistemik. Sejalan dengan hal tersebut, perkembangan aset kripto telah menjadi perhatian global. Sejak Presidensi G20 Argentina pada 2018, otoritas berfokus pada potensi risiko di area perlindungan konsumen, integritas pasar, perpajakan, pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Communiqué G20 FMCBG pada 17-18 Februari 2022 menyepakati untuk dilakukannya pendalaman terhadap manfaat dari inovasi di sektor keuangan terhadap stabilitas sistem keuangan, termasuk potensi kesenjangan pengaturan terhadap aset kripto.

Lebih lanjut, Global Standard-Setting Bodies (SSBs) terus berkoordinasi untuk merancang *framework* regulasi yang efektif dengan terus mengedepankan integritas sistem keuangan dan perlindungan konsumen. Dalam *policy paper*-nya, IMF (2023) mengusulkan *framework* elemen kebijakan untuk aset kripto yang dapat memitigasi risiko makrofinansial (Gambar 5.23). Elemen kebijakan tersebut terdiri dari sembilan *policy actions*:

1. Menjaga penguatan kebijakan moneter dan tidak menjadikan aset kripto sebagai *legal tender*.

2. Mencegah volatilitas arus modal dan menjaga efektivitas *capital flow management* (CFM).
3. Menetapkan pemberlakuan pajak atas aset kripto.
4. Menetapkan kepastian hukum atas aset kripto dan mengatasi risiko hukum.
5. Menegakkan pengawasan pada pasar aset kripto.
6. Membentuk kerangka koordinasi antarlembaga dan otoritas domestik.
7. Membentuk kerja sama internasional serta meningkatkan pengawasan dan penegakan peraturan.
8. Memantau dampak aset kripto terhadap stabilitas sistem moneter internasional.
9. Memperkuat kerja sama internasional untuk mengembangkan infrastruktur digital dan solusi untuk sistem pembayaran Lintas Negara.

Framework Elemen Kebijakan Aset Kripto



Sumber: IMF (2023), Diolah

Gambar 5.22 Framework Elemen Kebijakan Aset Kripto.

Berbagai SSBs lain juga vokal dalam mengajukan *policy recommendation*. Financial Stability Board (FSB) menyusun penguatan kerangka *monitoring* surveilans untuk memantau perkembangan elemen pasar, jalur transmisi dan potensi risiko aset kripto terhadap sistem keuangan global, serta pembelajaran dari gejolak pasar aset kripto di tahun 2022. Pada rangkaian ASEAN Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting (AFMGM) Maret 2023, FSB telah mempresentasikan progres pekerjaan terkait kerangka pengaturan dan pengawasan masing-masing untuk aset kripto dan *stablecoin*, baik di pertemuan level menteri keuangan dan gubernur bank sentral maupun di *side-event* di sela-sela rangkaian tersebut.

Pada 17 Juli 2023, FSB telah memfinalisasi kerangka pengaturan dan pengawasan tersebut. Terkait aset kripto, FSB memberikan beberapa rekomendasi kebijakan yang mencakup *data collection*, *monitoring* tata kelola *issuer stablecoin*, kerja sama Lintas Negara, dan kewajiban perusahaan aset digital dalam melakukan publikasi laporan (*disclosure*) (FSB, 2023).

Selain itu, FSB juga terus memperkuat kerangka regulasi dan supervisi *stablecoin* salah satunya terkait penguatan ketentuan hak konsumen dalam melakukan *redemption stablecoin* di mana *issuer* wajib memberikan *legal claim* terhadap konsumen untuk melakukan *redemption*. *Issuer* juga harus menjamin nilai *redemption currency-backed stablecoin* yang benar-benar sesuai dengan nilai mata uang yang di-*pegged* (FSB, 2023).

Sementara itu, Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) memublikasikan standar perlakuan aset kripto bagi sektor perbankan melalui *Prudential Treatment for Banks' Exposure to Crypto-assets*. Untuk pengaturan *stablecoins* yang berdampak sistemik, Committee on Payments and Market Infrastructures and International Organization of Securities Commissions (CPMI dan IOSCO) telah menerbitkan *Principles for Financial Market Infrastructures* (PFMI).

Dari aspek penegakan integritas pada sektor jasa keuangan, Financial Action Task Force (FATF) mengeluarkan Pedoman bagi otoritas untuk menyusun regulasi terkait aktivitas aset virtual dan Pedoman bagi penyelenggara layanan aset virtual (*Virtual Asset*

Services Providers) untuk menerapkan aspek APU-PPT. Terakhir, IOSCO Fintech Task Force menerbitkan Crypto-Asset Roadmap 2022-2023 yang fokus pada isu *market conduct*, perlindungan investor, stabilitas keuangan, ataupun pengaturan aset kripto serta DeFi (PwC, 2023).

Di dalam konteks kawasan ASEAN, ekosistem regulasi aset kripto masih berada di area abu-abu karena belum adanya harmonisasi Pedoman dan pengaturan yang seragam di kawasan ini karena setiap negara telah menetapkan regulasi sebagai upaya untuk mengawasi industri aset kripto dengan tingkat *enforcement* yang berbeda-beda. Berikut ini merupakan *overview* dari ekosistem regulasi di beberapa negara anggota ASEAN.

1. Singapura

Sebagai salah satu *global hub* untuk inovasi keuangan digital, otoritas Singapura memiliki *stance* yang netral dan ekosistem regulasi yang cukup matang terkait aset kripto. Monetary Authority of Singapore (MAS) terus melakukan pengawasan terkait potensi risiko yang timbul dari aktivitas perdagangan aset kripto dan pada saat yang sama juga memastikan bahwa pengawasan tersebut tidak mematikan inovasi digital di industri ini (Venkatesh & Rastogi, 2021).

Melalui Payment Service Act (PSA) 2019, otoritas mengatur aktivitas perdagangan, perizinan penyelenggara layanan aset virtual, dan aspek APU-PPT yang diperketat lebih lanjut di tahun 2021 terkait pelarangan transfer ilegal di seluruh platform Pedagang ataupun *wallet* aset kripto domestik. Sebagai upaya untuk menegakkan perlindungan konsumen, MAS meluncurkan *Guidelines on Provision of Digital Payment Token Services to the Public* yang melarang bentuk-bentuk promosi/*advertising* Pedagang kripto di ruang publik (MAS, 2022) dan membatasi Pedagang kripto untuk menyediakan layanan *lending* dan *staking* melalui penerbitan *Investor Protection Measures for Digital Payment Token Services* (MAS, 2023).

Selain itu, dengan memperhatikan dinamika perkembangan *stablecoin*, Singapura juga sudah berinisiasi untuk menyusun

peraturan *stablecoin* lebih lanjut melalui diterbitkannya *Consultation Paper on Proposed Regulatory Approach for Stablecoin-related Activities* dengan beberapa usulan peraturan yang mencakup perizinan *issuer stablecoin*, baik dari bank maupun nonbank, ketentuan *reserve asset* (dalam bentuk *cash*, aset yang ekuivalen dengan *cash*, atau obligasi pemerintah jangka pendek), kewajiban *issuer* untuk melakukan publikasi rincian *stablecoin*, serta ketentuan modal minimum *issuer* (MAS, 2022).

2. Thailand

Melalui *Royal Decree on Digital Asset Business* yang dirilis pada Mei 2018, otoritas Thailand melegalkan aset kripto untuk diperdagangkan. Lebih lanjut di tahun 2022, Securities and Exchange Commission (SEC Thailand) melarang aset kripto sebagai alat pembayaran. Selain itu, SEC Thailand juga mengatur perizinan seluruh entitas yang terlibat dalam industri aset kripto (Pedagang, broker, dan dealer). *Initial Coin Offering* (ICO) atau aset kripto yang akan di-*issue* perlu mendapat persetujuan lebih dahulu dari SEC.

Sebagai upaya penegakan peraturan APU-PTT, otoritas mewajibkan investor baru datang secara fisik untuk melakukan verifikasi sebelum membuka akun kepemilikan aset kripto. Pada tahun 2023, SEC juga mengumumkan pelarangan perusahaan kripto dalam menyediakan layanan kustodian yang menghasilkan *return* kepada deposan dan pemberi pinjaman (SEC, 2023).

Sebagai respons atas perkembangan *stablecoin*, Bank of Thailand (BoT) mengklasifikasikan *bank-backed stablecoin* sebagai layanan *e-money* dengan mengacu pada Payment System Act 2017. Adapun jenis *stablecoin* lain (*FX-backed stablecoin*, *asset-backed stablecoin*, dan *algorithmic stablecoin*) tidak dilarang, tetapi belum diatur secara khusus. Namun, BoT terus memantau perkembangannya sebagai upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan (BoT, 2021).

3. Vietnam

Walaupun tingkat adopsi kripto cukup tinggi, ekosistem regulasi masih berada di area abu-abu. Pada tahun 2018, otoritas Vietnam telah melarang penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran, tetapi kepemilikan kripto masih diperbolehkan. Aktivitas perdagangan, perizinan Pedagang, dan perlindungan konsumen belum diatur secara jelas dalam sebuah perangkat peraturan. Walaupun demikian, beberapa platform Pedagang kripto dapat beroperasi secara bebas tanpa izin otoritas yang jelas di Vietnam (Anh Huy, 2022).

4. Filipina

Filipina dikenal memiliki ekosistem regulasi yang cukup longgar. Bahkan, Arianti & Yaoren (2020) menemukan total transaksi di Filipina yang menggunakan aset kripto berada di kisaran 2 persen. Banko Sentral ng Pilipinas (BSP) mengeluarkan Circular No. 944/2017 untuk lebih lanjut mengatur operasi aset kripto sebagai aset virtual. Dengan *stance* regulator yang cenderung lebih akomodatif, proses konversi dari aset kripto ke *fiat money* (peso) dapat dengan mudah dilakukan di beberapa ATM dan perusahaan layanan remitansi atau transfer dana yang implementasinya diregulasi oleh BSP (Arianti & Yaoren, 2020).

Walaupun demikian, melalui *Advisory on the Use of Virtual Currencies* pada 29 Desember 2017, BSP terus mengingatkan konsumen untuk berhati-hati dalam menggunakan aset kripto. Melalui *advisory* tersebut, BSP tidak mendukung aset kripto sebagai mata uang atau instrumen investasi karena sifatnya yang sangat spekulatif dan berisiko. *Guidelines for Virtual Asset Service Providers* (VASP) dirilis pada tahun 2021 untuk mengatur perizinan penyelenggara layanan aset virtual, implementasi *Know Your Consumer* (KYC) dan kepatuhan APU-PPT. Dengan *use-case stablecoin* yang tinggi untuk layanan remitansi, regulator Filipina belum mengatur penggunaan *stablecoin* secara komprehensif.

5. Indonesia

Sementara itu, dalam merespons perkembangan industri aset kripto domestik, ekosistem regulasi Indonesia semakin diperkuat yang juga didukung oleh peralihan pengaturan dan pengawasan aset kripto ke otoritas keuangan sesuai dengan Undang-Undang (UU) P2SK. Pada perkembangan awal, Bappebti menetapkan aset kripto sebagai komoditas dan menjadi subjek Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka yang masuk dalam UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Di dalam ketentuan terkini, Bappebti menyempurnakan peraturan mengenai aset kripto melalui penerbitan Peraturan Bappebti No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Pada publikasi peraturan terbaru, yaitu PerBa No. 4 Tahun 2023, Bappebti memperluas jumlah aset kripto yang dapat diperdagangkan, yakni dari semula 383 aset kripto menjadi 501 aset kripto.

Terkait pengenaan pajak, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. PMK yang efektif berlaku sejak 1 Mei 2022 ini mengatur mekanisme perhitungan PPN dan PPh pada aktivitas transaksi aset kripto.

Besaran PPN yang dikenakan sebesar 1 persen dari tarif PPN umum untuk kegiatan atas penyerahan aset kripto. Apabila perdagangan tidak dilakukan di Pedagang fisik aset kripto yang terdaftar di Bappebti, besaran PPN dikenakan sebesar 2 persen dari tarif PPN umum. Adapun PPh dikenakan pada penghasilan dari penjualan aset kripto, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, dan penambang.

Penjual aset kripto adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan ataupun pertukaran aset kripto yang dikenai tarif 0,1 persen. Apabila penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik bukan Pedagang fisik aset kripto yang terdaftar di Bappebti, PPh dikenakan sebesar 0,2 persen.

Bagi penambang, PPh dikenakan sebesar tarif 0,1 persen dan harus disetorkan sendiri. Lebih lanjut terkait aspek APU-PPT, calon Pedagang fisik aset kripto (CPFAK) telah mengimplementasikan *travel rule* untuk mempermudah proses asesmen oleh lembaga/regulator terkait pengecekan riwayat transaksi aset kripto yang terkait dengan APU-PPT.

Selanjutnya, pada 17 Juli 2023, Bappebti telah menetapkan pembentukan ekosistem kripto yang terdiri dari bursa, kliring, dan pengelola penyimpanan kripto. Melalui Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-BBAK/07/2023, Bappebti menetapkan PT Bursa Komoditi Nusantara sebagai bursa kripto. Selain itu, Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-LKBAK/07/2023 juga diterbitkan untuk memberikan persetujuan kepada PT Kliring Berjangka Indonesia sebagai Lembaga Kliring Berjangka.

Selain itu, Bappebti juga menetapkan PT Tennet Depository Indonesia sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto dengan peluncuran Keputusan Kepala Bappebti Nomor/01/BAPPEBTI/SP-PTPAK/07/2023. Ke depan, payung hukum pengaturan dan pengawasan aset kripto menjadi lebih lengkap dan kuat sejalan dengan terbitnya UU P2SK yang memasukkan aset kripto sebagai bagian dari inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK). Terkait hal ini, OJK dan Bank Indonesia akan terus berkoordinasi dalam melakukan pengaturan dan pengawasan aset kripto sesuai dengan cakupan dan kewenangannya masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas, secara umum ASEAN memiliki potensi besar bagi perkembangan industri aset kripto. Berbagai otoritas di setiap negara anggota terus mengembangkan regulasi secara progresif sebagai respons peningkatan popularitas dan transaksi aset kripto. Namun, kematangan dan adopsi regulasi antarnegara masih belum berada dalam tingkat yang sama.

Oleh karena itu, upaya harmonisasi perangkat peraturan dan regulasi perlu dilakukan, antara lain, dengan memperhatikan beberapa hal.

Pertama, penguatan kejelasan peraturan dalam mengatur cakupan legalitas *use-case* aset kripto, struktur pasar, dan pengaturan bursa baik secara *centralized* ataupun *decentralized*.

Kedua, otoritas perlu memastikan bahwa regulasi tidak mematikan potensi inovasi keuangan digital dan peningkatan kapasitas regulator juga perlu diperkuat agar sistem pengawasan sejalan dengan perkembangan pesat inovasi dan teknologi aset kripto. Terakhir, perlindungan konsumen merupakan aspek penting yang juga harus menjadi prioritas bagi otoritas di kawasan.



KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo dalam pembukaan KTT ke-43 ASEAN 2023 di Jakarta, Selasa (5/9/2023).

BAB 6

Inklusi dan Literasi Keuangan Digital untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Ketangguhan Sektor Keuangan ASEAN



KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Petugas kasir melayani pembayaran secara digital melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dalam pameran Karya Kreatif Indonesia 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (26/5/2022). Pameran yang diselenggarakan Bank Indonesia itu menjadi upaya dalam meningkatkan akses pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta mendorong UMKM untuk *go digital* dan *go global*.

Inklusi keuangan menjadi salah satu agenda utama ASEAN untuk menjadikan kawasan ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Digitalisasi sektor keuangan dianggap sebagai sarana penting untuk meningkatkan inklusi keuangan.

Literasi keuangan yang kuat juga diakui sebagai elemen kunci untuk memastikan pemanfaatan produk dan layanan keuangan yang aman. Oleh karena itu, inklusi dan literasi keuangan digital menjadi agenda prioritas di ASEAN. Sebab, digitalisasi di sektor keuangan berkembang pesat di ASEAN, tetapi belum diiringi literasi yang memadai.

Untuk mengatasi tantangan inklusi dan literasi keuangan digital di ASEAN, Bank Indonesia menginisiasi penyusunan

Pedoman Implementasi untuk Memperkuat Literasi Keuangan Digital di ASEAN dan penyelenggaraan Digital Financial Inclusion (DFI) Festival.

Penyusunan Pedoman implementasi dan penyelenggaraan Festival DFI dilakukan melalui kolaborasi dengan pihak internal dan eksternal Bank Indonesia. Tujuan utamanya memberikan panduan dan referensi bagi pengambil kebijakan di negara anggota ASEAN untuk menyusun strategi dan kebijakan terkait dengan literasi keuangan guna mendorong inklusi keuangan digital yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

Selanjutnya, negara anggota ASEAN didorong untuk menerapkan Pedoman Implementasi di negara masing-masing guna menguatkan literasi keuangan digital di ASEAN.

Akselerasi Inklusi Keuangan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi ASEAN

ASEAN merupakan salah satu kawasan dengan pertumbuhan tercepat dan paling dinamis di dunia. Kawasan berpenduduk 630 juta orang dan kelas menengah yang terus berkembang itu memiliki sektor usaha kecil menengah (UKM) dinamis, yang menyumbang 50-80 persen tenaga kerja di ASEAN dan 96 persen perusahaan di kawasan ini⁶.

Namun, pertumbuhan dan pembangunan di ASEAN tidak menjamin kesempatan yang sama bagi semua orang untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, memastikan kemajuan integrasi ekonomi dan keuangan yang sejalan dengan peningkatan inklusi keuangan menjadi salah satu prioritas di ASEAN.

Inklusi keuangan adalah kondisi dengan ketersediaan akses dan penggunaan berbagai produk dan layanan keuangan formal berkualitas, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat⁷. Produk dan layanan ini meliputi akun transaksi/pembayaran, tabungan, kredit, asuransi, dan investasi. Inklusi keuangan ditingkatkan untuk mengurangi jumlah masyarakat *unbanked/underserved* atau yang belum memiliki atau yang memiliki keterbatasan pada akses terhadap lembaga keuangan formal.

⁶ ASEAN Guidance Note on National Financial Inclusion Strategy (2017)

⁷ Definisi inklusi keuangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Inklusi keuangan merupakan komponen penting dalam proses inklusi sosial dan ekonomi. Inklusi keuangan berperan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Produk dan layanan keuangan memungkinkan pemiliknya menyimpan, mengirim, dan menerima uang dengan aman dan terjangkau untuk kebutuhan sehari-hari. Termasuk pula merencanakan keadaan darurat dan berinvestasi produktif untuk masa depan, seperti di bidang kesehatan, pendidikan, dan bisnis. Inklusi keuangan dapat memberdayakan masyarakat dan komunitas untuk memenuhi kebutuhan dasar. Selama krisis, seperti saat pandemi, inklusi keuangan berperan penting membantu masyarakat mempersiapkan, merespons, dan pulih dari guncangan ekonomi.

Untuk memastikan inklusi keuangan dapat secara maksimal mendorong masyarakat mencapai kesejahteraan melalui penggunaan produk dan layanan keuangan secara optimal, dibutuhkan literasi keuangan yang mumpuni. Kombinasi kesadaran, pengetahuan, kemampuan, sikap, dan perilaku diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang tepat, yang pada akhirnya mencapai kesejahteraan keuangan individu.

Dengan literasi yang baik, individu memiliki kemampuan merencanakan keuangan serta mengetahui informasi terkait pilihan produk dan jasa keuangan, termasuk penyedia dan keamanannya. Dengan demikian, dapat terhindar dari kejahatan, dapat memilih dan memanfaatkan produk yang sesuai dengan kebutuhan, serta mengetahui hak dan kewajibannya. Ketika masyarakat memiliki literasi keuangan yang baik, maka efektivitas penggunaan produk dan layanan keuangan akan meningkat.

Pada 2015, ASEAN menghadapi tantangan yang mendesak, yaitu terdapat 265 juta atau 44 persen orang dewasa di ASEAN yang belum memiliki rekening bank di lembaga keuangan formal (*unbanked*). Perkembangan diskusi di forum global mengakui, inklusi keuangan berperan penting untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta mendorong kesejahteraan.

Peran penting inklusi keuangan juga dipertegas dalam Tujuan

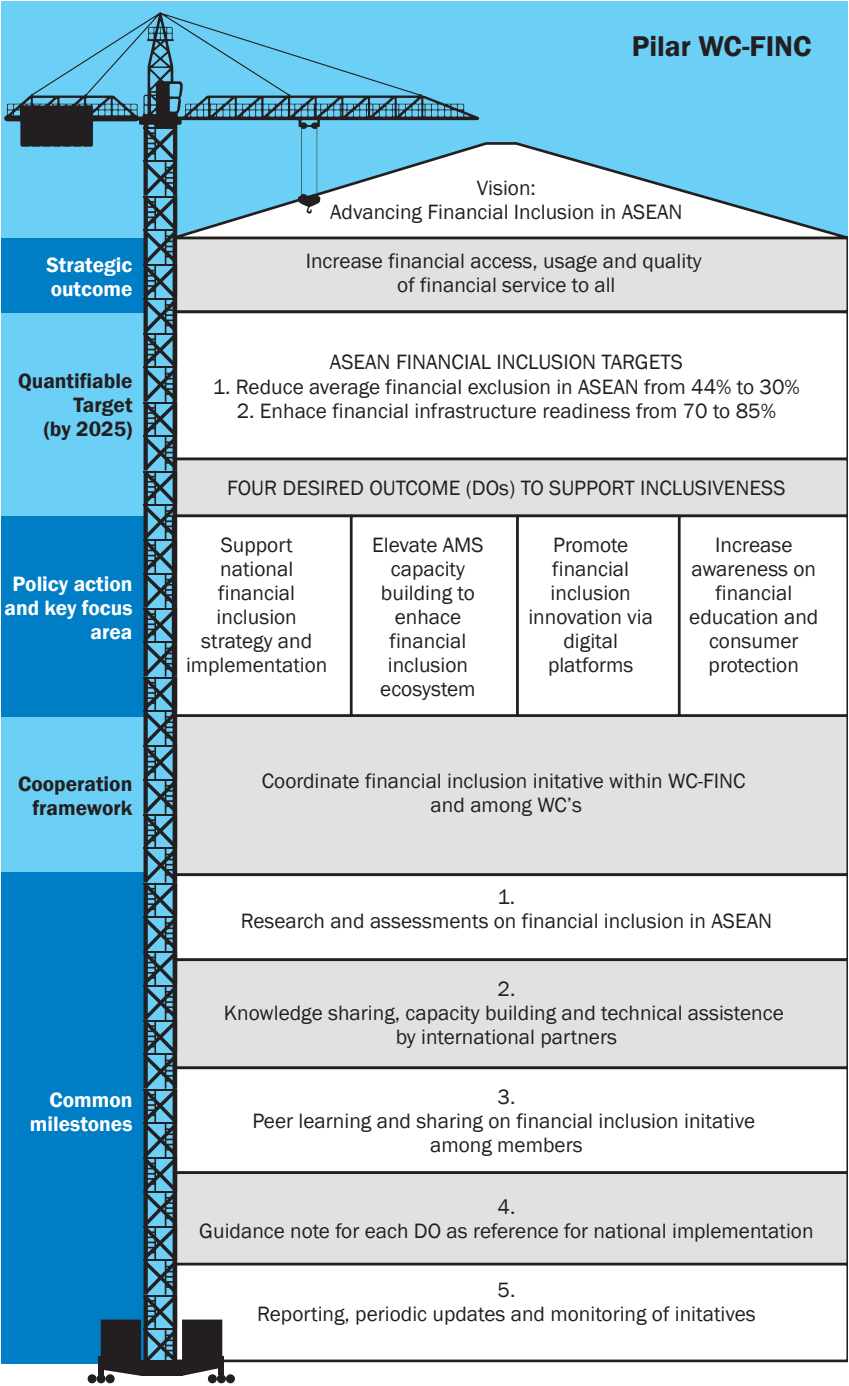
Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang menjadikan inklusi keuangan sebagai *enablers* untuk mencapai beberapa tujuan SDGs. Inklusi keuangan berhubungan erat dengan pemberdayaan. Dengan memberdayakan individu dan usaha untuk mengembangkan peluang ekonomi, inklusi keuangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif.

Inklusi keuangan penting dalam mempercepat integrasi keuangan dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Maka, ASEAN Finance Ministers and Central Banks Governors Meeting (AFMGM) pada 21 Maret 2015 menyepakati, inklusi keuangan harus menjadi prioritas kebijakan untuk ASEAN. Inklusi keuangan menjadi salah satu elemen ASEAN Economic Community Blueprint, yang memastikan sektor keuangan inklusif dan stabil sebagai salah satu tujuan utama integrasi ekonomi regional.

Inklusi keuangan yang meningkat akan mendorong pengiriman uang lintas negara sehingga mendukung mobilitas tenaga kerja regional. Peningkatan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk perdagangan dan investasi Lintas Negara memungkinkan UMKM mendapatkan keuntungan dari akses pasar yang lebih luas.

Selanjutnya, AFMGM mengesahkan pembentukan komite kerja untuk membahas dan mengoordinasikan inisiatif guna meningkatkan inklusi keuangan di ASEAN, yaitu Working Committee on Financial Inclusion (WC-FINC). WC-FINC mempertimbangkan opsi kebijakan dan mengoordinasikan upaya bersama dalam meningkatkan inklusi keuangan di ASEAN dengan melibatkan pemangku kepentingan. WC-FINC juga berperan sebagai wadah bagi kemitraan strategis dengan organisasi atau mitra internasional untuk kegiatan penelitian dan program peningkatan kapasitas.

WC-FINC memiliki visi memfasilitasi negara-negara ASEAN mewujudkan Asia Tenggara sebagai kawasan dengan inklusi keuangan yang maju sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengentaskan orang miskin, dan mengurangi kesenjangan pendapatan. Misi WC-FINC adalah mempertimbangkan kebijakan yang tepat, melibatkan pemangku kepentingan, dan koordinasi dalam meningkatkan inklusi keuangan ASEAN. Bank Indonesia sebagai *Co-Chairs* pertama WC-FINC bersama Bank Negara Malaysia berperan penting dalam meletakkan fondasi penyusunan rencana strategis WC-FINC.



Sumber: Measuring Progress Financial Inclusion in Selected ASEAN Countries, 2022 (UNDCF, 2023)

Gambar 6.1 Pilar WC-FINC.

WC-FINC menetapkan empat *Desired Outcomes* (DO) untuk mencapai visinya, yaitu strategi inklusi keuangan nasional dan rencana implementasinya serta pembangunan kapasitas untuk meningkatkan ekosistem inklusi keuangan. Visi berikutnya adalah inklusi keuangan yang inovatif melalui platform digital serta strategi, kebijakan, dan inisiatif untuk meningkatkan edukasi, literasi keuangan, dan perlindungan konsumen.

Untuk mengukur pencapaian visi, WC-FINC menetapkan target *key performance indicator* (KPI), yaitu tingkat eksklusi keuangan dengan target maksimum 30 persen pada 2025 dan kesiapan infrastruktur inklusi keuangan dengan target minimum 85 persen pada 2025. Pada masa *Co-Chairmanship* Bank Indonesia dan National Bank of Cambodia pada 2020-2022, ASEAN mencapai target tingkat eksklusi keuangan tersebut. Adapun target *financial inclusion infrastructure readiness* tercapai pada masa *Co-Chairmanship* Monetary Authority of Singapore dan Bank of Lao PDR yang berjalan sejak 2022.

Per Juni 2023, KPI WC-FINC mencapai 21,8 persen untuk tingkat eksklusi keuangan dan 85,57 persen untuk kesiapan infrastruktur inklusi keuangan. Hal ini menunjukkan upaya positif ASEAN mendorong inklusi keuangan sejak terbentuknya WC-FINC pada 2015 hingga kini.

Berbagai *deliverables* diterbitkan WC-FINC sesuai Rencana Aksi Strategis (*Strategic Action Plan/SAP*) untuk tiap-tiap DO, antara lain *Guidance Note on National Financial Inclusion Strategy*, *Guidance Note on Digital Financial Services*, dan *Guidance Note on Financial Education and Consumer Protection*. Diterbitkan juga *Guidance Note on Developing a Monitoring and Evaluation for Financial Inclusion*, *Policy Note on Digital Financial Literacy*, dan *Laporan Perkembangan Inklusi Keuangan di ASEAN pada 2020-2022*.

Penyusunan *deliverables* WC-FINC bekerja sama dengan mitra pembangunan, di antaranya Aliansi untuk Inklusi Keuangan (*Alliance for Financial Inclusion/AFI*), Dana Pembangunan Modal PBB (*UN Capital Development Fund/UNCDF*), dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (*Organization for Economic Cooperation and Development/OECD*).

Inklusi keuangan merupakan bagian dari langkah bersama ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia atau *epicentrum of growth*.

Pada periode *Co-Chairmanship* Bank Indonesia di WC-FINC, Bank Indonesia berhasil membawa agenda penting meningkatkan inklusi keuangan yang lebih selaras dengan upaya peningkatan inklusi ekonomi. Keberhasilan ini didukung penyusunan *ASEAN Monitoring Progress: Financial Inclusion in Selected ASEAN Countries 2021*.

Bank Indonesia bekerja sama dengan UNCDF mendorong ASEAN untuk melihat pentingnya meningkatkan inklusi keuangan yang selaras dengan peningkatan inklusi ekonomi. Ditilik pula respons negara ASEAN terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap akselerasi inklusi keuangan digital.

Topik inklusi keuangan di era digital berkaitan erat dengan sistem pembayaran dan UMKM. Sistem dan layanan pembayaran ritel yang terdiri dari berbagai sistem dan platform, produk, dan layanan terkait pembayaran memungkinkan perusahaan, individu, pemerintah, dan agen ekonomi lain mentransfer uang tanpa harus menggunakan uang tunai. Pengaruh pembayaran digital semakin besar pada perumusan dan implementasi strategi inklusi keuangan nasional (NFIS) di banyak negara, sekaligus mendukung kemajuan industri jasa pembayaran.

Di sisi lain, akses keuangan bagi UMKM sebagai pelaku usaha yang mendominasi di negara ASEAN merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya inklusi keuangan di suatu negara. Oleh karena itu, pembahasan inklusi keuangan di WC-FINC senantiasa diselaraskan dan terkait dengan *sectoral buddies* lainnya di ASEAN, yaitu The ASEAN Working Committee on Payment and Settlement Systems (WC-PSS) serta ASEAN Coordinating Committee on Micro Small and Medium Enterprises (ACCMSME).

Menurut Lyman dan Lauer (2015), inklusi keuangan digital menyediakan akses layanan formal kepada masyarakat yang belum memperoleh akses terhadap sektor keuangan dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti ponsel pintar. Lalu, bagaimana pengaruh inklusi keuangan digital terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah negara?

Beberapa kajian telah mengeksplorasi, inklusi keuangan digital dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Penelitian Khera *et al.* (2021) terhadap 52 negara berkembang menemukan, inklusi keuangan digital yang didukung akses infrastruktur, literasi keuangan dan digital, serta kualitas institusi mampu mendorong

pertumbuhan ekonomi negara. Efek positif inklusi keuangan digital juga didukung hasil penelitian (Ozturk dan Ullah, 2022) dengan contoh 42 negara anggota satu Inisiatif Satu Sabuk dan Jalan (*One Belt Road Initiative*/OBRI, termasuk Indonesia).

Tay *et al.* (2022) juga menemukan negara berkembang, khususnya negara-negara Asia, mendukung dan mendorong inklusi keuangan digital dalam rangka mengurangi kemiskinan. Secara garis besar dapat disimpulkan, inklusi keuangan digital berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah negara.

Platform digital memberi masyarakat akses keuangan, pasar, dan solusi digital lain yang lebih luas. Pandemi Covid-19 mengatalisasi dan mempercepat transformasi layanan keuangan melalui pemanfaatan digitalisasi.

Studi Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) menunjukkan, setelah pandemi, tren digitalisasi layanan keuangan lebih besar akan tetap ada. Penggunaan layanan keuangan digital, termasuk pembayaran digital, diindikasikan menjadi salah satu kontributor peningkatan inklusi keuangan di ASEAN.

Survei Bank Dunia, Global Findex 2021, menunjukkan peningkatan penggunaan layanan keuangan digital, khususnya pembayaran digital, yakni dua pertiga orang dewasa di dunia telah melakukan atau menerima pembayaran digital. Di negara berkembang, kecuali China, 40 persen orang yang melakukan pembayaran digital merupakan pengguna pertama yang melakukan pembayaran digital di masa pandemi.

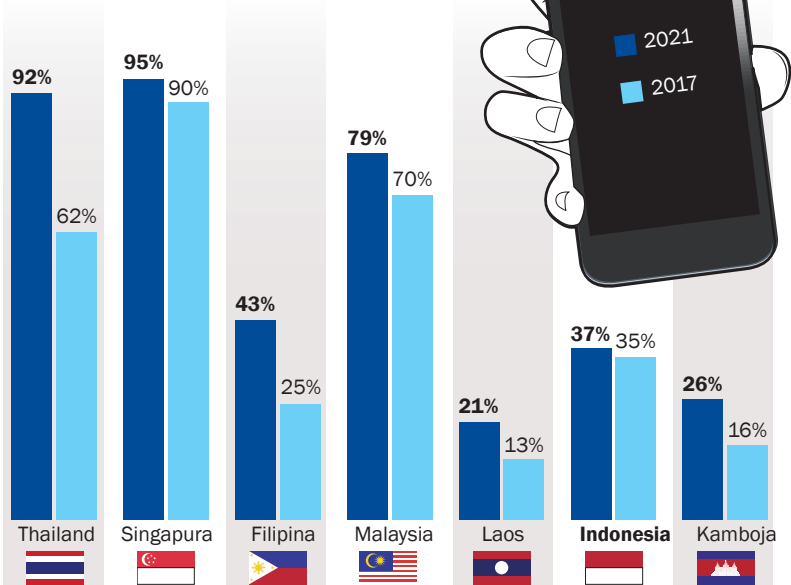
Berdasarkan survei tersebut, penggunaan pembayaran digital di sebagian besar perekonomian ASEAN meningkat. Survei juga menunjukkan, sebagian besar orang yang membayar secara digital merupakan pengguna pertama yang membayar secara digital di awal pandemi.

Untuk mendukung inklusi keuangan digital, pembuat kebijakan dan regulator di negara ASEAN juga berupaya mengembangkan ekosistem layanan keuangan digital dengan memperkenalkan berbagai pendekatan inovatif. Pendekatan inovatif tersebut di antaranya *regulatory sandbox*, *innovation desk*, dan peraturan baru terkait sistem pembayaran, penghimpunan dana, dan jenis layanan keuangan digital lainnya (AFI & WC-FINC, 2021).

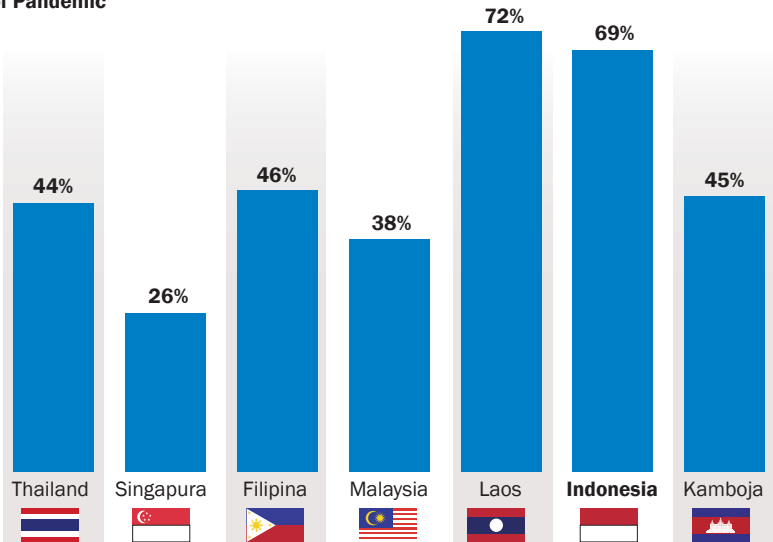
Tren Penggunaan Pembayaran Digital

Usage of Digital Payments

(%of adults 15+ who made or receive digital payments)



Made Digital Merchant Payment for the First Time in the Start of Pandemic



Sumber: Global Findex Database 2021 (Demirgüç-Kunt et al., 2022)

Gambar 6.2 Tren Penggunaan Pembayaran Digital.

Melalui upaya negara anggota ASEAN, berbagai kemajuan diraih, salah satunya terlihat dari tingkat inklusi keuangan negara anggota ASEAN secara regional yang mencapai 78,2 persen. Angka ini dilaporkan pada pertemuan ke-16 WC-FINC pada 7 Juli 2023.

Layanan keuangan digital berpotensi mendukung inklusi keuangan yang lebih besar di negara anggota ASEAN. Caranya dengan menyediakan jenis layanan keuangan baru, meningkatkan kemudahan dan efisiensi pembayaran, menurunkan biaya, dan mempercepat transaksi.

Digitalisasi produk dan layanan keuangan juga menawarkan peluang untuk menginklusikan kelompok yang kurang terlayani dalam sistem keuangan di negara ASEAN, seperti penduduk perdesaan, usaha mikro, dan perempuan.

Namun, percepatan digitalisasi juga dapat meningkatkan risiko eksklusi keuangan serta risiko dan tantangan lain seperti eksposur yang lebih besar terhadap penipuan, pencurian data, atau kesalahan konsumen. Risiko ini terutama jika konsumen kurang memiliki literasi digital atau keuangan.

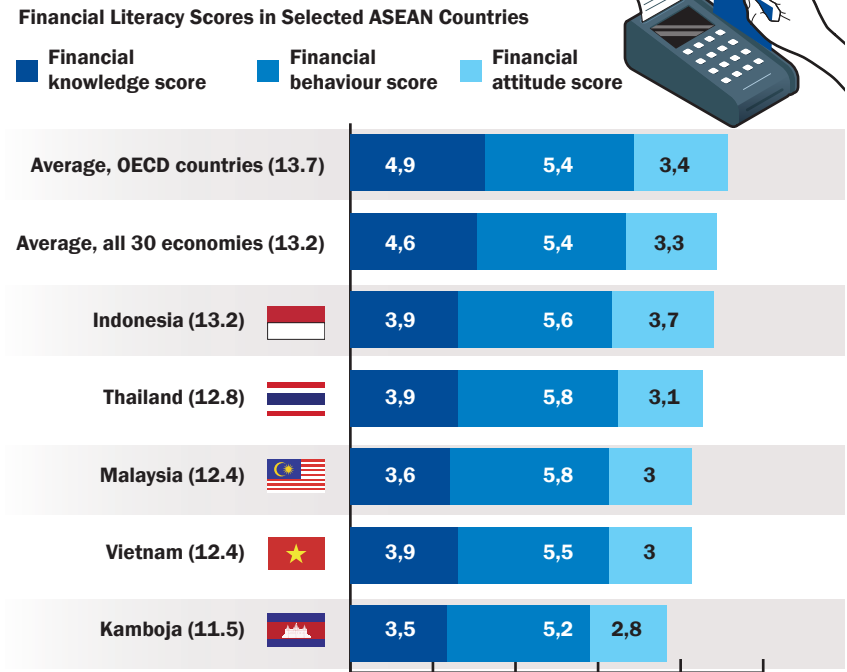
Seiring dengan perkembangan teknologi digital, produk dan layanan keuangan bagi konsumen semakin kompleks dan beragam. Oleh karena itu, literasi keuangan digital dapat mendukung pengguna layanan keuangan digital mengambil keputusan yang tepat dalam memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Pada akhirnya, hal ini mendukung kesejahteraan finansial pengguna (OECD, 2021).

Inisiatif ASEAN dalam Memperkuat Inklusi dan Literasi Keuangan Digital

Literasi keuangan dan digital dibutuhkan agar manfaat inisiatif keuangan digital dapat dirasakan masyarakat di negara-negara ASEAN. Penting untuk memastikan percepatan inklusi keuangan melalui ekonomi digital bersifat inklusif dan dapat menjangkau semua segmen, pelaku termasuk UMKM, sektor informal, perempuan, dan pemuda.

Literasi keuangan digital (*digital financial literacy/DFL*) berperan mengatasi tantangan yang muncul seiring arus digitalisasi di sektor keuangan yang cepat. Dengan demikian, konsumen bisa berinteraksi dengan ekosistem keuangan digital yang semakin kompleks secara lebih baik dan aman.

Perbandingan Tingkat Inklusi Finansial di ASEAN



Sumber: OECD (2018)

Gambar 6.3 Perbandingan Tingkat Inklusi Finansial di ASEAN.

DFL merupakan konsep yang cukup baru dan belum ada definisi formal yang ditetapkan. Menurut AFI dan WC-FINC (2021), DFL umumnya dikaitkan dengan dua konsep, yaitu literasi keuangan dan literasi digital.

Konsep DFL terdiri dari kesadaran/pengetahuan tentang layanan keuangan digital dan kompetensi untuk memanfaatkan layanan keuangan digital yang relevan secara mandiri atau sesuai kebutuhan. Selain itu, kesadaran/pengetahuan mengenai risiko seputar layanan keuangan digital dan kompetensi untuk memitigasi risiko dalam penggunaan layanan. Terakhir, konsep DFL berupa kesadaran/pengetahuan mengenai perlindungan konsumen.

Negara anggota ASEAN menyadari, inklusi keuangan perlu dibarengi dengan literasi keuangan yang memadai. Namun, saat ini

hanya 5 dari 10 negara anggota ASEAN yang memiliki strategi edukasi atau literasi keuangan nasional (Laporan *Desired Outcome 1* WC-FINC, 2023).

Adapun tingkat literasi keuangan di negara-negara ASEAN masih relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara maju seperti anggota OECD dan masih sangat perlu ditingkatkan (OECD, 2018). Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk mendorong literasi keuangan digital di ASEAN.

Bank Indonesia pada Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 fokus pada upaya meningkatkan inklusi dan literasi keuangan digital dengan membawa agenda penguatan Inklusi Keuangan Digital (*Digital Financial Inclusion/DFI*) dan DFL di ASEAN melalui dua *output* konkret yang menjadi bagian dari PEDs ASEAN 2023 di bidang ekonomi digital. *Output* konkret itu adalah penyusunan *Implementation Guideline to Strengthen Digital Financial Literacy in ASEAN* atau Pedoman Implementasi untuk Memperkuat Literasi Keuangan Digital di ASEAN yang sejalan dengan warisan Presidensi G20 Indonesia pada 2022 dan penyelenggaraan Festival DFI.

Perluasan akses keuangan melalui kanal digital dan peningkatan literasi keuangan juga merupakan salah satu langkah utama mendorong inklusi keuangan sebagaimana tercantum dalam ASEAN Economic Community Blueprint 2025.

Dalam cetak biru tersebut, langkah yang perlu dilakukan ASEAN untuk meningkatkan inklusi keuangan antara lain meningkatkan ekosistem keuangan di kawasan, khususnya untuk UMKM. Langkah lain adalah memperluas akses dan literasi keuangan. Hal tersebut dilakukan antara lain melalui digitalisasi untuk meningkatkan jangkauan layanan keuangan serta peningkatan saluran diskusi di ASEAN untuk mengembangkan praktik terbaik, bertukar informasi, dan memperkuat kerja sama dalam rangka peningkatan literasi keuangan.

Selain itu, perluasan akses dan literasi keuangan juga dilakukan melalui intensifikasi pelaksanaan program edukasi keuangan dan perlindungan konsumen untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan masyarakat serta mendorong penggunaan jasa keuangan yang aman.

Pedoman Implementasi untuk Memperkuat Literasi Keuangan Digital di ASEAN

Seiring dengan pertumbuhan penggunaan layanan keuangan digital di negara anggota ASEAN, terdapat urgensi untuk memastikan setiap individu memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memilih dan menggunakan layanan keuangan digital secara tepat dan aman. Literasi keuangan digital berperan dalam mendukung penggunaan layanan keuangan digital yang tepat dan aman, memperkuat ketahanan keuangan, mendukung kesejahteraan keuangan, serta mengatasi tantangan kelompok yang lebih rentan.

Untuk memperkuat inklusi keuangan dan literasi keuangan digital, pembuat kebijakan di negara anggota ASEAN perlu meningkatkan kapasitas negaranya dalam memformulasikan strategi inklusi dan edukasi keuangan secara nasional, khususnya pada era digital.

Perluasan akses dan literasi keuangan juga dilakukan melalui intensifikasi edukasi keuangan dan perlindungan konsumen.

Bank Indonesia menginisiasi penyusunan Panduan Implementasi untuk Penguatan Literasi Keuangan Digital sebagai agenda prioritas ekonomi (*Priority Economic Deliverables/ PEDs*) Indonesia di ASEAN 2023. Penyusunan Pedoman ini dilakukan bersama negara

anggota ASEAN dan bekerja sama dengan OECD.

Panduan implementasi ini melengkapi dan memperkuat laporan atau produk WC-FINC yang telah disusun sebelumnya, yaitu *Guidance Note on Financial Education and Consumer Protection* yang dikembangkan pada 2018 serta *Policy Note on Digital Financial Literacy* yang dikembangkan pada 2021. Penyusunan panduan implementasi ini sejalan dengan produk yang dihasilkan pada Presidensi G20 Indonesia 2022, yaitu panduan implementasi terkait prinsip-prinsip inklusi keuangan digital, yang di dalamnya mencakup literasi keuangan digital.

Penyusunan Pedoman Implementasi untuk Memperkuat Literasi Keuangan Digital di ASEAN (selanjutnya disebut "Pedoman

Implementasi”) disusun untuk mengatasi tantangan yang muncul terkait inklusi keuangan digital dan memanfaatkan potensi literasi keuangan digital melalui penguatan strategi peningkatan literasi keuangan digital di ASEAN.

Pedoman Implementasi merupakan panduan implementatif bagi pembuat kebijakan di negara anggota ASEAN. Pedoman ini memperkuat literasi keuangan digital guna mendorong inklusi keuangan digital, inklusi ekonomi, dan resiliensi keuangan.

Bank Indonesia berperan penting menginisiasi dan memimpin penyusunan Panduan Implementasi dalam penguatan inklusi keuangan dan literasi keuangan digital melalui kolaborasi bersama OECD.

Tujuan Pedoman pelaksanaan ini adalah mempromosikan inklusi dan literasi keuangan digital di ASEAN dengan memasukkan aspek-aspek yang relevan dari praktik terbaik internasional, dengan mempertimbangkan kesiapan negara-negara anggota ASEAN. Tujuan lain, meningkatkan inklusi keuangan digital ASEAN untuk mendukung inklusi ekonomi dengan memperkuat literasi keuangan digital.

Pedoman Implementasi ini juga merupakan penyelarasan produk Presidensi G20 Indonesia pada 2022 melalui kelompok kerja Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) yang disesuaikan dengan konteks ASEAN.



KOMPAS/AGUS SUSANTO

Bendera negara-negara ASEAN berkibar di Taman Fatahillah di Kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, Rabu (6/9/2023).

PEDs lainnya adalah penyelenggaraan Festival DFI sebagai bentuk nyata intensifikasi pelaksanaan program edukasi dan peningkatan saluran diskusi di ASEAN terkait topik inklusi dan literasi keuangan digital. Layanan keuangan digital (*digital financial services/DFS*) dapat meningkatkan aksesibilitas, inklusivitas, dan efisiensi dalam ekosistem keuangan di wilayah ASEAN.

Festival DFI bertujuan untuk berbagi informasi terkait kebijakan, praktik terbaik, dan inisiatif dalam mempromosikan inklusi keuangan digital guna mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Festival DFI juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya literasi keuangan digital.

Tujuan Festival DFI sejalan dengan mandat WC-FINC, yaitu sebagai platform berbagi pengalaman dan informasi antarnegara serta memfasilitasi negara anggota ASEAN mengembangkan inklusi keuangan.

Kolaborasi ASEAN dalam Penguatan Literasi Keuangan Digital

Dengan dukungan negara anggota dan mitra kerja ASEAN, Bank Indonesia memimpin pelaksanaan penyusunan *Implementation Guideline to Strengthen Digital Financial Literacy in ASEAN* atau Pedoman Implementasi untuk Memperkuat Literasi Keuangan Digital di ASEAN dan penyelenggaraan Festival DFI.

i. Pedoman Implementasi untuk Memperkuat Literasi Keuangan Digital di ASEAN

Pedoman Implementasi ini disusun dengan dukungan dari negara anggota ASEAN melalui pelaksanaan pengumpulan data dalam bentuk survei *stocktaking*. Survei ini untuk mengidentifikasi motivasi, pendekatan strategis, dan inisiatif negara anggota ASEAN dalam penguatan literasi keuangan digital, serta kesenjangan dan area perhatian untuk meningkatkan literasi keuangan digital di negara anggota ASEAN.

Survei *stocktaking* diikuti sembilan negara anggota ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui survei *stocktaking* dan riset *desk*, OECD menyusun Pedoman Implementasi yang disesuaikan dengan konteks ASEAN.

Berdasarkan data tersebut, OECD mengidentifikasi empat alasan utama negara anggota ASEAN memperkuat literasi keuangan digital.

Pertama, literasi keuangan digital dibutuhkan untuk mendukung inklusi keuangan digital. Keterbatasan literasi keuangan dan literasi digital serta kepercayaan terhadap layanan keuangan digital yang rendah telah membatasi peningkatan inklusi keuangan digital di beberapa negara anggota ASEAN.

Kedua, terdapat kebutuhan untuk memberdayakan konsumen secara berkelanjutan serta membekali konsumen dengan pengetahuan dan keterampilan agar dapat menggunakan berbagai layanan keuangan digital secara tepat dan aman dalam lanskap keuangan digital yang berkembang cepat.

Ketiga, terdapat kebutuhan untuk mendukung individu dalam memahami hak-hak sebagai konsumen, mengenali potensi risiko, melindungi informasi pribadi, dan menerapkan praktik yang aman saat menggunakan layanan keuangan digital dan platform digital. Kondisi ini dicapai di tengah praktik penipuan dalam layanan keuangan digital yang marak.

Keempat, terdapat kelompok sasaran tertentu seperti petani, masyarakat 3T (tertinggal, terdepan, terluar), UMKM, dan lansia yang memiliki literasi keuangan dan literasi digital terbatas sehingga kesulitan beradaptasi dengan teknologi digital.

Berbagai laporan dan rekomendasi dari organisasi internasional, termasuk OECD dan G20, menekankan, survei dasar dan reguler serta penelitian adalah alat penting untuk menerapkan kebijakan dan program literasi keuangan digital berbasis bukti. Sebagian negara anggota ASEAN telah memasukkan aspek literasi keuangan digital pada survei nasional terkait inklusi dan literasi keuangan.

Adapun Indonesia telah melakukan survei nasional inklusi keuangan secara reguler, yang salah satu aspeknya berupa pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan digital.

Sebagian besar negara anggota ASEAN telah memahami pentingnya literasi keuangan digital dan telah mengambil langkah strategis untuk meningkatkan literasi keuangan digital. Langkah yang dilakukan adalah mengintegrasikan literasi keuangan digital atau sebagian aspeknya ke dalam strategi nasional.

Di Indonesia, Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI)

bertanggung jawab mengoordinasikan dan mengimplementasikan Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Kebijakan dan program literasi keuangan digital telah masuk ke dalam pembahasan pada salah satu kelompok kerja DNKI, yaitu kelompok kerja edukasi keuangan.

Pedoman Implementasi ini juga mengidentifikasi kesenjangan dalam memajukan literasi keuangan digital di ASEAN. Kesenjangan itu antara lain berupa kekurangan data dan bukti kuat tingkat literasi keuangan digital di antara populasi, serta keterbatasan dalam pengembangan pendekatan peningkatan literasi keuangan digital yang strategis dan terkoordinasi.

Terdapat keterbatasan kerangka kerja kompetensi dan potensi program literasi keuangan digital yang dapat dikembangkan, terutama yang menargetkan kelompok rentan sebagai sasaran. Sebagian negara anggota ASEAN belum menilai dan mengevaluasi dampak program yang dilaksanakan.

OECD mengusulkan Pedoman yang dapat dipertimbangkan negara anggota ASEAN dalam memperkuat literasi keuangan digital.

- **Mengumpulkan bukti dan menyusun diagnosis tingkat literasi keuangan digital.**

Hal ini merupakan langkah penting dalam mengembangkan strategi dan intervensi literasi keuangan digital yang baik. Diagnosis juga memerlukan pemahaman tentang penggunaan layanan keuangan digital di seluruh populasi, risiko, dan tantangan bagi konsumen dan UMKM terhadap layanan keuangan digital, kesenjangan pendidikan, dan kebutuhan profil konsumen yang berbeda. Bukti tersebut didapatkan dari pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, yang idealnya dilakukan secara reguler. Negara anggota ASEAN dapat memanfaatkan survei nasional atau internasional dan mempertimbangkan survei literasi keuangan digital ASEAN yang terkoordinasi untuk melacak kemajuan dengan cara yang konsisten dan menjadi tolok ukur satu sama lain.

- **Mengembangkan pendekatan yang terkoordinasi dan strategis untuk memperkuat literasi keuangan digital.**

Banyak pemangku kepentingan terlibat dan lanskap keuangan digital berkembang pesat. Pendekatan strategis terhadap literasi

keuangan digital melalui penguatan posisi literasi keuangan digital di antara prioritas kerangka kerja terkoordinasi dan strategis. Pendekatan lain melalui pengembangan peta jalan nasional atau rencana aksi untuk meningkatkan literasi keuangan digital. Negara anggota ASEAN perlu memastikan pembangunan mekanisme kerja sama yang tepat antarpemangku kepentingan dari sektor publik dan swasta. Diperlukan Pedoman yang relevan dalam keterlibatan pemangku kepentingan untuk memastikan netralitas konten dan mengelola konflik kepentingan.

- **Mengembangkan kerangka kompetensi literasi keuangan digital.**

Caranya dengan menetapkan kompetensi utama—pada level nasional atau ASEAN—yang dibutuhkan konsumen untuk menggunakan layanan keuangan digital dengan aman. Dengan penetapan kompetensi utama, kebijakan dan program literasi keuangan digital dapat ditingkatkan. Hal ini mendukung pengembangan program, penilaian, dan evaluasi pendidikan keuangan.

- **Mengembangkan program efektif untuk meningkatkan literasi keuangan digital.**

Program efektif ini mempertimbangkan kebutuhan, kemampuan, dan preferensi audiens target. Negara anggota ASEAN dapat terus mengembangkan program literasi keuangan digital untuk kelompok sasaran utama. Sasaran utama meliputi kelompok yang kesulitan mengakses atau menggunakan layanan keuangan digital, seperti UMKM, lansia, orang yang tinggal di perdesaan/daerah terpencil, masyarakat berpenghasilan rendah, atau perempuan. Negara anggota ASEAN perlu mempertimbangkan saluran digital dan non-digital terbaik untuk memastikan program sesuai dengan audiens.

- **Memfasilitasi evaluasi program peningkatan literasi keuangan digital.**

Langkah dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan literasi keuangan digital pada kelompok rentan. Menguji coba dan menguji sebelum skala penuh diterapkan, serta menilai dampak dan efektivitas program.

ii. Festival Inklusi Keuangan Digital

Bank Indonesia menggelar Festival Inklusi Keuangan Digital (DFI) sebagai wadah berbagi pengalaman antarnegara dalam mendorong inklusi keuangan digital di tiap-tiap negara anggota ASEAN. Penyelenggaraan Festival DFI sejalan dengan agenda prioritas ekonomi digital dalam Ketekuaan Indonesia di ASEAN 2023, yang salah satunya fokus pada "inklusi keuangan digital mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif".

Festival DFI mengangkat topik utama "Digital Financial Inclusion for Sustained Economic Growth". Dalam festival ini, terdapat berbagai agenda, yaitu simposium internasional, seminar, unjuk bincang, dan pameran inisiatif DFI.

Kegiatan Festival DFI membahas sejumlah hal, yaitu, pertama, literasi keuangan digital sangat penting dalam era modern, pada saat teknologi digital mengubah lanskap keuangan secara drastis. Untuk mencapai inklusi keuangan digital yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, pengambil kebijakan di negara-negara anggota ASEAN perlu mengembangkan strategi literasi keuangan digital yang masif, terstruktur, dan ditargetkan. Hal ini disertai penguatan perlindungan konsumen dan kolaborasi antara pemangku kepentingan guna memastikan manfaat literasi keuangan digital dapat dirasakan secara merata.

Kedua, penyusunan strategi peningkatan literasi keuangan digital sebagai bagian dari strategi nasional perlu mempertimbangkan perumusan kompetensi dasar literasi keuangan digital dan pengukuran tingkat literasi keuangan digital yang setara di ASEAN. Hal ini membantu mengukur kemajuan dan memastikan negara-negara anggota dapat bekerja sama dalam meningkatkan literasi keuangan digital di kawasan.

Ketiga, upaya pengambil keputusan di negara anggota ASEAN dalam menurunkan tingkat kesenjangan inklusi keuangan di perdesaan dan perkotaan, antara lain, melalui strategi implementasi inklusi keuangan. Strategi lain adalah peningkatan kapasitas masyarakat, inovasi layanan keuangan melalui kanal digital, peningkatan literasi keuangan masyarakat, dan perlindungan konsumen.

Keempat, generasi muda perlu memiliki literasi keuangan digital. Aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku yang tepat, antara lain dengan

mempelajari berbagai opsi layanan keuangan digital dengan baik, mendorong kebiasaan menabung, serta pemahaman terkait mengelola keuangan juga perlu dimiliki. Hal ini agar terhindar dari berbagai risiko dan mencapai kesejahteraan keuangan.

Acara simposium, seminar, unjuk bincang, dan pameran selama Festival DFI 2023 diikuti peserta dari berbagai sektor, antara lain pengambil kebijakan, industri, akademisi, organisasi internasional, dan masyarakat umum. Kegiatan ini menjadi sarana berbagi praktik terbaik untuk memperkuat inklusi keuangan digital, media promosi profil ASEAN yang menampilkan inisiatif untuk memperkuat inklusi ekonomi dan keuangan di ASEAN, serta diseminasi kemajuan inisiatif WC-FINC.

Hasil lain dari festival ini adalah pengayaan wawasan otoritas, industri, akademisi, dan organisasi internasional dalam menerapkan dan mengembangkan strategi dan inisiatif inklusi keuangan digital. Selain itu, juga menjadi sarana peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya literasi keuangan digital.



KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberi pidato sambutan saat pembukaan ASEAN Fest 2023 di Jakarta Convention Center, Selasa (22/8/2023).

Capaian dalam Inklusi dan Literasi Keuangan Digital di ASEAN

Dalam rangka meningkatkan inklusi dan literasi keuangan digital, Bank Indonesia telah menyusun Pedoman Implementasi untuk Memperkuat Literasi Keuangan Digital di ASEAN. Bank Indonesia juga sudah menggelar Festival DFI pada masa Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, sebagai warisan Indonesia untuk ASEAN.

Pedoman Implementasi untuk Memperkuat Literasi Keuangan Digital di ASEAN diterima Komite Tingkat Senior (Senior Level Committee/SLC) negara anggota WC-FINC. Pedoman implementasi juga telah dipublikasikan sebagai Pedoman bagi negara anggota ASEAN dalam memperkuat strategi literasi keuangan digital.

Festival DFI pada 22-25 Agustus 2023 menarik minat 5.300 pengunjung dan lebih dari 1.300 peserta. Kebijakan, contoh penerapan, dan inisiatif ASEAN yang ditampilkan dalam Festival DFI diharapkan dapat mendorong inklusi keuangan digital yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Capaian Bank Indonesia pada topik inklusi keuangan dimaksud telah diterima seluruh gubernur bank sentral dan menteri keuangan ASEAN sebagaimana tercatat pada Joint Statement of the 10th AFMGM, 25 Agustus 2023. Pernyataan bersama menyebutkan, AFMGM mengapresiasi upaya WC-FINC pada masa keketuaan ASEAN dalam meningkatkan inklusi dan literasi keuangan digital.

AFMGM menyambut baik progres inisiatif WC-FINC, antara lain penyelesaian Pedoman Implementasi untuk Memperkuat Literasi Keuangan Digital di ASEAN dan kesuksesan penyelenggaraan Festival DFI secara paralel dengan the 10th AFMGM di Jakarta.

Selain menyusun Pedoman implementasi dan pelaksanaan Festival DFI, pada 2023 WC-FINC juga menjalankan program prioritas dan inisiatif untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan digital di ASEAN. Program tersebut, pertama, menyusun perangkat kebijakan untuk meningkatkan penggunaan pembayaran digital dan inklusi keuangan digital pada UMKM.

Program kedua, pengembangan platform untuk pertukaran informasi, praktik terbaik, dan pengalaman negara anggota terkait layanan keuangan digital untuk mendukung UMKM. Ketiga, menyusun studi terkait interoperabilitas pengenalan digital sebagai katalis pada inklusi keuangan di ASEAN. Keempat, laporan pemantauan inklusi

keuangan di ASEAN dengan fokus pembiayaan UMKM pada ekonomi digital.

Langkah ke Depan

Negara anggota ASEAN terus berkolaborasi untuk melanjutkan peningkatan inklusi keuangan di ASEAN, khususnya peningkatan kesiapan infrastruktur pendukung inklusi keuangan. Infrastruktur pendukung fisik dan nonfisik berperan penting dalam memfasilitasi peningkatan inklusi keuangan berkualitas.

Infrastruktur fisik melibatkan jaringan dan layanan keuangan yang diperlukan individu, terutama di daerah terpencil atau perdesaan, untuk mengakses layanan keuangan. Di sisi lain, infrastruktur nonfisik melibatkan pengembangan sistem peraturan dan kebijakan yang mendukung inklusi keuangan, infrastruktur teknologi informasi yang aman dan andal, serta pendidikan dan literasi keuangan yang efektif bagi masyarakat. Kualitas infrastruktur nonfisik berperan sentral dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan layanan keuangan digital yang aman dan inovatif.

Kombinasi infrastruktur fisik dan nonfisik yang kuat akan membantu mengatasi berbagai hambatan yang mungkin dihadapi individu dalam mengakses dan menggunakan layanan keuangan, memastikan keamanan transaksi, serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait manfaat dan risiko keuangan.

Untuk mendukung inklusi keuangan berkualitas di tengah perkembangan pesta inovasi digital, diharapkan negara anggota ASEAN dapat mengimplementasikan Pedoman Implementasi untuk Memperkuat Literasi Keuangan Digital di ASEAN sehingga strategi literasi keuangan digital di negara anggota ASEAN dapat dilaksanakan secara masif, terstruktur, dan ditargetkan.

Sebagai tindak lanjut penerapan Pedoman Implementasi, sangat penting bagi negara anggota ASEAN mendefinisikan kerangka kompetensi literasi keuangan digital di tingkat nasional dan ASEAN untuk pemanfaatan layanan keuangan digital secara tepat dan aman. Penetapan kerangka kompetensi untuk literasi keuangan digital dapat mendukung pengembangan program pendidikan keuangan yang disesuaikan dengan kelompok target serta menjadi faktor penting dalam metode pemantauan dan evaluasi.

Dalam pengembangan kerangka kompetensi nasional atau ASEAN, negara anggota ASEAN perlu mempertimbangkan faktor budaya, agama, dan sosial-ekonomi, khusus untuk wilayah dan negara masing-masing. Oleh karena itu, kerangka kompetensi bagi masyarakat umum dan kelompok target tertentu perlu disusun berdasarkan data dan riset.

Pengumpulan data terkait literasi keuangan digital juga menjadi hal yang krusial dalam pengembangan strategi literasi keuangan digital di negara anggota ASEAN. Negara anggota ASEAN dapat mengembangkan survei nasional atau memanfaatkan hasil survei internasional yang tersedia untuk mempelajari tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan digital.

Beberapa negara anggota ASEAN telah menunjukkan progres yang baik dalam penguatan literasi keuangan digital. Seluruh anggota ASEAN memanfaatkan WC-FINC secara optimal sebagai wadah untuk berbagi ilmu, pengalaman, dan praktik yang baik. Tujuannya, saling mendukung peningkatan inklusi keuangan di ASEAN agar mengakselerasi penguatan literasi keuangan di kawasan ASEAN.

Kolaborasi Bank Indonesia dengan Organisasi Internasional untuk Mendorong Inklusi Keuangan Digital

Dalam menjalankan agenda inklusi keuangan di ASEAN, negara anggota ASEAN berkolaborasi dengan berbagai organisasi internasional yang ahli di bidang inklusi keuangan. Dukungan organisasi internasional antara lain diberikan oleh Bank Dunia, Alliance for Financial Inclusion (AFI), dan United Nations Capital Development Fund (UNCDF). Lembaga-lembaga tersebut telah bekerja sama dengan negara anggota ASEAN secara bilateral dan berperan sebagai mitra kerja ASEAN WC-FINC dalam menyusun dan menjalankan program prioritas dan inisiatif yang dicanangkan WC-FINC.

Kerja sama dengan Bank Dunia menghasilkan laporan

Advancing Digital Financial Inclusion in ASEAN: Policy and Regulatory Enablers. Adapun kerja sama dengan AFI menghasilkan laporan *Policy Note on Digital Financial Literacy*. Sementara kerja sama dengan UNCDF menghasilkan *Guidance Note on Developing a Monitoring and Evaluation for Financial Inclusion* dan *Laporan Perkembangan Inklusi Keuangan di ASEAN 2020-2022*.

Dalam peran meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, Bank Indonesia juga didukung organisasi internasional. Organisasi internasional yang kredibel dan memiliki keahlian di bidang tersebut diyakini dapat memberikan rekomendasi implementatif dan konstruktif. Rekomendasi itu disampaikan dengan mempertimbangkan hasil penelitian serta data dan informasi dari berbagai negara.

Pada Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, Bank Indonesia berkolaborasi dengan OECD menyusun Pedoman Implementasi untuk Memperkuat Literasi Keuangan Digital di ASEAN. Pedoman Implementasi itu sebagai bagian dari pelaksanaan agenda ekonomi prioritas (PEDs) Keketuaan ASEAN 2023 dan prioritas tahunan WC-FINC 2023. Selain terlibat dalam penyusunan Pedoman, OECD juga berpartisipasi pada rangkaian kegiatan Festival Inklusi Keuangan Digital (DFI) pada 22-25 Agustus 2023 sebagai pembicara dan moderator dalam seminar serta peserta pameran.

Dalam Festival DFI, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan materi edukasi layanan keuangan digital yang merupakan bentuk pendampingan teknis dari Bank Dunia. Praktiknya, Bank Dunia memberikan konsultasi kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam menyusun materi edukasi layanan keuangan digital. Materi edukasi ini diharapkan dapat mendorong kesadaran publik terkait layanan keuangan digital, memberikan pemahaman kepada publik perihal manfaat dari layanan keuangan digital, dan mendorong publik untuk mengadopsi layanan keuangan digital secara aman.

Melalui pendampingan teknis ini, telah disusun 48 materi edukasi berupa selebaran elektronik, buku elektronik, komik, dan video. Materi edukasi ini akan didiseminasikan melalui kanal telekomunikasi digital, media sosial, dan kanal lainnya milik Bank

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan penyedia layanan jasa keuangan.

Materi edukasi menargetkan pengguna layanan keuangan tradisional, pengguna pasif layanan keuangan digital, dan calon potensial pengguna layanan keuangan digital di tengah penetrasi telepon seluler yang tinggi sehingga dapat dijangkau melalui media sosial dan komunikasi digital lainnya.

Bank Dunia juga memberikan pendampingan teknis kepada Bank Indonesia berupa penyusunan Modul Pelatihan Pengenalan dan Penggunaan Layanan Keuangan Digital untuk UMKM.

UMKM merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia dan berperan penting dalam mendukung upaya pemerintah menciptakan lapangan kerja, menanggulangi kemiskinan, dan mempercepat inklusi keuangan. Oleh karena itu, penyampaian informasi hingga pendampingan yang tepat dapat membantu pelaku usaha memanfaatkan peluang digitalisasi di sektor keuangan secara maksimal.

Modul pelatihan ini memberikan pengetahuan dasar tentang keberadaan dan manfaat layanan keuangan digital serta cara menggunakan layanan keuangan digital untuk menunjang pengembangan dan keberlangsungan UMKM. Modul berfungsi sebagai panduan dalam pelatihan dan pendampingan bagi UMKM yang dapat digunakan Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia serta semua pihak yang berkepentingan.

Modul pelatihan ini terdiri dari panduan dan materi ajar yang berkaitan dengan pengenalan rekening transaksi dan layanan keuangan digital, pembukaan dan penggunaan rekening transaksi dan layanan keuangan digital, serta *onboarding* sebagai *merchant* QRIS. Panduan juga terkait dengan pengenalan dan *onboarding* penjualan daring serta pengenalan layanan keuangan digital lainnya seperti *peer-to-peer lending*.

Partisipasi organisasi internasional seperti OECD dan Bank Dunia pada Festival DFI telah memfasilitasi pembuat kebijakan di negara anggota ASEAN untuk bertukar informasi terkait inisiatif inklusi dan literasi keuangan digital. Pertukaran informasi ini

juga dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya inklusi dan literasi keuangan digital dalam menumbuhkan ekonomi berkelanjutan.

Hal itu terlihat dari ketertarikan negara anggota ASEAN dalam mempelajari Modul Pelatihan Pengenalan dan Penggunaan Layanan Keuangan Digital untuk UMKM yang diluncurkan pada Festival DFI. Mempertimbangkan antusiasme tersebut, modul pelatihan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris agar dapat digunakan negara lain dan bermanfaat dalam meningkatkan literasi keuangan digital pada UMKM.



BAB 7

Keuangan Berkelanjutan dalam Mewujudkan Pembangunan ASEAN



KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Peluncuran proyek keketuaan ASEAN-Business Advisory Council Indonesia dalam ASEAN Business and Investment Summit 2023 di Jakarta, Senin (4/9/2023).

Keberlanjutan atau sustainability merupakan salah satu dari tiga pilar agenda ekonomi prioritas (priority economic deliverables/ PEDs) dalam keketuaan ASEAN 2023. Komitmen ASEAN terhadap keberlanjutan menjadi fokus utama di tengah urgensi perubahan iklim global.

ASEAN telah mengadopsi berbagai inisiatif, rencana aksi, dan kerangka kerja yang menekankan pentingnya pelestarian lingkungan dan adaptasi perubahan iklim. Berbagai forum dan agenda ASEAN 2023 telah membahas pilar keuangan berkelanjutan.

Dalam mendukung keuangan berkelanjutan, negara-negara anggota ASEAN melalui ASEAN Taxonomy Board (ATB) telah merumuskan *ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance* versi kedua yang melengkapi versi pertama, dengan memasukkan aspek sosial. Hal itu dimaksudkan untuk mengklasifikasikan

kegiatan hijau dan transisi di bawah kerangka dasar (kerangka yang komprehensif).

Di sisi lain, regulator sekuritas ASEAN telah memainkan peran penting dalam mendukung komitmen kawasan terhadap keberlanjutan.

Pada November 2017, ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) meluncurkan *ASEAN Green Bond Standards*, yang merupakan inisiatif keuangan berkelanjutan pertama. ACMF juga telah mengembangkan *Roadmap for ASEAN Sustainable Capital Markets* untuk memetakan jalan menuju keberlanjutan bagi seluruh pasar modal di kawasan ASEAN.

Sebagai tindak lanjut, seluruh bank sentral ASEAN saat ini sedang menyusun *ASEAN Green Map* sebagai langkah ke depan (*way forward*), yang bertujuan untuk memperkuat sinergi di berbagai sektor dalam mengembangkan ekosistem keuangan berkelanjutan di area perbankan, asuransi, pasar modal, dan sektor jasa tambahan yang relevan di ASEAN.

Bank sentral di ASEAN memiliki perhatian yang cukup besar terhadap pengembangan keuangan berkelanjutan di kawasan. Untuk itu, Senior Level Committee on Financial Integration (SLC) membentuk gugus tugas (*task force*) yang telah menyusun lima rekomendasi peran bank sentral ASEAN dalam memitigasi risiko perubahan iklim dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Kelima rekomendasi tersebut yakni, (i) memasukkan pertimbangan iklim dalam kerangka pengawasan; (ii) melakukan *stress test* dampak perubahan iklim; (iii) mendukung laporan keberlanjutan; (iv) memformulasikan kerangka pengaturan keuangan berkelanjutan; dan (v) menjalankan koordinasi dan kolaborasi lintas regulator di kawasan.

Tantangan: Dampak Perubahan Iklim di Kawasan ASEAN

Perubahan iklim menjadi tantangan serius bagi negara di kawasan Asia Tenggara karena populasi besar dan aktivitas ekonomi terpusat di wilayah pesisir.

Dampak perubahan iklim terhadap cuaca, termasuk banjir dan badai, naiknya permukaan air laut, serta kebergantungan banyak komunitas pada pertanian dan sumber daya alam, membuat

penanganan perubahan iklim menjadi prioritas para pemimpin di kawasan ini. Selain itu, masalah kemiskinan yang sudah ada di wilayah tersebut juga semakin memperburuk situasi.

Dalam sebuah studi tahun 2015, Bank Pembangunan Asia (ADB) memperkirakan kerugian akibat perubahan iklim bisa mencapai 60 persen lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Nilai produk domestik bruto (PDB) regional berkurang hingga 11 persen pada tahun 2010 dibandingkan dengan perkiraan 7 persen pada tahun 2009.

Studi tersebut juga mengungkapkan hal yang menarik, bahwa menstabilkan iklim menghasilkan manfaat, antara lain, lima hingga sebelas kali lipat dari biaya bersih. Selain penanganan deforestasi, efisiensi energi, dan pengurangan penggunaan listrik, pengembangan dan penggunaan teknologi rendah karbon diperlukan untuk mencapai tujuan stabilisasi iklim.

Emisi gas rumah kaca (GRK) di kawasan tersebut meningkat sejalan dengan industrialisasi yang mengandalkan bahan bakar fosil sebagai sumber energi dan perubahan penggunaan lahan yang menyebabkan hilangnya hutan tropis dan lahan gambut yang kaya akan keanekaragaman hayati.

Dengan mempertimbangkan kebijakan dan target kontribusi yang ditetapkan secara nasional (*nationally determined contribution/NDC*), emisi GRK diperkirakan akan terus meningkat secara global hingga tahun 2030 (Zhou *et al.*, 2020) (UNEP, 2020). Hal ini dapat menyebabkan kenaikan suhu 2,1-3,9 derajat celsius pada tahun 2100 dibandingkan dengan tingkat praindustri (CAT, 2021). ASEAN Center for Energy (ACE) memproyeksikan peningkatan emisi GRK terkait dengan energi di wilayah ini sebesar 34-147 persen antara tahun 2017 dan 2040 (ACE, 2020).

Di Indonesia telah terjadi serangkaian bencana terkait dengan perubahan iklim. Di antaranya, banjir berkepanjangan di Kalimantan akibat curah hujan ekstrem, kebakaran hutan dan lahan dengan intensitas tinggi di Sumatera karena cuaca panas, dan naiknya permukaan air laut di pantai utara Jawa.

Perubahan iklim juga menyebabkan gagal panen dan penyebaran sumber penyakit seperti nyamuk dan lalat. Diperkirakan suhu di Indonesia akan meningkat 0,8-1,4 derajat celsius pada tahun 2050-an. Indonesia juga sangat rentan terhadap kenaikan permukaan laut dan

diperkirakan lebih dari 4,2 juta orang dapat terkena banjir permanen pada periode tahun 2070-2100.

Di Malaysia, suhu permukaan telah meningkat secara signifikan di Semenanjung Malaysia, Sabah, dan Sarawak antara tahun 1970 hingga 2013. Gelombang panas di Malaysia juga diperkirakan akan semakin sering dan intens akibat perubahan iklim, sementara frekuensi dan ekstremitas banjir telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir.

Perubahan iklim dapat menyebabkan peningkatan jumlah populasi yang terkena banjir sungai ekstrem pada tahun 2035-2044 sekitar 102.290 orang.

Di Thailand, degradasi lingkungan telah meningkat secara signifikan selama 20 tahun terakhir dan ini berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Thailand menghadapi berbagai bahaya alam dan bahaya akibat ulah manusia, termasuk banjir, kekeringan, tanah longsor, kebakaran hutan, dan polusi udara dan air. Perubahan jangka panjang dalam pola cuaca juga dapat memengaruhi hasil pertanian dan pariwisata.

Sementara itu, di Filipina, suhu rata-rata tahunan telah meningkat sejak pertengahan abad ke-20, dengan peningkatan yang signifikan pada suhu siang dan malam yang panas. Filipina merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap bencana, terutama siklon tropis, banjir, dan tanah longsor. Kenaikan permukaan laut di beberapa bagian Filipina juga telah menyebabkan banjir dan mengancam hingga satu juta orang pada tahun 2070-2100.

Southeast Asia's Green Economy Report 2021 memperkirakan bahwa kerugian akibat iklim diperkirakan mencapai sepertiga dari PDB pada tahun 2050. Menurut studi ADB dan Postdam Institute (2017), tanpa adanya terobosan teknis terkait perubahan iklim, hasil beras di Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam dapat turun sebanyak 50 persen pada tahun 2100 dari tingkat tahun 1990.

Cuaca yang lebih panas juga mendorong penyakit tropis seperti malaria dan demam berdarah ke arah utara, ke negara-negara seperti Laos. Walaupun terdapat kemajuan yang signifikan dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam sektor keuangan di ASEAN, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi.

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang keberlanjutan dan bagaimana hal ini berkaitan

dengan keuangan. Banyak pemangku kepentingan di sektor keuangan belum sepenuhnya memahami konsep keberlanjutan atau bagaimana risiko dan peluang yang berkaitan dengan isu-isu keberlanjutan dapat memengaruhi kinerja keuangan.

Tantangan lainnya adalah kurangnya data dan informasi yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang berkelanjutan.

Dalam banyak kasus, data tentang dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan investasi dan pinjaman belum tersedia atau tidak dapat diakses dengan mudah. Tanpa data yang akurat dan transparan, sulit bagi pemangku kepentingan untuk mengevaluasi dan memonitor kinerja keberlanjutan.

Keterbatasan kapasitas juga menjadi tantangan. Beberapa negara anggota ASEAN mungkin tidak memiliki sumber daya atau keahlian teknis yang diperlukan untuk mengimplementasikan strategi dan alat keberlanjutan di sektor keuangan mereka. Ini bisa termasuk keahlian dalam mengevaluasi risiko dan peluang yang berhubungan dengan perubahan iklim, atau dalam merancang produk dan layanan keuangan yang berkelanjutan.

Selain itu, walaupun beberapa negara anggota ASEAN telah mulai mengembangkan kerangka regulasi dan kebijakan yang mendukung keuangan berkelanjutan, masih ada kekurangan dalam hal koordinasi dan harmonisasi di tingkat regional. Perbedaan dalam pendekatan dan standar keberlanjutan di antara negara-negara anggota dapat menciptakan ketidakpastian dan hambatan bagi pemangku kepentingan yang beroperasi di lebih dari satu pasar ASEAN.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan kerja sama dan koordinasi yang lebih baik di antara negara-negara anggota ASEAN, serta antara sektor publik dan swasta.

Pendidikan dan pelatihan dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang keberlanjutan, sementara pengembangan dan penerapan standar dan kerangka kerja yang konsisten dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas. Di sisi lain, peningkatan akses ke data dan informasi yang relevan akan memfasilitasi pengambilan keputusan yang berkelanjutan.

Dalam upaya mengurangi jejak karbon dan mengatasi dampak perubahan iklim, kawasan ASEAN pada dasarnya memiliki berbagai

sumber energi terbarukan seperti energi surya, angin, air, panas bumi, dan biomassa.

Potensi pengembangan energi angin terdapat di Filipina, Indonesia, dan Vietnam karena kecepatan angin yang mencapai enam hingga tujuh meter per detik menurut International Renewable Energy Agency (IRENA) pada tahun 2018.

Di samping itu, IRENA dan ACE (2016) juga menyoroti potensi panas bumi di Indonesia dan Filipina. Negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Filipina, dan Singapura memiliki peluang untuk mengeksplorasi energi laut karena posisi geografisnya sebagai negara kepulauan (ASEAN RESP, 2016).

Walaupun memiliki potensi sumber daya energi terbarukan yang melimpah, kawasan ini masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil, khususnya batubara, untuk memenuhi kebutuhannya. Kebergantungan tersebut berkontribusi pada perubahan iklim dan membuat wilayah ini rawan terhadap risiko keamanan energi dan fluktuasi harga. Oleh karena itu, negara-negara ASEAN semakin menyadari pentingnya energi terbarukan sebagai langkah untuk mengurangi kebergantungan pada bahan bakar fosil dan mencapai sistem energi yang berkelanjutan.



KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di atas Waduk Cirata, Jawa Barat, Selasa (12/9/2023).

Negara-negara ASEAN dapat mempercepat adopsi teknologi energi terbarukan dan mengatasi tantangan ini secara bersama-sama. Kemitraan strategis di antara negara-negara ASEAN dapat mempercepat transisi menuju energi terbarukan dan menciptakan sistem energi yang lebih tangguh untuk menghadapi masa depan.

Sebagai contoh, pada Februari 2023, Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) dan Tenaga Nasional Berhad (TNB) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk melakukan studi kelayakan dalam meningkatkan interkoneksi jaringan listrik antara Semenanjung Malaysia dan Thailand.

Selain kemitraan strategis, pada sisi inisiatif nasional, Indonesia mengumumkan pada KTT G20 2022 di Bali bahwa Indonesia berencana untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batubara 10,1 GW pada tahun 2030 melalui *Just Energy Transition Partnerships* (JETP) yang akan membuka pendanaan internasional sebesar 20 miliar dollar AS selama beberapa tahun. Kebijakan Malaysia pada *Malaysia's National Energy Policy 2022-2040* juga menempatkan energi sebagai elemen kunci dari strategi pertumbuhan hijau negara tersebut.

Kebijakan harus menyesuaikan dengan keadaan nasional. Namun, harus ada kerja sama di antara negara-negara ASEAN agar dapat menciptakan masa depan energi yang lebih berkelanjutan untuk mengatasi dampak perubahan iklim.

Potensi Pembiayaan Berkelanjutan untuk Pembangunan di ASEAN

Pada saat yang sama, ekonomi hijau yang berkembang di Asia Tenggara berpotensi menghasilkan 1 triliun dollar AS dalam peluang ekonomi. Ekonomi hijau dinilai mampu menciptakan lima juta hingga enam juta pekerjaan baru dan mendorong pertumbuhan PDB 6 persen hingga 8 persen. Oleh karena itu, perlu tindakan segera dan dalam skala besar hingga tahun 2030 untuk mencegah potensi dampak iklim yang lebih merusak, mencegah hilangnya PDB, dan mampu memacu peluang ekonomi.

Dalam menjalankan salah satu pilar strategis pada jalur ekonomi, Indonesia terus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan untuk masa depan yang tangguh (*sustainability*). Keuangan berkelanjutan didefinisikan sebagai keputusan investasi yang

mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dari suatu aktivitas ekonomi atau proyek.

Salah satu kunci dalam melakukan respons iklim adalah melalui sektor finansial, yaitu memastikan bahwa modal mengalir ke proyek-proyek hijau, secara efisien dan dalam skala besar, terutama dari sumber modal swasta dan kelembagaan. Analisis ADB menunjukkan bahwa Asia Tenggara membutuhkan sekitar 210 miliar dollar AS per tahun untuk infrastruktur tahan iklim hingga tahun 2030.

Pada banyak sektor, masih terdapat kesenjangan pembiayaan mencapai hampir 50 persen atau lebih. Untuk menutup kesenjangan ini, proyek infrastruktur memerlukan dukungan untuk transisi menuju *bankability*.

Selain itu, perlu adanya pengembangan model pembiayaan yang inovatif dan ramah lingkungan untuk mengakses modal swasta serta meningkatkan model antarsektor. Namun, modal saja tidak cukup. Mekanisme pembiayaan, kapasitas, dan model untuk proyek hijau harus sejalan dengan peta jalan nasional untuk pembiayaan hijau.

Keuangan berkelanjutan merupakan jembatan antara sistem keuangan dan ekosistem. Modal alam menghasilkan manfaat ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan, yang mendukung perekonomian yang sehat dan tangguh.

Sektor keuangan dapat memainkan peran kritis dalam mendukung negara-negara dalam perjalanan mereka menuju ketahanan dan keberlanjutan yang lebih besar, tetapi harus beradaptasi untuk melakukannya secara efektif.

Keseriusan kawasan ASEAN dalam mendorong implementasi keuangan berkelanjutan tergambar dalam pernyataan Gubernur Bank Indonesia pada 30 Maret 2023 dalam forum *ASEAN High Level Seminar*, yang menyatakan bahwa: "Topik yang sangat penting dalam membentuk ekonomi dunia seperti halnya digitalisasi ialah transisi hijau dan pembiayaan. Agenda transisi iklim akan bergantung pada

**Keuangan
berkelanjutan
merupakan jembatan
antara sistem
keuangan dan
ekosistem.**

dukungan dari sektor swasta untuk menyediakan pembiayaan yang terjangkau. Empat aspek penting untuk transisi iklim di negara berkembang ialah (i) kerangka kebijakan yang baik untuk transisi yang teratur, adil, dan terjangkau; (ii) kerja sama dalam mengatasi dampak sosial ekonomi; (iii) kerja sama erat dengan sektor swasta; dan (iv) kerja sama Lintas Negara.”

Berdasarkan laporan *Green Finance Opportunities in ASEAN* yang dipublikasikan oleh DBS dan UN Environment (2017), dengan menggunakan pendekatan *top-down* (makroekonomi) dan *bottom-up* (sektoral), dihasilkan kisaran peluang investasi hingga sebesar 3.000 miliar dollar AS antara tahun 2016 dan 2030 (DBS, 2017). Dalam laporan tersebut dipaparkan peluang investasi hijau di empat sektor utama, yaitu sektor energi terbarukan; efisiensi energi; infrastruktur dan pangan; serta pertanian dan tata guna lahan.

a) Energi Terbarukan

International Energy Agency (IEA) memperkirakan peluang investasi energi terbarukan ASEAN sebesar 400 miliar dollar AS dari tahun 2016 hingga 2030 untuk memenuhi pertumbuhan permintaan energi rendah karbon di kawasan ASEAN.

Berdasarkan analisis International Renewable Energy Agency tahun 2016, energi terbarukan dapat menyumbang hingga 29 persen dari total pasokan energi primer di kawasan ini pada tahun 2030 atau 32 tiga kali lipat dari pangsa energi terbarukan pada tahun 2014 (9,4 persen).

Fotovoltaik surya dan tenaga air menghasilkan lebih dari separuh peluang investasi yang diproyeksikan. Bioenergi diproyeksikan akan tetap menjadi sumber energi terbarukan yang penting bagi wilayah ASEAN.

b) Infrastruktur

Berdasarkan studi ADB dan Global Infrastructure Hub (GIH), infrastruktur hijau menunjukkan potensi investasi yang besar. Potensi investasi ini diproyeksikan mencapai sebesar 3.100 miliar dollar AS, dengan potensi yang dapat didefinisikan sebesar 1.800 miliar dollar AS.

Porsi investasi tersebut mencakup pembangunan infrastruktur

jaringan transmisi/distribusi listrik (700 miliar dollar AS), pasokan air (380 miliar dollar AS), telekomunikasi (260 miliar dollar AS), dan transportasi kereta api (60 miliar dollar AS).

c) Pangan, Pertanian, dan Tata Guna Lahan

Sektor pertanian dan ekspor pangan merupakan sektor vital penyumbang ekonomi ASEAN, mewakili lebih dari 25 persen PDB di beberapa negara ASEAN. Hal ini juga disebabkan sektor tersebut merupakan mata pencarian dan pekerjaan utama bagi masyarakat.

Berdasarkan riset Business and Sustainable Development Commission (ADB, 2017), potensi investasi terkait dengan pembangunan ketahanan pangan dan peningkatan ekspor mencapai 400 miliar dollar AS antara tahun 2016 dan 2030. Investasi ini meliputi inovasi teknologi yang dikaitkan dengan peningkatan produktivitas selama produksi dan panen serta praktik pertanian yang tahan iklim dan berkelanjutan.

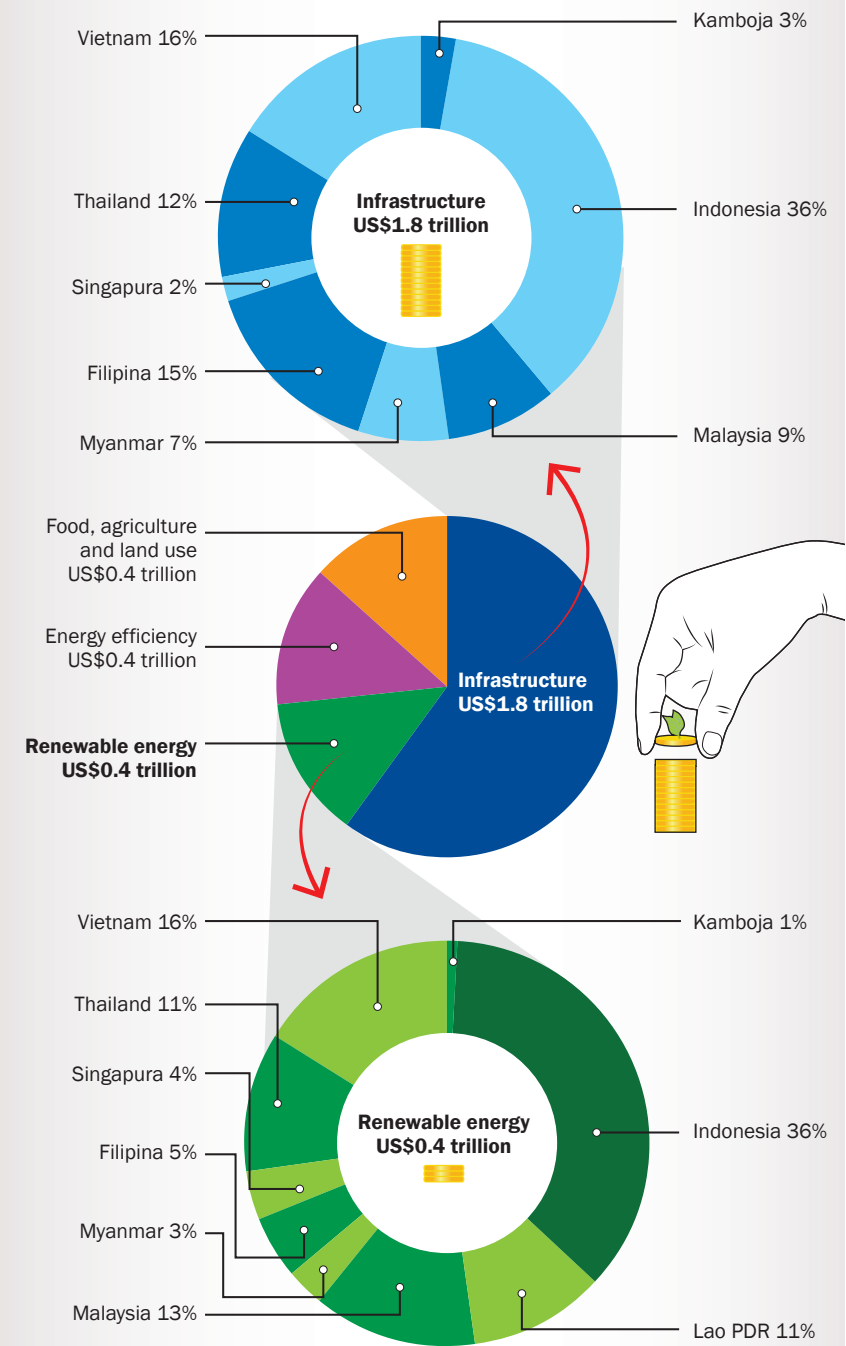
Potensi perkembangan investasi keuangan berkelanjutan di Asia selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Sebagai contoh, besaran utang untuk proyek berkelanjutan mengalami peningkatan dari sebesar 0,25 juta dollar AS pada tahun 2016 menjadi 6,75 juta dollar AS pada tahun 2021 pada lima negara utama Asia Tenggara. Selain itu, utang untuk proyek berkelanjutan mencapai 24 juta dollar AS untuk seluruh negara Asia Tenggara.

Kawasan ASEAN sangat rentan terhadap perubahan iklim, terutama mengingat populasi pesisirnya dan ketergantungan pada pertanian. Perubahan iklim yang terjadi berdampak signifikan bagi penduduk, operasionalisasi bisnis dan pemerintah di kawasan ASEAN.

Bahkan, pola cuaca yang tidak terduga, kenaikan suhu dan permukaan laut, peristiwa cuaca ekstrem, degradasi lahan, dan kerusakan keanekaragaman hayati telah menyebabkan kerusakan ekonomi dan kerusakan fisik, antara lain hilangnya harta benda, aset, dan nyawa manusia. Tantangan tersebut menjadi target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), bahkan sebelum Covid-19.

Pembiayaan adalah salah satu kunci yang dapat memajukan agenda keberlanjutannya di kawasan ASEAN. Peran berkelanjutan keuangan dibahas dalam agenda ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) pada tahun 2019.

Peluang Pendanaan/Investasi Hijau di Negara ASEAN



Sumber: DBS dan UN Environment (2017)

Gambar 7.1 Peluang Pendanaan/Investasi Hijau di Negara ASEAN.

Membangun pemahaman yang sama mengenai pentingnya aspek keberlanjutan di lingkup ASEAN merupakan aspek penting dalam mengumpulkan pendanaan dan investasi. Hal tersebut menjadi salah satu latar belakang pentingnya taksonomi keuangan yang kredibel baik dalam cakupan domestik maupun internasional.

Panduan yang jelas mengenai segmentasi sektor ekonomi akan membangun kepercayaan investor domestik, regional, dan global dalam menginvestasikan dana di sektor yang mendukung pembiayaan berkelanjutan.

Oleh karena itu, ASEAN Capital Markets Forum (ACMF), ASEAN Insurance Regulators Meeting (AIRM), ASEAN Senior Level Committee on Financial Integration (SLC), dan ASEAN Working Committee on Capital Market Development (WC-CMD), dengan pengesahan AFMGM, bersama tergabung membentuk ASEAN Taxonomy Board (ATB) pada Maret 2021 untuk mengembangkan, memelihara, dan mempromosikan Taksonomi ASEAN untuk agenda keuangan berkelanjutan.

Taksonomi ASEAN versi pertama menyediakan kerangka kerja, terutama membantu permodalan untuk tujuan kegiatan yang mempromosikan transisi ekonomi sektor riil yang mendukung program keberlanjutan. Dalam rangka mengimbangi tujuan keberlanjutan global dan kemajuan teknologi, pada Taksonomi ASEAN dilakukan peninjauan secara berkala agar tetap relevan dan efektif.

Sesuai laporan publikasi *ASEAN State of Climate Change* yang pertama, Sekretaris Jenderal ASEAN menyatakan, dalam rangka mendukung transisi yang cepat dan adil ke *net zero* bagi ASEAN, terdapat kebutuhan yang signifikan akan peningkatan akses terhadap pendanaan iklim, transfer pengetahuan dan teknologi di bidang-bidang prioritas utama, seperti adaptasi dan mitigasi, pengurangan risiko bencana, dan transisi ke energi bersih.

Program tersebut tidak akan terealisasi tanpa adanya dukungan sektor keuangan yang mampu menciptakan keputusan bisnis yang berkelanjutan.

Inisiatif ASEAN dalam Mendorong Keuangan Berkelanjutan

Pascapandemi Covid-19, seluruh dunia mengalami dampak sistemik yang merugikan hampir di berbagai sektor. Kawasan ASEAN dinilai telah mampu melakukan pemulihan dan pembangunan

kembali (*recovery and rebuilding*) dalam perekonomiannya. Ke depan, kebijakan yang ditetapkan harus mampu mengidentifikasi strategi dalam rangka mengatasi dampak berkepanjangan (*scarring effect*) dan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.

Keberlanjutan atau *sustainability* telah menjadi fokus utama ASEAN seiring dengan peningkatan pemahaman tentang urgensi dan dampak perubahan iklim global. Melalui berbagai inisiatif dan kerja sama, ASEAN berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di wilayahnya.

Komitmen ASEAN terhadap keberlanjutan dapat dilihat dari berbagai deklarasi, rencana aksi, dan kerangka kerja yang telah diadopsi oleh negara-negara anggota. Salah satu yang paling signifikan adalah *ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2025*, yang menekankan pentingnya pelestarian lingkungan dan adaptasi perubahan iklim sebagai bagian integral dari pembangunan sosial budaya di ASEAN.

Dalam upaya mitigasi perubahan iklim, ASEAN telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mempromosikan energi terbarukan, efisiensi energi, dan teknologi ramah lingkungan. Sejumlah negara anggota juga telah mengadopsi target pengurangan emisi gas rumah kaca yang ambisius, mencerminkan komitmen mereka terhadap penanganan perubahan iklim.

Pada sisi adaptasi, ASEAN telah memprioritaskan upaya untuk meningkatkan ketahanan komunitas lokal dan ekosistem terhadap dampak perubahan iklim. Ini mencakup upaya untuk meningkatkan manajemen sumber daya alam, membangun infrastruktur yang tahan iklim, dan mendorong praktik pertanian yang berkelanjutan.

ASEAN juga berkomitmen untuk memastikan keadilan sosial dan ekonomi dalam transisi ke keberlanjutan. Hal itu mencakup upaya untuk mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan ke dalam kebijakan ekonomi dan sosial, serta mendorong inklusi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan.

Komitmen ASEAN terhadap keberlanjutan mencerminkan visi bersama negara-negara anggota untuk menciptakan masyarakat yang aman, makmur, dan berkelanjutan di tengah tantangan global seperti perubahan iklim. Melalui kerja sama regional dan internasional,

ASEAN berusaha untuk mewujudkan visi ini dan memastikan masa depan yang lebih baik untuk semua penduduknya.

Keberlanjutan merupakan salah satu dari tiga pilar agenda prioritas ekonomi (*priority economic deliverables/PEDs*) dalam keketuaan ASEAN 2023. ASEAN menyatakan posisinya sebagai episentrum atau pusat pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Hal ini juga menegaskan komitmen ASEAN untuk mencapai pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu fokus agenda pembangunan. Komitmen ini tecermin dalam berbagai forum dan aktivitas *side event* pada keketuaan ASEAN yang mengambil topik keberlanjutan keuangan (*sustainability finance*).

Upaya transisi menuju ekonomi hijau menghadapi beberapa tantangan utama, di antaranya kebutuhan akan investasi dan area pembiayaan hijau yang tinggi, perubahan pekerjaan, dan resistansi dari sektor lama yang berbasis *carbon intensive*. Oleh karena itu, perlu upaya untuk memfasilitasi transisi hijau ASEAN yang adil dan teratur, dengan mempertimbangkan kebutuhan investasi dan pembiayaan yang optimal.

Selain itu, dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk transisi menuju ekonomi hijau, perlu dukungan sektor ekonomi dan keuangan berkelanjutan.

Berbagai forum dan agenda ASEAN 2023 telah membahas pilar keuangan berkelanjutan. Dari sisi perdagangan dan investasi, Working Committee on Capital Account Liberalization (WC-CAL) telah menyelesaikan inventarisasi kebijakan dan inisiatif pengembangan keuangan berkelanjutan bagi negara anggota ASEAN (ASEAN Member State /AMS).

Komite ini bertujuan membantu AMS memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang kegiatan keuangan berkelanjutan sehingga dapat berperan penting dalam mendorong arus modal, baik di dalam negeri (domestik) maupun ruang lingkup di dalam kawasan ASEAN (regional).

Fokus keuangan berkelanjutan juga membahas agenda pembiayaan infrastruktur melalui ASEAN Infrastructure Fund (AIF). Agenda pembahasan ini berupaya mengutamakan operasi permanen *ASEAN Catalytic Green Finance Facility* (ACGF) dengan menyediakan pembiayaan dan dukungan teknis untuk pemulihan hijau ASEAN serta

dukungan untuk memperkuat perencanaan investasi iklim.

Ke depan akan dilakukan studi lebih lanjut dalam memperluas kapasitas ACGF. Hal itu termasuk meningkatkan kredibilitasnya di mata investor internasional dan meningkatkan potensinya untuk menarik lebih banyak dana dan mitra pembiayaan ramah lingkungan.

Selain itu, Working Committee on Capital Market Development (WC-CMD) dan ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) on Infrastructure Financing mempromosikan keuangan berkelanjutan untuk proyek infrastruktur melalui sosialisasi webinar yang diselenggarakan sehingga menjangkau pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang lebih luas.

Pertemuan ASEAN juga mendiskusikan *Standardised Core Project Finance Loan Documents* dan ke depan akan lebih fokus mengenai *sustainability bond*. Termasuk dalam hal ini, pembelajaran dari negara anggota ASEAN yang menerbitkan *sovereign* atau *quasi-sovereign sustainability* yang terkait dengan infrastruktur berkelanjutan.

Sampai dengan Juli 2023, penerbitan obligasi berdasarkan *ASEAN Green, Social and Sustainability Bond Standards* telah mencapai 40,77 miliar dollar AS.

Keseriusan ASEAN dalam mendukung keuangan berkelanjutan juga diikuti dengan penerbitan Taksonomi ASEAN oleh ASEAN Taxonomy Board (ATB) guna mengklasifikasikan kegiatan hijau dan transisi di bawah kerangka dasar (kerangka yang komprehensif).

Pada ASEAN 2023, negara anggota merumuskan *ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance* versi 2. Ini semakin melengkapi versi 1 dengan memasukkan aspek sosial sebagai kriteria esensial ketiga yang merupakan tambahan dari dua kriteria esensial versi 1, yaitu *Do No Significant Harm* (DNSH) dan *Remedial Measures to Transition* (RMT).

Taksonomi ASEAN versi 2 menunjukkan negara anggota ASEAN berupaya mewujudkan transisi yang adil, terjangkau, kredibel, dan teratur di kawasan. ASEAN harus terus memastikan bahwa taksonomi tersebut dapat dioperasikan dengan taksonomi internasional lainnya guna menarik dan menyalurkan investasi yang diperlukan untuk mendukung transisi kawasan.

Energi hijau juga menjadi isu utama dalam mengatasi tantangan perubahan iklim. Komitmen dan kerja sama negara anggota ASEAN diperlukan dalam upaya berinvestasi pada transisi dan teknologi

energi hijau untuk meningkatkan ketahanan energi dan mendukung perjalanan kawasan menuju keberlanjutan.

Inisiatif sudah dilakukan, ditandai dengan pertemuan-pertemuan yang membahas penyelarasan transisi energi dengan pembangunan ekonomi, strategi pembiayaan transisi energi di ASEAN, dan *Energy Transition Mechanism and Country Platform*. Selain itu, mengakui pentingnya penghapusan penggunaan batubara secara terkelola akan menurunkan emisi karbon ASEAN secara signifikan.

Pada keketuaan ASEAN 2023, ACMF juga merumuskan beberapa inisiasi dalam mendukung keuangan berkelanjutan. Hal itu mencakup (i) pengesahan *Sustainability-Linked Bond Standards* (SLBS) yang akan memfasilitasi pembiayaan obligasi yang mendorong transisi ke praktik yang lebih berkelanjutan.

Kemudian, (ii) pengesahan *Sustainable and Responsible Fund Standards* (SRFS) yang menetapkan persyaratan pengungkapan dasar untuk dana yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Selanjutnya, (iii) penerbitan *Legal Wrappers* untuk *Sustainable Development Goals* (SDGs) *Bond Toolkit* agar lebih berguna bagi calon emiten di AMS yang berbeda.

Selain itu, (iv) peluncuran Pusat Pengetahuan tentang Keuangan Berkelanjutan sebagai pusat "satu atap" untuk meningkatkan kesadaran dan mengedukasi peserta tentang isu-isu terkait keuangan berkelanjutan.

Sebagai bentuk tindak lanjut, ACMF juga melakukan berbagai kolaborasi dengan International Sustainability Standards Board (ISSB) dalam rangka mempromosikan pengungkapan keberlanjutan perusahaan melalui keterlibatan rutin, agenda kegiatan bersama, dan peningkatan kapasitas (*capacity building*).

Selain itu, ACMF bersama WC-CMD berkolaborasi dengan industri melalui Joint Sustainable Finance Working Group (JSFWG) Industry Advisory Panel (IAP) di area prioritas taksonomi, standar transisi, pengungkapan, dan penguatan permintaan dan penawaran serta melakukan Studi Pasar Karbon ASEAN.

Inisiatif keuangan berkelanjutan ASEAN juga dilakukan dalam sektor asuransi. ASEAN Insurance Regulators Meeting (AIRM) mempromosikan asuransi yang terkait dengan keberlanjutan. Termasuk di dalamnya, inisiasi melalui (i) publikasi lanjutan *Newsletter*

Kuangan Berkelanjutan AIRM; (ii) berbagi hasil survei tentang area yang terkait dengan produk asuransi berkelanjutan di pasar asuransi ASEAN.

Selain itu, (iii) pembentukan gugus tugas untuk melakukan studi kolaboratif tentang pengembangan produk asuransi berkelanjutan di ASEAN; (iv) mendukung implementasi Kerangka Ekonomi Sirkular untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN untuk memfasilitasi transisi ekonomi sirkular kawasan; dan (v) partisipasi berkelanjutan AIRM dalam ASEAN Taxonomy Board.

Inisiatif ini memfasilitasi dan meningkatkan peran sektor asuransi dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan ASEAN.

Lebih lanjut, terkait dengan risiko bencana alam, *ASEAN Disaster Risk Financing and Insurance* (ADRFI) membantu perumus kebijakan seperti kementerian keuangan dan regulator asuransi menguantifikasi eksposur keuangan terhadap bencana alam, menilai kesenjangan dari pembiayaan darurat yang ada, mengadopsi solusi manajemen risiko bencana alam dan reasuransi yang efektif secara holistik (mitigasi), dan merencanakan pembangunan kapasitas yang ditargetkan untuk meningkatkan ketahanan keuangan.

Saat ini, seluruh bank sentral ASEAN sedang menyusun *ASEAN Green Map*, sebagai bagian dari visi dan arah kebijakan ASEAN dalam pengembangan keuangan berkelanjutan ke depan. *ASEAN Green Map* ini bertujuan memperkuat sinergi dan tanggapan di berbagai badan sektoral dalam mengembangkan ekosistem keuangan berkelanjutan di seluruh perbankan, asuransi, pasar modal, dan sektor jasa tambahan yang relevan di ASEAN.

Selanjutnya, berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas dilakukan bank sentral yang dipimpin oleh The Southeast Asian Central Banks (SEACEN) melalui penyusunan kurikulum pembelajaran untuk topik mengenai keuangan berkelanjutan.

Selain itu, negara-negara anggota ASEAN telah berpartisipasi dalam berbagai forum dan dialog multilateral lainnya di tingkat regional yang berfokus pada perubahan iklim dan keuangan berkelanjutan.

Pentingnya Sektor Keuangan Mencapai Target Keberlanjutan

Sektor keuangan memainkan peran penting dalam usaha ASEAN untuk mencapai tujuan keberlanjutan dan mitigasi dampak perubahan

iklim. Berbagai institusi keuangan, termasuk bank, asuransi, dan pasar modal, memainkan peran kunci dalam mengalokasikan sumber daya kegiatan ekonomi dan proyek yang mendukung atau mencerminkan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Pertama, sektor keuangan dapat mendorong investasi hijau atau ramah lingkungan. Melalui pendanaan proyek dan usaha yang berorientasi pada solusi iklim, sektor ini membantu dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon. Misalnya, pembiayaan untuk energi terbarukan, teknologi bersih, dan infrastruktur hijau dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan mempromosikan keberlanjutan.

Kedua, sektor keuangan juga memiliki peran dalam mengelola risiko iklim. Lembaga keuangan semakin menyadari bahwa perubahan iklim dapat memiliki dampak signifikan terhadap portofolio investasi dan operasi bisnis mereka. Oleh karena itu, banyak dari mereka telah mulai memasukkan pertimbangan risiko iklim dalam proses pengambilan keputusan mereka.

Ketiga, sektor keuangan dapat berkontribusi dalam mencapai keberlanjutan melalui penciptaan dan perdagangan instrumen keuangan yang berkelanjutan, seperti obligasi hijau dan obligasi berkelanjutan. Instrumen-instrumen ini memberikan mekanisme bagi investor untuk mendanai proyek dan kegiatan yang berkontribusi pada tujuan keberlanjutan.

ASEAN telah mengambil beberapa langkah penting untuk mempromosikan peran sektor keuangan dalam mencapai keberlanjutan. Misalnya, melalui ASEAN Capital Markets Forum, negara-negara anggota telah berkolaborasi untuk mengembangkan *Roadmap for ASEAN Sustainable Capital Markets*, yang bertujuan untuk mendorong integrasi pertimbangan keberlanjutan ke dalam praktik pasar modal di kawasan tersebut.

Secara keseluruhan, peran sektor keuangan dalam mendukung tujuan keberlanjutan ASEAN sangat signifikan dan terus berkembang seiring dengan peningkatan kesadaran tentang pentingnya isu ini.

Tujuan utama dari inisiatif keuangan berkelanjutan ASEAN adalah untuk memastikan bahwa sektor keuangan dapat memainkan peran integral dalam mendukung dan membiayai pembangunan berkelanjutan. Hal ini mencakup pendorong untuk investasi hijau dan pembangunan pasar modal yang berkelanjutan, serta peningkatan

kapasitas dan pemahaman tentang risiko dan peluang keuangan yang berkaitan dengan perubahan iklim dan keberlanjutan.

Berbagai inisiatif telah diterapkan untuk mencapai tujuan ini. Misalnya, ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) telah merilis panduan bersama tentang obligasi hijau, yang bertujuan untuk membantu perusahaan dalam mengeluarkan obligasi yang dapat mendanai proyek-proyek ramah lingkungan. Kerangka kerja ini, yang dikenal sebagai *ASEAN Green Bond Standards*, telah mendapatkan pengakuan dan penerimaan yang luas di pasar modal regional.

Pada tingkat nasional, berbagai negara anggota ASEAN telah mengambil inisiatif mereka sendiri untuk mempromosikan keuangan berkelanjutan. Misalnya, otoritas moneter dan keuangan di beberapa negara telah merilis Pedoman dan kerangka kerja untuk memandu bank dan institusi keuangan lainnya dalam memasukkan pertimbangan keberlanjutan ke dalam praktik mereka.

Secara keseluruhan, tujuan dan inisiatif keuangan berkelanjutan ASEAN mencerminkan komitmen kawasan ini untuk mendorong pembangunan yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Adapun beberapa inisiatif prioritas untuk mendorong keuangan berkelanjutan di ASEAN antara lain penerbitan *ASEAN Taxonomy*, *ASEAN Green Bonds* dan *Sustainable Bonds*, serta *ASEAN Green Map*.

Inisiatif Taksonomi Regional ASEAN dan Taksonomi Nasional di ASEAN

Taksonomi ASEAN dirancang untuk membantu investor, institusi keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya mengidentifikasi dan menilai aktivitas berkelanjutan di ASEAN. Taksonomi ini didasarkan pada International Capital Market Association (ICMA) Green Bond Principles dan Climate Bonds Initiative (CBI) Climate Bonds Standard.

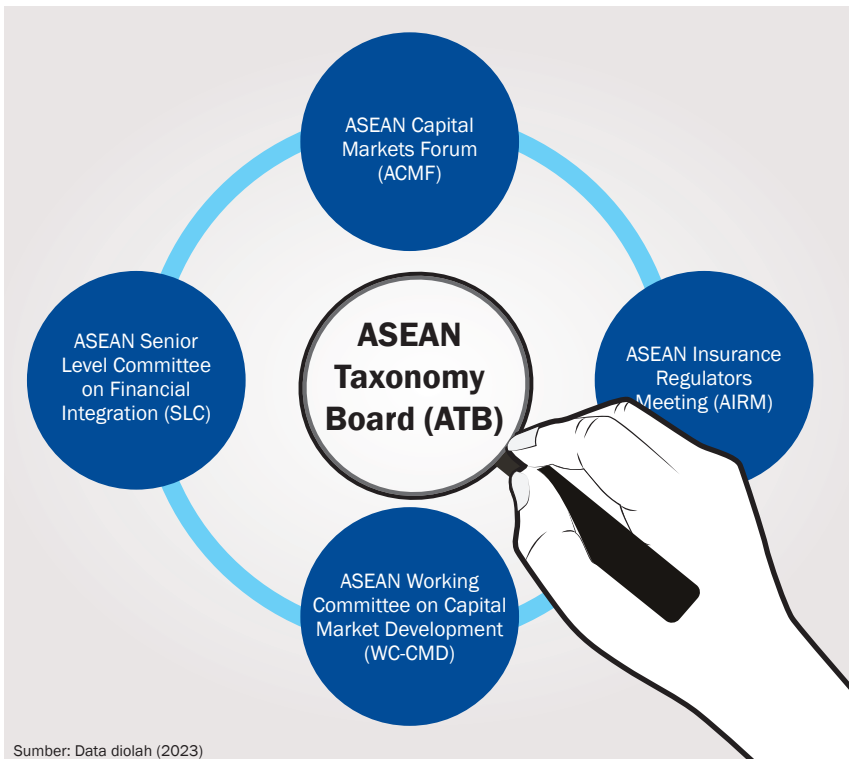
ASEAN Taxonomy Board (ATB) didirikan untuk mengembangkan, mempertahankan, dan mempromosikan Taksonomi ASEAN untuk Keuangan Berkelanjutan (*ASEAN Taxonomy*).

Taksonomi ASEAN merupakan inisiatif kolaborasi empat badan sektoral ASEAN yang membentuk ATB, yaitu ASEAN Capital Markets Forum (ACMF), ASEAN Insurance Regulators Meeting (AIRM), ASEAN Senior Level Committee on Financial Integration (SLC), dan ASEAN

Working Committee on Capital Market Development (WC-CMD) dengan menyatukan pandangan dari regulator pasar modal, asuransi, dan perbankan negara-negara ASEAN.

Taksonomi ASEAN dirancang sebagai suatu sistem yang inklusif dan kredibel untuk mengklasifikasikan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan di kawasan. Taksonomi ASEAN ini disusun dengan mempertimbangkan standar taksonomi yang sudah ada, tetapi tetap memperhitungkan kondisi dan kebutuhan negara-negara ASEAN yang beragam.

Untuk itu, Taksonomi ASEAN disusun dengan pendekatan *multi-tier* yang memiliki dua elemen utama, yakni *foundation framework* yang berisi tentang prinsip-prinsip umum yang digunakan untuk menilai aspek keberlanjutan dari suatu kegiatan ekonomi dan *plus standards* yang berisi definisi dan kriteria lebih lanjut, termasuk kriteria kualifikasi dan *benchmark*, bagi kegiatan ekonomi dan investasi hijau.



Gambar 7.2 ASEAN Taxonomy Board (ATB).

Secara lebih lengkap, Taksonomi ASEAN versi 1 terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu:

1. *Foundation framework* yang terdiri dari empat tujuan lingkungan (*environmental objectives*) dan dua kriteria penting (*essential criteria*) yang digunakan sebagai dasar menilai suatu kegiatan ekonomi;
2. Daftar sektor utama yang akan menerapkan *plus standards*, yang terdiri dari enam sektor utama dalam hal emisi gas rumah kaca dan tiga sektor pendukung yang berkontribusi untuk mencapai tujuan lingkungan;
3. *Decision tree* sebagai panduan bagi pengguna Taksonomi ASEAN untuk mengklasifikasikan kegiatan ekonominya; dan
4. Metodologi yang akan digunakan untuk menentukan *thresholds* berdasarkan *plus standards*, yang akan dikembangkan pada Taksonomi ASEAN fase berikutnya.

Pembentukan Taksonomi ASEAN ini diharapkan akan dapat menarik investasi global ke kawasan ASEAN untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan. Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN yang memiliki kebutuhan pembiayaan berkelanjutan yang besar tentu akan mendapat manfaat dari aliran investasi tersebut.

Pengembangan Taksonomi ASEAN juga sejalan dengan *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Indonesia*. Untuk tahap berikutnya, ASEAN akan melanjutkan pembahasan pengembangan Taksonomi ASEAN dan Indonesia akan terus berpartisipasi dalam upaya pengembangan taksonomi ASEAN tersebut melalui keikutsertaan di dalam ATB.

Berikut adalah beberapa inisiatif nasional dari negara-negara di ASEAN yang mempromosikan taksonomi hijau:

1. Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia meluncurkan *Roadmap Keuangan Berkelanjutan* pada tahun 2014. *Roadmap* (peta jalan) ini memandu peran industri jasa keuangan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Pada Januari 2022, sebagai bagian dari *Roadmap Keuangan Berkelanjutan*, Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan edisi pertama Taksonomi Hijau Indonesia, yang berfungsi sebagai panduan untuk

pengembangan kebijakan di lembaga pemerintah serta sebagai titik acuan bagi industri.

OJK juga menerbitkan POJK Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik yang memandu bank-bank di Indonesia untuk merancang rencana bisnis yang berkelanjutan dan memasukkan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam proses pemberian kredit. Selain itu, juga diterbitkan POJK Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*).

Sementara Bank Indonesia menerbitkan PBI Nomor 21/13/PBI/2019 untuk mendorong terciptanya pembiayaan berwawasan lingkungan (*green financing*) melalui pengaturan rasio *loan to value* (LTV).

Pada Oktober 2021, Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, yang menetapkan kerangka hukum untuk instrumen penetapan harga karbon dalam negeri, termasuk sistem perdagangan emisi, dan menetapkan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi untuk mengatasi perubahan iklim.

Pengembangan pasar karbon diatur bersamaan dengan pajak karbon yang pertama kali dimasukkan dalam Undang-Undang Perpajakan yang diperbarui, disetujui oleh parlemen pada Oktober 2021. Pajak karbon pertama kali akan dikenakan pada pembangkit listrik tenaga batubara dengan ekspansi bertahap ke sektor lain. Indonesia saat ini sedang mempersiapkan peraturan pelaksanaannya.

Berikutnya, pada 13 September 2022, Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 yang menetapkan pensiun dini pembangkit listrik tenaga batubara, menetapkan rezim penetapan harga tertinggi yang relatif lebih layak untuk proyek energi terbarukan, serta menetapkan insentif yang luas untuk energi terbarukan.

Selanjutnya, pada September 2023, Presiden Republik Indonesia secara resmi meluncurkan Bursa Karbon Indonesia. PT Bursa Efek Indonesia menjadi Penyelenggara Bursa Karbon resmi di Indonesia yang mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan, yang dikenal dengan nama IDXCarbon.

2. Malaysia

Di sisi perbankan, Cetak Biru Sektor Keuangan Bank Negara

Malaysia (BNM) 2022-2026 menetapkan strategi untuk mendukung transisi ekonomi yang tertib dan adil: mengintegrasikan risiko terkait iklim dan lingkungan dalam pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan; mengembangkan ekosistem dan meningkatkan solusi keuangan hijau bagi lembaga keuangan; serta menanamkan risiko terkait iklim dan lingkungan di semua fungsi dalam BNM, termasuk operasi dan investasi.

Menyusul penerbitan *Climate Change and Principle-based Taxonomy* (CCPT) oleh BNM pada April 2021, lembaga keuangan mulai melaporkan paparan mereka pada Juli 2022, mempersiapkan pengungkapan risiko keuangan terkait iklim yang sejalan dengan rekomendasi Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) mulai 2024.

BNM juga menyelesaikan dokumen panduan untuk Uji Stres Risiko Iklim setelah penerbitan pembahasan makalah pada Juni 2022. BNM dan SC membentuk Komite Bersama untuk Perubahan Iklim (JC3) pada 2019.

Hasil utama pada tahun 2022 meliputi FAQ dan kuesioner uji tuntas tentang penerapan CCPT; dokumen kebijakan yang akan datang tentang Manajemen Risiko Iklim dan Analisis Skenario, yang menetapkan ekspektasi peraturan tentang pengelolaan risiko terkait iklim; Laporan JC3 tentang Lanskap Keuangan Berkelanjutan di Malaysia; dan Panduan Aplikasi TCFD untuk Lembaga Keuangan Malaysia.

JC3 juga memimpin serangkaian pertemuan dengan kementerian dan lembaga pemerintah untuk memperjelas rencana dan inisiatif nasional, serta mengidentifikasi jalan untuk kolaborasi. Di bidang regional, BNM dan SC adalah anggota Dewan Taksonomi ASEAN, yang menerbitkan Taksonomi ASEAN tentang Keuangan Berkelanjutan Versi 1 pada November 2021.

3. Singapura

Pada bulan Februari 2022, Singapura mengumumkan akan meningkatkan ambisi iklimnya untuk mencapai *net zero* pada atau sekitar 2050 berdasarkan *Singapore Green Plan 2030*.

Monetary Authority of Singapore (MAS) mengintegrasikan pertimbangan lingkungan di dalam peraturan, pengembangan, investasi, dan fungsi perusahaan. MAS telah mengambil langkah

progresif untuk mengimplementasikan Rencana Aksi Keuangan Hijau (GFAP), sebuah strategi keuangan berkelanjutan yang diperkenalkan pada tahun 2019.

GFAP telah diperluas untuk mencakup pembiayaan berkelanjutan di semua sektor. Pembiayaan hijau dan transisi merupakan pendukung penting bagi transisi yang teratur, efektif, dan inklusif di Asia, untuk mendekarbonisasi seluruh perekonomian tanpa mengorbankan pembangunan sosial dan ekonomi.

Untuk mengembangkan ekosistem keuangan berkelanjutan yang mendukung transisi, MAS bekerja sama dengan industri untuk mengembangkan taksonomi guna memberikan kejelasan yang lebih baik tentang aktivitas transisi dan mempromosikan solusi inovatif, seperti *blended finance*. MAS juga telah meningkatkan upaya pengungkapan keberlanjutan dan *Green Fintech* karena data keberlanjutan yang *comparable* dan *reliable* sangat penting untuk mengembangkan dan melacak kemajuan rencana transisi.

Mengenai taksonomi, Singapore's Green Finance Industry Taskforce meluncurkan konsultasi publik kedua pada Mei 2022. Konsultasi publik ini menyusun kerangka panduan untuk menentukan kegiatan hijau dan transisi serta kriteria teknis *screening* di tiga sektor inti, yakni energi; bangunan dan konstruksi; serta transportasi dan bahan bakar.

Konsultasi juga termasuk panduan pengguna untuk lembaga keuangan dan perusahaan menerapkan taksonomi. Ambang batas untuk sektor lainnya akan dibahas dalam konsultasi publik berikutnya.

Untuk mempercepat pembiayaan kegiatan hijau dan transisi, MAS menyuntikkan modal awal ke Asia Climate Solutions Design Grant senilai 5 juta dollar Singapura yang diselenggarakan oleh Convergence Blended Finance.

Pertama, hal itu akan menyediakan pendanaan tahap awal untuk bukti konsep dan studi kelayakan atas solusi *blended finance* yang inovatif dan terukur untuk mendanai proyek-proyek keberlanjutan. Kedua, memobilisasi modal ke sektor-sektor sasaran berdampak tinggi yang secara signifikan kekurangan modal di Asia.

4. Thailand

Inisiatif Utama (*Key Strategic Initiatives/KSI*) yang direkomendasikan oleh Thailand bertujuan untuk mencapai tujuan keberlanjutan.

KSI merupakan program aksi yang esensial untuk mengubah sektor keuangan dan memenuhi komitmen Working Group on Sustainable Finance (WG-SF) dalam mendorong dan menerapkan keuangan berkelanjutan di sektor keuangan Thailand pada atau sebelum Desember 2025.

Berikut adalah rangkuman dari lima KSI yang termasuk dalam program aksi ini.

Pertama, mengembangkan taksonomi keuangan berkelanjutan yang praktis. Taksonomi ini akan menyelaraskan kebijakan keuangan berkelanjutan dari regulator dengan cara yang sejalan, serta mendorong produk dan layanan keuangan inovatif untuk menarik pendanaan menuju pencapaian tujuan keberlanjutan di Thailand.

Kedua, meningkatkan lingkungan data. Penting untuk melakukan pengungkapan ESG yang berkualitas sesuai dengan standar internasional. Hal ini akan membantu dalam pengambilan keputusan keuangan, serta penyusunan produk dan kebijakan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis.

Ketiga, menerapkan insentif yang efektif. Insentif yang efektif akan mendorong investor untuk memperoleh pengembalian yang sebanding dengan risiko investasi yang dihadapi. Hal ini akan menciptakan pasar yang mendukung dan mendorong lebih banyak investasi dalam produk keuangan berkelanjutan.

Keempat, menciptakan produk dan layanan *Demand-led*. Dalam menciptakan lingkungan ini, permintaan yang kuat untuk produk dan layanan keuangan berkelanjutan akan dihasilkan dan didorong untuk terus tumbuh. Untuk mencapai hal ini, tingkat hambatan peraturan untuk produk dan layanan baru akan diminimalkan.

Kelima, membangun sumber daya manusia. Tenaga kerja di sektor keuangan perlu dilengkapi dengan keterampilan, kompetensi, dan nilai-nilai terkait dengan keuangan berkelanjutan agar dapat mempercepat transformasi menuju keberlanjutan dalam sektor keuangan. Rencana kerja harus diubah menjadi tindakan nyata dengan hasil konkret.

Perkembangan kerangka taksonomi di tiap-tiap negara ASEAN diharapkan akan memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan dalam mendukung tercapainya tujuan keberlanjutan di kawasan.

Inisiatif Implementasi *Green Bonds* dan *Sustainable Bonds* di Negara-negara ASEAN

Regulator sekuritas ASEAN telah memainkan peran penting dalam mendukung komitmen kawasan terhadap keberlanjutan.

Pada bulan November 2017, ACMF meluncurkan *ASEAN Green Bond Standards*, yang merupakan inisiatif keuangan berkelanjutan pertama. Standar ini didasarkan pada Prinsip Obligasi Hijau Internasional, tetapi disesuaikan dengan konteks regional ASEAN.

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa obligasi yang diterbitkan sebagai "hijau" benar-benar mendanai proyek yang memiliki dampak lingkungan positif. Hal ini diikuti oleh *ASEAN Social Bond Standards* dan *ASEAN Sustainability Bond Standards* pada bulan Oktober 2018, yang merupakan serangkaian standar obligasi berkelanjutan.

ASEAN Green Bond Standards dirancang untuk mendorong dan memfasilitasi penerbitan obligasi hijau di pasar modal ASEAN. Obligasi hijau adalah instrumen keuangan yang penghasilannya digunakan untuk mendanai atau membiayai proyek dengan manfaat lingkungan yang jelas.

Adapun *ASEAN Sustainability Bond Standards* mirip dengan standar obligasi hijau. Standar obligasi berkelanjutan ini membantu perusahaan dalam mengeluarkan obligasi yang mendanai proyek dengan manfaat lingkungan dan/atau sosial yang jelas.

Berdasarkan upaya-upaya yang telah mendapatkan dukungan signifikan di kalangan emiten ASEAN, ACMF mengembangkan *Roadmap for ASEAN Sustainable Capital Markets* untuk memetakan jalan menuju keberlanjutan bagi seluruh pasar modal di kawasan.

Peta jalan tersebut merupakan rencana aksi yang dirancang untuk mendorong integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam praktik pasar modal di ASEAN. Peta jalan ini mencakup sejumlah inisiatif, termasuk pengembangan standar dan kerangka kerja untuk produk keuangan berkelanjutan, serta peningkatan transparansi dan pelaporan pada isu-isu keberlanjutan.

Dukungan juga dilengkapi oleh peran bank sentral dan regulator asuransi ASEAN, pada bulan Oktober 2020, yang mendesak peningkatan "agenda keuangan berkelanjutan yang kohesif yang mencakup perbankan, pasar modal, dan bidang asuransi pada ASEAN

Finance Ministers Meeting (AFMM) dan ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM), dengan koordinasi yang lebih besar di antara komite kerja ASEAN yang relevan”.

Sesuai *Green Bond Principle* dan *Sustainability Bond Guidelines*, dibangun empat komponen yang secara umum sejalan dengan lima pilar produk *sustainable finance*. Adapun empat komponen tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Use of Proceeds*. *Proceeds* secara eksklusif harus digunakan untuk proyek yang berkaitan dengan lingkungan, sosial, atau kombinasi keduanya. Hal ini harus dijelaskan dengan jelas dan merupakan bagian dalam dokumentasi legal penerbitan.
2. *Process of Project Evaluation and Selection*. Penerbit harus mengomunikasikan dengan jelas kepada investor apa tujuan penerbitan, proses penentuan aktivitas atau proyek yang memenuhi syarat, dan kriteria kelayakan lainnya.
3. *Management of Proceeds*. *Net proceeds* atas obligasi yang diterbitkan harus dikreditkan ke sub-rekening khusus, dan selanjutnya dilacak dan diverifikasi.
4. *Reporting*. Harus ada pelaporan tentang penggunaan dana.

Berikut adalah beberapa inisiatif implementasi *Green Bonds* dan *Sustainable Bonds* di negara-negara ASEAN dalam mempromosikan keuangan berkelanjutan.

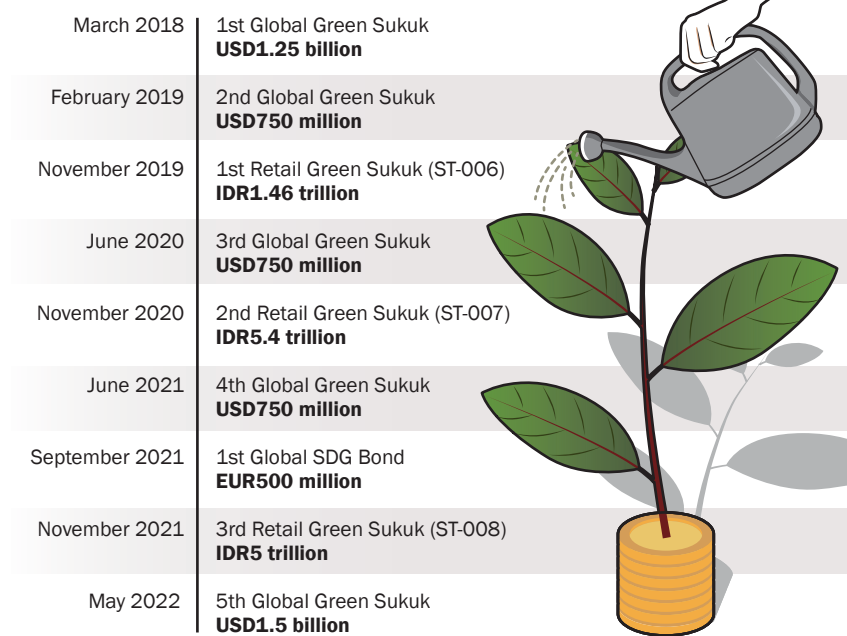
1. Indonesia

Inisiatif hijau juga dilakukan Kementerian Keuangan, di antaranya melalui *Green Bond* dan *Green Sukuk Framework*, *SDG Bond Framework*, pembentukan SDG One sebagai *platform blended finance* Indonesia.

Pada bulan Juni 2022, Bank Rakyat Indonesia (BRI), bank terbesar di Indonesia berdasarkan aset yang merupakan bank milik negara, berhasil menempatkan obligasi berkelanjutan senilai 500 juta dollar AS pertama di pasar untuk membiayai proyek lingkungan dan sosial di Indonesia.

Dua BUMN besar lainnya, Pertamina (minyak dan gas) dan PLN (listrik), telah mengumumkan bahwa mereka mencari pembiayaan hijau untuk proyek infrastruktur hijau dan pengembangan energi terbarukan.

Penerbitan Green Sukuk dan SDG Bond (2018-2022)



EUR = euro, IDR = Indonesia Rupiah, SDG = Sustainable Development Goal, USD = United States dollar.

Sumber: ADB (2022)

Gambar 7.3 Penerbitan Green Sukuk dan SDG Bond (2018-2022).

Sejak 2018, Indonesia turut meramaikan pasar dengan menerbitkan berbagai bentuk *Green Bond* dan *Sustainable Bond*, baik dari sektor korporasi maupun pemerintah di dalam ataupun luar negeri.

Pada Maret 2018, pemerintah menerbitkan *Green Sukuk* pertama sebesar 1,25 miliar dollar AS.

Pada 2023, Pemerintah Indonesia juga mulai menerbitkan Obligasi Biru pertamanya di Jepang dalam dua *series* penerbitan, yakni RIJPY0530 dengan prinsipal sebesar 14,7 miliar yen Jepang, kupon 1,2 persen, dan tenor tujuh tahun. Sementara seri lainnya adalah RIJPY0533 dengan prinsipal sebesar 6 miliar yen Jepang, kupon 1,43 persen, dan tenor 10 tahun.

SBN dalam bentuk Obligasi Biru diterbitkan mengacu pada *SDGs Government Securities Framework (SDGs Framework)* yang telah disusun pada 2021 dan menggunakan standar International Capital Market Association (ICMA) *principles*.

Dana hasil penerbitan Obligasi Biru akan digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang masuk kualifikasi *eligible* sesuai dengan *SDGs Framework* dan telah mendapatkan *Second Party Opinion* dari CICERO dan IISD.

2. Malaysia

Securities Commission Malaysia merilis panduan tentang obligasi dan sukuk hijau pada tahun 2014, yang merupakan salah satu panduan obligasi hijau pertama di dunia. Bank Negara Malaysia juga telah mempromosikan keuangan berkelanjutan melalui inisiatif seperti *Value-based Intermediation* (VBI), yang mendorong institusi keuangan Islam untuk memasukkan pertimbangan ESG ke dalam praktik mereka.

Malaysia memiliki target *net zero emission* paling cepat 2050. Berbagai kebijakan dan cetak biru diimplementasikan untuk mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Kerangka *The Sustainable and Responsible Investment* (SRI) Sukuk diperkenalkan oleh Komisi Sekuritas Malaysia (SC) pada tahun 2014. Instrumen ini terus memainkan peran penting dalam membiayai kebutuhan keberlanjutan Malaysia dengan memobilisasi pembiayaan untuk proyek ramah lingkungan, sosial, dan berkelanjutan, yang memenuhi syarat.

Sebanyak 1,7 miliar dollar AS sukuk telah diterbitkan secara kumulatif per Desember 2021. Penerbitan dari Malaysia merupakan 18 persen dari penerbitan di bawah *The ASEAN Green, Social and Sustainability Standards* di kawasan ini per Desember 2021.

Sejalan dengan transisi Malaysia menuju ekonomi rendah karbon, SC merilis Kerangka Kerja SRI-linked Sukuk pada Juni 2022. SRI-linked Sukuk adalah produk inovatif baru yang memungkinkan perusahaan memanfaatkan pasar modal untuk memenuhi kebutuhan keuangan transisi mereka.

SC juga memperluas Skema Hibah Sukuk dan Obligasi SRI, yang membantu emiten dalam membiayai hingga 90 persen dari biaya peninjauan eksternal, untuk memasukkan penerbitan di bawah Kerangka Kerja Sukuk terkait SRI.

Dalam APBN 2021, 2 miliar MYR dialokasikan untuk penerbitan Sukuk SRI dan obligasi hijau (hingga 31 Desember 2021) di bawah Skema Pembiayaan Teknologi Hijau 3.0.

Untuk lebih mempercepat pengembangan SRI, SC mengembangkan Taksonomi SRI Berbasis Prinsip setelah konsultasi publik. Ini memungkinkan pelaku pasar modal mengidentifikasi kegiatan ekonomi yang selaras dengan tujuan lingkungan, sosial, dan keberlanjutan.

Terkait dengan pasar ekuitas, Bursa Malaysia merilis persyaratan pelaporan keberlanjutan yang ditingkatkan bagi perusahaan terbuka untuk meningkatkan praktik dan pengungkapan keberlanjutan.

Selain FTSE4Good Bursa Malaysia ESG Index dan FTSE4Good Bursa Malaysia Syariah Index, yang diluncurkan masing-masing pada tahun 2014 dan 2021, Bursa Malaysia juga meluncurkan dua indeks bertema ESG baru di bawah FTSE Bursa Malaysia Index Series pada tahun 2022.

Dua indeks tersebut ialah FTSE Bursa Malaysia Top 100 ESG Low Carbon Select Index dan FTSE Bursa Malaysia Top 100 ESG Low Carbon Select Syariah Index.

Pada akhir tahun 2021, Pemerintah Malaysia mengumumkan pengembangan Pasar Karbon Sukarela (VCM) sebagai prakarsa utama untuk mengatasi agenda perubahan iklim, yang memungkinkan perusahaan membeli kredit karbon secara sukarela dari proyek dan sebagai solusi ramah iklim.

Untuk mengoordinasikan semua sumber daya yang tersedia secara nasional, pemerintah akan mempertimbangkan untuk membangun kerangka kerja keuangan berkelanjutan yang lebih komprehensif dan terpadu (*Integrated National Financing Framework*).

3. Singapura

Monetary Authority of Singapore (MAS) telah menyusun *Green Finance Action Plan*, yang bertujuan untuk membangun Singapura sebagai pusat keuangan hijau terkemuka di Asia. MAS juga memberikan pendanaan untuk penelitian tentang risiko iklim dan keuangan hijau.

Bersama dengan Bank Pembangunan Asia (ADB), MAS berpartisipasi dalam prakarsa *Glasgow Financial Alliance for Net Zero* (GFANZ) Asia Pacific Network untuk mengembangkan panduan bagi lembaga keuangan tentang bagaimana mereka dapat memfasilitasi penghapusan batubara pembangkit listrik di Asia Pasifik yang terkelola.

Panduan ini bertujuan memberikan kejelasan yang diperlukan untuk membantu mengarahkan modal ke proyek-proyek tersebut.

MAS terus memberikan hibah untuk membiayai penerbitan pinjaman dan obligasi yang ramah lingkungan dan terkait dengan keberlanjutan.

MAS juga mempromosikan pembiayaan berkelanjutan yang bertanggung jawab dan kredibel oleh bank-bank di Singapura. MAS melibatkan bank dalam rencana transisi, sementara bank memandu dan mendukung rencana transisi klien yang kredibel dengan pembiayaan yang sesuai.

Singapore Exchange (SGX) Listing Rules, yang direvisi pada Desember 2021, mewajibkan semua entitas yang terdaftar di SGX memberikan pelaporan iklim berdasarkan *comply-or-explain* mulai tahun 2022.

Pelaporan iklim akan secara bertahap menjadi wajib mulai tahun 2023 bagi mereka yang beroperasi di industri yang diidentifikasi oleh TCFD sebagai yang paling terpengaruh oleh perubahan iklim.

Bank memandu dan mendukung rencana transisi klien yang kredibel dengan pembiayaan yang sesuai.

Pengungkapan yang sifatnya wajib terkait dengan iklim, yang mengacu pada standar ISSB, akan diterapkan pada lembaga keuangan besar setelah tahun 2023.

Hal ini didasarkan pada ekspektasi pengawasan MAS yang ada untuk semua bank, perusahaan asuransi, dan

manajer aset untuk membuat pengungkapan terkait iklim mulai Juni 2022. Hal itu sesuai dengan kerangka pelaporan internasional yang dianggap baik, seperti rekomendasi TCFD.

Pada Juli 2022, MAS mengeluarkan Pedoman untuk dana ESG ritel yang mewajibkan pengungkapan untuk memperkuat label ESG dengan lebih baik mulai Januari 2023.

Di *Green Fintech*, MAS telah bekerja sama dengan mitra industri di *Project Greenprint* untuk mengembangkan utilitas digital yang memfasilitasi aliran efisien data ESG tepercaya. Ini termasuk (i) , sebuah register yang diluncurkan pada Mei 2022, yang mencatat sumber sertifikasi hijau dan memungkinkan akses lembaga keuangan kepada keputusan pembiayaan hijau dan berkelanjutan.

Selain itu, (ii) ESGenome, platform pengungkapan yang diluncurkan pada September 2022. Platform ini memungkinkan perusahaan yang

terdaftar di SGX mengunggah data keberlanjutan perusahaan dengan cara yang terstruktur dan efisien. Di samping itu, juga memberikan persetujuan untuk akses oleh pengguna eksternal seperti lembaga keuangan dan penyedia layanan yang mencari data yang sebanding.

4. Filipina

Bank Sentral Filipina telah mengeluarkan kerangka *Sustainable Finance Framework*, yang mewajibkan bank untuk mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan ke dalam strategi, operasi, dan manajemen risiko mereka.

Menyadari pentingnya stabilitas keuangan di tengah perubahan iklim dan risiko lingkungan, Bank Sentral Filipina (BSP) mengakui peran industri keuangan dalam memajukan pembangunan berkelanjutan di Filipina, dengan mengeluarkan kerangka *Sustainable Finance Framework*.

Untuk memenuhi komitmen keberlanjutannya, *Sustainable Finance Framework* menguraikan pendekatannya untuk mengumpulkan dana melalui obligasi hijau, obligasi sosial, obligasi keberlanjutan, pinjaman, dan instrumen utang lainnya. Dengan menggunakan kerangka kerja ini, Filipina berupaya mendorong pengembangan pasar *sustainable financing* atau pembiayaan berkelanjutan di dalam negeri.

Instrumen pembiayaan berkelanjutan akan disalurkan untuk mendanai *Eligible Social Projects* dan *Eligible Green Projects* yang mematuhi prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan yang dituangkan dalam berbagai Pedoman dan standar.

Pedoman ini termasuk *International Capital Market Association Green Bond Principles* (GBP), *Social Bond Principles* (SBP), *Sustainability Bond Guidelines* (SBGs), *ASEAN Green Bond Standards* (GBS), *Loan Market Association Green Loan Principles* (GLP), dan *Social Loan Principles* (SLP).

Filipina juga mengeluarkan berbagai kebijakan dan inisiatif tambahan guna mencapai komitmen internasional, regional, dan lokalnya, serta memperkuat upaya saat ini dalam mengembangkan keuangan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Filipina dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

Dalam *Sustainable Finance Roadmap*, diuraikan pendekatan

komprehensif yang menjadi dasar strategi efektif untuk mendorong penggunaan keuangan berkelanjutan secara luas di Filipina. Peta jalan ini disusun untuk mendukung inisiatif dan kebijakan saat ini, yang bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung adopsi keuangan berkelanjutan secara luas di Filipina, menentukan area prioritas, dan mengidentifikasi dasar-dasar perbaikan yang terkait dengan keuangan berkelanjutan.

Selain itu, peta jalan juga memberikan arahan dan rekomendasi strategis yang jelas untuk mempercepat pengembangan keuangan berkelanjutan. Tak ketinggalan, juga memberikan panduan investasi dan kebijakan untuk mendukung transisi menuju ekonomi berkelanjutan.

Untuk memastikan keselarasan dengan rencana aksi yang ada, *Sustainable Finance Roadmap* mempertimbangkan kebijakan dan rencana aksi nasional dan regional, termasuk *ACMF's Roadmap for ASEAN Sustainable Capital Markets*.

Terdapat tiga pilar utama dalam *Sustainable Finance Roadmap* di Filipina:

- Pilar A: Menciptakan Lingkungan yang Kondusif (Pilar Kebijakan)
- Pilar B: Mengutamakan Keuangan Berkelanjutan (Pilar Pembiayaan)
- Pilar C: Mengembangkan Pipeline Berkelanjutan (Pilar Investasi)

Saat ini tidak ada langkah dukungan keuangan khusus untuk produk keuangan berkelanjutan di Filipina. Meskipun demikian, terdapat 20 obligasi berkelanjutan yang diterbitkan, dengan total 4,3 miliar dollar AS dari tahun 2016 hingga Juni 2021.

Meningkatnya komitmen perusahaan Filipina terhadap inisiatif ramah lingkungan menunjukkan potensi kuantitas dan volume obligasi berkelanjutan yang lebih besar. Seiring dengan meningkatnya permintaan, upaya harus difokuskan pada peningkatan pasokan obligasi berkelanjutan.

Produk keuangan berkelanjutan yang patut diperhatikan di Filipina termasuk Multilateral Blended Finance, Agri-Agra Reform Credit Act tahun 2009, dan Akses Pasar, yang dapat ditingkatkan untuk memfasilitasi investasi lintas negara dan penggalangan dana serta mempercepat proses peninjauan aplikasi untuk dana berkelanjutan.

5. Thailand

Bank of Thailand dan otoritas sekuritas Thailand, The Securities and Exchange Commission, telah bekerja sama untuk mendorong keuangan berkelanjutan. Di antaranya, melalui inisiatif penerbitan panduan untuk perbankan berkelanjutan dan peluncuran program *Thailand's Sustainable Finance Initiative*.

Thailand dihadapkan pada berbagai tantangan dan ancaman terkait dengan keberlanjutan, termasuk degradasi lingkungan dan dampak dari perubahan iklim. Untuk mengatasi tantangan ini, sektor keuangan memegang peranan penting dalam mengarahkan alokasi modal menuju investasi yang lebih berkelanjutan dan menciptakan peluang ekonomi melalui inovasi pasar. Oleh karena itu, diperlukan inisiatif strategis yang kuat untuk mendorong transformasi sektor keuangan menuju keberlanjutan.

Thailand berkomitmen terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan *nationally determined contribution* (NDC) yang tertuang dalam Strategi Nasional dan Rencana Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional (NESDP) ke-12.

Selain itu, Thailand telah merancang *National Climate Change Master Plan* (2015-2050) untuk mencapai pertumbuhan rendah karbon dan ketahanan terhadap perubahan iklim pada tahun 2050. NDC-nya bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 20 persen dari tingkat bisnis biasa pada tahun 2030.

Dalam mengembangkan ekosistem keuangan berkelanjutan, setiap otoritas regulasi di Thailand telah membuat kemajuan yang signifikan di bidangnya masing-masing. Pasar modal Thailand lebih maju dalam mengadopsi kerangka keuangan berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan industri investasi internasional yang mengedepankan *the Principles of Responsible Investment* (PRI) sejak tahun 2005.

Di sektor perbankan telah ada inisiatif seperti peluncuran *Sustainable Banking Guidelines* dan di industri asuransi terdapat perkembangan positif mengenai isu inklusi keuangan. Panduan untuk perbankan berkelanjutan dan peluncuran program *Thailand's Sustainable Finance Initiative* dilakukan melalui kerja sama Bank of Thailand (BoT) dan Securities and Exchange Commission (SEC) Thailand.

BoT menetapkan rencana strategis tiga tahun (2020-2022), dengan beberapa tujuan terkait keberlanjutan. Tujuan tersebut antara lain

mendorong lembaga keuangan untuk mengintegrasikan keberlanjutan dalam bisnis dan operasi mereka, mengurangi utang rumah tangga, mempromosikan layanan keuangan yang adil dan perlindungan konsumen, serta meningkatkan literasi dan disiplin keuangan di kalangan konsumen.

BoT juga menjadi anggota Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS) dan telah meluncurkan Forum Perbankan Berkelanjutan Bangkok sebagai wadah untuk mengedukasi industri perbankan mengenai keberlanjutan dan menghadapi tantangan manajemen risiko.

Dalam sektor pasar modal, SEC Thailand aktif dalam mempromosikan keuangan berkelanjutan dan mengembangkan pasar modal berkelanjutan di Thailand. SEC berkolaborasi dengan Bursa Efek Thailand dan pihak terkait lainnya untuk memosisikan Thailand sebagai pemimpin di pasar modal berkelanjutan, baik di ASEAN maupun secara global.

Mereka juga berpartisipasi dalam inisiatif internasional seperti Sustainable Finance Organization International Securities Commission dan Sustainable Stock Exchanges. SEC juga memiliki peran penting dalam memajukan alokasi modal menuju proyek berkelanjutan, terutama melalui penerbitan obligasi hijau.

Secara keseluruhan, tujuan dan inisiatif keuangan berkelanjutan ASEAN telah mencerminkan komitmen kawasan ini untuk mendorong pembangunan yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berikut beberapa contoh inisiatif lain dalam rangka mendorong keuangan berkelanjutan dalam kawasan ini.

1. Inisiatif dengan institusi keuangan internasional

ASEAN bekerja sama dengan berbagai institusi seperti Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Badan Pembangunan Internasional Jepang (JICA), Bank Pembangunan Asia (ADB), serta Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pemahaman negara-negara anggota tentang keuangan berkelanjutan. Kolaborasi ini telah mencakup berbagai program

pelatihan, penelitian, dan peningkatan kapasitas yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan.

2. Inisiatif multilateral dan regional

ASEAN telah berpartisipasi dalam berbagai forum yang berfokus pada perubahan iklim dan keuangan berkelanjutan, antara lain ASEAN Working Group on Climate Change (AWGCC), ASEAN Environment Ministers Meeting (AEMM), ASEAN Finance Ministers Meeting (AFMM), ASEAN Capital Markets Forum (ACMF), ASEAN Center for Energy (ACE), ASEAN Social Forestry Network (ASFN).

Selain itu, juga ASEAN Learning Curriculum for Sustainable Finance yang dikembangkan oleh ASEAN Financial Centres Initiative (AFCI) bekerja sama dengan ASEAN Capital Markets Forum (ACMF).

Partisipasi di tingkat regional dalam berbagai forum dan dialog multilateral ini memungkinkan ASEAN berkontribusi secara aktif dalam pengembangan dan implementasi solusi untuk tantangan perubahan iklim dan keuangan berkelanjutan.

3. Inisiatif nasional

Beberapa negara anggota ASEAN telah mengambil inisiatif sendiri untuk mempromosikan keuangan berkelanjutan. Misalnya, otoritas keuangan di beberapa negara telah merilis Pedoman dan kerangka kerja untuk memandu bank dan institusi keuangan lainnya dalam mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan ke dalam praktik mereka.

Selain bentuk-bentuk inisiatif di atas, terbangun pula inisiatif publik-swasta untuk pembangunan berkelanjutan kawasan ASEAN. Kemitraan publik-swasta ini tidak hanya mendatangkan manfaat ekonomi dan lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) PBB dan komitmen ASEAN terhadap keberlanjutan.

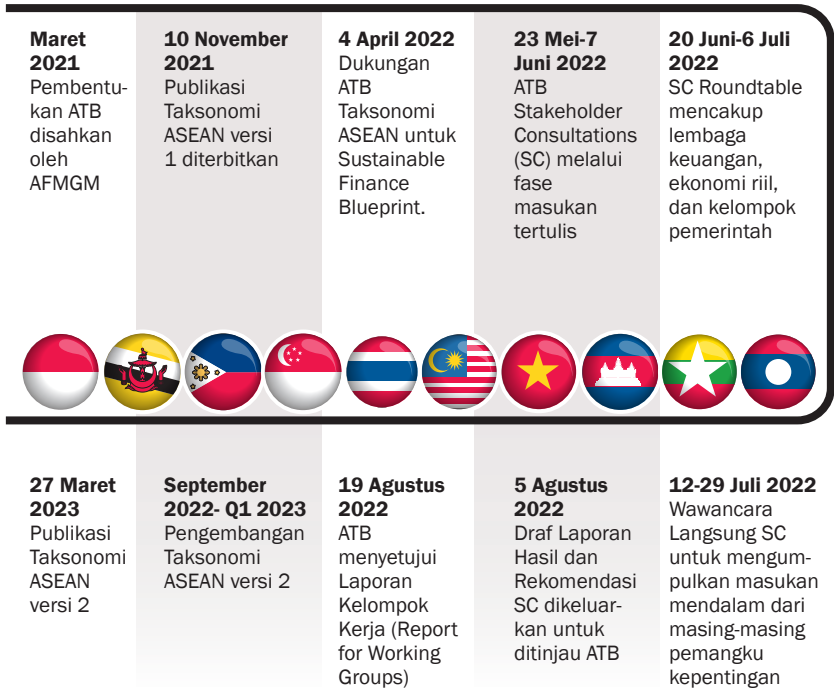
Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, kemitraan seperti ini menjadi semakin penting dan relevan. Beberapa contoh kemitraan

publik-swasta di antaranya (1) proyek tenaga surya di Vietnam, (2) proyek *smart city* di Singapura, (3) obligasi hijau di Indonesia, (4) pembangunan hidroelektrik di Laos, (5) proyek energi angin di Filipina, dan (6) program reforestasi di Malaysia.

Taksonomi ASEAN: Penguatan Fondasi Pengembangan Keuangan Berkelanjutan

Kepemimpinan Indonesia di ASEAN dengan tema "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth" memberikan peluang untuk menetapkan Pedoman global dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, ASEAN juga telah terbukti menjadi kawasan yang stabil dan tangguh dengan rekam jejak integrasi keuangan yang sukses. Taksonomi ASEAN ini merupakan contoh konkret bagi anggota ASEAN memastikan bahwa kawasan ini tetap menarik bagi investor.

Milestone Taksonomi ASEAN



Sumber: AFCDM (2023)

Gambar 7.4 Milestone Taksonomi ASEAN.

Komitmen Indonesia dalam mewujudkan keuangan berkelanjutan bersama negara anggota ASEAN lainnya telah dimulai sejak terbentuknya ASEAN Taxonomy Board (ATB) pada Maret 2021 dan diterbitkannya *ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance* versi 1 (ATSF v1) pada November 2021 dalam rangkaian COP 26.

Taksonomi ASEAN tersebut adalah panduan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan proyek dan kegiatan ekonomi berkelanjutan. Taksonomi ini dimaksudkan untuk memfasilitasi transisi negara-negara anggota ASEAN (AMS) dalam mengakui keberagaman dalam pembangunan ekonomi, sektor keuangan, dan kematangan infrastruktur.

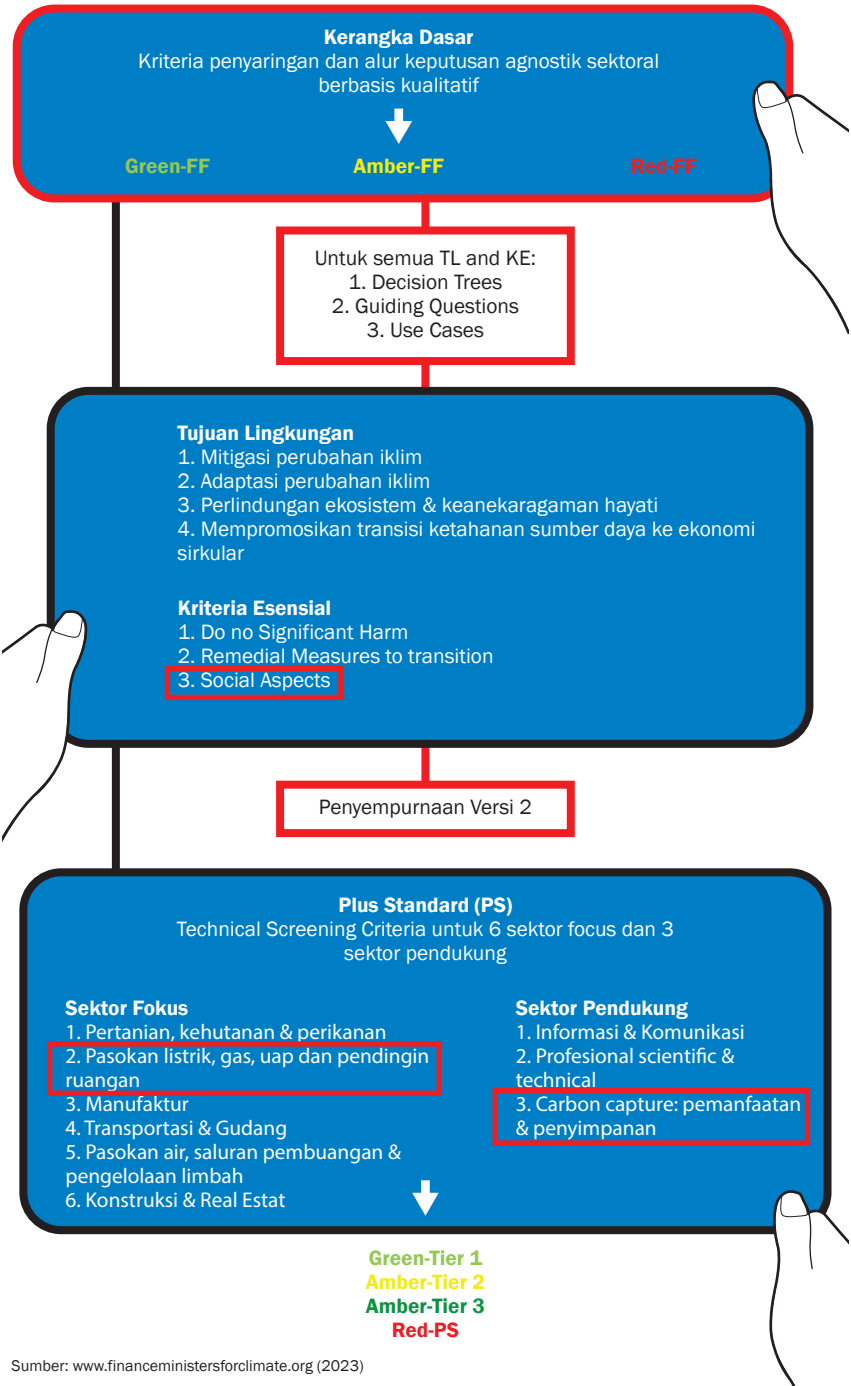
Sejak tahun 2021, Taksonomi ASEAN telah melewati beberapa tonggak penting (*key milestones*). Pada Maret 2021, pembentukan ASEAN Taxonomy Board (ATB) disahkan oleh ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM). Pada 10 November tahun yang sama, publikasi Taksonomi ASEAN versi 1 diterbitkan.

Pada 4 April 2022, ATB mengesahkan Taksonomi ASEAN untuk *Sustainable Blueprint*. Dilanjutkan pada 23 Mei hingga 7 Juni 2022, ATB Stakeholder Consultations (SC) dimulai dengan fase masukan tertulis (*feedback phase*). Selanjutnya, dilakukan Sesi Meja Bundar SC yang mencakup lembaga keuangan, ekonomi riil, dan kelompok pemerintah.

Juli 2022 merupakan fase Wawancara Langsung SC untuk mengumpulkan masukan atau *feedback* mendalam dari tiap-tiap pemangku kepentingan. Pada Agustus 2022, draf Laporan Hasil dan Rekomendasi SC, yang sebelumnya telah dilakukan, dikeluarkan untuk ditinjau ATB.

ATB selanjutnya menyetujui Laporan Kelompok Kerja (*Report for Working Groups*) pada 19 Agustus 2022 untuk melaksanakan tahap pembangunan selanjutnya. Pada September 2022 hingga triwulan I-2023, dilakukan pengembangan Taksonomi ASEAN versi 2 yang akhirnya secara resmi dipublikasikan pada 27 Maret 2023.

Taksonomi ASEAN untuk Keuangan Berkelanjutan telah dikembangkan sebagai landasan umum yang memungkinkan implementasi transisi yang tertib dan mendorong adopsi keuangan berkelanjutan oleh negara anggota ASEAN. Taksonomi ASEAN akan menjadi prioritas yang lebih besar untuk dibahas oleh para menteri keuangan ASEAN dan gubernur bank sentral di masa depan.



Sumber: www.financeministersforclimate.org (2023)

Gambar 7.5 Desain Taksonomi ASEAN.

Hal ini sangat penting karena sepuluh negara anggota ASEAN memiliki beragam sistem dan kebijakan mengenai keuangan berkelanjutan. Oleh karena itu, Taksonomi ASEAN akan berfungsi sebagai bahasa umum di berbagai yurisdiksi untuk berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai pelabelan kegiatan ekonomi dan instrumen keuangan.

Peta Jalan Pasar Modal Berkelanjutan ASEAN: Mendukung Ekosistem *Green Bonds* dan *Sustainable Bonds*

Negara-negara anggota ASEAN telah membuat komitmen signifikan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di kawasan dan memitigasi risiko sosial dan lingkungan yang terkait dengan perubahan iklim. Sejalan dengan komitmen ini, ACMF telah sepakat untuk memprioritaskan pengembangan ekosistem pasar modal ASEAN yang terbuka dan dinamis. Pasar modal yang memfasilitasi dan memobilisasi modal sektor swasta untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan.

Untuk membantu mewujudkan tujuan ini, ACMF telah mengembangkan Peta Jalan Pasar Modal Berkelanjutan ASEAN. Peta jalan ini berisi rekomendasi-rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk memberikan arahan strategis dan memandu ACMF dan para anggotanya dalam mengembangkan rencana aksi dan inisiatif di seluruh kawasan, berdasarkan upaya terbarunya dalam bidang keberlanjutan.

Peta jalan ini dikembangkan melalui keterlibatan para pemangku kepentingan utama di ASEAN dan sekitarnya; analisis dan perbandingan peta jalan internasional, nasional, dan regional yang relevan; serta tinjauan terhadap publikasi dan praktik terbaik dari berbagai kelompok industri dan pelaku pasar modal.

Beberapa masalah yang diidentifikasi adalah sebagai berikut.

1. Kurangnya transparansi informasi dan kualitas data.
2. Perlunya memperluas partisipasi dan akses antarpelaku pasar secara inklusif.
3. Mengingat kondisi keuangan berkelanjutan yang baru lahir, perlu peningkatan kapasitas di antara para pemangku kepentingan.

Peta jalan ini disusun berdasarkan empat bidang prioritas utama yang mengatasi masalah-masalah ini, yakni (i) memperkuat fondasi pasar modal yang berkelanjutan, (ii) mendorong pengembangan produk dan memungkinkan akses ke daerah-daerah yang kurang terlayani, (iii) meningkatkan kesadaran dan membangun kapasitas, dan (iv) meningkatkan konektivitas regional.

- a) Area Prioritas I: Penguatan fondasi, mengakui pentingnya menciptakan lingkungan yang saling percaya dan pemahaman yang jelas dan sama antara pengguna pasar modal ASEAN seperti emiten dan investor.

Untuk itu, negara-negara ASEAN perlu mengadopsi langkah-langkah yang konsisten untuk meningkatkan transparansi dan komparabilitas pelaporan dalam mempromosikan keberlanjutan. Hal ini dapat dicapai melalui penyelarasan langkah-langkah pengungkapan ESG dan kebijakan untuk emiten dan manajer aset. Strategi ini juga mendorong regulator untuk mewajibkan emiten mengungkapkan risiko ESG yang material (termasuk risiko transisi) dan peluang terkait tata kelola, strategi, dan manajemen risiko.

- b) Area Prioritas II: Mengatalisasi produk keuangan yang berkelanjutan, dan meningkatkan akses sumber daya keuangan untuk daerah-daerah yang kurang terlayani, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah.

Hal ini membutuhkan stimulasi dari sisi penawaran dan permintaan. Di sisi penawaran, regulator dapat mendukung pengembangan produk-produk inovatif dan memfasilitasi akses pasar Lintas Negara untuk produk-produk tersebut. Untuk meningkatkan permintaan, terdapat peluang memanfaatkan teknologi finansial (*fintech*), terutama mengingat preferensi generasi muda.

- c) Area Prioritas III: Meningkatkan kesadaran dan pengembangan kapasitas, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang inisiatif keuangan berkelanjutan dan membangun kapasitas teknis di antara para pelaku pasar modal dan masyarakat umum.

Peningkatan kesadaran, serta peningkatan kapasitas dan keahlian, sangat penting karena perjalanan keuangan berkelanjutan ASEAN masih dalam tahap awal. Dengan meningkatnya minat investor untuk mengembangkan keahlian mereka dalam keuangan berkelanjutan, maka perlu dilakukan upaya-upaya yang melibatkan para ahli terkait untuk memberikan kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi seluruh pemangku kepentingan pasar modal.

- d) Area Prioritas IV: Peningkatan konektivitas, mengakui bahwa pengembangan ekosistem keuangan berkelanjutan harus merupakan upaya kolaboratif dan terpadu dari semua pemangku kepentingan.

Langkah-langkah harus diambil untuk mengembangkan ekosistem keuangan berkelanjutan yang saling terkait dan kuat di ASEAN, melalui pertukaran informasi dan pengetahuan dengan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki keahlian teknis dalam hal yang berkaitan dengan keberlanjutan. Bersamaan dengan itu, ekosistem ini dapat diperkuat dengan mengembangkan kemitraan strategis dengan organisasi pembangunan multilateral, filantropi, dan LSM.

Gambar 7.6 menjelaskan secara ringkas keempat prioritas dalam peta jalan pasar modal berkelanjutan ASEAN.

Pasar modal berkelanjutan bisa diisi dari berbagai kelas aset termasuk ekuitas publik, ekuitas swasta, modal ventura, dan obligasi.

ASEAN telah memulai dengan pasar obligasi hijau. ASEAN telah menerbitkan *ASEAN Green, Social and Sustainability Bond Standards* yang mendukung prioritas 1 dalam peta jalan pasar modal berkelanjutan. Saat ini *green bonds*, *social bonds*, dan *sustainability bonds* merupakan produk keuangan berkelanjutan yang paling umum tersedia di pasar modal ASEAN.

Untuk mendorong lebih banyak modal ke dalam proyek dan perusahaan berkelanjutan, penting untuk mengembangkan produk dan standar yang lebih berkelanjutan yang memungkinkan terciptanya peluang baru dan dapat diakses oleh lebih banyak investor.

Area Prioritas Peta Jalan Pasar Modal Berkelanjutan ASEAN

Area Prioritas	Cakupan
Area Prioritas I: Penguatan Fondasi	• Mempromosikan Pengungkapan Keberlanjutan Perusahaan. • Mendorong Pengungkapan Informasi kepada Investor Institusional • Memeriksa Taksonomi Umum • Mengeksplorasi Standar Transisi
 Area Prioritas II: Mengkatalisasi Produk dan Memungkinkan Akses ke Daerah yang Kurang Terlayani	• Mengembangkan Standar Pembiayaan yang Berkelanjutan dan Bertanggung Jawab • Meningkatkan Akses Pasar untuk Produk Berkelanjutan • Mengembangkan Indeks ESG • Menggunakan Teknologi Digital untuk Memfasilitasi Partisipasi Lintas Negara dalam Produk Berkelanjutan • Mengeksplorasi Insentif
Area Prioritas III: Meningkatkan Kesadaran & Pengembangan Kapasitas	• Meningkatkan Kompetensi Teknis • Meningkatkan Knowledge Transfer • Meningkatkan Kesadaran Masyarakat
Bidang Prioritas IV: Peningkatan Konektivitas	• Mengembangkan Basis Data Publik untuk Produk, Proyek, dan Investor Berkelanjutan • Memanfaatkan Upaya Multilateral dan Filantropi • Upaya Koordinasi dengan Sektor Publik dan Keuangan.

Sumber: AFCDM (2023)

Gambar 7.6 Area Prioritas Peta Jalan Pasar Modal Berkelanjutan ASEAN.

Selanjutnya, untuk mengatalisasi perkembangan obligasi (*bonds*) yang merupakan prioritas kedua, perlu dipastikan konsistensi dan keselarasan dengan standar obligasi yang ada jika dibutuhkan, menyusul pengembangan *ASEAN Green, Social and Sustainability Bond Standards*.

Selain itu, diperlukan penerapan insentif, seperti pengurangan pajak atas obligasi berkelanjutan ataupun pemberian subsidi biaya penerbitan dan suku bunga obligasi berkelanjutan. Hal ini mengingat biaya penerbitan produk berkelanjutan lebih tinggi dibandingkan dengan produk konvensional karena penerbit harus menanggung biaya tambahan untuk kepatuhan dan pemantauan eksternal.

Pengembangan kapasitas dan peningkatan konektivitas sebagai prioritas kedua dan keempat yang penting dilakukan untuk mendukung obligasi berkelanjutan. Hal itu dilakukan melalui kemitraan dengan

para pemangku kepentingan, termasuk pelaku sektor keuangan (seperti *fund manager*, bank, perusahaan asuransi, dan bursa) serta lembaga multilateral untuk membangun kapasitas komprehensif dalam kompetensi teknis.

Selain itu, organisasi pembangunan multilateral memiliki kemampuan dan sumber daya untuk melakukan investasi awal, mendukung proyek-proyek yang berisiko lebih tinggi, dan memberikan pinjaman dengan tingkat bunga yang lunak (jika diperlukan) untuk mengatalisasi obligasi ramah lingkungan, sosial, dan berkelanjutan.

ASEAN melalui ACMF juga bisa bekerja sama dengan pemerintah nasional dan bank sentralnya untuk menjajaki peningkatan penerbitan kelas aset berkelanjutan seperti *green* dan *sustainable bonds*.

Peran Bank Sentral dalam Mendorong Keuangan Berkelanjutan

Tanggung jawab perubahan iklim dan lingkungan tidak lepas dari peran bank sentral dan otoritas moneter, terutama dalam mendorong pertumbuhan keuangan berkelanjutan.

Melalui publikasi laporan *The Roles of ASEAN Central Bank in Managing Climate and Environment-Related Risks*, bank sentral dan otoritas moneter di negara-negara ASEAN secara khusus mengeksplorasi peran bank sentral di kawasan ASEAN dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.

Lebih lanjut, laporan ini juga bertujuan memberikan panduan kepada bank sentral dalam melakukan aksi mitigasi dan adaptasi risiko iklim, serta mempromosikan keuangan berkelanjutan di wilayah ASEAN.

Bank sentral di ASEAN memiliki peran penting dalam mendukung sektor keuangan mengelola risiko terkait perubahan iklim serta mendorong pertumbuhan keuangan berkelanjutan. Hal ini dapat diterapkan antara lain melalui:

- a) mengintegrasikan pertimbangan perubahan iklim dan lingkungan dalam pengawasan keuangan;
- b) menerapkan *stress test* dan *scenario analysis* untuk mengidentifikasi simpul-simpul eksposur terhadap risiko iklim dan lingkungan, serta memformulasikan kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan;
- c) mendukung *disclosure* dan pelaporan keberlanjutan yang dapat

mendukung kredibilitas kerangka keuangan berkelanjutan nasional dan kawasan;

- d) memformulasikan kerangka pengaturan dan kebijakan yang mendorong pertumbuhan keuangan berkelanjutan; dan
- e) menjalankan koordinasi dan kolaborasi lintas regulator keuangan di tingkat kawasan dan internasional untuk mengharmonisasikan kebijakan terkait keuangan berkelanjutan, berbagi praktik terbaik, dan memperkuat *knowledge base* di bidang pengaturan keuangan berkelanjutan.

Mengintegrasikan Pertimbangan Risiko Perubahan Iklim dalam Pengawasan Sektor Keuangan

Risiko perubahan iklim dan kerusakan lingkungan menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan bank sentral dalam menjalankan mandatnya. Hal ini dilatarbelakangi perkembangan kondisi strategis perekonomian.

Risiko perubahan iklim dan lingkungan telah termaterialisasi dalam bentuk kenaikan suhu permukaan bumi serta meningkatnya frekuensi dan keparahan cuaca ekstrem dan bencana alam.

Meningkatnya frekuensi dan keparahan insiden terkait dengan perubahan iklim mengganggu aktivitas perekonomian di multisektor. Ini terjadi antara lain di bidang pertanian, jasa dan pariwisata, konstruksi, energi, dan pertambangan.

Sebagai contoh, menurunnya produktivitas agrikultur akibat suhu bumi yang semakin hangat berdampak pada volatilitas harga pangan (inflasi pangan) serta pemburukan kinerja perusahaan. Hal itu selanjutnya meningkatkan risiko kredit.

Dalam skala yang besar, hal ini berpotensi mendisrupsi stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan. Potensi disrupsi ini mendorong regulator untuk mengambil peran dan inisiatif, baik yang bersifat mitigatif maupun adaptif terhadap risiko tersebut.

Di samping itu, meningkatnya kesadaran global akan pentingnya upaya membatasi perubahan iklim menuntut perusahaan, termasuk institusi keuangan, untuk mengintegrasikan pertimbangan risiko perubahan iklim dan lingkungan pada praktik bisnisnya.

Banyak negara mulai menerapkan regulasi untuk membatasi emisi gas rumah kaca dari praktik bisnis pelaku usaha. Salah satunya melalui

penerapan pajak karbon pada perusahaan dan rantai pasok yang beroperasi di negaranya ataupun negara lain (*cross-border adjustment mechanism/CBAM*).

Investor dengan preferensi di bidang keberlanjutan turut memilah dan membatasi investasinya pada perusahaan yang memiliki pengelolaan ESG baik. Perkembangan ini membuat pelaku usaha yang tidak melakukan transisi terekspos pada risiko penurunan daya saing (*competitiveness*) usahanya. Hal itu diperkuat dengan ragam inisiatif internasional yang mengakui dan mendorong bank sentral untuk mengintegrasikan risiko perubahan iklim dalam kerangka pengawasan dan pengaturan sektor keuangan.

Sebagai otoritas yang memiliki tanggung jawab utama menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan, bank sentral memiliki otoritas dan kapasitas untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan di wilayah tersebut. Dalam menghadapi risiko perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, bank sentral perlu memainkan peran aktif dalam mengintegrasikan risiko terkait iklim.

Upaya mengintegrasikan risiko iklim dalam kerangka pengawasan sektor keuangan dapat dilakukan melalui penerapan strategi manajemen risiko terkait iklim. Untuk mengadopsi strategi manajemen risiko terkait perubahan iklim, bank sentral perlu melakukan langkah identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan.

Pertama, identifikasi risiko terkait iklim menjadi langkah awal yang penting. Bank sentral perlu memahami bagaimana perubahan iklim dan kerusakan lingkungan dapat memengaruhi sektor keuangan dan lembaga keuangan di wilayah ASEAN. Ini melibatkan analisis mendalam tentang dampak perubahan suhu global, bencana alam yang semakin sering terjadi, dan risiko lain yang berkaitan dengan lingkungan serta transmisinya pada sistem keuangan.

Langkah selanjutnya adalah pengukuran risiko. Bank sentral perlu mengembangkan metode dan indikator yang memungkinkan mereka untuk mengukur tingkat risiko terkait iklim yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Ini mencakup menganalisis eksposur sektor keuangan terhadap risiko seperti perubahan iklim ekstrem, fluktuasi harga energi, dan perubahan kebijakan iklim.

Terakhir, bank sentral perlu secara terus-menerus memantau risiko

tersebut agar dapat mengambil tindakan yang diperlukan. Pemantauan yang baik memungkinkan bank sentral untuk mendeteksi tren dan pola yang muncul, serta mengidentifikasi celah dan kelemahan yang perlu diperbaiki dalam sistem keuangan.

Dengan memahami risiko ini, bank sentral dapat merancang kebijakan yang tepat untuk memitigasi risiko tersebut dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Menerapkan *Stress Test* dan *Scenario Analysis* untuk Menilai Risiko Perubahan Iklim

Dalam mengelola risiko perubahan iklim yang semakin nyata, bank sentral di negara-negara ASEAN perlu melakukan *stress test* dan menganalisis skenario untuk memahami dan mengelola risiko yang timbul.

Stress test merupakan metode penting yang digunakan oleh bank sentral di ASEAN untuk menguji ketangguhan sistem keuangan dalam menghadapi risiko iklim. Uji ketahanan ini melibatkan skenario yang mencerminkan perubahan iklim ekstrem (misalnya skenario buruk/*adverse* dan sangat parah/*severe*), seperti kenaikan suhu yang drastis dan bencana alam yang serius.

Dengan menganalisis bagaimana lembaga keuangan bertahan dalam skenario-skenario ini, bank sentral dapat mengidentifikasi celah dan kerentanan yang perlu ditangani untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Pelaksanaan *stress test* perlu dilengkapi dengan analisis skenario.

Scenario analysis adalah alat yang digunakan untuk memahami dan mengantisipasi risiko terkait dengan iklim di masa depan. Dalam analisis ini, berbagai skenario risiko iklim diidentifikasi dan dianalisis, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini mencakup narasi mengenai perubahan kebijakan iklim, fluktuasi harga energi, dan dampak ekonomi dari perubahan suhu global.

Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan ini, bank sentral dapat mengambil langkah-langkah pencegahan dan merancang kebijakan yang sesuai. Melalui uji ketahanan dan analisis skenario, bank sentral dapat menyikapi risiko terkait iklim secara lebih *well-informed* dengan mempertimbangkan berbagai simpul risiko dan kemungkinan yang dapat terjadi.

Dengan memahami bagaimana sistem keuangan akan bertahan dalam kondisi yang ekstrem, bank sentral dapat merancang kebijakan dan langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Langkah-langkah ini meliputi mendorong lembaga keuangan untuk mengintegrasikan risiko iklim dalam proses pengambilan keputusan mereka, memperkuat kerangka regulasi yang mendukung, dan mempromosikan investasi berkelanjutan.

Upaya Mendorong Pengungkapan dalam Keuangan Berkelanjutan

Selain mengintegrasikan risiko terkait dengan iklim ke dalam pengawasan keuangan, bank sentral di ASEAN dapat berperan nyata meningkatkan pengungkapan (*disclosure*) dan pelaporan terkait iklim.

Pada Juni 2023, The International Financial Reporting Standards (IFRS) melalui International Sustainability Standards Board (ISSB) telah menerbitkan standar laporan keberlanjutan global bernama IFRS S1 dan IFRS S2. Standar pelaporan ini akan diimplementasikan pertama kali untuk laporan tahun 2024.

Pengungkapan risiko terkait iklim melibatkan lembaga keuangan dalam memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang bagaimana risiko perubahan iklim dapat memengaruhi operasi, keuangan, dan kinerja mereka. Hal ini meliputi aspek (i) tata kelola, (ii) strategi, (iii) manajemen risiko, serta (iv) metrik dan target.

Melalui pengungkapan yang tepat, kredibel, dan dapat diperbandingkan, para pemangku kepentingan dapat memahami risiko dan peluang terkait iklim, serta kapabilitas yang dimiliki oleh lembaga keuangan, sehingga membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang lengkap.

Pelaporan terkait iklim melibatkan lembaga keuangan yang menyediakan informasi secara terstruktur dan terstandardisasi tentang risiko iklim, kinerja keberlanjutan, dan upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak lingkungan. Hal ini mencakup pengungkapan

Bank sentral di ASEAN dapat berperan nyata meningkatkan pengungkapan dan pelaporan terkait iklim.

tentang tingkat emisi karbon, penggunaan sumber daya, praktik investasi berkelanjutan, dan komitmen terhadap tujuan perubahan iklim global.

Melalui pelaporan ini, lembaga keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas dan membangun kepercayaan dengan para pemangku kepentingan.

Bank sentral di ASEAN memiliki peran penting dalam mendorong pengungkapan dan pelaporan terkait iklim oleh lembaga keuangan. Bank sentral dapat mengembangkan dan/atau mengadopsi kerangka kerja dan Pedoman untuk pengungkapan risiko iklim yang diakui secara global.

Regulator sektor keuangan dapat ikut memberikan panduan tentang praktik pelaporan yang baik, serta mengadakan dialog, *workshop*/pelatihan. Selain itu, kerja sama dengan lembaga keuangan untuk mempromosikan transparansi.

Dengan memainkan peran ini, bank sentral berperan aktif dalam memperkuat tata kelola keuangan berkelanjutan. Melalui pengungkapan dan pelaporan terkait iklim, bank sentral di ASEAN dapat mencegah praktik *greenwashing*, memperkuat kredibilitas keuangan berkelanjutan di kawasan, serta mendorong pergeseran menuju keuangan yang berkelanjutan.

Pendekatan Kebijakan untuk Mendukung Keuangan Berkelanjutan

Selanjutnya, bank sentral di ASEAN dapat turut mengambil peran dalam mendukung akselerasi keuangan hijau dan investasi berkelanjutan melalui pendekatan kebijakan. Bank sentral di ASEAN dapat mendorong lembaga keuangan untuk menerapkan prinsip keuangan hijau dan memasukkan aspek keberlanjutan dalam evaluasi risiko dan kebijakan mereka.

Selain itu, melalui inovasi kebijakan dan kerangka pengaturan, bank sentral juga dapat memberikan insentif dan stimulus bagi lembaga keuangan yang berinvestasi secara berkelanjutan, serta mempromosikan wawasan dan kesadaran tentang pentingnya keuangan hijau di masyarakat.

Regulator sektor keuangan dapat turut mendorong penerbitan instrumen keuangan berkelanjutan seperti *Green Bond/Sukuk* dan/

atau *SDG Bond* melalui pemberian Pedoman dan bimbingan kepada lembaga keuangan dalam menerapkan prinsip-prinsip obligasi hijau, termasuk dalam hal penilaian risiko dan penggunaan dana yang diperoleh.

Bank sentral di ASEAN juga telah menerapkan beberapa inisiatif kebijakan untuk mendukung pertumbuhan keuangan berkelanjutan. Sebagai contoh, Bank Negara Malaysia telah meluncurkan program *Low Carbon Transition Fund for SMEs* yang menyediakan dana terjangkau bagi UMKM yang mengembangkan dan/atau menerapkan teknologi ramah lingkungan atau prinsip bisnis sirkular.

Senada dengan hal ini, State Bank of Vietnam memberikan kebijakan subsidi suku bunga untuk kredit hijau bagi UMKM. Bank of Thailand telah mengeluarkan *policy statement* mendorong institusi keuangan untuk menginternalisasikan risiko dan kesempatan terkait perubahan iklim dan lingkungan. Banko Sentral ng Pilipinas menerbitkan *Philippine Sustainable Finance Roadmap* sebagai acuan bagi industri tentang arah dan strategi kebijakan keuangan berkelanjutan di Filipina.

Bank Indonesia telah mengimplementasikan instrumen kebijakan makroprudensial untuk mendukung pertumbuhan pembiayaan berkelanjutan, antara lain, melalui:

- a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/13/PBI/2019: Ketentuan uang muka dan rasio *loan to value* dan uang muka yang lebih terjangkau untuk pembiayaan kendaraan bermotor listrik dan properti yang memenuhi kriteria berwawasan lingkungan (*green building*).
- b) Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/PBI/2022: Memperkuat kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) dengan mempertimbangkan pembiayaan tidak langsung kepada lembaga tertentu yang diberi mandat untuk mendukung pembiayaan proyek berkelanjutan, serta kepemilikan surat berharga berkelanjutan oleh bank sebagai komponen RPIM.
- c) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023: Menetapkan kebijakan insentif untuk bank yang menyalurkan pembiayaan kepada sektor tertentu, termasuk pembiayaan yang berwawasan lingkungan.

Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi

Mempertimbangkan bahwa iklim merupakan *global public goods*, diperlukan upaya bersama secara global dalam mengelolanya. Kolaborasi lintas regulator keuangan dan organisasi internasional dibutuhkan dalam mengelola risiko perubahan iklim.

Bank sentral ASEAN memainkan peran penting melalui kerja sama dengan bank sentral lainnya di seluruh dunia. Kolaborasi memungkinkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman, serta memperkuat upaya bersama untuk mencapai keberlanjutan global.

Berbagi praktik terbaik dan pengetahuan antara bank sentral di ASEAN menjadi kunci untuk mengatasi risiko iklim secara efektif. Melalui pertemuan, konferensi, dan forum internasional, bank sentral dapat mempelajari strategi dan pendekatan terbaik dari bank sentral dan regulator lainnya.

Di antaranya, melalui G20 Sustainable Finance Working Group, ASEAN Senior Level Committee Task Force on Sustainable Finance, dan EMEAP Interest Group on Sustainable Finance. Forum ini mendorong pertukaran pengetahuan tentang pengukuran risiko iklim, *disclosure* dan pelaporan, pengembangan instrumen keuangan berkelanjutan, serta inisiatif pengaturan dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan keuangan berkelanjutan.

Kolaborasi lintas regulator, khususnya dalam kawasan yang sama, dapat memperkuat harmonisasi kebijakan regional dalam mengelola risiko dan mendukung keuangan berkelanjutan, antara lain inisiatif ASEAN untuk membangun *ASEAN Taxonomy on Sustainable Finance* dan *ASEAN Green Map*.

Melalui koordinasi lintas bank sentral di ASEAN, disepakati beberapa rekomendasi bersifat *non-binding* yang dapat diterapkan untuk mendukung pengembangan keuangan berkelanjutan di kawasan, di antaranya:

- 1) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta menggalakkan *capacity building* mengenai risiko dan peluang terkait perubahan iklim dan lingkungan untuk kalangan pelaku kebijakan, lembaga keuangan, dan masyarakat umum.

Bank sentral dapat memanfaatkan ASEAN Steering Committee on Capacity Building (SCCB) atau bekerja sama dengan lembaga

internasional lainnya untuk memfasilitasi pelaksanaan *capacity building*.

- 2) Membangun kepemimpinan bank sentral dalam mengelola risiko dan kesempatan terkait perubahan iklim dan lingkungan.

Dalam hal ini, bank sentral di ASEAN dapat mengintegrasikan risiko iklim dan lingkungan dalam pelaksanaan proses operasionalisasinya ataupun dalam penyusunan dan penetapan kerangka kebijakan.

- 3) Membangun kerangka regulasi dan pengawasan yang mempertimbangkan risiko perubahan iklim dan lingkungan. Bank sentral dapat turut mengembangkan Pedoman dan kerangka kerja untuk memandu lembaga keuangan mengelola risiko perubahan iklim dan lingkungan.
- 4) Mengembangkan *ASEAN Green Map* sebagai arah kebijakan pengembangan keuangan berkelanjutan di kawasan ASEAN secara *end-to-end*.

Hal ini akan memperkuat kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antarbank sentral di ASEAN serta membentuk praktik yang baik dan keseragaman pandangan mengenai keuangan berkelanjutan di kawasan, baik dari sisi perbankan, institusi keuangan non-bank, maupun pasar modal di ASEAN.

- 5) Membangun *ASEAN Voice* untuk menyuarakan keselarasan kepentingan dan keseragaman langkah kawasan pada ragam fora internasional untuk menjaga stabilitas moneter dan keuangan di ASEAN.
- 6) Membangun kerangka pengawasan dan penilaian risiko. Dalam konteks ini, bank sentral di ASEAN dapat bekerja sama melakukan kajian dan membangun kerangka pengumpulan data keuangan hijau yang serupa. Kerangka tersebut dapat menjadi landasan panduan umum tentang tata cara memonitor dan menilai risiko perubahan iklim dan lingkungan di ASEAN.
- 7) Membangun strategi komunikasi yang jelas dan kredibel. Strategi komunikasi dapat menjadi panduan bagi industri keuangan dan publik dalam memahami arah kebijakan dan membangun ekspektasi tentang upaya pengembangan keuangan berkelanjutan.

Komunikasi yang kredibel bisa dimanfaatkan oleh investor

sebagai dasar menentukan keputusan terkait investasi berkelanjutan di kawasan ASEAN.

Tujuh rekomendasi yang berkaitan dengan isu keberlanjutan ini dikawal dan ditindaklanjuti oleh ASEAN Senior Level Committee Task Force on Sustainable Finance (ASEAN SLC TFSF). ASEAN SLC TFSF berperan dalam memetakan prioritas dan menerapkan rekomendasi yang disepakati.

Pada tahun 2023 ASEAN SLC TFSF memiliki empat agenda utama, yaitu (1) perumusan dan penyempurnaan *ASEAN Learning Curriculum for Sustainable Finance*, (2) perumusan *ASEAN Green Map*, (3) penyempurnaan *ASEAN Taxonomy on Sustainable Finance*, dan (4) inventarisasi (*stocktaking*) praktik-praktik perbankan yang berkelanjutan di negara-negara ASEAN.

Selain inisiatif keuangan berkelanjutan oleh bank sentral yang umumnya menyasar pengembangan praktik bisnis berkelanjutan oleh institusi keuangan, kolaborasi ASEAN turut berperan penting dalam pengembangan pasar keuangan berkelanjutan di kawasan.

Peran ASEAN dalam Mengembangkan Taksonomi ASEAN Versi 2

Taksonomi ASEAN merupakan bahasa umum dalam menentukan kegiatan ekonomi dan instrumen keuangan berkelanjutan yang diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan koordinasi di wilayah ASEAN dengan karakteristik beragam.

ASEAN membentuk ASEAN Taxonomy Board (ATB) yang terdiri dari perwakilan the ASEAN Capital Markets Forum (ACMF), the ASEAN Insurance Regulators Meeting (AIRM), the ASEAN Senior Level Committee on Financial Integration (SLC), dan the ASEAN Working Committee on Capital Market Development (WC-CMD).

Pada November 2021 ASEAN Taxonomy Board telah mengeluarkan *ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance Version 1* yang kemudian dikembangkan lebih lanjut pada *ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance Version 2* (Maret 2023).

ATB secara berkala meninjau dan memperhatikan perkembangan global agar *ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance* tetap relevan bagi pemangku kepentingan dari berbagai aspek. Sebagai langkah lanjutan dari versi 1, pada 27 Maret 2023 ATB telah menerbitkan

ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance versi 2 (ATSF v2) dengan *highlight* sebagai berikut:

1. Penyelesaian *foundation framework*, memuat metodologi terperinci terdiri dari *decision trees* dan *guiding questions* untuk seluruh tujuan lingkungan (*environmental objectives/EO*) dan kriteria esensial (*essential criteria/EC*) untuk menilai suatu aktivitas ekonomi, serta dilengkapi *use cases*; dan
2. *Plus standards* dengan pengembangan *technical screening criteria* (TSC) untuk *focus sector* pertama, yaitu sektor energi. *Plus standards* mengklasifikasikan suatu aktivitas menjadi *Green*, *Amber Tier 2*, dan *Amber Tier 3*. *Green tier* diselaraskan dengan taksonomi internasional lainnya dan mengacu pada target Perjanjian Paris 1,5 derajat celsius. Sementara *Amber Tier 2* dan *Amber Tier 3* bertujuan untuk mendorong transisi aktivitas ekonomi.



KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Deretan generator di Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Cirata, Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (26/9/2023).

ATSF versi 2 juga menyoroti pentingnya aspek sosial dalam taksonomi, dengan menggabungkannya sebagai EC ketiga di samping *Do No Significant Harm* (DNSH) dan *Remedial Measures to Transition* (RMT). Kemudian, dikombinasikan dengan fitur lain seperti perluasan kriteria DNSH, *common building blocks* dibentuk untuk memungkinkan transisi yang teratur dan adil (*orderly and just transition*), serta mendorong adopsi keuangan berkelanjutan oleh AMS.

Selain itu, diterbitkannya ATSF versi 2 ini menunjukkan komitmen kawasan ASEAN dalam menyediakan kerangka kerja yang selanjutnya dapat menjadi Pedoman yang bersifat ilmu pengetahuan bagi para pemangku kepentingan, yang bersifat inklusif, dengan mempertimbangkan tahapan perkembangan dari tiap-tiap negara anggota ASEAN.

Ini juga dinilai sebagai pionir global untuk taksonomi kawasan yang mempertimbangkan secara menyeluruh upaya penghentian penggunaan batubara (*coal phaseouts/CPOs*) di kawasan tersebut.

Selanjutnya akan dilakukan pengembangan *technical screening criteria* untuk sektor-sektor fokus dan sektor-sektor pendukung di bawah Taksonomi ASEAN Versi 3, yang akan dirilis secara bertahap selama dua tahun ke depan. Pengembangan dilakukan ATB melalui konsultasi yang melibatkan pemangku kepentingan dari sektor keuangan dan ekonomi riil, badan pemerintah, serta pemangku kepentingan regional dan organisasi internasional.

Taksonomi ASEAN untuk keuangan berkelanjutan berada di bawah naungan ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM). Selain itu, upaya Taksonomi ASEAN juga didorong oleh empat alur kerja sektor keuangan.

Empat alur tersebut ialah ASEAN Capital Markets Forum (ACMF), ASEAN Insurance Regulators Meeting (AIRM), ASEAN Senior Level Committee on Financial Integration (SLC), dan ASEAN Working Committee on Capital Market Development (WC-CMD).

Dalam hal ini, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peran penting dalam mendukung Taksonomi ASEAN, khususnya keikutsertaan pada AFMGM dan keanggotaan pada ASEAN SLC. Bank Indonesia selaku pemangku kepentingan pada AFMGM dan ASEAN SLC turut membantu mengembangkan, memelihara, dan mempromosikan

Taksonomi ASEAN. Bersamaan dengan Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, momentum ini harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong transisi berkelanjutan di Indonesia.

Peran ASEAN dalam Mempromosikan *Green Bonds* dan *Sustainable Bonds*

Setelah penerbitan sejumlah Pedoman keuangan berkelanjutan, di antaranya *ASEAN Green Bond Standard* (2017, direvisi 2018), *ASEAN Social Bond Standard* (Oktober 2018), dan *ASEAN Sustainability-Linked Standard* (2022), perkembangan penerbitan obligasi terkait hijau sangat masif.

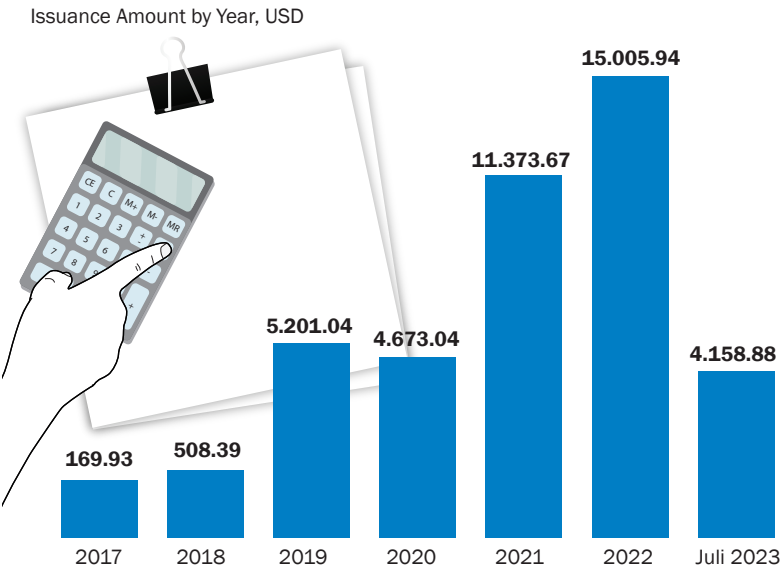
Sampai dengan Juli 2023, negara-negara ASEAN sudah menerbitkan 41.090,89 juta dollar AS obligasi hijau, sosial, dan keberlanjutan. Nilai tersebut didominasi *Sustainability Bond* (28.004,12 juta dollar AS), diikuti *Green Bond* (10.790,44 juta dollar AS) dan *Social Bond* (2.296,33 juta dollar AS).

Penerbitan terbanyak oleh Thailand (15.381,8 juta dollar AS), Filipina (10.436,6 juta dollar AS), Malaysia (9.961,68 juta dollar AS), Singapura (3.641,42 juta dollar AS), dan Indonesia (1.667,91 juta dollar AS).

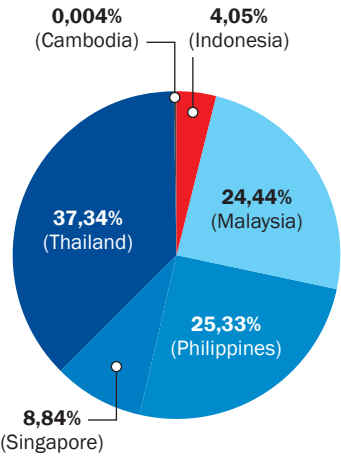
Bank Indonesia berperan aktif dalam the ASEAN Working Committee on Capital Market Development (WC-CMD), kelompok kerja di bawah Forum Ekonomi dan Keuangan ASEAN yang dibentuk untuk pengembangan kapasitas dan infrastruktur pasar modal dengan tujuan jangka panjang. Dalam posisi ini, Bank Indonesia turut mendorong kolaborasi Lintas Negara di kawasan, dengan menjadikan keuangan berkelanjutan sebagai salah satu fokus pembahasan.

Selain itu, WC-CMD juga memprioritaskan *transition finance* melalui pengembangan *Transition Pathway* dan *Transition Standard* untuk mendukung entitas yang melakukan transisi dari model bisnis yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan sosial menuju model bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

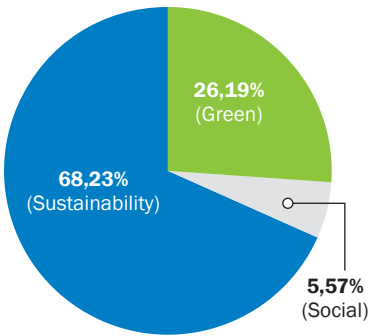
Dalam upaya meningkatkan kapasitas dan membangun infrastruktur pengembangan pasar modal ASEAN, The ASEAN Working Committee on Capital Market Development (WC-CMD) mengeluarkan *Conversation Pack* (April 2022).



Penerbitan Obligasi Hijau, Sosial dan Keberlanjutan ASEAN (USD juta)



Penerbitan Obligasi Hijau, Sosial dan Keberlanjutan ASEAN berdasarkan Negara (%)



Penerbitan Obligasi Hijau, Sosial dan Keberlanjutan ASEAN (%)

Sumber: ACMF (2023)

Gambar 7.7 Perbandingan Penerbitan Obligasi Hijau, Sosial, dan Keberlanjutan ASEAN.

Conversation Pack ini merupakan inisiatif materi diskusi dengan pemerintah, pemilik proyek, dan promotor untuk mempertimbangkan penggunaan *sustainable finance* untuk proyek berkelanjutan. Dengan demikian, diperoleh dampak ganda (*twin effect*), yakni menumbuhkan peluang pembiayaan berkelanjutan (*pool of sustainable finance opportunities*) dan mendorong proyek-proyek yang berkelanjutan (*sustainable projects*).

Di dalamnya dipaparkan lima topik atau "5As" yang harus dibahas ketika mempertimbangkan pembiayaan berkelanjutan untuk proyek berkelanjutan, yaitu *Agenda, Alignment, Avenues, Achievements*, dan *Activities*.

ACMF dan WC-CMD juga membentuk Panel Penasihat Industri (Industry Advisory Panel/IAP) sebagai bentuk interaksi yang melibatkan sektor swasta secara aktif dalam agenda dan isu-isu keuangan berkelanjutan ACMF dan WC-CMD.

IAP saat ini terdiri dari 15 organisasi anggota pasar modal, perbankan dan asuransi, serta profesional keuangan dan penyedia jasa keuangan lainnya termasuk dari bidang hukum, akuntansi, dan pemeringkat (*rating*). IAP beroperasi di bawah naungan WC-CMD-ACMF Joint Sustainable Finance Working Group (JSFWG), yang mengoordinasikan agenda keuangan berkelanjutan untuk ACMF dan WC-CMD.

Peran Bank Indonesia dalam *sustainable finance* di ASEAN sangat penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Selain turut mempromosikan *sustainable finance* yang merupakan salah satu prioritas WC-CMD, pengembangan instrumen berkelanjutan terus diupayakan. Hal ini terutama terkait pembiayaan jangka pendek dalam bentuk surat berharga komersial berwawasan hijau dan berkelanjutan (ESG) sebagai alternatif pembiayaan bagi penerbit dan menjadi instrumen investasi berkelanjutan yang relatif minim risiko karena tenornya yang pendek.

Selanjutnya, untuk mendukung perkembangan pasar perdana surat utang hijau dan berkelanjutan yang semakin pesat, dibutuhkan pasar sekunder yang likuid dan efisien melalui pengembangan transaksi repo berwawasan hijau dan lingkungan (repo ESG).

Pengembangan produk derivatif berkelanjutan telah berkembang

di negara di luar ASEAN seperti Hong Kong, Inggris, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Wujudnya antara lain *sustainability-linked derivatives*, *ESG credit default swap*, derivatif perdagangan saham terkait ESG, derivatif perdagangan emisi, serta derivatif energi terbarukan dan bahan bakar terbarukan. Selain itu, juga derivatif bencana dan cuaca yang akan dikoordinasikan dengan otoritas terkait sebagai upaya penguatan pasar keuangan berkelanjutan.

Langkah ke Depan: ASEAN Green Maps

Menindaklanjuti rekomendasi pada *Report on the Roles of ASEAN Central Banks in Managing Climate and Environment-related Risks*, ASEAN Senior Level Committee on Financial Integration (SLC) telah membentuk Task Force on Sustainable Finance (TFSF). Tugasnya antara lain merumuskan *ASEAN Green Map*. *ASEAN Green Map* ini berisi pemetaan visi dan arah kebijakan ASEAN dalam pengembangan keuangan berkelanjutan.

Pada triwulan II-2023, tim penyusun *ASEAN Green Map* yang dipimpin oleh Bank of Thailand telah berhasil mendapatkan pendanaan dari ASEAN-ROK FCC (ASEAN-Republic of Korea Financial Cooperation Center). Kajian *ASEAN Green Map* diperkirakan selesai pada semester I-2024 untuk kemudian didiskusikan dalam ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) 2024.

Saat ini TFSF sedang mendiskusikan *Knowledge Partner* yang akan dipilih sebagai konsultan dalam penyusunan *ASEAN Green Map*. Bersamaan dengan itu, TFSF juga sedang mendiskusikan *zero draft ASEAN Green Map* yang akan menjadi dasar penyusunan *ASEAN Green Map* bersama konsultan.

ASEAN Green Map merupakan platform berbasis web yang menyediakan informasi tentang proyek berkelanjutan di ASEAN. *ASEAN Green Map* mencakup informasi tentang berbagai proyek berkelanjutan, termasuk obligasi hijau, proyek energi terbarukan, dan proyek infrastruktur berkelanjutan. Peta ini juga mencakup informasi tentang institusi keuangan dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam proyek-proyek tersebut.

Zero draft ASEAN Green Map berisi tiga bagian utama, yaitu *aspirations*, *building blocks*, serta *recommendations and roadmap for*

implementations. Bagian aspirasi akan memetakan visi ASEAN dalam membentuk ekosistem keuangan berkelanjutan di kawasan.

Keuangan berkelanjutan didefinisikan sebagai integrasi pertimbangan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam proses keuangan, produk, jasa, atau strategi investasi. Dalam hal ini, keuangan berkelanjutan memastikan bahwa kriteria ESG dipertimbangkan dalam organisasi, investasi, dan keputusan bisnis, dengan sasaran jangka panjang mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan kinerja positif terhadap lingkungan dan sosial.

Bagian aspirasi turut mengeksplorasi tantangan dan aspek-aspek yang perlu dikembangkan negara anggota dalam mendukung keuangan berkelanjutan.

Selanjutnya, bagian aspirasi juga menggariskan tujuan definitif dari penyusunan *ASEAN Green Map*, yaitu, pertama, memformulasikan seperangkat rekomendasi *non-binding* dan mengkoordinasikan agenda keuangan berkelanjutan kawasan ASEAN. *ASEAN Green Map* juga akan berperan sebagai landasan mengonsolidasikan konsensus regional terkait dengan keuangan berkelanjutan.

Kemudian, kedua, mengarahkan perhatian *ASEAN sectoral bodies*, jaringan profesional, lembaga internasional, dan pemangku kepentingan lainnya terkait prioritas pengembangan keuangan berkelanjutan di ASEAN.

Hasil kajian juga akan memperkuat koordinasi lintas industri perbankan, asuransi, dan pasar modal di ASEAN agar terdapat harmonisasi langkah dan pemahaman dalam mengembangkan keuangan berkelanjutan.

Bagian kedua mengenai *building blocks* akan memperkenalkan tahapan-tahapan umum yang dibutuhkan dalam membangun ekosistem keuangan berkelanjutan. Pembelajaran terhadap tahapan-tahapan pengembangan ekosistem keuangan berkelanjutan akan didasarkan pada rangkaian kajian literatur serta pengalaman negara anggota ASEAN dan negara lainnya.

Untuk itu, akan dilakukan *stocktake* terhadap inisiatif keuangan berkelanjutan di ASEAN, serta evaluasi terhadap pengalaman *sectoral bodies* di ASEAN. Bagian ini juga memetakan inisiatif dan program kerja di tingkat kawasan yang dapat mendukung pemenuhan *building*

blocks bagi negara anggota sehingga dapat terpetakan potensi kerja sama lintas negara/lembaga.

Pada bagian akhir, *ASEAN Green Map* akan merangkum temuan dan hasil analisis kesenjangan (*gap analysis*) antara kondisi yang sudah ada dengan kondisi yang diharapkan. Berdasarkan analisis tersebut, kajian akan memberikan rekomendasi untuk menutup kesenjangan (*gap*) yang ada, serta membangun rekomendasi aksi kolektif guna mendukung tahapan pencapaian keuangan berkelanjutan yang telah dipetakan dalam *ASEAN Green Map*.

Peta jalan ini juga akan dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di tingkat nasional, kawasan, ataupun internasional sebagai acuan pembentukan ekspektasi pelaku ekonomi mengenai arah kebijakan keuangan berkelanjutan di ASEAN.

Pengelolaan Cadangan Devisa untuk Mendukung Keberlanjutan

Cadangan devisa adalah aset likuid dalam mata uang asing yang dimiliki oleh bank sentral atau otoritas moneter suatu negara. Cadangan devisa amat penting untuk memastikan stabilitas ekonomi dan finansial, mengelola fluktuasi nilai tukar, dan membiayai defisit transaksi berjalan. Namun, pengelolaan cadangan devisa juga berperan sangat signifikan dalam mendukung *sustainability* atau keberlanjutan.

Pengelolaan cadangan devisa yang berkelanjutan dapat membantu negara-negara ASEAN untuk merespons secara efektif terhadap risiko-risiko finansial yang terkait dengan perubahan iklim dan tantangan lingkungan lainnya.

Misalnya, dengan mengalokasikan sebagian cadangan devisa untuk investasi hijau dan berkelanjutan, negara-negara ASEAN dapat mendorong transisi ke ekonomi rendah karbon. Ini menjadi bagian dari penerapan ekonomi berkelanjutan sebagai *role model* yang dapat meningkatkan pendanaan untuk proyek berkelanjutan baru sehingga berdampak pada peningkatan daya tahan mereka terhadap dampak perubahan iklim.

Dengan demikian, pengelolaan cadangan devisa yang mendukung *sustainability* tidak hanya berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan finansial, tetapi juga memainkan peran penting dalam mencapai tujuan keberlanjutan dan mempromosikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pendekatan ASEAN dalam Pengelolaan Cadangan Devisa yang Mendukung Keberlanjutan

Negara-negara ASEAN telah mengambil pendekatan proaktif dalam pengelolaan cadangan devisa mereka untuk mendukung keberlanjutan. Sebagai bagian dari upaya mereka untuk mempromosikan keuangan berkelanjutan, mereka telah mengidentifikasi sejumlah peluang strategis untuk mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan ke dalam strategi pengelolaan cadangan devisa mereka.

Salah satu pendekatan yang diambil oleh negara-negara ASEAN adalah melalui investasi dalam instrumen keuangan berkelanjutan, seperti obligasi hijau dan obligasi berkelanjutan. Obligasi ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat, seperti proyek energi terbarukan, efisiensi energi, dan infrastruktur berkelanjutan.

Selain itu, negara-negara ASEAN juga berupaya untuk mengembangkan kerangka kerja dan Pedoman untuk pengelolaan cadangan devisa yang berkelanjutan. Ini mencakup pembuatan standar dan kriteria untuk menilai keberlanjutan proyek dan investasi, serta mengembangkan sistem pelaporan dan pengungkapan yang transparan dan akuntabel.

Berikut adalah beberapa contoh pendekatan spesifik yang diambil oleh negara-negara ASEAN dalam pengelolaan cadangan devisa mereka untuk mendukung keberlanjutan:

- 1) Indonesia:** Bank Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat terhadap keberlanjutan dengan menerapkan berbagai pendekatan investasi berbasis pertimbangan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Di samping itu, Bank Indonesia juga telah berinvestasi pada *green, social, and sustainability bonds*.

- 2) Singapura:** Otoritas Moneter Singapura (MAS) telah menjadi pionir dalam mendorong keuangan berkelanjutan. MAS telah mengalokasikan sebagian cadangan devisa mereka ke dalam investasi berkelanjutan, termasuk obligasi hijau dan berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan MAS antara lain (a) mendefinisikan prinsip-prinsip investasi hijau untuk diterapkan oleh *external portfolio manager* (EPM), (b) mengembangkan strategi investasi yang fokus pada tema *sustainability* dan perubahan iklim, (c) tidak melakukan investasi pada perusahaan yang terlibat dalam aktivitas pertambangan batubara dan minyak, dan (d) menjadikan perhitungan karbon menggunakan indikator *weighted average carbon intensity* (WACI) sebagai salah satu pertimbangan dalam strategi investasi.

- 3) Filipina:** Banko Sentral ng Pilipinas (BSP) telah mengakui pentingnya keuangan berkelanjutan dan mengambil langkah-langkah untuk mengintegrasikan pertimbangan ESG dalam pengelolaan portofolio cadangan devisanya dan mengadopsi praktik investasi berkelanjutan dan bertanggung jawab.

BSP telah berinvestasi pada *green bond* melalui BIS's *Asian Green Bond Fund* (BISIP G3) dan *Asian Bond Fund* (ABF). Ke depannya, BSP akan terus melakukan pendalaman melalui penguatan pemahaman dan asesmen yang mendalam.

- 4) Malaysia:** Bank Negara Malaysia (BNM) juga telah menunjukkan minat dalam keuangan hijau dan berkelanjutan. Mereka telah mulai mengintegrasikan faktor keberlanjutan dalam praktik pengelolaan cadangan devisa mereka. Hal ini dilakukan dengan memasukkan pertimbangan ESG dan kriteria *socially responsible investing* (SRI) dalam proses investasi yang dilakukan.

Dalam menjalankan pendekatan ini, negara-negara ASEAN berupaya untuk mengombinasikan tujuan keuangan dan ekonomi mereka dengan tujuan lingkungan dan sosial, menciptakan model pembangunan yang lebih berkelanjutan dan tahan terhadap risiko perubahan iklim dan tantangan lingkungan lainnya.

Selain itu, negara-negara ASEAN juga aktif berkolaborasi dengan institusi keuangan internasional dan organisasi multilateral dalam pengembangan praktik terbaik dan inovasi dalam pengelolaan cadangan devisa berkelanjutan. Hal ini termasuk partisipasi dalam forum dan dialog internasional tentang keuangan berkelanjutan, serta kerja sama dalam penelitian dan pengembangan.

Dengan demikian, pendekatan ASEAN dalam pengelolaan cadangan devisa berkelanjutan mencerminkan komitmen untuk mencapai tujuan keberlanjutan dan stabilitas ekonomi dan finansial, sekaligus memanfaatkan peluang investasi berkelanjutan yang ditawarkan oleh transisi ke ekonomi hijau dan rendah karbon.

Praktik Pengelolaan Cadangan Devisa yang Mendukung Keberlanjutan

Dewasa ini, berbagai bentuk instrumen keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) tumbuh pesat sejalan dengan meningkatnya kesadaran investor terhadap urgensi untuk menjaga kesehatan bumi. Upaya untuk menjaga sustainabilitas dunia dilakukan dalam berbagai bidang, tidak terkecuali bidang keuangan, khususnya investasi/pengelolaan dana yang menerapkan prinsip ESG.

Investasi berbasis ESG pada dasarnya adalah pengelolaan dana yang, dalam proses pengambilan keputusan atas instrumen investasi, mempertimbangkan dampak dari investasi pada sustainabilitas dunia.

Dalam penerapan ESG, manajer investasi akan mempertimbangkan apakah proyek/instansi di mana manajer investasi berinvestasi akan memberikan dampak yang baik terhadap lingkungan hidup (*environmental*) dan lingkungan sosial (*social*), serta memiliki tata kelola (*governance*) yang baik.

Investasi menggunakan prinsip ESG merupakan ilmu yang baru dan terus berkembang. Tantangan utama dari investasi ESG adalah menemukan keseimbangan antara menjaga investasi untuk tidak berdampak buruk pada sustainabilitas dunia, tetapi

masih tetap menjaga profil risiko (*risks*) dan pertumbuhan nilai jangka panjang dari investasi sesuai permintaan investor dan otoritas publik.

Risiko pengelolaan berbasis ESG⁸ yang mencakup lingkungan, sosial, dan tata kelola dapat menjadi *downside risks* yang berpotensi menggerus nilai investasi dan meningkatkan risiko kredit. Dalam hal ini, perlu diterapkan pendekatan investasi yang mempertimbangkan risiko dan peluang ESG yang material ke dalam proses alokasi aset dan manajemen risiko. Tujuannya adalah agar dapat menghasilkan keuntungan (*return*) jangka panjang yang berkelanjutan.

Berdasarkan survei Harvard Law terhadap 300 investor institusional dan institusi besar dunia pada 2017 (2020), secara umum terdapat tiga faktor utama pendorong penerapan prinsip ESG dalam keputusan investasi, yaitu:

- 1) *Fiduciary duty*, yaitu tanggung jawab institusi untuk memitigasi risiko ESG dan membangun ekonomi berkelanjutan;
- 2) *Regulatory landscape*, yaitu beberapa inisiatif global, seperti *United Nations-Principles for Responsible Investment* (UN-PRI) dan kerangka kerja Sustainability Accounting Standards Board (SASB); serta
- 3) Risiko investasi, yaitu untuk memitigasi risiko ESG dan ekspektasi kriteria ESG untuk mendorong kinerja.

Meningkatnya pengelolaan investasi berdasarkan prinsip ESG tecermin pada peningkatan jumlah dana yang dikelola menggunakan prinsip ESG di banyak negara ataupun kawasan. Berdasarkan data OECD (2020), jumlah *signatories* UN-PRI mencapai 2.300 untuk investor institusional.

Selain itu, pertumbuhan *Asset Under Management* (AUM) yang menggunakan prinsip ESG dalam proses pembuatan keputusan terkait pengelolaan dana tumbuh pesat dalam satu dekade

⁸ Risiko ESG mencakup lingkungan (antara lain emisi karbon, polusi udara, dan efisiensi energi), sosial (antara lain kesehatan, kemiskinan, kesetaraan, dan pendidikan), dan tata kelola (antara lain akuntabilitas dan transparansi, korupsi, stakeholder engagement, dan shareholder rights).

terakhir. Di Amerika Serikat (AS), investasi ESG yang dikelola secara profesional mencapai 20 persen dari total, atau lebih dari 11 triliun dollar AS.

Sementara itu, di Eropa, praktik industri yang menerapkan ESG mencapai lebih dari 17 triliun dollar AS. Sejalan dengan tingginya minat investor, baik ritel maupun institusional, terhadap *pool* investasi dan likuiditas ESG, dana investasi dan *Exchange Traded Fund* (ETF) ESG tumbuh melampaui 1 triliun dollar AS di AS. Sementara di Eropa dan Asia lebih rendah. Tren kenaikan juga tecermin pada pertumbuhan produk ESG, seperti dana ESG, yang melebihi 1 triliun dollar AS dalam AUM.

Meskipun demikian, perkembangan investasi menggunakan prinsip ESG di kawasan Asia, khususnya ASEAN, masih tergolong rendah. Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia bersama-sama dengan negara-negara di kawasan ASEAN berkomitmen untuk terus mempromosikan *sustainable finance* dan pembangunan *infrastructure finance* di kawasan sebagai salah satu program kerja ASEAN 2023.

Berbagai macam upaya yang dilakukan oleh ASEAN 2023 antara lain menerbitkan *ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance version 1* dan *ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance version 2*. Keduanya berfungsi sebagai panduan investor mengenai standar dan kriteria ESG di kawasan ASEAN mengingat kondisi *idiosyncratic* negara di kawasan ASEAN yang cukup berbeda dengan negara-negara di kawasan Eropa ataupun Amerika.

Secara lebih khusus, ASEAN 2023 juga telah menerbitkan *ASEAN ESG Bond Standard*. Ini dimaksudkan untuk membantu investor dalam memahami standar dan kriteria ESG di kawasan ASEAN khusus untuk pasar surat-surat berharga.

Dalam rangka mendukung program kerja ASEAN 2023 khususnya terkait *sustainable finance*, Bank Indonesia (BI) telah melakukan transformasi kebijakan dalam kerangka bauran kebijakan dan kelembagaan hijau.

Dalam hal investasi ESG pada pengelolaan cadangan devisa, Bank Indonesia melakukan investasi pada *green bond* sejak tahun 2016. Dalam perkembangannya, Bank Indonesia telah menerapkan investasi ESG dalam rangka mendukung pengelolaan cadangan

devisa secara berkelanjutan sebagai berikut:

- 1) Pengadopsian *Socially Responsible Investing* (SRI) sebagaimana penggunaan *benchmark* MSCI SRI oleh pengelola portofolio eksternal atau *external portfolio manager* (EPM).
- 2) Penempatan investasi *green bond* di EMEAP-Asian Bond Fund (EMEAP-ABF) dan BIS-Asian Green Bond Fund (BISIP G3)
- 3) Penempatan investasi pada *Green, Social, dan Sustainability Bonds*.

Penempatan investasi *green bond* di EMEAP-Asian Bond Fund (EMEAP-ABF) dan BIS-Asian Green Bond Fund (BISIP G3) merupakan bagian dari upaya kerja sama negara-negara di kawasan ASEAN dan The Bank for International Settlement (BIS) untuk memperdalam pasar keuangan berbasis ESG khususnya surat-surat berharga di kawasan ASEAN.

EMEAP-ABF dan BISIP G3 merupakan *pool fund* yang terdiri dari *green bond* negara dan instansi di kawasan ASEAN. Dengan tersedianya *pool fund green bond* seperti EMEAP-ABF dan BISIP G3 yang aktif ditransaksikan diharapkan dapat membantu terbentuknya harga *green bond* secara berkelanjutan dan dapat menjadi acuan dalam transaksi.

Dengan demikian, salah satu infrastruktur utama dalam pasar keuangan, yaitu *reference rate*, dapat terbentuk dan memudahkan pelaksanaan operasionalisasi baik untuk investor ritel maupun institusi.

Secara lebih jauh, BI, sebagaimana bank sentral lain di kawasan ASEAN, saat ini tengah berusaha untuk membentuk kerangka kerja investasi ESG untuk pengelolaan cadangan devisa secara internal. Itu merupakan salah satu hal yang dibahas dalam Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, di mana setiap bank sentral membagikan pengetahuan dan pengalaman mereka terkait penerapan prinsip ESG dalam pengelolaan cadangan devisa internal.

Pertimbangan Keuangan dalam Investasi Berkelanjutan Cadangan Devisa

Penting untuk memahami bahwa mengingat sifat cadangan devisa sebagai alat pertahanan moneter dan finansial, setiap keputusan investasi yang terkait dengan cadangan devisa perlu dianalisis dengan sangat hati-hati. Oleh karena itu, sementara investasi hijau dan berkelanjutan bisa menawarkan banyak manfaat dalam konteks *sustainability*, aspek keberlanjutan itu harus diimbangi dengan pertimbangan kestabilan finansial dan moneter.

Salah satu area yang penting untuk diperhatikan adalah pertimbangan mengenai *return on investment* (ROI). Saat berinvestasi dalam instrumen keuangan berkelanjutan, otoritas moneter perlu memastikan bahwa ROI dari instrumen tersebut setidaknya sebanding, jika tidak lebih baik, dari instrumen investasi tradisional. Hal ini penting agar cadangan devisa tetap memenuhi tujuannya sebagai *buffer* terhadap ketidakpastian ekonomi dan finansial.

Dalam menerapkan kebijakan pengelolaan cadangan devisa yang mendukung *sustainability*, negara-negara ASEAN harus memastikan bahwa investasi hijau dan berkelanjutan tidak mengorbankan stabilitas finansial dan moneter. Hal ini berarti bahwa investasi berkelanjutan harus memenuhi standar keuangan yang ketat dan memberikan imbal hasil yang sebanding dengan risiko yang diambil.

Sementara investasi berkelanjutan dalam pengelolaan cadangan devisa menawarkan banyak manfaat bagi *sustainability*, pertimbangan finansial harus tetap menjadi prioritas. Dengan pendekatan yang seimbang dan pertimbangan yang hati-hati, negara-negara ASEAN dapat memastikan bahwa cadangan devisa mereka tetap stabil sambil mendukung tujuan keberlanjutan jangka panjang.

Tantangan dan Peluang dalam Pengelolaan Cadangan Devisa yang Mendukung Keberlanjutan

Terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan cadangan devisa yang mendukung *sustainability*.

- a) Adanya keterbatasan data dan informasi yang relevan mengenai proyek berkelanjutan dan investasi yang memenuhi kriteria keberlanjutan. Hal itu dapat menjadi hambatan dalam pengambilan keputusan pengelolaan cadangan devisa.
- b) Pengelolaan risiko dalam investasi berkelanjutan dan hijau perlu diperhatikan secara lebih detail. Termasuk dalam hal itu, penilaian risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), serta pemahaman tentang risiko iklim yang dapat memengaruhi nilai investasi.
- c) Terdapat kekurangan kapasitas manusia dan teknis untuk menganalisis dan mengelola investasi berkelanjutan dalam pengelolaan cadangan devisa.

Di samping itu, ada pula peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat upaya pengelolaan cadangan devisa yang berkelanjutan di ASEAN.

- a) Perkembangan pasar keuangan berkelanjutan yang semakin pesat dan meningkatnya minat investor dalam investasi berkelanjutan. Hal ini memberikan peluang untuk diversifikasi portofolio cadangan devisa dengan instrumen-instrumen keuangan berkelanjutan.
- b) Kolaborasi antara negara-negara ASEAN dan institusi keuangan internasional serta organisasi multilateral dapat memperkuat pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam pengelolaan cadangan devisa yang mendukung keberlanjutan.
- c) Peningkatan kemampuan dalam menganalisis dan mengukur dampak investasi berkelanjutan dapat membantu mengatasi tantangan pengelolaan cadangan devisa yang berkaitan dengan keberlanjutan.

- d) Inovasi keuangan seperti obligasi hijau dan berkelanjutan, serta instrumen-instrumen keuangan berkelanjutan lainnya, dapat memberikan peluang bagi negara-negara ASEAN untuk mengarahkan cadangan devisa mereka ke proyek dan investasi yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Dalam menghadapi tantangan dan mengoptimalkan peluang ini, negara-negara ASEAN dapat bekerja sama untuk mengembangkan kerangka kebijakan dan regulasi yang memadai, memperkuat kapasitas dan kemampuan analisis, serta mempromosikan transparansi dan pelaporan yang lebih baik dalam pengelolaan cadangan devisa yang mendukung *sustainability*.

Dengan demikian, pengelolaan cadangan devisa dapat menjadi alat yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta memperkuat ketahanan terhadap risiko lingkungan dan perubahan iklim.



Epilog |



KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Ketua Delegasi Thailand Sarun Charoensuwan, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, Presiden RI Joko Widodo, Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao (dari kiri ke kanan) berfoto bersama sebelum memulai KTT ke-11 ASEAN dan Amerika Serikat di Jakarta, Rabu (6/9/2023). Konferensi ini merupakan salah satu rangkaian KTT ke-43 ASEAN yang digelar pada 5-7 September 2023.

ASEAN berdiri pada 8 Agustus 1967 dengan dilandasi komitmen negara-negara di kawasan ini untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai wilayah yang stabil, damai, dan sejahtera. Kerja sama dalam wadah ASEAN itu sejalan dengan amanat konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama dalam menghapuskan penjajahan di muka bumi, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut aktif dalam melaksanakan ketertiban dunia.

ASEAN juga merupakan wujud konkret dari sikap politik bebas aktif Indonesia yang tidak memihak blok geopolitik

tertentu serta aktif bersinergi dengan negara-negara lain demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan serta kemajuan sosial dan budaya/peradaban. Selain itu, juga turut aktif mewujudkan situasi politik kawasan dan global yang damai, aman, dan sinergis.

ASEAN telah berhasil menjadi contoh harmoni dari keberagaman. Perbedaan antarnegara tidak menjadi penghalang dalam mewujudkan tujuan dan tekad ASEAN. Bahkan, ASEAN dapat memainkan peran sebagai episentrum pertumbuhan yang memberikan manfaat bagi masyarakat di kawasan dan dunia, di tengah tantangan dan perubahan dinamika global yang semakin meningkat.

Di bidang perekonomian, tantangan tersebut diperburuk oleh dinamika geopolitik global, sebagaimana tecermin dalam *World Economic Outlook* IMF tahun 2023, dengan judul "A Rocky Recovery". Laporan IMF itu menggambarkan meningkatnya kembali ketidakpastian global di tengah turbulensi sektor keuangan, tekanan inflasi yang tinggi, serta dampak berkepanjangan invasi Rusia atas Ukraina, selain dampak negatif pandemi Covid-19 yang berlangsung lebih dari tiga tahun.

Dinamika global ini membutuhkan respons kebijakan yang tepat dan cepat, seiring dengan semakin cepatnya transformasi pada era digital dan tekanan dampak pemburukan iklim global. Kegagalan dalam merespons kondisi ini dengan tepat dan cepat menyebabkan negara terdampak menyumbang pemburukan kondisi ekonomi global.

Di tengah pertumbuhan perekonomian global yang masih menunjukkan sinyal pelemahan tersebut, Indonesia pada tahun 2023 menerima estafet Keketuaan ASEAN. Untuk merespons kondisi yang tengah dihadapi, Keketuaan Indonesia 2023 merumuskan tema strategis: "ASEAN Matters, Epicentrum of Growth".

Keketuaan ASEAN ini menjadi momentum Indonesia untuk mengoptimalkan peran ASEAN sebagai kawasan ekonomi yang tumbuh cepat, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga mampu menjadi pusat (*epicentrum*) pertumbuhan ekonomi global. Bagi Indonesia, kepemimpinan dalam Keketuaan ASEAN 2023 ini merupakan kelanjutan kepemimpinan Indonesia di forum organisasi global setelah Indonesia berhasil menunjukkan kapasitas dalam Presidensi G20 tahun 2022.

Indonesia dalam kapasitas Keketuaan ASEAN 2023 secara kolektif memperkuat kolaborasi ASEAN melalui tiga *strategic thrust: recovery-rebuilding, digital economy, dan sustainability*.

Recovery-rebuilding bertujuan memulihkan pertumbuhan regional dan konektivitas yang menghasilkan daya saing baru guna mengatasi efek berkepanjangan sehingga mampu menjadi pusat pertumbuhan baru di masa depan. *Digital economy* bertujuan mengakselerasi transformasi menuju partisipasi ekonomi digital yang inklusif, dalam menavigasi tantangan digitalisasi, revolusi industri, dan disrupsi rantai pasok. Adapun *sustainability* bertujuan memastikan ekonomi dan keuangan ASEAN tumbuh berkelanjutan di tengah tantangan dan risiko transisi energi. Ketiga *strategic thrust* ini menjadi tema besar bagi seluruh pilar ASEAN yang meliputi Pilar Politik-Keamanan, Pilar Sosial-Budaya, dan Pilar Ekonomi.

Pada Pilar Ekonomi, Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 merumuskan 16 butir agenda prioritas ekonomi (*priority economic deliverables/PEDs*) Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tiga dari 16 PEDs dimaksud merupakan prioritas di jalur integrasi keuangan. Bank Indonesia secara proaktif mendorong dan mengawal inisiatif-inisiatif terkait PEDs di bawah kewenangan dan tanggung jawab bank sentral, yaitu bauran kebijakan, transaksi menggunakan mata uang lokal (*local currency transaction/LCT*), konektivitas pembayaran di kawasan (*regional payment connectivity/RPC*), dan inklusi keuangan.

Keempat inisiatif tersebut didukung oleh satu inisiatif Bank Indonesia untuk memperkuat proses kerja di ASEAN, yaitu *revisiting working committee mandates*, atau meninjau kembali mandat dari komite kerja, agar sesuai dengan visi ASEAN pasca-2025. Semua inisiatif tersebut telah disampaikan pada Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (AFMGM) Ke-10 yang diselenggarakan pada 25 Agustus 2023.

Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 di Jalur Integrasi Keuangan menghasilkan banyak pencapaian positif. Bank Indonesia, yang didukung oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Luar Negeri, menginisiasi ASEAN Leaders' Declaration on Advancing Regional Payment Connectivity and Promoting Local Currency Transaction (ALD on RPC and LCT). ALD tersebut diadopsi oleh para pemimpin negara di

ASEAN (*leaders*) dalam Konferensi Tingkat Tinggi Ke-42 ASEAN pada Mei 2023.

Secara umum, ALD on EPC and LCT meliputi lima poin utama: (1) Pembayaran digital lintas negara (RPC) tahun 2025; (2) Mendorong transaksi menggunakan mata uang lokal (LCT); (3) Memajukan RCT dan LCT; (4) Melibatkan mitra eksternal ASEAN dalam RCT dan LCT; (5) Mengawasi implementasi RPC dan LCT. Di dalam ALD tersebut, para pemimpin negara di ASEAN menugaskan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan untuk mengawal implementasi RPC dan LCT.

Sebagai perwujudannya, AFMGM Ke-10 telah mendukung pembentukan Satuan Tugas Transaksi Mata Uang Lokal ASEAN (ASEAN Local Currency Transaction Task Force/LCT-TF) dan pengembangan Prinsip-prinsip Tingkat Tinggi tentang Kerangka Kerja Transaksi Mata Uang Lokal (High-Level Principles on LCT Framework). Pencapaian ini merupakan salah satu yang dilaporkan ke dalam ALD Epicentrum of Growth, ALD yang mencakup seluruh prioritas Indonesia yang diadopsi oleh para pemimpin negara ASEAN pada KTT Ke-43 pada September 2023.

Selain terkait LCT, inisiatif BI lainnya yang didukung oleh para pemimpin di ALD tersebut adalah terkait pentingnya bauran kebijakan di ASEAN, dukungan terhadap perluasan RPC, dan perlunya inklusi keuangan digital di kawasan.

Langkah ke Depan

Pada waktu mendatang, tantangan dan ketidakpastian perekonomian global dan regional ASEAN terlihat semakin tinggi dan semakin sulit diantisipasi tanpa melibatkan kerja sama antarnegara. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen kuat untuk mengimplementasikan kesepakatan Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 sehingga upaya menjadikan kawasan ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan global bisa terwujud. Lebih lanjut, Bank Indonesia menginisiasi *revisit foresight* mengenai *working committee mandates* di ASEAN, dengan menyesuaikan perkembangan terkini di dunia internasional.

Formulasi kebijakan yang sinergis antarnegara ASEAN yang telah diformulasikan pada Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 diharapkan dapat dikembangkan dan diaplikasikan. Di dalam formulasi tersebut,

antara lain terdapat bauran kebijakan, LCT, RPC, inklusi keuangan, dan kebijakan lainnya. Penguatan bauran kebijakan makroekonomi ASEAN diharapkan dapat menjadi panduan negara-negara ASEAN untuk mengoptimalkan kombinasi instrumen kebijakan dalam mempertahankan stabilitas ekonomi kawasan.

Pembentukan Satuan Tugas Transaksi Mata Uang Lokal ASEAN dan penyusunan Prinsip-prinsip Tingkat Tinggi akan menjadi prinsip-prinsip utama dalam pengembangan Kerangka Kerja LCT ASEAN. Dengan demikian, ke depan, diharapkan penggunaan mata uang lokal dapat mendorong efisiensi transaksi perdagangan, investasi, dan keuangan ASEAN.

Penyelesaian peta jalan konektivitas pembayaran kawasan (RPC) untuk ASEAN perlu terus didorong. Perluasan akses RPC bagi semua negara anggota ASEAN dapat diperluas, termasuk meliputi negara di luar ASEAN. Selain itu, kerja sama dalam mengembangkan inklusi keuangan digital dan literasi keuangan digital di ASEAN juga perlu terus diperkuat. Pedoman Implementasi Penguatan Literasi Keuangan Digital di ASEAN perlu disempurnakan menjadi panduan berbasis aksi, melengkapi panduan agenda inklusi keuangan ASEAN dan global.

Untuk menjaga keberlanjutan keuangan, implementasi kebijakan ekonomi hijau ASEAN diharapkan juga dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dalam menavigasi perkembangan digital, ASEAN perlu mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi berbasis digital, termasuk melalui penyempurnaan Kerangka Kerja Integrasi Perbankan ASEAN (ABIF) dengan penguatan elemen digital ABIF.

Dalam menavigasi ekonomi digital, manajemen risiko keamanan siber bagi industri keuangan dan internal bank sentral perlu diperkuat. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi, serta kapasitas keamanan siber.

Seiring dengan sistem keuangan digital yang inklusif, penguatan kerja sama pengawasan lintas negara (*cross-border supervision*) menjadi semakin penting. Kebijakan keamanan yang dibahas dalam pertemuan Cybersecurity Resilience and Information Sharing Platform (CRISP) memperkaya wawasan dan perumusan kebijakan terkait isu siber ASEAN.

Terkait pengelolaan sumber daya alam, ASEAN berupaya

meningkatkan produktivitas melalui pengembangan teknologi baru dalam mengembangkan industri hilir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengembangan hilirisasi ini dilakukan tanpa mengabaikan transisi ekonomi dan keuangan hijau sehingga tumbuh secara berkelanjutan.

Sinergi yang solid telah menghasilkan rangkaian rumusan kebijakan komprehensif dan multidimensional yang berhasil disepakati dalam Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. Hal ini menjadi momentum bagi pertumbuhan ekonomi ASEAN yang kuat dan berkelanjutan. Mengingat dampak ekonomi ASEAN terhadap dunia semakin signifikan (*matters*), pertumbuhan ekonomi ASEAN yang kuat juga akan memberikan dampak rambatan yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi global.

Dengan demikian, tema besar Keketuaan Indonesia 2023, "ASEAN Matters, Epicentrum of Growth" dapat menjadi semakin bermakna.



KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Bendera negara-negara ASEAN dan negara mitra menghiasi salah satu ruangan tempat pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN di Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Daftar Pustaka

- Acclime. (2023). *Vietnam Fintech Brief in 2023*. <https://vietnam.acclime.com/downloads/guides/Vietnam%20Fintech%20Brief%20-%202023.pdf>.
- ADB. *Green Bond Market Survey for Indonesia Insights on the Perspectives of Institutional Investors and Underwriters November 2022*.
- ADB. (2020). *Financial Integration and Macroeconomic Linkages in Asia Crises, Responses, and Policy Considerations*. DOI: <http://dx.doi.org/10.22617/TCS200287-2>.
- ADB. (2023). *Financial Digitalization and Its Implications for ASEAN+3 Regional Financial Stability*. DOI: <http://dx.doi.org/10.22617/TCS230020-2>.
- Anh Huy. (2022). *Vietnam's Vibrant Crypto Scene Needs a Regulatory Framework*.
- Anwar, R.S., M. Mohamed, S.M. Hamzan, N.S.A. Malek, M.H.M. Zain, M.H. Jaafar, S. Sani, R.M. Brazil-De Vera, M.C.T. Desquitado, V. Praneepachachon, D. Wong, B.A. Lim, G. Goh, W., Tan, dan J. Hong. (2020). *Report on the Roles of ASEAN Central Banks in Managing Climate and Environment-related Risks*. Kuala Lumpur.
- Arianti, V. dan Kenneth Yaoren. (2020). "How Terrorists Use Cryptocurrency in Southeast Asia". *The Diplomat*, 30 Juni. <https://thediplomat.com/2020/06/how-terrorists-use-cryptocurrency-in-southeast-asia/>.
- ASEAN Taxonomy Board. (2023). *ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance Version 2*. Retrieved from <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/ASEAN-Taxonomy-Board-menerbitkan-ASEAN-Taxonomy-for-Sustainable-Finance-Version-2-untuk-mendukung-transisi-berkelanjutan/Versi%20Bahasa%20-%20Media%20Statement%20ATSF%20v2%20%28Press%20Release%29.pdf>.

- ASEAN Working Committee on Capital Market Development. (2020). *ASEAN Capital Markets Forum*. <https://www.theacmf.org/images/downloads/pdf/Report-on-Promoting-Sustainable-Finance-in-ASEAN-for-AFCDM-AFMGM.pdf>.
- Badan Kebijakan Fiskal. (tt). *ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance sebagai Komitmen ASEAN dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim*. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2021/11/10/4319-asean-taxonomy-for-sustainable-finance-sebagai-komitmen-asean-dalam-menghadapi-dampak-perubahan-iklim>.
- Bakken, R. (2022). *What is Sustainable Finance and Why is it Important?* Harvard Extension School. <https://extension.harvard.edu/blog/what-is-sustainable-finance-and-why-is-it-important/>.
- Bank for International Settlements (BIS). (2020). *Central Bank Digital Currencies: Foundational Principles and Core Features*. Retrieved from <https://www.bis.org/publ/othp33.htm>.
- Bank Indonesia. (2023). *Sinergi dan Inovasi Kebijakan untuk Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional (Kajian Stabilitas Keuangan No. 40)*. Departemen Kebijakan Makroprudensial BI. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/KSK_4023_.pdf.
- Bank of Thailand dan Hong Kong Monetary Authority. (2020). *Cross-border CBDC Payments: A Proof-of-Concept Trial*.
- Boston Consulting Group. (2023). *Indonesia's Fintech Industry is Ready to Rise*. <https://web-assets.bcg.com/11/8f/644106dd4bdeb4bd272eccb1901c/indonesia-fintech-report-28-03-2023.pdf>.
- BoT. (2021). Siaran Pers: Stablecoins Regulation Policy. <https://www.bot.or.th/en/news-and-media/news/news-20210319-2.html>.
- Bank for International Settlements (BIS). (2021). *A Blueprint for Instant Cross-border Payments*. Retrieve from: <https://www.bis.org/publ/othp39.pdf>.
- Bank for International Settlements (BIS). (2023). *Project Nexus-Enabling Instant Cross-border Payments: Conclusions from a Technical Proof of Concept between the Eurosystem, Malaysia and Singapore*. Retrieve from: <https://www.bis.org/publ/othp62.html>.

- Bank for International Settlements (BIS). (2021). *Nexus: A Blueprint for Instant Cross-border Payments*.
- Bank for International Settlements (BIS) (2023). *Project Nexus: Enabling Instant Cross-border Payments*.
- Bank for International Settlements (BIS). (2021). *Inthanon-lion Rock to mBridge*. BIS Innovation HUB. September 2021.
- BSP. (2021). *Forging Pathways to a Cash-Lite Society*. Banko Sentral ng Pilipinas. Edisi 2021.
- BSP. (2020). *Central Bank Digital Currency for the BSP: Fundamentals and Strategies*. Oktober.
- CBDC Tracker. (2023). *Today's Central Bank Digital Currencies Status*. <https://cbdctracker.org/>.
- CPMI. (2018). *Cross-border Retail Payments*. Bank for International Settlements.
- CPMI. (2022). *Interlinking Payment Systems and the Role of Application Programming Interfaces-A Framework for Cross-border Payments*.
- CPMI. (2023). *Exploring Multilateral Platforms for Cross-border Payments*. Bank for International Settlements.
- CPMI, IOSCO. (2016). *Guidance on Cyber Resilience for Financial Market Infrastructures*.
- Chainalysis. (2022). *The 2022 Global Crypto Adoption Index: Emerging Markets Lead in Grassroots Adoption, China Remains Active Despite Ban, and Crypto Fundamentals Appear Healthy*. <https://Chainalysis.com/reports/2022-global-crypto-adoption-index/>.
- Coindesk. (2019). *Philippines' Union Bank Launches Stablecoin, Conducts Country's*. 31 Juli.
- First Bank Blockchain Transaction. <https://www.coindesk.com/business/2019/07/30/philippines-unionbank-launches-stablecoin-conducts-countrys-first-bank-blockchain-transaction/>.
- Coindesk. (2023). *On-Chain Vs Off-Chain Transactions: What's the Difference?* 11 Mei. <https://www.coindesk.com/learn/on-chain-vs-off-chain-transactions-whats-the-difference/>.

- Committee on Payments and Market Infrastructures. (2019). *Wholesale Digital Tokens*. Bank for International Settlements.
- D.S. Innovate. (2021). *Digital Banking in Indonesia: The Future of the Industry*. <https://www.telkomsel.com/sites/default/files/upload/Whitepaper-Digital-Banking-in-Indonesia-Preview.pdf>.
- FSB. (2017). *Financial Stability Implications from FinTech: Supervisory and Regulatory Issues that Merit Authorities' Attention*. <https://www.fsb.org/wp-content/uploads/R270617.pdf>.
- Harun. (2019). "Understanding Digital Financial System and Its Implications to Financial Stability with Indonesia's Stylized Facts". *Research Paper*, Juli. Bank Indonesia.
- HKTDC Research. (2023). *Laos: Central Bank Launches Digital Currency Trial*. <https://research.hktdc.com/en/article/MTMxNTE1OTEzNA>.
- IMF. (2023). *Macrofinancial Implications of Crypto Assets*. <https://www.imf.org/-/media/Files/Research/imf-and-g20/2023/g20-report-macrofinancial-implications-crypto-assets-february23.ashx>.
- IMF. (2019). "Fintech: The Experience So Far". *IMF Policy Paper*. Juni.
- International Monetary Fund. (2022). *Digital Money Across Borders: International Use of CBDCs*. Retrieved from <https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2022/03/21/Digital-Money-Across-Borders-International-Use-of-CBDCs-50977>.
- International Monetary Fund. (2019). "Lao People's Democratic Republic". *IMF Country Report No. 19/267*. <https://www.imf.org/en/Countries/LAO>.
- Interpol. (2021). *ASEAN Cyberthreat Assessment 2021*. <https://www.interpol.int/content/download/16106/file/ASEAN%20Cyberthreat%20Assessment%202021%20-%20final.pdf>.
- Kahn, C.M. dan W. Roberds. (2009). "Why Pay? An Introduction to Payments Economics". *Journal of Financial Intermediation*.
- Kapronasia. (2023). *Why Emerging Southeast Asia is Crypto Friendly*. <https://www.kapronasia.com/blockchain-research-menu-item/why-emerging-southeast-asia-is-crypto-friendly.html>.
- Ledger Insights. (2023). *Laos to Launch CBDC Proof of Concept with Soramitsu*. 6 Februari. <https://www.ledgerinsights.com/laos-cbdc-soramitsu-proof-of-concept/>.

- Ledger Insights. (2021). *Soramitsu Partners with Laos on Second CBDC Project in ASEAN*. 4 Oktober. <https://www.ledgerinsights.com/soramitsu-partners-with-laos-on-second-cbdc-project-in-asean/>.
- Lyons, A.C., J. Kass-Hanna, F. Liu, A.J. Greenlee, dan L. Zeng. (2022). "Building Financial Resilience Through Financial and Digital Literacy in South Asia and Africa". *Working Paper Series No. 1098*. Tokyo: Asian Development Bank Institute.
- Manning, John. (2022). "Digital-Banking Development is Essential for Boosting Financial Inclusion in ASEAN". *International Banker*. 28 September. <https://internationalbanker.com/banking/digital-banking-development-is-essential-for-boosting-financial-inclusion-in-asean/>.
- MAS. (2022). *MAS Issues Guidelines to Discourage Cryptocurrency Trading by General Public*. Monetary Authority of Singapore. 17 Januari. <https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2022/mas-issues-guidelines-to-discourage-cryptocurrency-trading-by-general-public>
- MAS. (2022). MAS Proposes Measures to Reduce Risks to Consumers from Cryptocurrency Trading and Enhance Standards of Stablecoin-Related Activities. 26 Oktober. [Siaran Pers]. <https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2022/mas-proposes-measures-to-reduce-risks-to-consumers-from-cryptocurrency-trading-and-enhance-standards-of-stablecoin-related-activities#1>.
- MAS. (2023). *MAS Publishes Investor Protection Measures for Digital Payment Token Services*. Monetary Authority of Singapore. 3 Juli. <https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2023/mas-publishes-investor-protection-measures-for-digital-payment-token-services>.
- McKinsey. (2021). *Emerging Markets Leap Forward in Digital Banking Innovation and Adoption* (2021 Asia-Pacific Personal Financial Survey).
- Ngo, Vu Minh dan Nguyen Huan Huu. (2022). *Policy Paper CBDC in Vietnam Challenges of Central Bank Digital Currency implementation*. <https://www.freiheit.org/southeast-and-east-asia/cbdc-vietnam>.
- OJK. (2022). Siaran Pers: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022. 22 November. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2022.aspx>.

- OJK. (2022). Siaran Pers: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga dan Penguatan Kinerja Intermediasi Berlanjut Jelang Akhir Tahun. 6 Desember. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Stabilitas-Sektor-Jasa-Kuangan-Terjaga-dan-Penguatan-Kinerja-Intermediasi-Berlanjut-Jelang-Akhir-Tahun/Siaran%20Pers%20RDKB%20Akhir%20Tahun.pdf>.
- Peyton, Anthony. (2018). *ASEAN Financial Innovation Network Launches API Exchange*.
- Futures Fintech (18 September). <https://www.fintechfutures.com/2018/09/asean-financial-innovation-network-launches-api-exchange/>.
- PwC. (2023). *Global Crypto Regulation Report*. <https://www.pwc.com/gx/en/new-ventures/cryptocurrency-assets/pwc-global-crypto-regulation-report-2023.pdf>.
- Quimba, Francis. (2023). "Analysis of the Fintech Landscape in the Philippines". *Research Paper Series* No. 2023-01.
- Quintero, Dennis dan Divina Panganiban. (2022). *Fintech in the Philippines 2022*. Chambers and Partners Fintech Guide. https://www.quisumbingtorres.com/-/media/minisites/quisumbing-torres/files/2022/quisumbing-torreschambers-and-partnersfintech-guid.pdf?sc_ _lang=en&rev=09c5854ed15a4b62ad9cf6405585857c&hash=E51C305BE06B83822495F959F92CB2EF.
- Rafli, A.M. (2022). "Cara Mewujudkan Prinsip Keuangan Berkelanjutan". *Mekari Jurnal*, 19 September. <https://www.jurnal.id/id/blog/prinsip-keuangan-berkelanjutan-sbc/#:~:text=Tujuan%20penerapan%20prinsip%20keuangan%20berkelanjutan,energi%20dan%20sumber%20daya%20alam>.
- Soderberg, G., M. Bechara, W. Bossu, N. Che, S. Davidovic, J. Kiff, I. Lukonga, T.M. Griffoli, T. Sun, dan A. Yoshinaga. (2022). *Behind the Scenes of Central Bank Digital Currency: Emerging Trends, Insights, and Policy Lessons*. International Monetary Fund.
- SEC Thailand. (2021). *SEC Issues Rules for Disclosures of Warnings on Cryptocurrency*.
- Soramitsu. (2020). *Kingdom of Cambodia Launches Central Bank Digital Currency, Co-Developed with Fintech Company Soramitsu*. 1–6. <https://soramitsu.co.jp/bakong-press-release>.

- Trading Risks. https://www.sec.or.th/EN/Pages/News_Detail.aspx?SECID=10018
- ThinkChina.sg. 20 Desember. <https://www.thinkchina.sg/vietnams-vibrant-crypto-scene-needs-regulatory-framework>.
- Temasek & Bain. (2022). *e-Conomy SEA 2022*. <https://goo.gle/econ22bain>.
- Triple-A. (2023). *Cryptocurrency Ownership Data*. <https://triple-a.io/crypto-ownership-data>
- Twimbit. (2023). *Winning Financial Services in Indonesia 2023*. <https://twimbit.com/insights-plus/winning-financial-services-in-indonesia-2023>.
- Venkatesh, Kruthidan Anirudh Rastogi. (2021). *Singapore: Cryptocurrency Regulation in Singapore: Challenges and Opportunities Ahead*. <https://www.mondaq.com/fin-tech/1025630/cryptocurrency-regulation-in-singapore-challenges-and-opportunities-ahead->.
- World Bank. (2019). *Advancing Digital Financial Inclusion in ASEAN Policy and Regulatory Enablers*. <http://documents1.worldbank.org/curated/en/856241551375164922/pdf/134953-WorldBankASEANDigitalFinancialInclusioninASEANpublicationJan.pdf>.
- World Economic Forum. (2021). *Central Bank Digital Currency Policy-Maker Toolkit*. Retrieved from <https://www.weforum.org/reports/central-bank-digital-currency-policy-maker-toolkit>.
- World Bank Group & Institute of Finance and Sustainability. *Unleashing Sustainable Finance in Southeast Asia* (November 2022). <https://doi.org/10.1596/38341>.
- World Bank Group. *Unleashing sustainable finance in Southeast Asia* (29 November 2022). <https://www.worldbank.org/en/country/malaysia/publication/SFSEAreport>
- World Economic Forum. *These Countries are Leading the Way in Green Finance* (12 September 2019). <https://www.weforum.org/agenda/2019/09/these-countries-are-leading-the-way-in-green-finance/>.
- Yoshino, Naoyuki, Peter J. Morgan, dan Ganeshan Wignaraja. (2015). "Financial Education in Asia: Assessment and Recommendations". *ADBI Working Paper Series No. 534*. Tokyo: Asian Development Bank Institute, Juni. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/161053/adbi-wp534.pdf>.

- Zemp, Brandon. (2023). "The Power of Stablecoins-Enabling Fast and Efficient Cross-border Transactions". *Forbes*, 5 April. <https://www.forbes.com/sites/forbesbooksauthors/2023/04/05/the-power-of-stablecoinsenabling-fast-and-efficient-cross-border-transactions/?sh=16de5fdc47c3>.
- ADB & Potsdam Institute. (2017). *A Region at Risk the Human Dimensions of Climate Change in Asia and the Pacific*. <http://dx.doi.org/10.22617/TCS178839-2>.
- ASEAN Capital Markets Forum (ACMF). (2018). *ASEAN Green Bond Standards*. <https://www.theacmf.org/images/downloads/pdf/AGBS2018.pdf>.
- ASEAN Capital Markets Forum (ACMF). (2018). *ASEAN Social Bond Standards*. <https://www.theacmf.org/images/downloads/pdf/ASBS2018.pdf>.
- ASEAN Capital Markets Forum (ACMF). (2018). *ASEAN Sustainability Bond Standards*. <https://www.theacmf.org/images/downloads/pdf/ASUS2018.pdf>.
- ASEAN Capital Markets Forum (ACMF). (2020). *Roadmap for ASEAN Sustainable Capital Markets*. https://www.theacmf.org/images/downloads/pdf/ACMF_Roadmap_high.resolution.pdf.
- ASEAN Capital Markets Forum (ACMF). (2023). *Statistics Data Visualization*. <https://www.theacmf.org/sustainable-finance/statistics>.
- ASEAN Centre for Energy (ACE). (2020). *The 6th ASEAN Energy Outlook 2017-2040*.
- ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meeting (AFCDM). (2023). *Progress Report of Initiatives under the ASEAN Senior Level Committee for Financial Integration (SLC)*. Indonesia.
- ASEAN Senior Level Committee on Financial Integration (SLC). (2020). *Report on the Roles of ASEAN Central Banks in Managing Climate and Environment-related Risks*. https://www.theacmf.org/images/downloads/pdf/2020-11-17-ASEAN-Task-Force-Report_for-publication.pdf.
- ASEAN Taxonomy Board (ATB). (2021). *ASEAN Taxonomy Version 2*. <https://www.theacmf.org/images/downloads/pdf/ASEAN-Taxonomy-Version-2.pdf>.

- ASEAN Taxonomy Board (ATB). (2021). *ASEAN Taxonomy*. https://www.theacmf.org/images/downloads/pdf/ASEAN%20Taxonomy_310522.pdf.
- Asian Development Bank (ADB). (2015). *Southeast Asia and The Economics of Global Climate Stabilization*.
- Asian Development Bank (ADB). (2017). *Meeting Asia's Infrastructure Needs*. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/227496/special-report-infrastructure.pdf>.
- Asian Development Bank (ADB). (2022). *Green Bond Market Survey for Indonesia Insights on the Perspectives of Institutional Investors and Underwriters*. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/843491/green-bond-market-survey-indonesia.pdf>.
- Business and Sustainable Development Commission (2017). "Better Business Better World- Sustainable Business Opportunities in Asia". *Better Business, Better World, Sustainable Business Opportunities in Asia*, Juni 2017. http://s3.amazonaws.com/aws-bsdc/BSDC_asia_web.pdf.
- Climate Action Tracker (CAT). (2021). *Climate Action Tracker*. Retrieved 1 27, 2021, from <https://climateactiontracker.org>.
- Global Infrastructure Hub (GIH) (2017). *Global Infrastructure Outlook – Infrastructure Investment Needs – 50 Countries, 7 Sectors to 2040*. <https://gihub-webtools.s3.amazonaws.com/umbraco/media/1529/global-infrastructureoutlook-24-july-2017.pdf>.
- International Energy Agency (IEA) (2016). *Southeast Asia Energy Outlook 2015: World Energy Outlook Special Report*. https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2015_SouthEastAsia.pdf.
- International Renewable Energy Agency (Irena) & ASEAN Centre for Energy (ACE). (2016). *Renewable Energy Outlook for ASEAN: a REmap Analysis*. http://www.Irena.org/DocumentDownloads/Publications/Irena_REmap_ASEAN_2016_report.pdf.
- International Renewable Energy Agency (Irena) (2018). *Renewable Energy Market Analysis Southeast Asia*. https://www.Irena.org/-/media/Files/Irena/Agency/Publication/2018/Jan/Irena_Market_Southeast_Asia_2018.pdf.
- Southeast Asia's Green Economy 2021 Report: Opportunities on the Road to Net Zero.

The Renewable Energy Support Programme for ASEAN (ASEAN RESP). (2016). *ASEAN Renewable Energy Policies*. <http://go.aseanenergy.org/on8d3>.

UNEP. (2020). *Emissions Gap Report 2020*. Retrieved from <https://www.unenvironment.org/emissions-gapreport-2020>.

Zhou, W., D.L. McCollum, O. Fricko, S. Fujimori, M. Gidden, dan G. Fei. (2020). *Decarbonization Pathways and Energy Investment Needs for Developing Asia in Line with 'Well Below' 2° C*. *Climate Policy* 20:2, 234-245. doi:10. 1080/14693062.2020.1722606.

Website

<https://www.adb.org/sites/default/files/publication/574821/adbi-wp1098.pdf>.

https://www.bi.go.id/en/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_258423.aspx

<https://www.uncdf.org/article/8202/2022-monitoring-progress-financial-inclusion-in-asean>

<https://www.uncdf.org/article/7615/measuring-progress-2021-financial-inclusion-in-asean>

<https://asean.org/our-communities/economic-community/finance-integration/>

https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_257623.aspx

https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_258223.aspx

<https://www.youtube.com/watch?v=ESsuqXQag9U>

<https://www.youtube.com/watch?v=mXo7FIWIfq4s>

<https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/ASEAN-Digital-Masterplan-EDITED.pdf>

https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/ASEAN-Comprehensive-Recovery-Framework_Pub_2020_1.pdf

https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_257823.aspx

- <https://www.adb.org/publications/financial-literacy-poverty-reduction-case-indonesia>
- https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_257723.aspx
- <https://asean.org/wp-content/uploads/2023/04/ENG-Joint-Press-Release-BI-Kemenkeu-AFMGM-04.40.pdf>
- <https://asean.org/wp-content/uploads/2023/05/FINAL-Chairmans-Statement-42nd-ASEAN-Summit-1.pdf>
- https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_257823.aspx
- <https://www.bi.go.id/id/bi-institute/BI-Epsilon/Pages/Inklusi-Kuangan-Digital-Dorong-Pertumbuhan-Ekonomi.aspx>
- <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1566014121000844>
- <https://www.adb.org/publications/financial-stability-and-financial-inclusion>
- <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/156343/adbi-wp488.pdf>
- <https://www.ebrd.com/what-we-do/belt-and-road/overview.html>
- <https://www.cfr.org/blog/countries-chinas-belt-and-road-initiative-whos-and-whos-out>
- <https://greenfdc.org/countries-of-the-belt-and-road-initiative-bri/>
- https://en.wikipedia.org/wiki/Belt_and_Road_Initiative
- <https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview>
- <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JED-03-2020-0027/full/html>
- <https://www.bmeb-bi.org/index.php/BEMP/article/view/574/895>
- https://www.adb.org/sites/default/files/publication/843491/green-bond-market-survey-indonesia_0.pdf
- https://www.bi.go.id/en/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_258423.aspx
- <https://www.bnm.gov.my/funds4SME>

<https://www.thejakartapost.com/business/2022/11/15/asean-5-expand-qr-code-payments-to-benefit-msmes-migrant-workers.html>

<https://asean.org/our-communities/economic-community/resilient-and-inclusive-asean/development-of-micro-small-and-medium-enterprises-in-asean-msme/>

MENGEMBAN keketuaan di ASEAN pada 2023, Indonesia menavigasi kerja sama kawasan ini dalam merespons tantangan global. Kepemimpinan Indonesia berjalan di tengah moderasi ekonomi global yang terus berlanjut, fragmentasi geopolitik, kerentanan di negara terbelakang, serta pengetatan kebijakan moneter yang agresif di negara maju. Di sisi lain, pemulihan pascapandemi Covid-19 juga masih memerlukan perhatian.

Tema Keketuaan Indonesia "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth" merefleksikan tekad untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas kawasan ini sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Tema ini diwujudkan dalam fokus strategis untuk mendorong pemulihan, konektivitas, dan daya saing baru di kawasan; mempercepat transformasi dan partisipasi ekonomi digital yang inklusif; serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Bergandeng tangan dengan pemerintah, Bank Indonesia memainkan peran penting selama Keketuaan ASEAN, terutama pada jalur integrasi keuangan. Bank Indonesia secara proaktif mendorong dan mengawal inisiatif-inisiatif terkait agenda ekonomi prioritas di bawah kewenangan dan tanggung jawab bank sentral, yaitu bauran kebijakan, transaksi menggunakan mata uang lokal, serta konektivitas pembayaran di kawasan dan inklusi keuangan.



Kampus Utama BI Institute,
Gedung D
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350
Telp. 131
Faks. (021) 386 1458

www.bi.go.id/id/institute

ISBN 978-623-5662-60-2 (PDF)

